

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 17 No 4 Desember 2018
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Kekerasan terhadap Anak Marginal di Perkotaan
<i>Violence Against Children in the Marginal Urban</i>
Soetji Andari | 287 - 296 |
| 2. | Nilai Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Manado Sebagai Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Manado
<i>The Value of Community Social Solidarity as The Basis for Services Social Welfare</i>
Andayani Listyawati dan Tyas Eko Raharjo F. | 297 - 308 |
| 3. | Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
<i>The Influence of the Amount of Government Expenses Budget to the Society Welfare Improvement</i>
Ana Uluwiyah | 309 - 318 |
| 4. | Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
<i>Empowerment of Women with Social-Economical Vulnerability Through Family Welfare Improvement</i>
Akhmad Purnama | 319 - 328 |
| 5. | Hubungan Perawatan Diri dengan Sikap Sosial Remaja di Sekolah Menengah Pertama
<i>Correlation Between Self Care and the Social Attitude of Adolescent in Junior High School</i>
Stefany Puspitasari dan Emi Budiastuti | 329 - 338 |
| 6. | Praktik Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Prasekolah
<i>Parenting Practice in Developing Cognitive Aspect for Preschool Children</i>
Budi Muhammad Taftazani, Nurliana Cipta Apsari, dan Ishartono | 339 - 350 |

7. Pentingnya Peran Kelekatan Teman Sebaya dalam Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Remaja di Panti Asuhan di Kota Banda Aceh 351 - 364
The Important Role of Peer Attachment on Self Concept and Emotional Intelligence of Orphanage Teenagers in Banda Aceh
Putri Diah Qashdina dan Alfiasari

8. Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017 365 - 374
The Effect of Marital Status and Economic Condition on Children Poverty in Banten Province in 2017
Euis Naya Sari

9. Hubungan antara Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral, Interaksi Ibu-Anak, dan Karakter Tekun Anak Usia Sekolah pada Keluarga di Slum Area 375 - 388
The Relationship between Mother's Spiritual Intelligence, Moral Socialization, Mother-Child Interaction, and Persistence Character of School Age Children in Slum Area Families
Rizki Rulita Putri, Dinda Ayu Az'zahrah, dan Alfiasari

10. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial 389 - 400
The Role of Civil Society Organization on Developing Social Harmony
Ratih Probosiwi

11. Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: 401 - 414
Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat
*The Action Step of Expected Family Program:
The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficiary Family*
Sunit Agus Tri Cahyono dan Siti Wahyu Iryani

12. Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah 415 - 428
Improving Human Resources Competencies of Social Welfare Area Organizers
Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 17 Nomor 4 Desember 2018 ini memuat sejumlah 12 artikel yang dibuka dengan tulisan Soetji Andari yaitu Kekerasan terhadap Anak Marginal di Perkotaan, *Violence Againsts Children in the Marginal Urban*, diikuti oleh Artikel Andayani Listyawati dan Tyas Eko Raharjo F dengan tulisannya berjudul Nilai Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Manado sebagai Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Manado, *The Value of Community Social Solidarity as The Basic for Services Social Welfare* berikutnya adalah artikel Ana Uluwiyah dengan artikelnya Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat *The Influence of the Amount of Government Expenses Budget to the Society Welfare Improvement* Artikel selanjutnya adalah Akhmad Purnama dengan judul Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga *Empowerment of Women with Social Economical Vulnerability Throught Family Welfare Improvement*, artikel Stefany Puspitasari dan Emi Budiastuti berjudul Hubungan Perawatan Diri dengan Sikap Sosial Remaja di Sekolah Menengah Pertama *Correlation Between Self Care and The Social Attitude of Adolescent in Junior High School*, Artikel berikutnya adalah Budi Muhammad Taftazani Nurlinana Cipta Apsari dan Ishartono berjudul Praktik Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Prasekolah *Parenting Practice in Developing Cognitive Aspect for Preschool Children*. Artikel selanjutnya adalah Pentingnya Peran Kelekatan Teman Sebaya dalam Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Remaja di Panti Asuhan di Kota Banda Aceh, *The Important Role of Peer Attachment on Self Concept and Emotional Intelligence of Orphanage Teenagers in Banda Aceh* oleh Putri Diah Qashdina dan Alfiasari. Artikel selanjutnya oleh Euis Naya Sari adalah Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017 *The Effect of Marital Status and Economic Condition on Children Poverty in Banten Province in 2017*. Artikel selanjutnya adalah Rizki Rulita Putri, Dinda Ayu Az'zahrah dan Alfiasari berjudul Hubungan antara Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral, Interaksi Ibu-Anak dan Karakter Tekun Anak Usia Sekolah pada Keluarga di Slum Area *The Relationship between Mother's Spiritual Intelligence, Moral Socialization, Mother-Child Interaction and Persistence Character of School Age Children in Slum Area Families*. Berikutnya adalah artikel Ratih Probosiwi dengan judul Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Kekerukunan Sosial *The Role of Civil Society Organization on Developing Social Harmony*. Naskah selanjutnya adalah Sunit Agus Tri Cahyono dan Siti Wahyu Iryani berjudul Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat *The Action Step Of Expected Family Program: The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficiary Family* dan kemudian ditutup dengan artikel oleh Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati yang berjudul Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah *Improving Human Resources Competencies of Social Welfare Area Organizers*

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 17 No 4 Desember 2018

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Soetji Andari (B2P3KS Yogyakarta)

Kekerasan terhadap Anak Marginal di Perkotaan

Violence Against Children in the Marginal Urban

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember 2018, hal 287 - 296

Marginal children come from marginalized society such as street children, child workers as a consequence of poverty, helplessness or strife. They are marginalized by the absence of parents due to death, divorce or separation and it causes a family function does not work to protect children. Marginal children human rights are not fulfilled as they are entitled to such as rights to grow up healthfully, rights to have proper education and that of protection. The purpose of this research is to uncover the facts of violence experienced by marginal children in urban areas. This research uses a qualitative descriptive approach. The data was collected by conducting interview and distributing questionnaires to 60 marginal children that were vulnerable to violence in the city of Manado and Bandung. The results showed that the urban marginal children experienced violence suffered from physical and psychological trauma. They could in turn potentially do violence. It requires immediate coordination, facilitation, and protection conducted by inter-institutions, by families and communities to prevent and anticipate violence.

Keywords: *child; violence; marginal; urban*

Anak marginal adalah anak berasal dari masyarakat marginal yang terpinggirkan seperti anak jalanan, pekerja anak, karena kemiskinan, ketidakberdayaan atau perselisihan. Mereka terpinggirkan karena ketiadaan orang tua akibat kematian, perceraian atau perpisahan yang menyebabkan keluarga tidak berfungsi melindungi anak. Anak marginal tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan hak pertumbuhan, pendidikan dan perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta kekerasan yang dialami anak marginal di perkotaan. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan terhadap 60 anak marginal rentan terhadap tindak kekerasan di Kota Bandung dan Kota Manado, pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan anak marginal perkotaan yang menjadi korban kekerasan mengalami trauma fisik atau psikis. Anak marginal yang mengalami kekerasan dan menjadi korban dapat berpotensi sebagai pelaku kekerasan. Perlu koordinasi, pendampingan, perlindungan yang dilakukan antar institusi, keluarga dan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kekerasan.

Kata kunci: *anak; marginal; kekerasan; perkotaan*

Andayani Listyawati dan Tyas Eko Raharjo F. (B2P3KS Yogyakarta)

Nilai Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Manado Sebagai Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Manado

The Value of Community Social Solidarity as The Basis for Services Social Welfare

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 297 - 308

This study aims to describe the value of social solidarity of the people of Manado as the basis for organizing social welfare. The approach used is descriptive qualitative to reveal the value of social solidarity of the people of Manado as a basis for the implementation of good social welfare related to the value of social wisdom. The study was conducted in the city of Manado with the urban community setting, because the city has a uniqueness in community life with the inherent value of local wisdom as a high-tolerance living philosophy. Data sources were determined purposively, namely the Head of the Office of Social Affairs and Community Empowerment of Manado City, village officials, community leaders, and community members. Data were obtained using interview techniques, observation, and subsequent document review. Data were analyzed descriptively with exposure in narrative form. The results of the study show that the solidarity value of the people of Manado can be used as a basis for the implementation of social welfare which is derived from the value of social wisdom. Torang values all together provide a sense of brotherhood to always establish harmony in society. Sitou Timou Tou gives social services to the community with mutual respect, care, help to help neighbors. Mapalaus provides social services by collaborating and collaborating to alleviate social problems in the community. It is recommended that the Head of the Office of Social and Community Empowerment of Manado City can provide guidance to the social cultural organizations concerned with Manado. Guidance for pillars of social and family welfare workers to keep preserving the value of social solidarity of the people of Manado.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengungkap nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang terkait dengan nilai kearifan sosialnya. Penelitian dilakukan di Kota Manado dengan *setting* masyarakat kelurahan, karena kota tersebut memiliki keunikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan melekatnya nilai kearifan lokal sebagai falsafah hidup bertoleransi tinggi. Sumber data ditetapkan secara *purposive* yakni Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen selanjutnya data dianalisa secara deskriptif dengan paparan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa nilai kesetiakawanan masyarakat Manado dapat dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersumber dari nilai kearifan sosial. Nilai *Torang samua basudara* memberikan rasa persaudaraan untuk selalu menjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. *Sitou timou tou* memberikal layanan sosial kepada masyarakat dengan saling menghormati, peduli, tolong menolong kepada tetangga. *Mapalaus* memberikal layanan sosial dengan melakukan kerjasama dan bergotongroyong untuk meringankan permasalahan sosial di masyarakat. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado agar memberikan pembinaan kepada organisasi sosial peduli budaya Manado. Bimbingan pilar tenaga kesejahteraan sosial

Keywords: *social solidarity value; local wisdom; manado community*

dan keluarga untuk tetap melestarikan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado.

Kata Kunci: *nilai kesetiakawanan sosial; kearifan lokal; masyarakat manado*

Ana Uluwiyah (Pusdiklat BPS Jakarta)

Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

The Influence of the Amount of Government Expenses Budget to the Society Welfare Improvement

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 309 - 318

Government expenses budgets from year to year always increase. Some budget allocations are realized in Subsidized Expenditures, Social Aid Expenditures, and Aid Expenditures. The amount of the budget is different every year, according to the government program being launched. However, based on several welfare indicators, an increase in government spending has not contributed significantly yet to the level of welfare from year to year. This research was aimed to analyze whether the amount of government spending was influenced by several society welfare indicators. It used only several welfare indicators, namely indicators of health, education, poverty, life environment and inflation. It was conducted by using a quantitative analysis approach, with simple linear regression analysis. Based on the results of the study, it was found out that only a few welfare indicator variables that had a significant relation to government assistance spending, namely the percentage of PLN/Electricity power users, the percentage of families having proper sanitation, the percentage of poverty, the percentage of % of under-5-years old babies who had received Polio immunization, and the percentage of % of under-5-years old babies who had received measles immunization. The variables of Inflation and Education indicators do not affect significantly to the amount of government assistance spending. It showed that the amount of government assistance expenses budget had not obviously impacted

Anggaran belanja pemerintah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Beberapa alokasi anggaran direalisasikan pada Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan. Besaran anggaran belanja tersebut setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan program pemerintah yang sedang dicanangkan. Berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan, peningkatan anggaran belanja pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan dari tahun ke tahun. Penelitian bertujuan untuk menganalisis besaran belanja pemerintah dipengaruhi oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Penelitian hanya menggunakan beberapa indikator kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup dan inflasi. Metode penelitian dengan pendekatan analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hanya beberapa variabel indikator kesejahteraan yang memiliki hubungan yang kuat dengan belanja bantuan pemerintah yaitu persentase rumah tangga pengguna listrik PLN, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, persentase penduduk miskin, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi polio, dan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak. Variabel indikator pendidikan dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan

to human resources improvement program and to that of prices stability of basic needs. Therefore, the Government necessarily need to add the allocation of the amount of government assistance expenses budget to improve the educational capacity of the society and prices stability of basic needs through providing subsidize or direct aids.

Keywords: *assistance spending; welfare indicators; regression*

bahwa besaran anggaran belanja bantuan pemerintah belum memberikan dampak yang terlihat nyata pada program peningkatan sumber daya manusia dan kestabilan harga bahan pokok di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah alokasi belanja bantuan untuk peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat dan kestabilan harga bahan pokok melalui subsidi atau bantuan langsung.

Kata Kunci: *belanja bantuan; indikator kesejahteraan; regresi*

Akhmad Purnama (B2P3KS Yogyakarta)

Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Empowerment of Women with Social-Economical Vulnerability Through Family Welfare Improvement

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 319 - 328

This research aims to comprehend the empowerment of women with social-economical vulnerability in the effort of improving the family welfare. It was carried out in Triwidadi Village, Kecamatan Pajangan, Bantul Regency. The empowerment is conducted by (1) Forming social groups of productive economical enterprises as a cooperation forum or network that is accessible for developing initiatives. (2) Providing motivational guidance, social guidance, and enhancing skills, included providing entrepreneurship guidance and innovation. The research uses a qualitative approach. Data is collected by using in depth-interview. The informants are 10 Social-Economic Vulnerable Women and Triwidadi Village Head. The result showed that social-economical vulnerable women as the objects of the research are all widows, about 50 years of age and most of them did not pass their Elementary School. Their income is less than five hundred thousands rupiah, and most of their expenditure is proportional to their income. They functioned as the head of the family with 3 to 5 dependents mostly. After gaining the empowerment through

Penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dilakukan di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan (1) Membentuk kelompok sosial usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang jejaring/kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan prakarsa/inisiatif. (2) Memberi bimbingan motivasi, sosial, keterampilan termasuk bimbingan kewirausahaan dan inovasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara secara mendalam (*in depth-interview*). Informan meliputi perempuan rawan sosial ekonomi berjumlah 10 orang dan Kepala Desa Triwidadi. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan rawan sosial ekonomi sebagai informan penelitian berstatus janda, berumur sekisar 50 tahun, dan umumnya tidak tamat SD. Penghasilan kurang dari Rp.500.000,-, sebagian besar pengeluaran sebanding dengan pemasukan, sebagai kepala keluarga dengan tanggungan antara

some guidance (motivational guidance, social guidance, entrepreneurship skills and innovation guidance), it appeared that there were some behavioral changes, an increase of family welfare, and some improvement of understanding on knowledge and skills guidance. The activity of social groups of productive economical enterprises was able to prevent poverty (social-economical vulnerability). It is recommended to local government authorities to provide more intensive assistance and guidance to social-economical vulnerable women so that they will contribute more in improving the economy and will socialize with their environment.

Keywords: *empowerment; socio-economic vulnerable women; welfare*

tiga hingga lima orang. Setelah mendapatkan pemberdayaan melalui bimbingan motivasi, sosial, keterampilan kewirausahaan dan inovasi menunjukkan ada perubahan perilaku, ada peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan pemahaman tentang bimbingan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan kelompok sosial usaha ekonomi produktif yang dilakukan dapat mencegah terjadinya kemiskinan (rawan sosial ekonomi). Rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar memberikan pendampingan lebih intensif kepada perempuan rawan sosial ekonomi agar dapat lebih berdaya dalam mengembangkan ekonomi dan bersosialisasi dengan lingkungan.

Kata kunci: pemberdayaan; perempuan rawan sosial ekonomi; kesejahteraan

Stefany Puspitasari dan Emi Budiastuti (Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta)
Hubungan Perawatan Diri dengan Sikap Sosial Remaja di Sekolah Menengah Pertama
Correlation Between Self Care and the Social Attitude of Adolescent in Junior High School
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 329 - 338

This study aimed to reveal: (1) self-care of adolescent; (2) the relationship between self-care and social attitude of adolescent. The research used a quantitative approach. The samples for being respondents were chosen by using probability random sampling technique. There were 95 students of SMP N 5 Depok chosen to become respondents. The variable data of self-care was gained by distributing questionnaires and that of study achievement was gained by observing study result report. The data was then analyzed by using descriptive statistics and correlation method. The results showed that: (1) student's self-care was in a low category (53%); (2) there was a positive correlation between self-care and student social attitude with the correlation coefficient value of 0,536. It was recommended that school authority should pay more attention to students' social life and not only to their academic results.

Keywords: *social; attitude; self-care; adolescent*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perawatan diri remaja di SMP; (2) hubungan antara perawatan diri dengan sikap sosial remaja di SMP. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari keseluruhan siswa SMP N 5 Depok, diambil 95 siswa sebagai sampel secara random. Data variabel perawatan diri diperoleh menggunakan kuesioner, sedangkan variabel prestasi belajar diperoleh dari raport. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perawatan diri pada remaja di SMP berada pada kategori rendah yaitu sebesar 53%; (2) ada hubungan positif antara perawatan diri dan sikap sosial siswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,536. Direkomendasikan agar pihak sekolah lebih memperhatikan kehidupan sosial siswa disamping nilai akademik.

Kata Kunci: sikap; sosial; *self care* (perawatan diri); remaja

Budi Muhammad Taftazani, Nurliana Cipta Apsari, dan Ishartono (Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran)

Praktik Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Prasekolah

Parenting Practice in Developing Cognitive Aspect for Preschool Children

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 339 - 350

The practice of social work aside from directed to overcome social problems, also works on issues of prevention and development. One of the issues related to the development and prevention orientation is parenting quality. This research can be used as a practical study for developing social work intervention with parenting quality improvement goals. This study specifically describes parenting practices related to the development of cognitive aspects of preschoolers. The article was written based on descriptive research conducted through a survey on a family population with preschool-aged children living in transit apartments in Rancaekek sub-district, Bandung regency. The practice of parent's upbringing shows that the majority of parents support children by providing activities that challenge children. Parents provide opportunities for children to engage in activities on their own initiative. When the child achieve success not all parents give appreciation to the child. Only some parents know the limits of thinking ability of the child that is useful as a learning benchmark. Some parents once call their child as lazy or incapable, as opposed to effective parenting that should give more support and motivation. The majority of parents practice parenting in accordance with the preparation of entering into the next development stage such as learning to develop perceptions by teaching the child how to understand the others and postpone pleasure. Parent-child interaction and activity allow for dialogue as a medium to improve the child's abilities. To improve the quality of parenting and prevent inappropriate nurture, social workers who work in the child and family welfare arena need to develop educational programs related to appropriate care practices in accordance with the level of child development.

Praktik pekerjaan sosial selain diarahkan kepada tindakan mengatasi masalah sosial, juga bergerak pada isu yang berorientasi pencegahan dan pengembangan. Salah satu isu yang terkait dengan orientasi pengembangan dan pencegahan masalah adalah kualitas pengasuhan anak oleh orang tua. Riset ini secara praktis dapat dijadikan bahankajian untuk mengembangkan intervensi pekerjaan sosial dalam meningkatkan kualitas pengasuhan anak oleh orang tua. Penelitian secara khusus menggambarkan tentang praktik pengasuhan orang tua terkait pengembangan aspek kognitif anak usia prasekolah. Artikel ditulis berdasarkan riset deskriptif yang dilakukan melalui survey pada populasi keluarga yang memiliki anak usia prasekolah yang tinggal di apartemen transit Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Praktik pengasuhan yang dilakukan orang tua menunjukkan mayoritas orang tua memberi dukungan kepada anak melalui pemberian aktivitas yang menantang anak. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri. Hanya sebagian orang tua mengetahui batas kemampuan berfikir anak yang berguna sebagai patokan pembelajaran. Sebagian orang tua pernah menyebut anak mereka malas atau tidak mampu, sebagai hal yang berlawanan dengan pengasuhan efektif yang seharusnya lebih banyak memberi dukungan dan motivasi. Mayoritas orang tua mempraktikkan pengasuhan sejalan dengan persiapan memasuki tahap perkembangan berikutnya diantaranya belajar mengembangkan persepsi dengan mengajarkan anak memahami keadaan orang lain dan menunda kesenangan. Interaksi dan aktivitas bersama antara orang tua dan anak memungkinkan terjadinya dialog sebagai media untuk meningkatkan kemampuan

Keywords: parenting; cognitive aspects; preschool children

anak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan mencegah terjadinya perlakuan kurang tepat, pekerja sosial yang bekerja di arena kesejahteraan anak dan keluarga perlu mengembangkan program edukasi terkait praktik pengasuhan yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Kata Kunci : pengasuhan; aspek kognitif; anak prasekolah

Putri Diah Qashdina dan Alfiasari (Institut Pertanian Bogor)

Pentingnya Peran Kelekatan Teman Sebaya dalam Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Remaja di Panti Asuhan di Kota Banda Aceh

The Important Role of Peer Attachment on Self Concept and Emotional Intelligence of Orphanage Teenagers in Banda Aceh

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 351 - 364

The existence of abandoned children including those living in orphanages is caused by various social problems that occur in people's lives such as poverty, loss of parents due to death, and lack of parental presence caused by conflict and natural disasters. A new life with a different social environment will be experienced by teenagers who live in orphanages. Therefore, this study was conducted to find the influence of adolescent characteristics, family characteristics, characteristics of peer groups, and peer attachment to self-concept and emotional intelligence of adolescents in orphanages. The study was conducted at two orphanages in Banda Aceh with purposive sampling, namely teenagers in selected orphanages aged 12-18 years. Data acquisition was done by interview method using structured questionnaires to 63 teenagers. In accordance with the research hypothesis, the results showed that peer attachment had a significant positive relationship with self-concept and emotional intelligence while self-concept was positively correlated very significantly with the emotional intelligence of adolescents in orphanages. Regression analysis results indicate that there is a very significant positive effect on peer attachment to self-concept and emotional intelligence. The results showed

Keberadaan anak-anak terlantar termasuk yang tinggal di panti asuhan banyak disebabkan oleh berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, kehilangan orang tua akibat kematian, dan ketiadaan keberadaan orang tua yang disebabkan konflik serta bencana alam. Kehidupan yang baru dengan lingkungan sosial yang berbeda akan dialami oleh remaja yang tinggal di panti asuhan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Penelitian dilakukan di dua panti asuhan di Kota Banda Aceh dengan penarikan contoh secara purposif, yaitu remaja di panti asuhan terpilih dengan usia 12-18 tahun. Perolehan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada 63 remaja. Sesuai dengan hipotesa penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelekatan teman sebaya memiliki hubungan positif signifikan dengan konsep diri dan kecerdasan emosi sedangkan konsep diri berhubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa terdapat

that self concept and emotional intelligence of the orphanage adolescents were quite good but there were no more significant effects on this two variables.

Keywords: *emotional intelligence; orphanage; peer attachment; self concept; teenager*

pengaruh positif sangat signifikan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri maupun terhadap kecerdasan emosi. Hasil penelitian menunjukkan konsep diri dan kecerdasan emosi remaja panti asuhan cukup baik namun tidak terdapat pengaruh yang lebih nyata pada kedua variabel tersebut.

Kata Kunci: *kecerdasan emosi; kelekatan teman sebaya; konsep diri; panti asuhan; remaja*

Euis Naya Sari (Pusdiklat BPS Jakarta)

Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017

The Effect of Marital Status and Economic Condition on Children Poverty in Banten Province in 2017

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 365 - 374

The development of a child is influenced by many factors including the marital status of the head of the household and the economic condition of the household. The information about child poverty is very important to be known by local government so that local government can implement policies to overcome the problem. In this regard, this study was conducted, which aimed to find out the relationship of those factors in Banten Province. This study was carried out by using literature review supported by quantitative descriptive analysis and logistic regression on secondary data. In the analysis, the predictor variables used were the marital status of the head of the household (KRT), the working status of the household head, and the number of children in the household. The results show that the accuracy of the model is 94.30 percent. All predictor variables have a significant effect on child poverty. The odds ratio of the KRT marital status is 1.068. The odds ratio of working status of household head is 0.891. Finally, the odds ratio of the number of children in the household is 1.939. This shows that the KRT's marital status, the work status of the household head, and the number of children in the household significantly influence the poverty level of the children in

Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah status perkawinan kepala rumah tangga dan kondisi ekonomi rumah tangga. Informasi tersebut sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka penelitian ini dilakukan, yang bertujuan mengetahui hubungan tersebut di Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan telaah pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi logistik terhadap data-data sekunder. Dalam analisis regresi logistik yang digunakan, Variabel prediktor yang diteliti adalah status perkawinan Kepala Rumah Tangga (KRT), status bekerja KRT, dan jumlah anak dalam rumah tangga. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh ketepatan model sebesar 94,30 persen. Seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan anak. Odds ratio dari status perkawinan KRT adalah sebesar 1,068. Odds ratio status bekerja KRT adalah sebesar 0,891. Terakhir, odds ratio dari jumlah anak dalam rumah tangga adalah sebesar 1.939. Hal ini menunjukkan bahwa status perkawinan KRT, status bekerja KRT, dan jumlah anak dalam

the family. If the household head is divorced, then a child in the family is more likely to be classified as poor compared to that if married. Then, the status of unemployed household head is able to increase the incarceration of child households to be classified as poor. Finally, the more the number of children in the household, the higher the tendency of children to be classified as poor is. This is due to many family members, households that cannot be used to maintain balance, income, and savings per individual. If they fall into poverty. Poverty for children cannot be used for education. Differences occur in a circle of poverty that recurs between generations. The tendency to be very important because it can cause long-term damage. Those who need education and a decent life and happy childhood become lost because of your limitations to love parents, economic conditions, and they look for schools to work or various other reasons. The facts are very worrying, considering they are the successor of this nation later. Therefore, some values are given in advance: First, a program to provide family planning program services and campaign for happy small families. Thus, the family can balance income, expenditure and savings for the future. Second, giving to many people. This is done to encourage people from poverty and prevent it.

Keywords: Head of Household; Logistic Regression; Odds Ratio

rumah tangga signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga anak. Apabila KRT berstatus cerai, maka rumah tangga anak lebih cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan apabila KRT berstatus kawin. Kemudian, KRT berstatus tidak bekerja akan meningkatkan kecenderungan rumah tangga anak untuk tergolong miskin. Terakhir, semakin banyak jumlah anak dalam rumah tangga maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk tergolong miskin. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anggota keluarga, rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan per individu. Sehingga mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut mengakibatkan anak tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang layak untuk mendukung masa depannya. Akibatnya, terjadi lingkaran kemiskinan yang berulang kembali antar generasi. Kecenderungan untuk menjadi miskin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta masa kecil yang bahagia menjadi hilang karena keterbatasan kasih sayang orang tua, kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja atau berbagai alasan lainnya. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat merekalah adalah penerus bangsa ini nantinya. Oleh karena itu, beberapa masukan yang diberikan di antaranya: Pertama, kebijakan untuk memberikan layanan program keluarga berencana dan mengkampanyekan keluarga kecil bahagia. Dengan begitu, keluarga dapat menyeimbangkan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan untuk masa depan. Kedua, pemberian jaminan sosial untuk keluarga dengan banyak anak. Hal ini dilakukan untuk mengangkat keluarga tersebut dari kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan apabila terjadi krisis ekonomi.

Kata Kunci: Kepala Rumah Tangga; Regresi Logistik; Odds Ratio

Rizki Rulita Putri, Dinda Ayu Az'zahrah, dan Alfiasari (Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural)

Hubungan antara Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral, Interaksi Ibu-Anak, dan Karakter Tekun Anak Usia Sekolah pada Keluarga di Slum Area

The Relationship between Mother's Spiritual Intelligence, Moral Socialization, Mother-Child Interaction, and Persistence Character of School Age Children in Slum Area Families

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 375 - 388

Parental factors such as mother's spiritual intelligence, mother's moral socialization, and mother-child interaction can affect the child's persistence character. The objectives of this research were to: identify and analyze the relationship between family and child characteristics, mother's spiritual intelligence, moral socialization, and mother-child interaction with the persistence character of children in urban slums. This study used a cross-sectional study design and purposive selection of location. Respondents of this study included 44 mothers and 44 children aged 6-12 years in formal school, and lived in slum areas, in one of the North Jakarta areas. The results showed that the average achievement of mother's spiritual intelligence, mother's moral socialization, mother-child interaction, and persistence character of children were in a fairly good category. Correlation test results showed that the size of the family, mother's spiritual intelligence, moral socialization, and mother-child interaction were significantly related to the persistence character of school-age children. It is recommended that the involvement of the government and the community of family observers is needed through counseling on the importance of mother's spiritual and moral intelligence, as well as mother and child interactions.

Keywords: *moral socialization; mother's spiritual intelligence; mother-child interaction; persistence character; slum area*

Faktor orang tua seperti kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, serta interaksi ibu-anak dapat memengaruhi karakter tekun anak. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis hubungan karakteristik keluarga dan anak, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, serta interaksi ibu-anak dengan karakter tekun anak di wilayah kumuh perkotaan. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional study* dan pemilihan lokasi secara *purposive*. Responden penelitian ini meliputi 44 ibu dan 44 anak berusia 6-12 tahun bersekolah formal, serta tinggal di pemukiman kumuh (*slum area*), di salah satu kawasan Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, interaksi ibu-anak, dan karakter tekun anak berada pada kategori cukup baik. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa besar keluarga, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, dan interaksi ibu-anak berhubungan positif nyata dengan karakter tekun anak usia sekolah. Hubungan yang positif signifikan juga terjadi antara kecerdasan spiritual ibu dengan sosialisasi moral. Interaksi ibu-anak dengan sosialisasi moral dan kecerdasan spiritual ibujuga menunjukkan hubungan yang sangat signifikan.

Kata Kunci: *interaksi ibu-anak; karakter tekun; kecerdasan spiritual ibu; sosialisasi moral ibu; pemukiman kumuh.*

Ratih Probosiwi (B2P3KS Yogyakarta)

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial

The Role of Civil Society Organization on Developing Social Harmony

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 389 - 400

In every government program implementation, it needs support from three pillars of good governance namely the government itself, the private sector and civil society. Civil society organizations or better known as CSOs have a role in the history of Indonesian government. The implementation of the social harmony program as one of the government programs to prevent and create harmony and harmonization of the community also needs support of CSO. This study aims to examine the role of CSOs in creating social harmony through the social harmony program launched by the Ministry of Social Affairs. Data is obtained through literature review, in-depth interviews, as well as field study and observations. The results of the study show that CSOs still have very little role in Program Keserasian Sosial, especially on non-physic programs. The social harmony forum as the main implementer of the program lacked a portion of involvement in civil society and its organizations to participate in the implementation of the program. An understanding must be given to program implementers to involve CSOs in building harmony and harmony between communities.

Keywords: *Civil Society Organization; Involvement; Impementation; and Social Harmony*

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, perlu dukungan dari tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah itu sendiri, pihak swasta dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil atau lebih dikenal dengan CSO mempunyai peran dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan program keserasian sosial sebagai salah satu program untuk mencegah konflik dan menciptakan kerukunan serta harmonisasi berbasis masyarakat perlu didukung oleh CSO. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan CSO dalam penciptaan keserasian sosial melalui program keserasian sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan uji lapangan atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSO masih kurang berperan dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial terutama dalam kegiatan non fisik. Forum keserasian sosial sebagai pelaksana utama program kurang memberikan porsi keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil lain untuk turut dalam pelaksanaan program. Perlu diberikan pemahaman bagi pelaksana program untuk melibatkan CSO lain dalam membangun keserasian dan kerukunan antarmasyarakat.

Kata Kunci: *Civil Society Organization; Pelibatan; Pelaksanaan; dan Keserasian Sosial*

Sunit Agus Tri Cahyono¹ dan Siti Wahyu Iryani (B2P3KS Yogyakarta)

Gerak Langkah Program Keluarga Harapan:

Kontribusi Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

The Action Step Of Expected Family Program:

The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficiary Family

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 401 - 414

This study was aimed to describe the contribution of Expected Family Program (=PKH), supporting factors and its inhibitors to the welfare of Beneficiary Families (KPM) in Candimulyo Sub-District. The research used a descriptive qualitative approach. The data was collected by conducting interviews, observations and document studies techniques. The data was then analyzed by an interactive cycle analysis. The results showed that PKH contributed to the improvement of family welfare, particularly in reducing the lack of food quality and quantity, health and education, so that KPM tended to be more prosperous. Supporting factors were the high motivation and enthusiasm of KPM in fulfilling their commitment in the field of education, health and social welfare. The other things that became inhibiting factors were exclusive errors and inclusive errors in targeting families of KPM. It was recommended that the verification and validation of KPM data should involve all elements of the community tiered from below such as the nearest neighborhood units (=RT, RW, kelurahan / village), sub-districts, districts /cities and that of local community leaders.

Keywords: action step; program keluarga harapan (PKH); beneficiary family (KPM)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang diharapkan mempunyai dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi PKH, faktor pendukung dan penghambatnya terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan telaah dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan siklus interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PKH berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga KPM cenderung lebih sejahtera. Faktor pendukung antara lain KPM memiliki motivasi/antusiasme tinggi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Faktor penghambat antara lain masih ditemukan *exclusive error* dan *inclusive error* dalam penetapan sasaran garap (KPM). Rekomendasi yang diajukan diantaranya dalam verifikasi dan validasi (Verivali) data KPM perlu perluasan pelibatan semua unsur masyarakat mulai dari RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga tokoh masyarakat setempat.

Kata Kunci: gerak langkah; program keluarga harapan (PKH); keluarga penerima manfaat (KPM)

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati (B2P3KS Yogyakarta)

Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah

Improving Human Resources Competencies of Social Welfare Area Organizers

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 4 Desember, hal 415 - 428

The Human Resources of Social Welfare Organizer act as executing performers, drivers or companions of social activity programs. This study was aimed to know the Human Resources Competencies of Social Welfare Area Organizers and the effort to improve the competencies concerned. It was a qualitative descriptive research to describe the current competencies of social welfare area organizers and the effort to improve those competencies. The location of the research was determined purposively and it was in Banjarmasin City. This city was chosen because there was a social home managed by the local government namely LKS PSBW Melati and that of LKSA Hikmah Zam Zam managed by a private party. The data was collected and analyzed descriptively to explain the Human Resources Competencies in organizing social welfare for local area. The result of the research showed that from the view point of education aspect, the majority of the human resources concerned graduated from universities but they had not had any educational background of being social workers. The ratio of the amount of the human resources and the clients served had not been in accordance with the LKS organization guidances yet. The quality of the service was influenced by the human resources concerned length of work, the longer the length of work was, the more experiences related to the duties and responsibilities they would have accordingly. The social service process in LKS had met the standard procedures appropriately covering the service stage to termination. The human resources competency and capacity of social welfare organizers need to be developed by attending social work training and practicing so that they are able to carry out social service on the base of social works.

Key Words: competency; human resources; social welfare organizer

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial berperan sebagai pelaku, penggerak ataupun pendamping program kegiatan sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah dan upaya pengembangannya. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah, dan upaya pengembangannya. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yakni Kota Banjarmasin karena terdapat panti yang dikelola pemerintah yaitu LKS PSBW Melati dan dikelola swasta yaitu LKSA Hikmah Zam Zam. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pendidikan mayoritas SDM berpendidikan sarjana namun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Namun demikian mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta mempunyai sikap yang baik dalam pelayanan. Rasio jumlah SDM dan jumlah klien yang dilayani belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan LKS. Kualitas layanan dipengaruhi lama bekerja, makin lama bekerja semakin banyak pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban. Proses pelayanan sosial di LKS sudah sesuai prosedur meliputi tahapan pelayanan hingga terminasi. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan karier agar dapat melakukan pelayanan sosial secara efektif.

Kata Kunci: kompetensi; sumber daya manusia; penyelenggara kesejahteraan sosial

Kekerasan terhadap Anak Marginal di Perkotaan

Violence Against Children in the Marginal Urban

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Alamat Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu Yogyakarta,

email: soetjiandari@gmail.com/ 082227728790

diterima 31 Juli 2018, diperbaiki 01 Agustus 2018, disetujui 17 Desember 2018

Abstract

Marginal children come from marginalized society such as street children, child workers as a consequence of poverty, helplessness or strife. They are marginalized by the absence of parents due to death, divorce or separation and it causes a family function does not work to protect children. Marginal children human rights are not fulfilled as they are entitled to such as rights to grow up healthfully, rights to have proper education and that of protection. The purpose of this research is to uncover the facts of violence experienced by marginal children in urban areas. This research uses a qualitative descriptive approach. The data was collected by conducting interview and distributing questionnaires to 60 marginal children that were vulnerable to violence in the city of Manado and Bandung. The results showed that the urban marginal children experienced violence suffered from physical and psychological trauma. They could in turn potentially do violence. It requires immediate coordination, facilitation, and protection conducted by inter-institutions, by families and communities to prevent and anticipate violence.

Keywords: *child; violence; marginal; urban*

Abstrak

Anak marjinal adalah anak berasal dari masyarakat marjinal yang terpinggirkan seperti anak jalanan, pekerja anak, karena kemiskinan, ketidakberdayaan atau perselisihan. Mereka terpinggirkan karena ketiadaan orang tua akibat kematian, perceraian atau perpisahan yang menyebabkan keluarga tidak berfungsi melindungi anak. Anak marjinal tidak terpenuhi haknya karena tidak mendapatkan hak pertumbuhan, pendidikan dan perlindungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta kekerasan yang dialami anak marjinal di perkotaan. Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan terhadap 60 anak marjinal rentan terhadap tindak kekerasan di Kota Bandung dan Kota Manado, pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan anak marjinal perkotaan yang menjadi korban kekerasan mengalami trauma fisik atau psikis. Anak marginal yang mengalami kekerasan dan menjadi korban dapat berpotensi sebagai pelaku kekerasan. Perlu koordinasi, pendampingan, perlindungan yang dilakukan antar institusi, keluarga dan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kekerasan.

Kata kunci: *anak; marjinal; kekerasan; perkotaan*

A. Pendahuluan

Anak marginal terdiri dari anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari minoritas linguistik, etnik dan budaya dan anak-anak yang mempunyai kelemahan atau kelompok marginal (Sari Rudiyati, 2011). Anak marginal umumnya terlibat dengan pekerjaan yang tidak terbatas waktu dan dengan dengan upah rendah. Anak marginal 80,7% berada di jalanan lebih dari 5 jam/

hari dan 69,8% melakukan hal ini selama satu minggu. Anak dari masyarakat marginal tidak merasakan telah dieksploitasi serta mendapat kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Mereka justru menganggap jalanan sebagai “lahan bermain” yang menyenangkan, karena tidak banyak aturan.

Anak marginal bertahan hidup dengan melakukan aktivitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci ken-

daraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan seks. Banyak anak marginal berasal dari jalanan akibat kemiskinan, ketidakberdayaan maupun ketidakharmonisan keluarga. Mereka terpinggirkan akibat dari kehilangan orang tua baik karena meninggal dunia, perceraian maupun tidak mampu menghidupi keluarga. Eksploitasi anak semakin diperparah oleh kekerasan fisik atau psikis terhadap anak. Anak marginal menjadi korban tindak kekerasan dan kemarahan orangtua akibat himpitan ekonomi, tekanan hidup dan pekerjaan yang berat mendorong sikap temperamen. Contoh dari kaum marginal antara lain pengemis, pemulung, buruh, dan orang dengan penghasilan rendah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keluarga.

Anak yang lari meninggalkan rumah karena tekanan di jalan merupakan sasaran empuk dari pelaku kekerasan. Banyak kasus kekerasan (fisik, psikis dan seksual) yang dialami oleh anak jalanan dan terungkap ke publik hanyalah sebuah fenomena “gunung es” dari problem kekerasan yang sebenarnya di dalam kehidupan anak jalanan. Anak jalanan erat dengan tindak kekerasan merupakan fenomena yang menjadi perhatian masyarakat. Tiga dari empat anak di seluruh dunia mengalami kekerasan setiap tahunnya. Penelitian tahun 2017 tentang anak di berbagai Negara menyimpulkan bahwa kekerasan di masa kanak-kanak juga menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. *Know Violence in Childhood* mengatakan bahwa anak yang mengalami kekerasan di rumah atau di sekolah cenderung tidak ingin ke sekolah atau putus sekolah. Mereka cenderung tidak berhasil dalam kehidupan karena tidak mendapatkan pendidikan dan 8 % GDP global dihabiskan setiap tahun untuk memperbaiki dampak negatif akibat kekerasan masa kecil. (VoA, 2017).

Anak marginal adalah suatu kelompok sosial tertentu yang dianggap memiliki status sosial rendah dan terpinggirkan. Tidak jarang

anak marginal mengalami ancaman kecelakaan, eksploitasi, penyakit, kekerasan, perdagangan anak, dan pelecehan seksual sering mereka alami. Kondisi ini juga sangat rentan terhadap pelanggaran bagi hak anak yang menjadi komitmen nasional maupun internasional. tidak memiliki akses dan sumber daya serta tidak memiliki kemampuan untuk menjadi subjek (Ritzer dan Godman, 2004).

Mereka menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Data Kementerian Sosial tahun 2015 mencatat sebanyak 33,400 anak tersebar di 16 provinsi. Kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik dan seksual, kekerasan emosional, pengabaian, dan eksploitasi. Menurut dokumen *Convention on the Rights of the Child* (1989), kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.

Survei Terhadap Anak yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Tahun 2013 menemukan bahwa prevalensi nasional kekerasan yang dialami anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-24 tahun dibagi 2 kelompok yaitu umur 13-17 tahun (pengalaman kekerasan dalam 12 bulan terakhir) dan 18-24 tahun (pengalaman kekerasan Sebelum usia 18 Tahun (Kurniasari dkk, 2013). Anak korban kekerasan masih dianggap kasuistik dan jarang dilaporkan karena menjadi aib bagi keluarga.

Pelaku kekerasan memiliki masa lalu yang hampir sama pada masa kanak-kanak, sehingga menjadi “*role model*” pola asuh (*parenting skill*). Akibatnya, pola asuh yang diterapkan pada anaknya melalui proses imitasi atau *modelling* yang diperoleh di lingkungan terdekat yang dipercayainya atau terinternalisasi sebagai suatu “nilai” atau “budaya” yang dianggap patut dan wajar.

Anak dari komunitas marginal sering kali berhadapan dengan kekerasan, karena tidak ada yang melindungi. Kasus kekerasan terhadap

anak marginal, masih berlangsung terjadi di ranah domestik maupun ranah publik. Kekerasan pada anak masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai persoalan intern keluarga. Permasalahan kekerasan anak apabila diekspose menjadi aib keluarga. Kekerasan yang diterima anak, sekecil apa pun dalam bentuk apa pun, baik fisik, mental, seksual, hingga penelantaran, bisa menimbulkan luka yang membahayakan secara fisik dan mental.

Pemerintah melindungi dan mengatasi berbagai tindak kekerasan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman terhadap anak termasuk anak marginal meningkat secara signifikan. Perlindungan terhadap anak memerlukan penanganan khusus karena mereka tinggal dilingkungan yang berpotensi terjadinya kekerasan dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Kasus kekerasan terhadap pria, wanita bahkan anakpun sering menjadi *headline* di berbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, hal tersebut karena kasus kekerasan anak dapat menjadi aib keluarga. Pelaku adalah orang dekat yaitu orang tua atau anggota keluarga di rumah melakukan kekerasan dan menganggap ini hal biasa, atau takut akan melaporkan karena dianggap membuka aib. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku (Tambunan, 2014).

Terkuaknya kasus kekerasan terhadap anak setelah luka pada tubuh anak ketika dibawa

berobat bahkan anak tersebut meninggal. Kekerasan anak terjadi karena berbagai faktor yang terakumulasi pada faktor pencetus. Pencetus yang sering terjadi salah satunya adalah tangisan anak yang tanpa henti dan kenakalan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, terutama kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti, hal tersebut terkendala dalam alat bukti.

Seorang anak merupakan generasi penerus bangsa kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Pada kenyataannya, masih banyak anak Indonesia yang belum terpenuhi haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampai kepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya (Huda, 2008).

Penelitian ini mengkaji tentang kekerasan dan eksploitasi terhadap anak marginal di Kota Bandung dan Kota Manado, banyak anak yang mengalami tindak kekerasan terutama anak dari komunitas marginal. Menurut data Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung, tahun 2017 hanya ada 65 laporan, pada tahun 2018 berdasarkan rekap data dari Januari-Juli, ada sekitar 71 laporan (Tribun Jabar, 2018). Di kota Manado, LSM Swara Parangpuan mencatat ada 268 kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut). Data ini berdasarkan pantauan media dan 76 persen di antaranya adalah kekerasan seksual (Tribun Manado, 2018).

B. Penggunaan Metode Penelitian

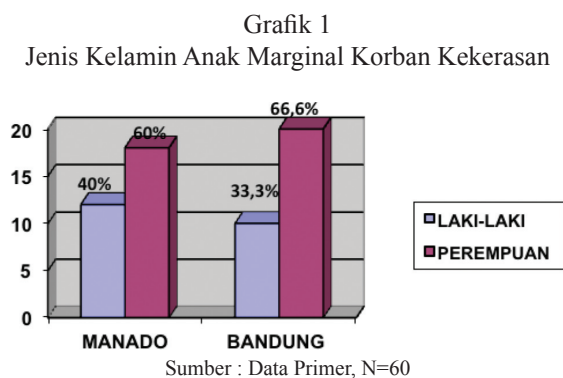
Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, kekerasan terhadap anak marginal yang terjadi di Kota Bandung dan Kota Manado. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan

menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Sugiyono (2017). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Penelitian dilakukan pada 60 anak marginal terdiri dari: anak jalanan, anak buruh pabrik, anak yang orang tua bekerja di jalanan sebagai pengasong dan anak pengemis yang hidup di jalanan, lingkungan kumuh atau padat penduduk, di pinggiran stasiun kereta api, dan pusat keramaian kota.

Data analisis secara mendalam terhadap permasalahan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak marginal. Pendekatan ini dipilih dengan harapan memperoleh masukan bagi analisis lebih lanjut, yang mengarah kepada penyusunan pola penanganan eksploitasi kekerasan anak.

C. Hasil dan Pembahasan

Jenis Kelamin Anak Korban Eksploitasi dapat dilihat dari grafik 1.



Grafik1 mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan di masyarakat marginal di Bandung dialami oleh anak perempuan yaitu 18 anak perempuan (60%), sedangkan di Kota Manado ada anak perempuan 20 (66,6%), ada anggapan bahwa kekerasan pada anak ha-

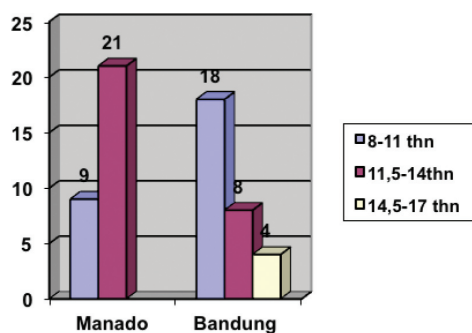
nya bersifat kasuistik dan dianggap hanya terjadi pada keluarga tertentu yang bermasalah, baik secara genetik maupun faktor lingkungan. karena anak perempuan.

Survei Kekerasan Terhadap Anak Indonesia 2013 oleh Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa kekerasan yang dialami anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Jumlahnya mencapai hampir separuh populasi anak laki-laki, tepatnya 7.061.946 anak atau 47,74 persen. Pada anak perempuan, prevalensinya mencapai 17,98 persen (2.603.770 anak). Anak yang menjadi korban kekerasan di masa lalu berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan ketika mereka dewasa. Kekerasan atau penyiksaan terhadap anak termasuk segala bentuk penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan atau eksploitasi komersial atau lainnya semakin meningkat. Anak yang mengalami tindak kekerasan (kekerasan fisik, emosional, seksual) mengakibatkan bahaya aktual dan potensial bagi kesehatan anak. (Kurniasari, 2013).

Kedua lokasi penelitian menunjukkan anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan dibanding anak laki-laki. Hal ini disebabkan pandangan secara psikologis anak perempuan lebih menurut, tidak banyak protes dan tidak banyak menuntut apabila mengalami tekanan dari luar dirinya. Secara ekonomis, anak perempuan yang dipekerjakan lebih banyak mendapatkan keuntungan dibanding anak lelaki, karena anak perempuan lebih cepat dewasa secara psikologis sehingga mampu membantu orang tua.

Dampak psikologis anak marginal perempuan menjadi korban kekerasan mengalami depresi, gangguan panik, phobia, insomnia, maupun psikosomatis. Dukungan sosial dari keluarga akan memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan kesehatan mental serta motivasi dalam hidup seseorang terutama yang mengalami trauma dan stress akibat kekerasan.

Grafik.2
Umur Anak Yang Mengalami Kekerasan



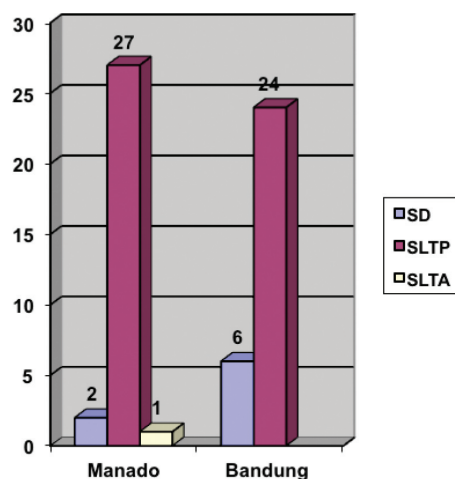
Sumber : Data Primer, N=60

Pada Grafik 2, diketahui bahwa umur anak yang mengalami eksploitasi berkisar antara umur 8 s/d 17 tahun. Pengeksploitasian anak akan membawa dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Anak melakukan kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapat perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kekerasan terhadap anak marginal yang terjadi kota Manado terjadi pada kelompok usia 14 – 17 tahun (17%). Sedangkan di Bandung kecenderungan eksploitasi anak terjadi pada umur 8 – 11 tahun (86,70%). Artinya ada perbedaan komposisi umur di kedua kota, hal tersebut karena anak marginal berinteraksi berdasarkan usia cara pandang mereka seperti jaringan, norma maupun nilai yang dianut oleh masyarakat marginal. Anak marginal rentan terhadap eksploitasi tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual karena tidak ada yang melindungi. Selain itu anak usia remaja, tertekan jiwanya, pergaulan buruk dan efek dari tayangan kekerasan di media masa (Irfan Rifai, 2016).

Pendidikan merupakan gerbang untuk menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Masyarakat marginal kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anaknya. Keterbatasan ekonomi masyarakat marginal menyebabkan anak putus sekolah, dan belum mampu untuk membiayai sekolah hingga ke perguruan tinggi. Anak pu-

tus sekolah adalah keadaan tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai hal. Anak putus sekolah di daerah pinggiran perkotaan mengalami keterlantaran pendidikan.

Grafik. 3
Tingkat Pendidikan Anak Yang Mengalami Kekerasan



Sumber : Data Primer, N=60

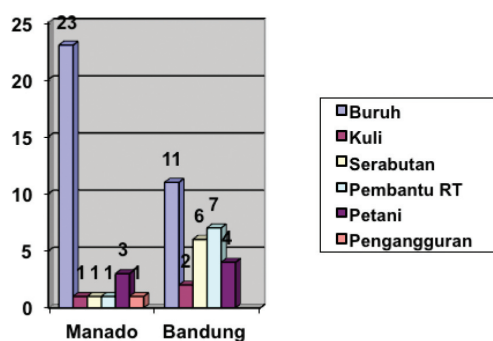
Grafik 3 menjelaskan tingkat pendidikan anak marginal yang mengalami kekerasan. Data di atas menunjukkan bahwa anak marginal yang mengalami kekerasan di Manado sebanyak 27 anak (90,01) berpendidikan SMP sedangkan di Bandung ada 24 anak (80%). Anak dengan tingkat pendidikan SD di Manado sebanyak 2 anak (6,66%) dan di Bandung ada 6 anak (20%). Kekerasan terhadap anak marginal baik sebagai korban tindak kekerasan atau terjerumus melakukan tindak kekerasan karena tekanan dari orang tua, sekolah, teman maupun masyarakat. Hal tersebut anak harus dididik sejak dini untuk melindungi diri dari segala bentuk potensi yang dapat menjadikan anak sebagai korban tindak kekerasan. Anak harus dapat membentuk sistem yang mampu memproteksi anak dari segala bentuk ancaman kekerasan baik di rumah, sekolah dan lingkungan (Sari, 2014).

Anak marginal yang paling banyak mengalami kekerasan di kedua kota berpendidikan SMP. Anak usia remaja tingkat SMP, tertekan jiwanya, pergaulan buruk dan efek dari

tayangan kekerasan di media masa (Irfan Rifai, 2016). Perilaku agresif remaja akibat berbagai faktor, merasa kurang diperhatikan, perasaan tertekan, pergaulan buruk dan efek dari tayangan kekerasan di media masa. Anak usia remaja (SMP) yang sering mengalami kekerasan dapat mengembangkan perasaan tidak berguna, perasaan tidak bermanfaat dan akan berkembang perasaan tidak aman dan harga diri rendah dalam jiwa anak. Pada akhirnya, anak akan menjadi pendiam, mengucilkan diri dari lingkungannya, dan tidak bergaul dengan teman (Restu & Yusri, 2013).

Latar belakang pekerjaan orang tua anak marginal dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4
Pekerjaan Orang Tua Anak Marginal yang Mengalami Kekerasan



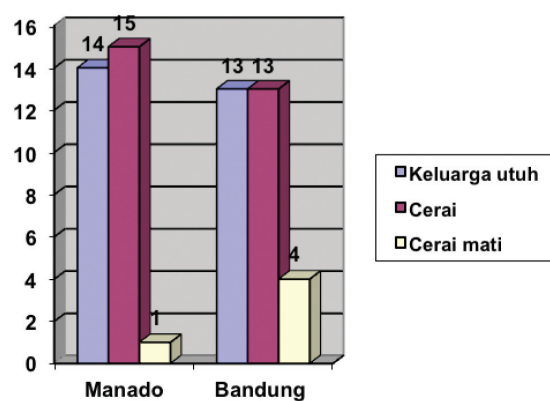
Sumber : Data Primer, N=60

Pada Grafik 4, menunjukkan bahwa orang tua responden bekerja di sektor informal yang bersifat subsisten dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah, yaitu buruh yang bekerja di sektor informal sebanyak 23 orang (76,6%) di Kota Manado dan 11 orang (36,6%) di Kota Bandung. Penghasilan orang tua responden di sektor informal tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Hal tersebut menyebabkan anak harus membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Anak menjadi korban untuk menghidupi keluarganya dengan cara bekerja dan membantu perekonomian keluarga sehingga berhenti dari sekolah. Selain itu, ada yang lebih memilih bekerja dibandingkan sekolah, meskipun ada juga anak marginal yang masih bersekolah.

Penghasilan orang tua anak marginal tidak lebih dari 1 juta perbulan untuk menghidupi keluarganya sebagian besar sebagai pedagang asongan, minuman dan mainan, penghasilan rata-rata Rp-20.000,- sampai dengan Rp- 30.000,- sehari tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarga.

Kehidupan keluarga anak marginal yang mengalami kekerasan, salah satunya dengan melihat status perkawinan orang tuanya. Status perkawinan berkaitan dengan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5
Status Perkawinan Orang Tua Anak Marginal yang Mengalami Kekerasan



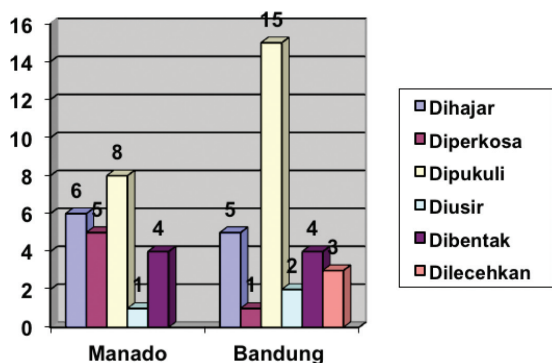
Sumber : Data Primer N=30

Mencermati Grafik 5, bahwa status perkawinan orang tua anak yang mengalami eksploitasi di kota Manado ternyata, anak dari keluarga utuh 46,37% dan anak dari keluarga yang sudah bercerai 50%, 2,12% cerai mati atau ditinggal salah satu orang tua.

Status perkawinan orang tua yang anaknya mengalami eksploitasi di Kota Bandung ternyata tidak ada perbedaan antara anak dari keluarga utuh dan anak dari keluarga yang sudah bercerai yaitu 13 orang (43,33%), dan yang lainnya dari orang tua yang telah meninggal 4 orang (13,33%). Status perkawinan pada anak marginal tidak berpengaruh pada kekerasan yang dialami anak. Artinya anak dari keluarga utuh maupun keluarga dapat menjadi korban kekerasan maupun pelaku kekerasan itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Berikut adalah gambaran bentuk kekerasan yang dialami anak marginal.

Grafik. 6
Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Anak Marginal



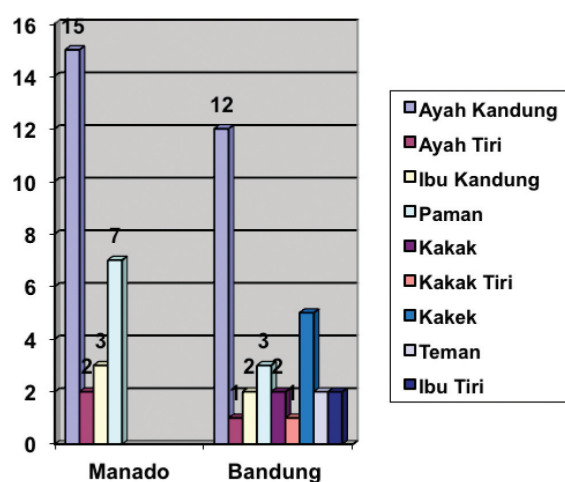
Sumber : Data Primer, N=60

Pada Grafik 6 di atas, kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masyarakat ternyata masih terus dilakukan, hal ini terbukti di kota Manado kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh anak ada dalam beberapa bentuk kekerasan. Mayoritas bentuk kekerasan, dipukul atau pemukulan dengan tangan anak 8 anak (26,66%), selanjutnya anak yang dihajar atau pemukulan dengan menggunakan alat 6 anak (20%), yang diperkosa 5 anak (16,66%) dan yang paling sedikit anak yang diusir 1 anak (3,33%). Sedangkan di Kota Bandung paling banyak adalah anak yang dipukuli yaitu 15 anak (50%), selanjutnya anak yang dihajar 5 anak (16,66%), yang dibentak 4 anak (13,33%) dan yang lainnya adalah dilecehkan 3 anak, diusir 2 anak dan yang diperkosa 1 anak. Melihat data di atas kenyataan yang terjadi di kota Manado banyak anak yang dipukul, dihajar dan diperkosa, sedangkan di kota Bandung kebanyakan anak yang dipukul dan dihajar.

Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, kesulitan untuk membedakan anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga. Anak yang mengalami kekerasan biasanya

memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalahnya sehingga menutup diri di lingkungan. Kendala yang dihadapi untuk mengungkapkan tindak kekerasan, karena sulit mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan dalam keluarga, karena 'berdosa' jika menceritakan 'kejelekan, keburukan, atau aib' keluarga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga sulit terungkap.

Grafik.7
Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak Marginal



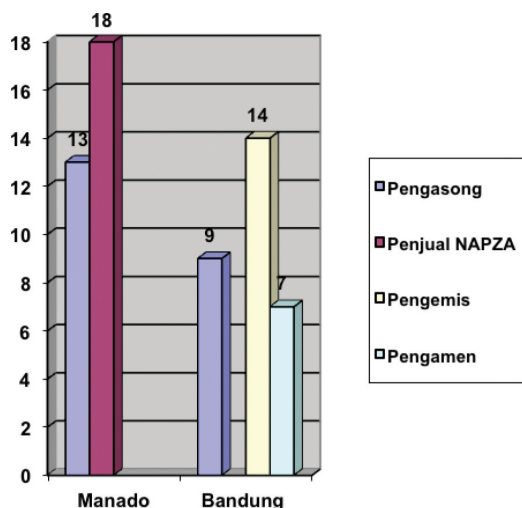
Sumber : Data Primer, N=60

Data pada grafik 7 menunjukkan bahwa pelaku yang melaksanakan tindak kekerasan terhadap anak di kota Manado yang paling banyak dilakukan oleh ayah kandung yaitu 15 anak (50%) selanjutnya oleh paman 7 anak (23,33%), disusul orang tua dan ibu yang sama besarnya 3 anak (10%), yang paling sedikit oleh ayah tiri 2 anak (6,66%). Sedangkan di kota Bandung juga hampir sama di Manado tapi lebih meluas karena ada yang dilakukan oleh teman sendiri. Pelaku kekerasan yang paling banyak dilakukan oleh ayah kandung yaitu 40% (12 anak), selanjutnya oleh kakek 5 anak (16,66%) paman 3 anak (10%). Yang lainnya sama besarnya yaitu oleh ibu kandung, kakak kandung, teman yaitu ada 2 anak (6,66%) serta oleh ayah tiri dan kakak tiri 1 anak (3,33%).

Melihat data baik di kota Manado maupun di kota Bandung pelaku tindak kekerasan

tersebut ada dalam lingkup keluarga. Pekerjaan anak marginal dijadikan sebagai sumber ber-penghasilan oleh para orang tua menginginkan keuntungan dari perbuatan yang sangat keji terhadap anak marginal.

Grafik 8
Jenis Eksploitasi yang Dialami Anak Marginal



Sumber : Data Primer, N=60

Jenis eksploitasi yang dialami anak dalam masyarakat marginal di kota Manado dan kota Bandung di Manado hanya ada 2 jenis eksploitasi yaitu menjual obat-obatan terlarang (ekstasi dll) sebanyak 18 anak (60%) dan yang menjadi pedagang asongan 12 anak (40%). Sedangkan di kota Bandung ada 3 jenis eksploitasi yang dialami anak, yang paling banyak adalah anak menjadi pengemis terdapat 14 anak (46,67%), asongan 9 anak (30%) dan yang pengamen sebanyak 7 anak (23,33%)

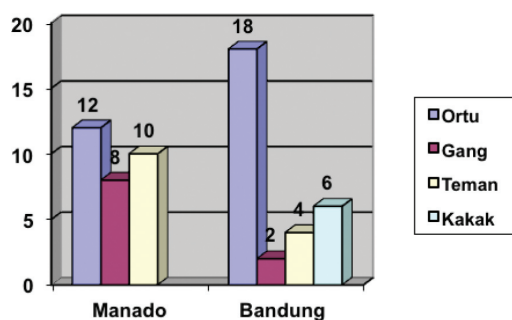
Masyarakat Kota Manado terkenal mempunyai gengsi (harga diri) yang tinggi, pada kenyataan banyak anak menjadi pengemis tersebut. mereka untuk tidak bekerja dan hanya mencari uang dengan cara gampang dengan cara meminta uang dengan alat sekedarnya. Menurut masyarakat sekitar, hal tersebut menjadikan anak marginal tidak suka bekerja keras, mer-

eka lebih memilih menjadi pengemis bahkan tidak jarang menjadi pengedar obat terlarang. Dari hasil wawancara dengan pendamping anak jalanan, beberapa anak terjebak menjual benda terlarang pada awalnya mereka diberikan secara cuma-cuma, setelah mereka ketagihan dipaksa menjualnya. Anak marginal yang terjebak dalam masalah narkoba tidak bisa lepas dari kelompok pengedar (Yaspen Martinus, 2018).

Hasil wawancara dengan pendamping anak di Kota Bandung, kasus anak marginal menjadi pengedar obat terlarang karena sudah menjadi pecandu, untuk mendapatkan obat terlarang tidak jarang mereka harus mengedarkan obat terlarang atau narkoba golongan IV merupakan psikotropika seperti dumolit, alprazolam, sanax, diazepam, dan lainnya. Mereka membeli obat terlarang tidak jarang dengan menjual diri. Bahkan ada anak marginal pecandu obat terlarang terjangkit penyakit HIV-AIDS akibat jarum suntik yang digunakan bersama-sama dengan anak marginal lain.

Eksplorasi terhadap anak marginal dipaksa mengemis, mengasong dan mengamen oleh orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah atau ibu tiri, atau ayah atau ibu angkat, juga teman sebaya maupun teman kelompok. Eksploitasi terhadap anak marginal berdampak anak tidak bersekolah (putus sekolah) karena terlena mencari uang dengan cara mudah (dalam sehari mendapat kurang lebih Rp. 20.000,-), Permasalahan ini sudah terlihat di Bandung dengan begitu maraknya pengemis anak di jalanan. Data BPS tahun 2017 anak terlantar terdapat 7.625 jiwa, dan Anak Wanita dan Lansia Korban Tindak Kekerasan 679 jiwa (BPS Jawa Barat, 2018) Anak yang menjadi pengemis tidak dapat disalahkan akan tetapi warga masyarakat yang memberinya harus diberi pengertian bahwa memberi kepada anak-anak yang mengemis di jalanan tidak mendidik, dapat merusak mental anak.

Grafik 9
Pelaku Eksploitasi Kepada Anak Marginal



Sumber : Data Primer, N=60

Pelaku eksploitasi terhadap anak baik di kota Manado dan kota Bandung kebanyakan dilakukan oleh orang tua, di Manado 12 anak (40%) dan di Bandung 18 anak (60%), selanjutnya di Manado eksploitasi yang dilakukan oleh teman 10 anak (33,33%) dan gang 8 anak (26,67%). Eksploitasi terhadap anak marginal yang dilakukan oleh orang tua dengan menyuruh menjadi pengasong, pengemis. Sedangkan kekerasan lain dilakukan oleh teman bermain (*peer group*) serta teman dekat yang menggiring jadi penjual obat-obatan terlarang karena sekali anak terlibat atau terjerumus ke penjualan narkoba sulit untuk keluar karena merupakan sindikat. Hal ini dapat dilihat pada grafik 9. karena persentasenya sama sedangkan di kota Bandung selain orang tua yang banyak adalah kakak 6 anak (20%) menyusul teman 4 anak dan teman satu kelompok (*peer group*) 2 anak.

Pelaku eksploitasi terhadap anak marginal adalah orang terdekat seperti orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah atau ibu angkat, juga teman sebaya maupun teman kelompok, untuk mengatasi tindak kekerasan perlu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Anak marginal yang menjadi korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya, karena anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus

dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

D. Penutup Kesimpulan

Kekerasan terjadi pada anak marginal perkotaan di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Kekerasan yang terjadi pada anak marginal banyak dialami oleh anak perempuan, dibandingkan anak laki-laki, pendidikan sekolah menengah pertama. Dari hasil penelitian dari Usia korban kekerasan berusia antara 8 hingga 14 tahun. Pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak marginal paling banyak adalah ayah kandung.

Anak marginal di perkotaan yang menjadi korban kekerasan mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Mereka berpotensi melakukan tindak kekerasan atau sebagai pelaku kekerasan terhadap anak lain ketika mereka dewasa.

Rekomendasi:

Upaya menurunkan tingkat kekerasan yang dialami oleh anak marginal yang tinggal di perkotaan

1. Perlu koordinasi antarinstansi, keluarga dan masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi terjadi tindak kekerasan terhadap anak marginal yang tinggal di daerah kumuh, di jalanan juga di daerah miskin dan padat di perkotaan.
2. Perlu upaya penanganan melalui sosialisasi, kesadaran hukum yang melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk menangani masalah kekerasan anak marginal.
3. Upaya perlindungan terhadap anak marginal melalui pendampingan terutama terhadap anak rentan terhadap tindak kekerasan. Pendampingan terhadap anak memerlukan kerjasama dalam penanganan dan pencegahan dengan dewan perlindungan anak, seperti Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T-P2A) merupakan pusat kegiatan terpadu

yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Komnas Hak Anak dan berbagai pihak agar berjalan secara holistik dan komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, serta pendamping sosial yang telah membantu dalam kegiatan penelitian kekerasan terhadap anak marginal.

Pustaka Acuan

- Biro Pusat Statistik Jawa Barat, 2018, <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/405/jumlah-permasalahan-sosial-menurut-jenis-di-jawa-barat-2016.html>
- Finneke Wolajan. (2018) Swara Parangpuan Mencatat Asa 268 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulut, <http://manado.tribunnews.com/2018/11/26/swara-parangpuan-mencatat-asa-268-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulut>. edisi Senin, 26 November 2018 12:46
- Huda, N. (2008). Kekerasan Terhadap Anak Dan Masalah Sosial Yang Kronis. *Pena Justisia*, 7(4), 14.
- Irfan Rifai. (2016). The Emergence Of Youth Violence In Indonesia: A Socio-Historical Analysis. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i1.115
- Kurniasari Yanuar Farida Wismaayanti Irmayani Husmiati Nurdin Widodo Badrun Susantyo Konsultan, A., & Gambit Praptoraharjo Kerjasama Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, I. (2013). Survey Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Tahun 2013. In *Kementerian Sosial*.
- Restu, Y., & Yusri. (2013). Studi tentang perilaku agresif siswa di sekolah. *Jurnal Ilmiah Konseling*.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, (2004) Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada Media.
- Sari, R. T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Siswa SMK Ketintang Surabaya. *Jurnal BK*.
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, CV, Bandung.
- Sururin, (2016) Kekerasan anak, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34575>
- Tambunan, L. (2014). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalamrumah Tangga. *Jurnal Hukum*.
- Tribun Jabar. (2018). Tahun Ini, Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung Meningkat, <http://jabar.tribunnews.com/2018/09/04/tahun-ini-laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-kota-bandung-meningkat>. Edisi Selasa, 4 September 2018 15:02
- Tribun Manado.(2018). Swara Parangpuan Mencatat Asa 268 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Sulut, <http://manado.tribunnews.com/2018/11/26/swara-parangpuan-mencatat-asa-268-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sulut>. edisi Senin, 26 November 2018 12:46
- Voa Indonesia, edisi 28/09/2017, 75 Persen Anak-anak di Dunia Jadi Korban Kekerasan, <https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-puluh-lima-persen-anak-di-dunia-jadi-korban-kekerasan/4047830.html>.

Nilai Kesetiakawanan Sosial Masyarakat Manado Sebagai Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Manado

The Value of Community Social Solidarity as The Basis for Services Social Welfare

Andayani Listyawati dan Tyas Eko Raharjo F.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta. Tlp. (0274) 377265

HP. 081255567049 E-mail tyasekoraharjo@gmail.com

diterima 09 Oktober 2018, diperbaiki 11 Desember 2018, disetujui 29 Desember 2018

Abstract

This study aims to describe the value of social solidarity of the people of Manado as the basis for organizing social welfare. The approach used is descriptive qualitative to reveal the value of social solidarity of the people of Manado as a basis for the implementation of good social welfare related to the value of social wisdom. The study was conducted in the city of Manado with the urban community setting, because the city has a uniqueness in community life with the inherent value of local wisdom as a high-tolerance living philosophy. Data sources were determined purposively, namely the Head of the Office of Social Affairs and Community Empowerment of Manado City, village officials, community leaders, and community members. Data were obtained using interview techniques, observation, and subsequent document review. Data were analyzed descriptively with exposure in narrative form. The results of the study show that the solidarity value of the people of Manado can be used as a basis for the implementation of social welfare which is derived from the value of social wisdom. Torang values all together provide a sense of brotherhood to always establish harmony in society. Sitou Timou Tou gives social services to the community with mutual respect, care, help to help neighbors. Mapalaus provides social services by collaborating and collaborating to alleviate social problems in the community. It is recommended that the Head of the Office of Social and Community Empowerment of Manado City can provide guidance to the social cultural organizations concerned with Manado. Guidance for pillars of social and family welfare workers to keep preserving the value of social solidarity of the people of Manado.

Keywords: *social solidarity value; local wisdom; manado community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengungkap nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang terkait dengan nilai kearifan sosialnya. Penelitian dilakukan di Kota Manado dengan *setting* masyarakat kelurahan, karena kota tersebut memiliki keunikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan melekatnya nilai kearifan lokal sebagai falsafah hidup bertoleransi tinggi. Sumber data ditetapkan secara *purposive* yakni Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen selanjutnya data dianalisa secara deskriptif dengan paparan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa nilai kesetiakawanan masyarakat Manado dapat dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersumber dari nilai kearifan sosial. Nilai *Torang samua basudara* memberikan rasa persaudaraan untuk selalu menjalin keharmonisan dalam bermasyarakat. *Sitou timou tou* memberikal layanan sosial kepada masyarakat dengan saling menghormati, peduli, tolong menolong kepada tetangga. *Mapalaus* memberikal layanan sosial dengan melakukan kerjasama dan bergotongroyong untuk meringankan permasalahan sosial di masyarakat. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado agar memberikan pembinaan kepada organisasi sosial peduli budaya Manado. Bimbingan pilar tenaga kesejahteraan sosial dan keluarga untuk tetap melestarikan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado.

Kata Kunci: *nilai kesetiakawanan sosial; kearifan lokal; masyarakat manado*

A. Pendahuluan

Kesetiakawanan sosial merupakan modal sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Nilai yang tercantum dalam kesetiakawanan sosial berangsur-angsur dalam kehidupan masyarakat cenderung memudar, hal ini terlihat pada kondisi hubungan antar warga meskipun berdekatan tetapi tidak saling mengenal dan tidak bertegur sapa. Kehidupan masyarakat terjadi dikarenakan kesibukan seseorang sesuai dengan tuntutan dalam pekerjaan yang mengharuskan untuk melakukan pekerjaan hingga sore hari, kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian hilangnya kesempatan warga untuk saling berkomunikasi dengan tetangga sangat mungkin terjadi dan bahkan timbul rasa egois di antara tetangga. Kondisi tersebut berdampak pada keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Tradisi budaya Indonesia telah lama mengutamakan keharmonisan relasi perorangan dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kerukunan dan hormat menghormati diantara warga, namun pada sisi lain kesetiakawanan sosial cenderung semakin memudar dalam kehidupan bermasyarakat (Sunit Agus Tri Cahyono, 2012).

Tiga hal yang dapat menggerus nilai kesetiakawanan sosial, pertama menguatnya semangat individualis karena globalisasi. Gelombang globalisasi dengan paradigma kebebasan, langsung atau tidak, berdampak pada lunturnya nilai kultural masyarakat. Kedua menguatnya identitas komunal dan kedaerahan, akibatnya semangat kedaerahan dan komunal lebih dominan dari pada nasionalisme. Ketiga lemahnya otoritas kepemimpinan, hal ini terkait dengan keteladanan para kepemimpinan yang memudar. Terkikisnya nilai kesetiakawanan menimbulkan ketidakpercayaan sosial, baik antara masyarakat dan pemerintah maupun antara masyarakat dan masyarakat, karena terpecah dalam aneka golongan.

Semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial dapat dilihat dari fenomena yang nampak pada kehidupan bermasyarakat, yakni

maraknya berbagai kerusuhan, pertengkaran antar pelajar, saling serang antar umat, saling bunuh, dan semakin bertambahnya masyarakat miskin. Kondisi ini lambat laun akan membahayakan keutuhan bangsa jika terus dibiarkan, proses pelemahan persatuan dan kesatuan yang dapat mengancam ketahanan bangsa (HM. Jusuf Rizal, 2012).

Seiring dengan perkembangan jaman, di era globalisasi ini nilai-nilai kesetiakawanan sosial terus mengalami penurunan terutama di kalangan generasi muda atau pelajar. Nilai kesetiakawanan sosial mulai luntur, hal ini terbukti dengan adanya sikap acuh tak acuh, ingin menang sendiri, dan tidak setia kawan. Berbagai macam penyebab lunturnya nilai kesetiakawanan sosial yakni ada yang berasal karena kesenjangan sosial atau status sosial masyarakat, karena sikap egois masing-masing individu, kurangnya pemahaman dan penanaman nilai kesetiakawanan sosial, kurangnya sikap toleransi, empati dan simpati terhadap kondisi lingkungan.

Nilai gotong royong masyarakat yang awalnya menjadi perilaku hidup telah mengalami beberapa pelemahan dengan pengaruh budaya lain yang lebih mementingkan kebebasan individu. Globalisasi memberikan dampak pada aspek kehidupan masyarakat diantaranya adalah nilai kegotongroyongan. Pola pikir masyarakat mulai terpengaruh terkait dengan pelaksanaan kegiatan gotong royong. Masyarakat lebih suka membeli barang mewah daripada memberi bantuan kepada orang miskin. Masyarakat cenderung hidup individualis, konsumtif, dan kapitalis sehingga rasa kebersamaan, kekeluargaan mulai hilang tergerus dengan kemajuan globalisasi. Terutama pada kalangan kaum muda cepat berpengaruh dengan budaya yang belum sesuai dengan etika masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi seakan membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Sebagian para remaja berpakaian yang begitu tipis sehingga seakan memperlihatkan bagian tubuh yang semestinya harus tertutup.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan luntarnya nilai kesetiakawanan sosial yakni dengan melakukan penelitian tentang pengembangan sistem penguatan nilai kesetiakawanan sosial dengan maksud dapat memperoleh model pengembangan sistem penguatan nilai kesetiakawanan sosial.

Untuk mengatasi masalah kepedulian sosial, banyak upaya yang telah dilakukan berbagai kalangan untuk mengedukasi generasi muda, baik itu dari kalangan masyarakat umum seperti karang taruna, lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang kemanusiaan seperti Basarnas, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, pemerintah melalui jalur pendidikan juga berupaya untuk mengatasi permasalahan kepedulian sosial di kalangan generasi muda atau kalangan pelajar, salah satunya dengan memberikan pembelajaran kepada para pelajar melalui kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) yang dikembangkan di lingkungan sekolah.

Perkembangan jaman nilai kesetiakawanan sosial masyarakat dipandang sebagai bagian dari semangat kebangsaan bagi setiap warga negara. Berdasar pada permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian tentang pengembangan sistem penguatan nilai kesetiakawanan sosial, dengan tujuan supaya nilai kesetiakawanan sosial dapat dikuatkan dan dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penguatan juga diharapkan dapat bermanfaat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk mengkaji tentang bagaimana nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mendasarkan pola berpikir secara induktif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Bagong Suyanto dan Sutinah,

2007), artinya mengungkap terkait dengan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Manado dengan alasan, bahwa Kota Manado memiliki keunikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan melekatnya nilai kearifan lokal yang menjadi falsafah hidup. Kehidupan bertoleransi yang tinggi terbukti dengan penghargaan kota toleransi pada tahun 2017.

Pengumpulan data diperoleh dari informan yaitu pemimpin pemerintahan di tingkat Kota Manado yang memiliki kompeten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat dan warga masyarakat pengguna manfaat. Data diperoleh melalui teknik wawancara, untuk mengungkap nilai kesetiakawanan sosial sebagai dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pengamatan atau observasi juga dilakukan untuk mengetahui secara langsung aktivitas para pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Telaah dokumen dilakukan untuk mengetahui monografi, geografi lokasi penelitian, dan sumber berkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lokasi penelitian ditetapkan secara *purposive* yaitu Kota Manado. Alasan penentuan lokasi karena Kota Manado merupakan salah satu kota yang menjadi lokasi penelitian indeks kesetiakawanan sosial dan dinyatakan memiliki indeks tinggi.

Data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif, dan dipaparkan dalam bentuk uraian/naratif. Proses analisis dimulai dengan menghimpun dan merumuskan makna yang disampaikan informan, mengelompokkan data ke dalam klasifikasi berdasarkan kriteria keterangan yang ditetapkan. Menghubungkan pernyataan informan dengan hasil telaah dokumen ataupun hasil pengamatan lapangan, kemudian memaknai data dengan menguraikan dan menjelaskan secara deskriptif mengenai nilai kesetiakawanan sosial sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Manado.

C. Hasil dan Pembahasan

Kota Manado secara administratif dibagi dalam 11 wilayah kecamatan dan 87 kelurahan, sebagaimana tabel 1 (Perda. No. 2 Tahun 2012).

Tabel 1. Wilayah Kota Manado
Berdasar Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah
Bunaken	5	36,19
Bunaken Kepulauan	4	16,85
Malalayang	9	17,12
Mapanget	10	49,75
Sario	7	1,75
Singkil	9	4,68
Tikala	5	7,10
Tuminting	10	4,31
Wanea	9	7,85
Wenang	12	3,64
Paal Dua	7	8,02
Total	87	157,26

Sumber: Dinsosdayamasy.Kota Manado, 2018

Penduduk Kota Manado mayoritas beragama Kristen, selanjutnya pemeluk agama Islam dan disusul agama lain. Keberagaman agama yang ada di Kota Manado menjadi lebih memperkuat kebersamaan dalam kesetiakawanan sosial dan saling mendukung dalam setiap kegiatan. Demikian juga budaya yang tumbuh dan berkembang membuat lebih mempererat khasanah kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat menunjukkan hubungan mendalam antar budaya dari berbagai macam masyarakat. Hal ini terjadi sebagai akibat adaptasi kultural dengan nilai budaya lokal yakni masyarakat Minahasa dominan memiliki nilai budaya ideal yang adaptif dan berkembang alami serta diterima baik oleh masyarakat pendatang (bukan orang Minahasa) sebagai *culture dominant*. Interaksi yang baik antar pemeluk agama tersebut menghantarkan Kota Manado masuk dalam kategori kota toleransi pada tahun 2017.

Berdasar pengamatan dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa yang berkaitan dengan nilai kesetiakawanan sosial yang dapat menjadi dasar dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Penanganan masalah kesejahteraan sosial

di Kota Manado telah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi dasar keberhasilan terentasnya penyandang masalah sosial di Kota Manado, karena masyarakat lebih tahu permasalahan yang dialaminya. Banyaknya masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado dapat disimak pada tabel 2.

Tabel 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Manado

PMKS	Jumlah
Anak Balita Terlantar	13
Anak Terlantar	307
Anak Berhadapan dengan Hukum	135
Anak Jalanan	35
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	34
Anak Korban Tindak Kekerasan	30
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10
Anak Nakal	634
Lanjut Usia Terlantar	96
Penyandang Disabilitas/Cacat	1.445
Tuna Susila	348
Gelandangan Psikotik	37
Pengemis	40
Pemulung	97
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	41
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	170
Korban Penyalahgunaan NAPZA	786
Korban Trafficking	18
Korban Bencana Alam	15.271
Korban Bencana Sosial	202
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.936
Fakir Miskin	16.271

Sumber : Dinsosdayamasy. Kota Manado, 2018

Tabel 2 menunjukkan kondisi masalah kesejahteraan sosial Kota Manado begitu kompleks terutama masalah keluarga fakir miskin masih nampak dominan yakni 16.271 KK atau 3,13 persen, di susul dengan masalah sosial korban bencana alam 15.271 atau 2,94 persen, dan perempuan rawan sosial ekonomi 2.936 jiwa atau 0,56 persen. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan segera mungkin karena Kota Manado merupakan kota yang memiliki toleransi tinggi sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan B2P3KS tahun 2018.

Kondisi toleran tinggi tersebut ternyata dapat menjadi dasar penanganan masalah kesejahteraan sosial secara mandiri sebagaimana pendapat Haryati Soebadyo, bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, perumahan, pendidikan, kesehatan dan jenis kebutuhan yang lain, namun dapat ditangani secara mandiri dalam kesetiakawanan sosial (Haryati Soebadyo, 1991). Berdasar pendapat tersebut pemerintah Kota Manado berkomitmen memberikan perhatian kepada keluarga tidak mampu melalui program pengentasan kemiskinan dan layanan jaminan sosial, yang melibatkan peranserta masyarakat mampu dan peduli, agar masyarakat dapat hidup layak.

Pemerintah Kota Manado dalam penanganan masalah sosial tetap memperhatikan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tersedia di lingkungannya, baik secara formal maupun informal. Berikut jenis potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di Kota Manado dapat disimak pada tabel 3

Tabel 3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Manado

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
Pekerja Sosial Profesional	2
Pekerja Sosial Masyarakat	30
Karang Taruna	87
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	93
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Orsos	114
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2
Keluaga Pioner	30
Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	7
Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	198
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	11
Dunia Usaha yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	25
Kearifan lokal	6

Sumber : Dinsosdayamasy. Kota Manado, 2018

Tabel 3 menunjukkan banyaknya potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan peme-

rintah daerah Kota Manado dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerah. Jika dicermati banyaknya potensi dan sumber kesejahteraan sosial tersebut dapat memberi gambaran bahwa, Kota Manado seharusnya memang mampu dalam penanganan masalah sosial secara mandiri. Berdasar pengakuan kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado bahwa dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya keluarga miskin dilakukan melalui program pengentasan kemiskinan dan layanan jaminan sosial. Namun demikian dalam penanganan kemiskinan juga melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat lebih merasakan kesetiakawanan sosial terhadap masyarakat yang lebih membutuhkan pertolongan.

Pengakuan kepala dinas tersebut diperkuat dengan pernyataan salah seorang kepala bidang kesejahteraan dan layanan sosial katanya “kami melakukan pelayanan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melibatkan warga setempat sesuai dengan kearifan lokal yang ada,” seperti contoh masyarakat telah akrab dengan slogan *torang samua basudara atau torang samua ciptaan Tuhan*. Slogan tersebut menjadi kekuatan masyarakat untuk saling membantu dan ini terbukti di Kota Manado ternyata masyarakat berpartisipasi untuk mengumpulkan dana demi terbantunya keluarga miskin.

Implementasi nilai kesetiakawanan sosial sebagai dasar penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Manado erat kaitannya dengan nilai kearifan lokal yang telah menjadi slogan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial merupakan kondisi ikatan antara individu dan kelompok sosial yang termanifestasi sebagai tenggang rasa dan kepedulian serta tolong menolong (Nelam, 2002). Pendapat tersebut sejalan dengan nilai kearifan lokal yang menjadi slogan masyarakat Manado yang telah lama menjadi dasar dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Slogan yang menjadi dasar penanganan masalah sosial tersebut dapat disimak pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai kesetiakawanan Sosial Masyarakat Manado Sebagai Dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

No	Nilai Kearifan Lokal	Keterangan
1	Torang Samua Basudara atau Torang Samua Ciptaan Tuhan	Semua masyarakat di Manado merupakan saudara (menghindari konflik SARA)
2	Mapalus	Untuk melakukan kegiatan bersama (kerjasama) mempererat hubungan antar warga
3	Sitou Timon Tumou Tou	manusia hidup memanusiakan manusia lain
4	Budaya demokrasi	Musyawaharah menentukan pimpinan masyarakat
5	Anti diskriminasi	semua orang mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk berkembang dan berekspresi
6	Budaya Silaturahmi	menciptakan kerukunan hidup

Sumber : Frangky Suleman, 2016

Tabel 4 menunjukkan, bahwa nilai kearifan lokal erat dengan nilai kesetiakawanan sosial terkait dengan slogan *torang samua basudara* masuk dalam nilai toleransi dalam kesetiakawanan sosial. Kearifan lokal masyarakat yang ada di Manado ini memberi tujuan untuk saling menghargai diantara pemeluk agama, suku, RAS, dan antar golongan, sehingga nilai *torang samua basudara* ini dapat menjadi dasar penanganan masalah sosial terkait dengan SARA. Berdasar wawancara sejak adanya nilai kearifan lokal tersebut kehidupan masyarakat Manado mengacu pada nilai *torang samua basudara* dan menjadikan *ikon* dalam bermasyarakat. Sebagaimana pengakuan salah seorang perangkat Kelurahan Ranotana Kecamatan Wanea “Warga Kelurahan Ranotana ini sudah beken dengan slogan torang samua basudara, sehingga kami telah terbiasa bergaul dengan berbagai warga yang beragama lain dengan kami, bahkan di sekolah Kristen juga banyak yang beragama non Kristen”

Pengakuan perangkat Kelurahan Ranotana tersebut membuktikan warga masyarakat telah betul menerapkan slogan yang telah diyakini untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak membedakan agama, suku, dan golongan manapun semua menjadi saudara yang tinggal di Kota Manado. Nilai kesetiakawanan sosial tersebut terbukti dapat menyelesaikan masalah sosial terkait dengan konflik antar keyakinan. Pengakuan dari warga tersebut juga memberi keberhasilan

Kota Manado dalam mendapatkan penghargaan kota yang toleran pada tahun 2017.

Wujud nyata masyarakat lainnya yang terjadi adalah di bidang pendidikan, beberapa umat beragama Islam sekolah di yayasan pendidikan Kristen dan tetap mampu berinteraksi secara sehat tanpa menghilangkan ciri identitas agama dan wujud toleransi yang selalu terjaga dengan baik dapat dilihat keberadaan bangunan Gereja Masehi Injil di Minahasa Jemaat Yarden berada di wilayah kampung Islam.

Nilai kearifan lokal *mapalus* memberi makna kegiatan sosial yang dilakukan secara bersama yakni nilai gotong royong dalam kesetiakawanan sosial. Kegiatan *mapalus* dilakukan warga Kota Manado untuk bergotong royong saling membantu dalam mengerjakan kegiatan warga untuk saling meringankan beban setiap individu. *Mapalus* dilakukan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi warga yang mengalami permasalahan dalam hal tempat tinggal keluarga tidak mampu.

Cara yang dilakukan dengan bergotong royong untuk memperbaiki rumah keluarga tidak mampu, baik dalam hal pendanaan dalam perbaikan tempat tinggal juga dilakukan dengan gotong royong mengumpulkan uang dan barang bahan perbaikan rumah. Kondisi ini diakui oleh Lurah Mapanget Barat Kecamatan Mapanget “Kami melakukan kegiatan mapalus dengan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk masyarakat secara suka rela, selanjutnya dana tersebut akan digunakan untuk membantu keluarga miskin baik untuk membantu dalam

memperbaiki rumah bagi keluarga miskin. Selain itu dengan *mapalus* kami dapat melakukan kegiatan gotong royong untuk membantu keluarga mengalami kesusahan atau duka”.

Pengakuan Lurah Mapangat Barat tersebut juga diperkuat dengan pengakuan bu Olla salah satu warga dari Kelurahan Ranotana Weru Kecamatan Wanea katanya; “Ditempat kami untuk kegiatan *mapalaus* dapat untuk membantu warga keluarga miskin yang mengalami kesulitan dalam memperbaiki rumah layak huni, cara yang dilakukan dengan mengumpulkan dana dan bahan material untuk bangunan rumah secara suka rela, dan untuk membantu anak dari keluarga miskin yang akan melanjutkan sekolahnya”.

Kedua pengakuan tersebut berasal dari kelurahan yang berbeda tetapi kegiatannya pada dasarnya sama, bahwa nilai kesetiakawanan sosial *mapalus* dapat dilakukan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerahnya. Kondiai ini menunjukkan, bahwa nilai kesetiakawanan sosial yang melekat dalam nilai kearifan lokal dapat menjadi dasar penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerahnya.

Sitou Timon Tumou Tou falsafah ini menjadi slogan dan sebagai acuan bagi masyarakat di Kota Manado dalam kehidupan di masyarakat. *Sitou Timon Tumou Tou* memiliki arti yang mendalam yakni manusia hidup memanusiakan manusia lain, bahwa masyarakat Manado sangat toleran, saling membangun keakraban dengan sesama, saling menghormati dan menghargai segala bentuk keberadaan diantara manusia (Djakara, Salmin, 2003). Filsafah tersebut terbukti dengan situasi pada masyarakat Kota Manado yang selalu hidup dengan damai berdampingan dengan masyarakat pendatang dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam dengan Manado beragama Kristen. Rasa saling terbuka dan menerima perbedaan membuat masyarakat asal Jawa yang berdomisili di Manado mengaku dirinya sebagai orang Manado *Niyaku Manado* (aku orang Manado).

Pengakuan dari seorang kepala kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea (Youla Sondakh) “Kami anggap manusia yang tinggal di Kota Manado semua adalah saudara kita sehigga harus dihormati sebagaimana diri kita sendiri. Kami tidak pernah membedakan mereka dari suku, agama mana saja itu sama dengan kita orang”. Pengakuan tersebut didukung dengan pernyataan salah seorang warga yang tinggal dalam satu kelurahan Ustiani yang berasal dari keturunan Jawa tapi lahir di Manado katanya “Saya sudah menjadi orang Manado karena lahir di sini dan sudah tidak tahu lagi orang tua saya dulu di jawanya daerah mana. Tinggal di Kota Manado bagaikan saya tinggal di tanah tumpah darah saya, dan Manadolah sebagai tanah kelahiran saya.”

Pengakuan kedua informan di atas menunjukkan, bahwa falsafah *sitou tumon tumou tou* menjadi salah satu nilai kesetiakawanan sosial yang sangat diyakini dalam menghormati sesama manusia tanpa memandang suku, agama dari seseorang. Dengan falsafah yang mewujudkan kerukunan juga menjadi dasar dalam penanganan masalah sosial terutama berkait dengan konflik sosial antar agama.

Oleh karena itu wujud dukungan pemerintah dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Kota Manado dengan membentuk badan yang dapat memberi wadah dalam bermusyawarah dan kerjasama antar umat beragama. Badan tersebut adalah BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dan BAMAG (Badan Musyawarah Antar Umat Beragama) kedua lembaga ini didirikan dengan melibatkan berbagai keterwakilan umat beragama yang ada di Kota Manado. Tugas yang dilakukan membangun kerjasama dan menjalin komunikasi dua arah antar pemimpin agama dengan umat. Dengan demikian kedua lembaga memiliki dukungan dari berbagai umat agama dan etnis yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama yakni kedamaian dalam bermasyarakat.

Nilai kesetiakawanan sosial selanjutnya yakni budaya demokrasi yang dimiliki sejak masyarakat Manado masih dikenal dengan masyarakat Minahasa yang dipimpin oleh *Kepala Walak*, karena masyarakat Minahasa tidak mengenal adanya Raja dalam kelompok masyarakat dan pemerintahan masa lampau. Keberadaan *Kepala Walak* ini ditentukan secara musyawarah dan tidak berdasar pada keturunan.

Hal ini menunjukkan, bahwa masyarakat Minahasa telah melakukan sistem demokrasi dengan bermusyawarah dalam menentukan pimpinan masyarakat (*Kepala Walak*). Demikian juga kesetiakawanan sosial telah dibangun dalam proses berinteraksi berjalannya proses musyawarah sehingga ditemukan kesepakatan diantara masyarakat. Kepala walak merupakan perpanjangan tangan dari warganya dalam pengambilan keputusan strategis, seperti pembagian wilayah, para *kepala walak* melaksanakan musyawarah.

Kondisi tersebut merupakan pelaksanaan demokrasi yang sering dilakukan masyarakat Kota Manado dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam kehidupan antar umat beragama di kota Manado adalah sebagai alat akomodasi antar masyarakat terhadap kebutuhan untuk bebas berekspresi sesuai agama yang dianutnya, tanpa merasa tersisih dari kelompok masyarakat dominan. Demikian juga warga pendatang merasa nyaman, sebab diapresiasi dan dihormati, terlebih pemenuhan kebutuhan kedamaian dalam bermasyarakat. Suasana demokrasi juga dirasakan oleh salah satu warga Kelurahan Karabasan Utara Kecamatan Wanea “Kami selalu melakukan musyawarah bila menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan kami, seperti pada saat di lingkungan kami ada warga yang mengalami masalah ketidak mampuan dalam menyekolahkan anaknya, maka kami bermusyawarah dengan pimpinan lingkungan untuk melakukan pengumpulan dana membantu keluarga tidak mampu”. Pengakuan beberapa warga dan

proses penentuan *Kepala Walak* yang dilakukan oleh para pendahulu masyarakat Manado menunjukkan, bahwa budaya demokrasi telah menjadi kebiasaan masyarakat Manado dalam menyelesaikan masalah baik masalah kesejahteraan sosial maupun permasalahan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat.

Anti diskriminasi juga merupakan kearifan lokal di Kota Manado yang merupakan nilai kesetiakawanan sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Manado tidak memperlakukan keberadaan mayoritas dan minoritas pemeluk agama. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berekspresi. Terlebih dalam hal gender berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas dan perannya sama dengan laki-laki (Maria Heny Pratiknjo, 2007). Setiap kelompok etnis yang memiliki perbedaan dalam budaya, masyarakat Manado tetap mengakui keberadaannya. Masalah mayoritas dan minoritas bagi masyarakat Manado tidak menjadi persoalan karena semua telah menjadi warga yang baik di Kota Manado. Kondisi ini diperjelas dengan pengakuan salah seorang pendeta di Kelurahan Mapang, “Masyarakat Manado selalu memberi kesempatan bagi semua baik masyarakat asli maupun pendatang kami selalu memberikan kesempatan warga pendatang untuk mendapatkan posisi dan peluang yang sama, sebagaimana pendahulu kami, bahwa Wali Kota Manado juga pernah di jabat oleh warga pendatang dan bukan beragama mayoritas yakni beragama Islam”. Pengakuan yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat Kota Manado (Sammy Agust Rain) “Kami informasikan pula di Kota Manado ini juga pernah di pimpin oleh Letkol Hi. Rauf Mo’o beliau berasal dari Gorontalo sebagai kaum pendatang yang mampu memimpin Kota Manado dengan baik dan juga Bapak Supeno, BA. Memimpin Manado pada saat Islam belum berkembang di Manado”.

Berdasar hasil wawancara tersebut menunjukkan, bahwa masyarakat Manado sangat terbuka dengan adanya pendatang yang membawa kebaikan. Masyarakat Manado sangat anti dengan diskriminasi, intinya bahwa keterbukaan akan melahirkan kebersamaan dalam perbedaan. Pengakuan kualitas hidup seseorang maupun kelompok bukan karena identitas promordial yang alami melekat, namun karena usaha dan kerja keras suatu kelompok.

Budaya silaturahmi merupakan wujud dari nilai kesetiakawanan sosial yang memiliki unsur tenggang rasa, bahwa dengan silaturahmi hubungan antar masyarakat menjadi lebih dekat dan akrab dalam menciptakan kerukunan hidup (A. Listyawati, 2018). Budaya yang telah dilakukan oleh nenek moyang masih menjadi kebiasaan yang baik masyarakat Manado. Silaturahmi dilakukan untuk mencegah (*preventif*) timbulnya masalah kesejahteraan sosial di masyarakat terutama konflik sosial. Masyarakat lebih peka atau tahu terkait kondisi di Kota Manado yang memungkinkan terjadinya konflik sosial antar agama. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi terjadinya masalah tersebut masyarakat yang dipelopori tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih memperkuat budaya silaturahmi. Ternyata dengan tetap melestarikan budaya silaturahmi yang erat dengan nilai kesetiakawanan sosial mampu mencegah timbulnya konflik sosial.

Strategi yang dilakukan dalam melestarikan nilai tersebut diwujudkan dengan melakukan kunjungan di antara warga. Kunjungan biasa dilakukan pada saat perayaan hari raya keagamaan. Misalkan Pada Hari Raya Idul Fitri para warga yang memeluk keyakinan non Islam ikut serta melakukan kunjungan dengan silaturahmi antar tetangga. Sebaliknya pada saat Hari Raya Natal mereka yang beragama non Kristen juga melakukan kunjungan yang sama dengan silaturahmi diantara tetangganya.

Tabel 5. Bentuk Silaturahmi Responden pada Hari Raya Keagamaan

No	Silaturahmi	f	%
1	Berkunjung dan mengirim bingkisan	15	50,00
2	Berkunjung	10	33,33
3	Mengirim bingkisan	5	16,67
Total		30	100

Data pada tabel 5 menunjukkan, bahwa masyarakat Manado masih melestarikan kebiasaan baik yang diwariskan para pendahulu yakni dengan menjunjung tinggi budaya silaturahmi. Kunjungan sebagai wujud silaturahmi dengan memberi ucapan selamat kepada semua tetangga yang sedang merayakan hari raya keagamaan. Cara silaturahmi ini memberikan gambaran adanya nilai kesetiakawanan sosial yang masih dilakukan dan dijaga oleh masyarakat. Pengakuan informan bahwa dirinya bersilaturahmi sambil mengirim bingkisan dilakukan oleh 15 orang, sedangkan mereka yang mengaku hanya berkunjung tanpa membawa bingkisan sebanyak 10 orang, dan yang mengirim bingkisan saja dilakukan oleh lima orang.

Kondisi tersebut membuktikan budaya silaturahmi yang menjadi nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado sebagai dasar dalam membina solidaritas di antara masyarakat. Nilai ini juga untuk selalu menjaga rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki keyakinan berbeda. Perbedaan dalam masyarakat Manado menjadi kekuatan dalam menjalin kebersamaan. Tradisi yang dialami tersebut sesuai dengan ungkapan tokoh kesetiakawanan sosial yang menyatakan, bahwa kesetiakawanan sosial suatu kondisi ikatan antara individu dan atau kelompok sosial yang termanifestasi sebagai tenggang rasa dan kepedulian serta tolong menolong, yang dilandasi pada kesadaran kolektif, kepercayaan, cita-cita, dan komitmen moral bersama (Nelam, 2002). Budaya silaturahmi menjalin kebersamaan masyarakat dalam menjalani kehidupan, sehingga dengan kebersamaan mewujudkan adanya saling keterikatan

di antara warga masyarakat. Kondisi keterikatan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tenggang rasa, sikap kepedulian, dan tindakan saling menolong.

D. Penutup

Kesimpulan. Nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado identik dengan nilai kearifan sosial yang ada sejak lama. Namun nilai tersebut dapat lestari karena dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah secara alami. Bahkan sekarang telah menjadi slogan masyarakat Manado yang terus menjadi jiwa dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Kesetiakawanan sosial masyarakat Manado merupakan budaya yang menekankan keharmonisan dalam tatanan sosial masyarakat. Menempatkan seseorang dan masyarakat dalam relasi yang seimbang, selaras dan serasi dalam bermasyarakat.

Nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado *Torang samua basudara* memberikan rasa persaudaraan untuk selalu menjalin hubungan secara harmonis terhadap semua warga yang ada di Manado. Memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam memelihara toleransi antar pemeluk agama dengan membentuk badan yang dapat melayani kebutuhan warga. BAMAG sebagai badan yang memberi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal religi. Menyelesaikan segala permasalahan berkaitan dengan keagamaan warga masyarakat Manado.

Mapalaus sebagai penanganan masalah kerjasama untuk membantu warga yang mengalami permasalahan sosial. Pelayanan yang diberikan dengan memberi pertolongan yang dilakukan secara gotong royong dalam meredakan beban warga masyarakat Manado. Semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya telah ada sejak lama, terwujud dalam sikap dan tindakan yang dilakukan atas dasar rasa kebersamaan. Nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado tercermin dalam kehidupan keseharian dengan

adanya rasa kepedulian di antara sesama warga dengan saling bergotongroyong merupakan jaminan sosial secara tradisional, arisan warga, kerukunan kematian.

Nilai *Sitou Timon Tumou Tou* (Manusia hidup memanusiakan orang lain), memberikan layanan sosial kepada warga masyarakat Kota Manado dengan saling menghormati. Kepedulian sosial yang dilandasi rasa cinta kasih sesama, sehingga kehidupan warga Manado selalu memberi hormat kepada orang lain dengan saling membantu di antara tetangga, menolong warga yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Masyarakat Manado memandang bahwa setiap orang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dialami warga juga merupakan masalah baginya.

Rekomendasi. Berdasar kesimpulan penelitian ini, maka agar nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado lebih optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan adanya pelestarian. Oleh karena itu untuk melestarikan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat Manado diajukan rekomendasi kepada.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk dapat memberi pembinaan kepada organisasi sosial yang peduli terhadap nilai budaya masyarakat. Memberikan bimbingan kepada para pilar tenaga kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahan di Kota Manado. Bimbingan kepada keluarga terkait dengan pelestarian nilai kesejahteraan sosial masyarakat Manado.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala B2P3KS Yogyakarta yang telah menugaskan peneliti. Kepala dan staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado atas pendampingan dalam penelitian. Perangkat Kelurahan Mapangat Barat, Karobasan Utara, Bumi Nyiur, Ranotana Weru telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tim Peneliti Indeks Ke-

setiakawanan Sosial atas kerjasamanya dalam pelaksanaan penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Abdullah AP. (2005). *Kerukunan Hidup Umat Beragama: Studi Kasus Di Kota Manado*. Jakarta
- A. Listyawati, (2018). *Indeks Kesetiakawanan Sosial*. B2P3KS PRESS Yogyakarta.
- Bagong Suyanto dan Sutinah, (2007). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Frangky Suleman. (2016). *Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado*. Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi E- ISSN : 2599-1078 UNDIP.

- Djakara, Salmin. (2003). *Niyaku Toudano Maulud Tumenggun Sis Dan Orang Jatun*. Manado: BKSNT dan Laboratorium Antropologi Fisip Unsrat.
- Maria Heny Pratiknjo, (2007). *Kedudukan Wanita Manado Dalam Masyarakat*. Manado: Pendidikan karakter dan pekerti bangsa.
- Masri Sangarimbun dan Sofian Effendi (1985). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Miles dan Huberman, (1992). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Nelam. (2002). *Penelitian tentang Pelestarian dan Aktualisasi Kesetiakawanan Sosial Menurut Visi dari Tokoh Umat Berbagai Agama*. Yogyakarta: B2P3KS
- Sunit Agus Tri Cahyono, (2012). *Menelisik Akar Konflik Sosial di Kota Makassar, Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: B2P3KS.

Pengaruh Besaran Anggaran Belanja Pemerintah dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

The Influence of the Amount of Government Expenses Budget to the Society Welfare Improvement

Ana Uluwiyah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS), Jl.Raya Jagakarsa No.70 Lenteng Agung, Jakarta Selatan, (021) 7873782-83, auluwiyah@bps.go.id, 0856-2657434.

diterima 08 November 2018, diperbaiki 22 November 2018, disetujui 11 Desember 2018

Abstract

Government expenses budgets from year to year always increase. Some budget allocations are realized in Subsidized Expenditures, Social Aid Expenditures, and Aid Expenditures. The amount of the budget is different every year, according to the government program being launched. However, based on several welfare indicators, an increase in government spending has not contributed significantly yet to the level of welfare from year to year. This research was aimed to analyze whether the amount of government spending was influenced by several society welfare indicators. It used only several welfare indicators, namely indicators of health, education, poverty, life environment and inflation. It was conducted by using a quantitative analysis approach, with simple linear regression analysis. Based on the results of the study, it was found out that only a few welfare indicator variables that had a significant relation to government assistance spending, namely the percentage of PLN/Electricity power users, the percentage of families having proper sanitation, the percentage of poverty, the percentage of % of under-5-years old babies who had received Polio immunization, and the percentage of % of under-5-years old babies who had received measles immunization. The variables of Inflation and Education indicators do not affect significantly to the amount of government assistance spending. It showed that the amount of government assistance expenses budget had not obviously impacted to human resources improvement program and to that of prices stability of basic needs. Therefore, the Government necessarily need to add the allocation of the amount of government assistance expenses budget to improve the educational capacity of the society and prices stability of basic needs through providing subsidize or direct aids.

Keywords: *assistance spending; welfare indicators; regression*

Abstrak

Anggaran belanja pemerintah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Beberapa alokasi anggaran direalisasikan pada Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan. Besaran anggaran belanja tersebut setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan program pemerintah yang sedang dicanangkan. Berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan, peningkatan anggaran belanja pemerintah belum memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan dari tahun ke tahun. Penelitian bertujuan untuk menganalisis besaran belanja pemerintah dipengaruhi oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat. Penelitian hanya menggunakan beberapa indikator kesejahteraan yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, lingkungan hidup dan inflasi. Metode penelitian dengan pendekatan analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hanya beberapa variabel indikator kesejahteraan yang memiliki hubungan yang kuat dengan belanja bantuan pemerintah yaitu persentase rumah tangga pengguna listrik PLN, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak, persentase penduduk miskin, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi polio, dan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak. Variabel indikator pendidikan dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap belanja bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa besaran anggaran belanja bantuan pemerintah belum memberikan dampak yang terlihat nyata pada program peningkatan sumber daya manusia dan kestabilan harga bahan pokok di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menambah alokasi belanja bantuan untuk peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat dan kestabilan harga bahan pokok melalui subsidi atau bantuan langsung.

Kata Kunci: *belanja bantuan; indikator kesejahteraan; regresi*

A. Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan pemerintah (Deswantoro, 2010). Beberapa program sosial telah dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan Indonesia seperti transmigrasi, beras murah, subsidi bahan bakar, dsb. Anggaran belanja bantuan pemerintah setiap tahun dialokasikan berdasarkan PMK No. 81/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L dan PMK No. 214/2013 tentang Bagan Akun Standar. Bantuan Sosial diartikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (PAPBN, 2018).

Besaran anggaran belanja tersebut setiap tahun berbeda, disesuaikan dengan program pemerintah yang sedang dicanangkan. Akan tetapi berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan, peningkatan besaran anggaran belanja pemerintah belum memberikan kontribusi secara signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun (Suradi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 2012).

Kebijakan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2012). Namun menurut (Paseki, Naukoko, & Wauran, 2014), Alokasi Dana Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu dilakukan penilaian yang lebih luas antara besaran belanja bantuan pemerintah dengan dampak yang dihasilkan, salah satunya adalah mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Fajar, 2018) indikator untuk mengukur indeks kesejahteraan dengan mengkomodir tingkat kebahagiaan masyarakat, sedangkan menurut (BPS, 2017) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu

wilayah. Komponen penyusun IPM terdiri atas Angka Harapan Hidup, Angka Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita. Indikator-indikator kualitas hidup yang mencakup komponen sumber daya alam, modal manusia, dan sosial merupakan indikator yang perlu digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan yang lebih luas daripada produksi ekonomi untuk memprediksi masa depan pada pembangunan berkelanjutan (Rustia, 2012).

Dalam penelitian ini indikator kesejahteraan dibatasi pada indikator pendidikan, kualitas lingkungan, inflasi, kesehatan, dan pendidikan. Indikator ini untuk mengukur capaian tujuan program peningkatan kesejahteraan pemerintah terhadap belanja bantuan pemerintah. Informasi terkait alokasi belanja bantuan terhadap dampak kesejahteraan masih sedikit diinformasikan kepada masyarakat. Padahal hal ini penting, mengingat masyarakat merupakan sumber dana anggaran belanja pemerintah yaitu melalui pembayaran pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh indikator kesejahteraan terhadap besaran belanja bantuan pemerintah. Penelitian ini memiliki batasan pada sumber data dan metode analisis, sehingga hanya beberapa komponen penyusun tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian, dan data belanja bantuan pemerintah secara nasional. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah tentang belanja bantuan pemerintah yang dialokasikan setiap tahun apakah dipengaruhi oleh target kinerja kesejahteraan yang dicapai pada tahun tertentu tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum terkait indikator penyusun kesejahteraan dan belanja bantuan pemerintah melalui visualisasi. Anali-

sis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan pengaruh tiap variabel tidak terikat/ variabel prediktor (r) yaitu indikator kesejahteraan terhadap variabel terikatnya/ variabel respon (Y) yaitu belanja bantuan pemerintah. Adapun model regresi berganda sebagai berikut.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip} = \varepsilon_i \dots \dots \dots (1)$$

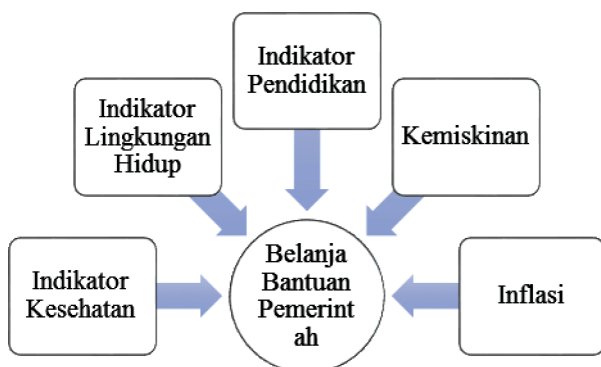
Y_i = nilai variabel terikat/dependen dalam pengamatan i

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_p$ = parameter yang tidak diketahui nilainya

X_{i1}, X_{i2}, X_{ip} = nilai variabel tidak terikat/ independen dalam pengamatan ke- i

ε_i = error random

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* tahun 2006 sampai 2017 yang diperoleh melalui website BPS. Jenis data yang digunakan adalah data kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, tingkat inflasi, dan keuangan pada level Nasional. Pengujian menggunakan *tools* Microsoft Excel 2016 dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas dihipotesiskan bahwa besarnya belanja bantuan dipengaruhi oleh capaian indikator kesejahteraan yang dirinci berdasarkan indikator kesehatan, indikator lingkungan hidup, indikator pendidikan, kemiskinan, dan inflasi.

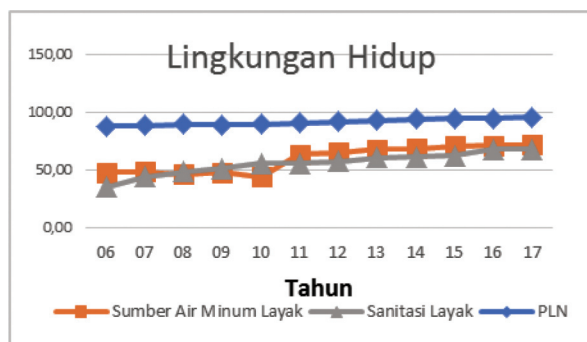
C. Hasil dan Pembahasan

Beberapa program pemerintah dengan sasaran masyarakat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan selalu dilakukan oleh beberapa generasi pemimpin negara Indonesia. Program tersebut diantaranya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Masyarakat Miskin, subsidi BBM, beasiswa, jaminan kesehatan, dan program lain. Metode penyampaian program tersebut biasanya bersifat langsung kepada masyarakat.

Untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dihasilkan dari program tersebut, perlu dilakukan pengukuran capaian kinerja program. Beberapa data indikator kesejahteraan telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator capaian kinerja program peningkatan kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa komponen penyusun indikator kesejahteraan. Komponen penyusun indikator kesejahteraan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut.

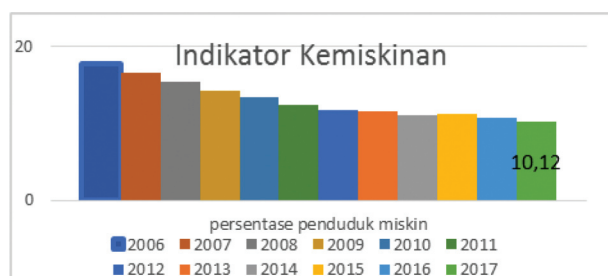
1. Indikator lingkungan hidup: Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik PLN, sumber air minum layak, sanitasi layak;
2. Indikator kesehatan memuat persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak;
3. Indikator pendidikan memuat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, PT/Universitas;
4. Tingkat kemiskinan;
5. Inflasi

Berdasarkan data yang dihimpun dari *website* BPS, bahwa indikator lingkungan hidup yang mencakup ketersediaan listrik PLN lebih tinggi dari ketersediaan fasilitas sumber air minum layak dan sanitasi layak. Akan tetapi, pergerakan kenaikan sumber air minum layak dan sanitasi layak meningkat tajam sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah peduli dan fokus terhadap lingkungan hidup yang sehat.



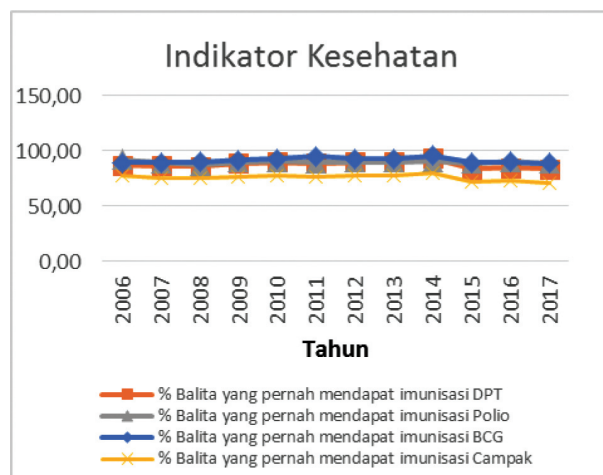
Gambar 2. Lingkungan Hidup Tahun 2006-2017
Sumber: www.bps.go.id

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki, dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2010). Angka kemiskinan merupakan indikator yang banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Suradi (2017), pembangunan manusia dan kemiskinan merupakan kondisi yang menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2006 sampai 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara teratur (gambar 3). Angka kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,12 persen menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2017 ada sebanyak 10,12 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan sasaran utama adalah masyarakat miskin



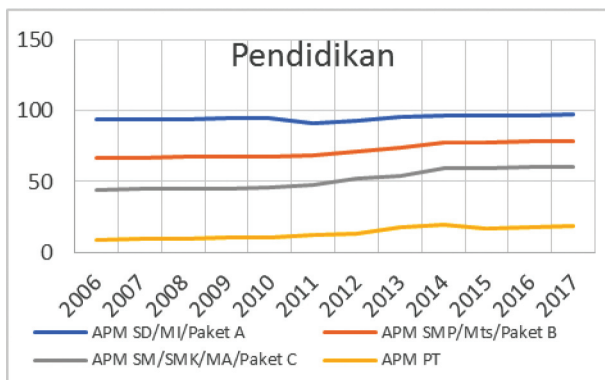
Gambar 3. Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2006-2017
Sumber : www.bps.go.id

Indikator kesehatan dalam penelitian ini diukur dari persentase anak balita yang pernah mendapat imunisasi. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberian imunisasi gratis melalui puskesmas. Berdasarkan gambar 4, persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi DPT, Polio dan BCG relatif stabil, namun mulai tahun 2015 hingga 2017 menurun. Penurunan ini disebabkan oleh sejak tahun 2015 hingga 2020 pemerintah memiliki program untuk menggalakkan imunisasi Measles-Rubella (MR) (P. Paramita, 2018)



Gambar 4. Indikator Kesehatan tahun 2006-2017

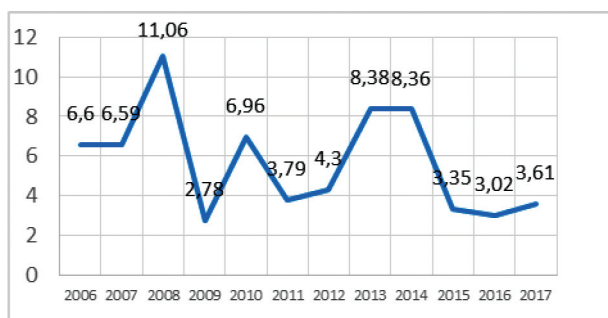
Indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Jika APM sama dengan 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu (Statistik, 2018). APM untuk tingkat SD lebih tinggi apabila dibandingkan dengan APM Perguruan Tinggi atau SMA dan SMP. Akan tetapi kenaikan APM SMA dan perguruan tinggi lebih tajam sejak tahun 2014. Hal ini disebabkan pemerintah menambah kuota program beasiswa yang ditawarkan seperti program Bidikmisi. Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Kemenristekdikti) jumlah penerima Bidikmisi tahun 2014 199.408 mahasiswa, menjadi 339.348 tahun 2017.



Gambar 5. APM Tahun 2006-2017
Sumber : www.bps.go.id

Inflasi dalam penelitian ini merupakan salah satu komponen ukuran kesejahteraan. Karena inflasi mempengaruhi perubahan harga barang pokok ditingkat masyarakat, sehingga inflasi sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Suseno & Astiyah, 2009). Berdasarkan gambar 6, tingkat inflasi sangat fluktuatif.

Perubahan tingkat inflasi yang fluktuatif ini disebabkan oleh beberapa faktor. Utamanya adalah kenaikan harga sembilan bahan pokok seperti beras, cabai, telur, dll. Ketersediaan bahan pokok tersebut umumnya berasal dari import yang dibeli dengan mata uang asing, sedangkan kurs mata uang rupiah setiap waktu berubah fluktuatif (Yanti, 2016). Hal inilah yang mengakibatkan fluktuatifnya inflasi di Indonesia.



Gambar 6. Inflasi tahun 2006-2017.
Sumber : www.bps.go.id

Anggaran belanja pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) unsur yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan

daerah. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan, dan pengeluaran tidak terduga. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja modal.

Berdasarkan data yang dikutip dari *website* BPS (www.bps.go.id), belanja bantuan memiliki kenaikan yang sangat tajam di tahun 2016 dan tahun 2017. Beberapa realisasi belanja lain memiliki nilai yang hampir sama dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 7. Akan tetapi belanja bantuan sejak tahun 2015 meningkat tajam.

Sejak tahun 2015, pemerintah mulai banyak membuat kebijakan terkait program sosial untuk pengentasan kemiskinan. Dorongan utamanya adalah adanya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diberlakukan secara internasional sejak tahun 2015. Beberapa program tersebut diantaranya seperti Beras Miskin (Raskin) dan Program *bantuan* tunai utama (PKH) (Bappenas, Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia - Unicef, 2017)



Gambar 7. Pergerakan Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Tahun 2006 s.d 2017
Sumber: www.bps.go.id

Pembiayaan program kesejahteraan masyarakat bersumber pada beberapa anggaran belanja pemerintah. Menurut (Kusreni & Suhab, 2009), program peningkatan kesejahteraan rakyat dilaksanakan berdasarkan anggaran belanja subsidi, belanja bantuan, dan belanja ban-

tuan sosial, yang bersumber dari pajak. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 101 Tahun 2011, belanja bantuan, belanja subsidi, dan belanja bantuan merupakan belanja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum (Keuangan, 2011). Hal ini menjadi dasar bagi penelitian ini, analisis hanya menggunakan ketiga realisasi belanja tersebut.

Berdasarkan data belanja pemerintah, belanja bantuan sejak tahun 2015 bergerak meningkat. Puncaknya tahun 2016 hingga saat ini mengalami peningkatan yang tajam. Belanja bantuan merupakan belanja yang langsung disalurkan kepada penerima program khususnya program peningkatan kesejahteraan /kegiatan sosial kepada masyarakat. Hal ini seharusnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui indikator kesejahteraan. Dampak realisasi belanja bantuan sulit untuk diukur, apakah belanja mampu meningkatkan indikator pendidikan, kesehatan, atau stabilisasi perekonomian. Untuk itu, penelitian ini menganalisis sasaran belanja pemerintah pada periode waktu

tertentu dengan tujuan peningkatan kesejahteraan pada unsur komponen tertentu.

Analisis kuantitatif yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan tujuan untuk melihat hubungan/pengaruh antara variabel belanja pemerintah dengan komponen indikator kesejahteraan. Analisis regresi berganda dipilih karena metode analisis ini merupakan metode yang paling mudah dan paling sesuai menggambarkan pengaruh suatu variabel terikat dan tidak terikat. Berdasarkan pengujian dengan regresi diperoleh hasil bahwa Belanja Bantuan sangat berhubungan dengan indikator kesehatan persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio dan campak, dan berhubungan dengan persentase Penduduk Miskin. Belanja bantuan sosial berhubungan dengan persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak dan persentase penduduk miskin. Belanja subsidi sangat berhubungan dengan persentase penduduk dengan akses sanitasi layak, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi polio dan persentase penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1,2 dan 3.

Tabel 1. Hasil Pengujian Belanja Bantuan dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	18172314076	0,07
2.	Sumber Air Minum Layak	-1814864377	0,24
3.	Sanitasi Layak	-892203206,5	0,60
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	-3556787421	0,46
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	13770915531	0,06
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	8427799367	0,04
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	-21428488560	0,00
8.	APM SD/MI/Paket A	961867734	0,95
9.	APM SMP/Mts/Paket B	9709204406	0,81
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	1556915227	0,95
11.	APM PT	-9358787376	0,12
12.	Persentas Penduduk Miskin	-7692958337	0,02
13.	Inflasi	-5518619600	0,11

Tabel 2. Hasil Pengujian Belanja Sosial dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	-1017817742	0,06
2.	Sumber Air Minum Layak	-81729459,07	0,33
3.	Sanitasi Layak	162770605,6	0,10
	Indikator Kesehatan	181201046,3	0,82
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	-1306261237	0,24
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	-1207255031	0,08
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	1732459185	0,03
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	6908310,27	0,99
8.	APM SD/MI/Paket A	570566884	0,83
9.	APM SMP/Mts/Paket B	-854100046	0,63
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	176956984	0,63
11.	APM PT	791321967	0,003
12.	Persentase Penduduk Miskin	366375195	0,22
13.	Inflasi		

Tabel 3. Hasil Pengujian Belanja Subsidi dengan Indikator Kesejahteraan

No.	Variabel	Coefficient	P-Value
1.	PLN	-86301358	0,14
2.	Sumber Air Minum Layak	-953637,94	0,91
3.	Sanitasi Layak	34884568,2	0,00
4.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	19571397,5	0,65
5.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	59350738	0,32
6.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	-86854483,7	0,03
7.	% Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	-56232118,3	0,16
8.	APM SD/MI/Paket A	122450110	0,43
9.	APM SMP/Mts/Paket B	-359175662	0,38
10.	APM SM/SMK/MA/Paket C	208970955	0,42
11.	APM PT	54915803,4	0,32
12.	Persentas Penduduk Miskin	-38338066	0,06
13.	Inflasi	-994424	0,96

Berdasarkan hasil uji regresi antara belanja pemerintah dengan beberapa indikator kesejahteraan diatas, didapatkan nilai P-Value yang berbeda untuk setiap variabel. P-Value adalah salah satu ukuran peluang pengambilan keputusan. P-Value kurang dari 0,005 diartikan signifikan memberikan pengaruh kepada variabel terikatnya. Untuk melihat pengaruhnya negatif atau positif dapat dilihat pada nilai *coefficient*. Ukuran untuk mengukur sebesar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya, dapat dilihat nilai R-Square.

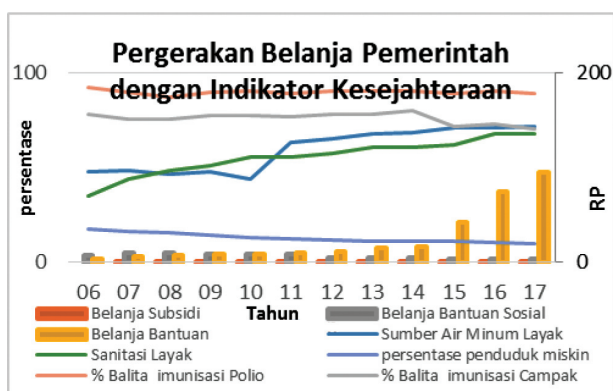
Berdasarkan tabel 2 dan 3 dapat dianalisis bahwa tidak semua indikator memiliki hubungan yang signifikan dengan alokasi belanja pe-

merintah. Hanya beberapa indikator saja yang memiliki hubungan yaitu pengguna listrik PLN, sanitasi layak, persentase penduduk miskin, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Polio, dan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi Campak.

Hal ini menunjukkan bahwa besaran belanja pemerintah memberikan dampak pada peningkatan kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan, tidak berpengaruh dengan indikator pendidikan. Indikator pendidikan tidak terpengaruh oleh belanja bantuan pemerintah, padahal pemerintah telah memiliki program beasiswa nasional sejak tahun 2014 seperti LPDP dan Bidikmisi. Hal ini, dapat menjadi perhatian pemerintah, untuk meningkatkan SDM Indonesia, pemerin-

tah harus lebih banyak mengalokasikan anggaran belanja untuk program pendidikan.

Berikut ini adalah gambaran antara indikator yang terpengaruh dengan tingkat belanja bantuan pemerintah. Ternyata peningkatan belanja bantuan pemerintah meningkat signifikan di tahun 2015, tetapi indikator terpengaruh tidak bergerak meningkat atau menurun signifikan juga. Hal ini menjadi kelemahan penelitian ini, perlu dilakukan pengujian kembali dengan data indikator dan metode yang lain.



Gambar 8. Pergerakan Belanja Pemerintah dan Indikator kesejahteraan yang berhubungan tahun 2006-2017

Model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \varepsilon$$

$$Y_1 = \alpha \beta X_{11} + \beta X_{22} - \beta X_{31} + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Y_1 = Belanja Bantuan

X_{11} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio

X_{21} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak

X_{31} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 2 adalah 0,9005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1, X_2 , dan X_3 mampu mempengaruhi sebesar 90 %, 10 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

$$Y_2 = \alpha \beta X_{12} - \beta X_{22} + \varepsilon \dots\dots\dots(3)$$

Y_1 = Belanja Bantuan Sosial

X_{12} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak

X_{22} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 3 adalah 0,6005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1 dan X_2 mampu mempengaruhi sebesar 60 %, 40 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

$$Y_1 = \alpha \beta X_{11} + \beta X_{21} - \beta X_{31} + \varepsilon \dots\dots\dots(4)$$

Y_1 = Belanja Subsidi

X_{11} = % Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio

X_{21} = % penduduk memiliki akses sanitasi layak

X_{31} = % Penduduk Miskin

Nilai R-Square persamaan 4 adalah 0,7476. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X_1, X_2 , dan X_3 mampu mempengaruhi sebesar 75 %, 25 % sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Berdasarkan permodelan diatas, dapat uraikan bahwa persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio, campak berpengaruh positif pada besaran bantuan, sedangkan persentase penduduk miskin berpengaruh negatif terhadap peningkatan belanja bantuan. Persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak berpengaruh positif pada belanja bantuan sosial. Belanja subsidi dapat dipengaruhi oleh besaran persentase balita yang mendapatkan imunisasi polio, sanitasi layak dan penduduk miskin. Program imunisasi polio gratis yang dibiayai oleh belanja subsidi. Kedepannya pemerintah harus lebih banyak menciptakan kegiatan subsidi imunisasi dan pembuatan fasilitas sanitasi.

D. Penutup

Kesimpulan: Kesimpulan yang dapat diambil adalah persentase penduduk memiliki akses sanitasi layak, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi campak dan polio, dan persentase penduduk miskin mempengaruhi

besarnya belanja bantuan pemerintah. Angka Partisipasi Murni tidak mempengaruhi besarnya belanja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja bantuan pemerintah masih dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada unsur kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Kesejahteraan pada unsur pendidikan belum menjadi perhatian yang kuat bagi pemerintah.

Rekomendasi: Pemerintah harus memperhatikan tingkat pendidikan masyarakat, dengan menambah alokasi belanja bantuan untuk peningkatan kapasitas pendidikan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim pengajar Karya Tulis Ilmiah, Pusdiklat BPS, dan beberapa rekan pegawai BPS.

Pustaka Acuan

- Bappenas. (2010). *Evaluasi Pelayanan KB Bagi Masyarakat Miskin*. Bappenas.
- Bappenas. (2017). *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia - Unicef*. Bappenas.
- BPS. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016*. Jambi: BPS Tanjung Jabung Timur. Diambil kembali dari BPS.
- Deswanto, D. B. (2010). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi kalimantan Barat Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 187-210.
- Fajar, M. (2018, Desember). *Indikator Sederhana Untuk Mengukur Kesejahteraan*. Diambil kembali dari Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/325071006_Indikator_Sederhana_Untuk_Mengukur_Kesejahteraan
- Keuangan, K. (2011). *Klasifikasi Jenis Belanja*. Jakarta: www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Kusreni, S., & Suhab, S. (2009). Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*.
- P.Paramita, R. (2018, 12). *Cakupan imunisasi campak cenderung turun*. Diambil kembali dari Beritagar: <https://beritagar.id/artikel/berita/cakupan-imunisasi-campak-cenderung-turun>
- PAPBN, D. (2018, 11). *Departemen Keuangan*. Diambil kembali dari Anggaran Departemen Keuangan: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=977>
- Paseki, M., Naukoko, A., & Wauran, P. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 14*, 30.
- Rustia, H. N. (2012). Mengukur Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 225-232.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan perKapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi dan Manajemen Vol.2 ISSN: 0854-1442*.
- Statistik, B. P. (2018, 11). *Sirusa*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=9>
- Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Vol.12 No.03*, 1-11.
- Suradi. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Informasi Vol.17 No.03*.
- Suseno, & Astiyah, S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Yanti, M. N. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 21*, 186.

Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Empowerment of Women with Social-Economical Vulnerability Through Family Welfare Improvement

Akhmad Purnama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.

Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta.

HP 085643600923. Email: akhmadpurnama19@gmail.com.

diterima 03 Oktober 2018, diperbaiki 28 November 2018, disetujui 06 Desember 2018

Abstract

This research aims to comprehend the empowerment of women with social-economical vulnerability in the effort of improving the family welfare. It was carried out in Triwidadi Village, Kecamatan Pajangan, Bantul Regency. The empowerment is conducted by (1) Forming social groups of productive economical enterprises as a cooperation forum or network that is accessible for developing initiatives. (2) Providing motivational guidance, social guidance, and enhancing skills, included providing entrepreneurship guidance and innovation. The research uses a qualitative approach. Data is collected by using in depth-interview. The informants are 10 Social-Economic Vulnerable Women and Triwidadi Village Head. The result showed that social-economical vulnerable women as the objects of the research are all widows, about 50 years of age and most of them did not pass their Elementary School. Their income is less than five hundred thousands rupiah, and most of their expenditure is proportional to their income. They functioned as the head of the family with 3 to 5 dependents mostly. After gaining the empowerment through some guidance (motivational guidance, social guidance, entrepreneurship skills and innovation guidance), it appeared that there were some behavioral changes, an increase of family welfare, and some improvement of understanding on knowledge and skills guidance. The activity of social groups of productive economical enterprises was able to prevent poverty (social-economical vulnerability). It is recommended to local government authorities to provide more intensive assistance and guidance to social-economical vulnerable women so that they will contribute more in improving the economy and will socialize with their environment.

Keywords: *empowerment; socio-economic vulnerable women; welfare*

Abstrak

Penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi dilakukan di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan (1) Membentuk kelompok sosial usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang jejaring/kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan prakarsa/ inisiatif. (2) Memberi bimbingan motivasi, sosial, keterampilan termasuk bimbingan kewirausahaan dan inovasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara secara mendalam (*in depth-interview*). Informan meliputi perempuan rawan sosial ekonomi berjumlah 10 orang dan Kepala Desa Triwidadi. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan rawan sosial ekonomi sebagai informan penelitian berstatus janda, berumur sekitar 50 tahun, dan umumnya tidak tamat SD. Penghasilan kurang dari Rp.500.000,-, sebagian besar pengeluaran sebanding dengan pemasukan, sebagai kepala keluarga dengan tanggungan antara tiga hingga lima orang. Setelah mendapatkan pemberdayaan melalui bimbingan motivasi, sosial, keterampilan kewirausahaan dan inovasi menunjukkan ada perubahan perilaku, ada peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan pemahaman tentang bimbingan pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan kelompok sosial usaha ekonomi produktif yang dilakukan dapat mencegah terjadinya kemiskinan (rawan sosial ekonomi). Rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar memberikan pendampingan lebih intensif kepada perempuan rawan sosial ekonomi agar dapat lebih berdaya dalam mengembangkan ekonomi dan bersosialisasi dengan lingkungan.

Kata kunci: *pemberdayaan; perempuan rawan sosial ekonomi; kesejahteraan*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Chambers mengatakan *The realities of poor people are local, complex, diverse and dynamic. Income-poverty, though important, is only one aspect of deprivation. Participatory appraisal confirms many dimensions and criteria of disadvantage, ill-being and well-being as people experience them. In addition to poverty, these include social inferiority, isolation, physical weakness, vulnerability, seasonal deprivation, powerlessness and humiliation* (1995). Kemiskinan merupakan masalah mendasar karena menyangkut kehidupan dan penghidupan penduduk. Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan, terisolir, minimnya akses (pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sarana dan prasarana lingkungan, tempat tinggal), dan kerentanan. Penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017, pada September 2017 berjumlah 26,58 juta orang (10,12 persen) berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Selama periode Maret-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan turun sebanyak 40,28 ribu orang dari 10,67 juta Maret 2017 menjadi 10,27 juta orang pada September 2017. (BPS, 2017).

Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Dikarenakan oleh berbagai peran perempuan miskin yang diambil dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011), meliputi: pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; dan keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis (Basuki & Prasetyo, 2007). Terdapat tiga alasan penting kenapa perempuan wajib diber-

dayakan dalam konteks pengentasan kemiskinan, yaitu: (1) perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pembangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan yang mempunyai hak sama dengan laki-laki; (2) perempuan memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak, yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada; dan (3) pemberdayaan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu (Ratnawati, 2011).

Faktor dari dalam yang mempengaruhi perempuan miskin dalam pemanfaatan sumber daya lokal yaitu pendidikan rendah (77 % SD dan tidak tamat SD), tidak punya keterampilan selain bertani dan mereka belum terjangkau oleh program pengentasan kemiskinan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan (Kwik Kian Gie, 2001).

Kemampuan perempuan untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga, yaitu sebagai ibu rumah tangga/tulang punggung keluarga dalam pencari nafkah (tuntutan kebutuhan ekonomi) keluarga menjadi nyata bagi kaum perempuan yang hidup, tumbuh dan berkembang pada kalangan masyarakat modern. Kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (single tanpa kepemilikan kemampuan untuk memainkan peran ganda terlebih bagi kalangan kaum perempuan sebagai kepala keluarga atau orang tua tunggal (*single parent*) atau janda akan mengalami hambatan dan

memenuhi berbagai bentuk kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi apabila tidak mendapat pemberdayaan (Endro Winarno 2012). Permasalahan kemampuan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi perlu untuk mendapatkan peningkatan kapasitas. Perempuan miskin untuk mendapatkan Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi harus memenuhi syarat-syarat. Peserta Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yakni perempuan dewasa berusia 18-59 tahun, belum menikah atau sudah menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Keputusan Menteri Sosial Nomor. 24/HUK/1996) selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Sosial RI No 186 Th 2011 tentang Rencana Strategi Kementerian Sosial RI, disebut dengan istilah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Rendahnya kualitas sumberdaya perempuan khususnya pada perempuan rawan sosial ekonomi sebagai faktor determinan dari rendahnya tingkat kesejahteraan sosial keluarga, dan merupakan salah satu dampak dari marginalisasi perempuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya kemampuan dalam memahami, menganalisis dan memanfaatkan setiap bentuk peluang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Sispa Rini, dkk., (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui program pengembangan sumberdaya manusia yaitu pemberian pelatihan keterampilan. Program pengembangan kelembagaan kelompok yaitu motivasi berkelompok, administrasi dan mekanisme kelompok. Program pemupukan modal swadaya yaitu program Askesos dan bantuan pinjaman modal. Program pengembangan usaha yaitu kegiatan bazar. Program penyediaan informasi tepat guna yaitu kegiatan sosialisasi serta pengajian. Setelah dilakukan pemberdayaan terhadap perempuan rawan sosial ekonomi di kelompok Rumpun An-nisa Kota Bengkulu secara ekonomi dapat memban-

tu mendapatkan akses modal dengan mudah, akan tetapi tidak mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan dan kerap terjadi alih fungsi dalam penggunaan uang pinjaman. Untuk mengatasi permasalahan, hendaknya Yayasan 'Aisyiyah' meningkatkan jumlah pinjaman yang diberikan, mengadakan program bantuan pendidikan bagi anak-anak dan mengadakan program kelompok usaha ekonomi produktif. Secara sosial terjadi peningkatan, hal tersebut terlihat dari perubahan sikap dan perilaku anggota kelompok Rumpun An-Nisa yang lebih sabar dalam mendidik anak, lebih berpikir jernih dalam menyikapi suatu permasalahan.

PRSE membutuhkan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan PRSE sudah dilakukan melalui beberapa program baik oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu pemberdayaan PRSE dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial pada tahun 2015. Pemberdayaan bagi PRSE salah satunya dilakukan di Desa Triwidadi. Bagaimanakah pengaruh pemberdayaan yang dilakukan oleh B2P3KS dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi perempuan rawan ekonomi di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, itulah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian adalah apakah pemberdayaan PRSE sudah dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemberdayaan PRSE dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Manfaat penelitian sebagai kontribusi bagi pemerintah (Kementerian Sosial RI) dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin khususnya. Manfaat lain sebagai khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang penanganan PRSE. Meningkatnya ketahanan sosial ekonomi dalam menangkal dampak negatif arus informasi dan mencegah serta menanggulangi terjadinya masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi secara mandiri, sehingga yang bersangkutan

mampu melaksanakan fungsi pencegahan, timbulnya kemiskinan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian pemberdayaan PRSE menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami objek, tidak menemukan hukum-hukum dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat ekstrapolasi artinya perluasan data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia (Asmadi Alsa, 2007). Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu salah satu daerah yang menjadi lokasi pemberdayaan oleh B2P3KS bagi perempuan rawan sosial ekonomi. Hasil pengamatan dan wawancara dengan informan kunci diperoleh informasi bahwa Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi penelitian karena 1) Terdapat perempuan rawan sosial ekonomi berjumlah 65 orang. 2) Sebagai desa untuk pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi. 3) Para perempuan rawan sosial ekonomi aktif berorganisasi dan memiliki pekerjaan sampingan. Penggalan data terkait dengan pemberdayaan ditentukan secara *purposive*, yaitu Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang melakukan peningkatan kebutuhan dengan bekerja dan kegiatan kemasyarakatan. Pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power* dan otoritas atas situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mereka mampu mengarahkan kemana peneliti melakukan pengumpulan data lebih lanjut. Subjek penelitian sebagai sumber data dipakai untuk mengungkap data dan informasi tentang kegiatan perempuan rawan sosial ekonomi. Subjek penelitian adalah perempuan rawan sosial ekonomi berjumlah 10 orang yang bekerja dan melakukan kegiatan kemasyarakatan. Peneliti berusaha untuk mempelajari dan menggambarkan bagaimana para perempuan rawan sosial ekonomi memanfaatkan waktu untuk kegiatan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peneliti juga mende-

kripsikan berbagai karya yang dihasilkan oleh perempuan rawan sosial ekonomi. Pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.

Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara, yang dilakukan secara mendalam (*in depth-interview*) dengan maksud agar jawaban yang diperoleh lebih mendalam dalam arti informan memahami dan mampu menjelaskan perihal objek kajian. Informan meliputi perempuan rawan sosial ekonomi dan kepala desa. Data digali melalui wawancara dengan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada sumber data. Ada dua bentuk wawancara, yaitu berstruktur atau menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan dan disusun permasalahan yang akan diteliti berkisar tentang bagaimana memahami bimbingan inovasi, bimbingan sosial dan keterampilan. Tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang berkembang di luar konteks pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan tapi masih terkait persoalan atau hal-hal yang diteliti sesuai jawaban dan kondisi pada saat wawancara dilakukan (Nasution, 2007). Observasi, dilakukan dengan cara mengamati atau melihat secara langsung bagaimana perempuan rawan sosial ekonomi menjalankan pekerjaannya. Pengumpulan dokumen, digunakan sebagai upaya untuk mengumpulkan data pendukung dari berbagai dokumen yang dicatat atau dilaporkan oleh pihak yang berwenang. Antara lain berupa dokumen terkait kondisi geografi dan demografi yang terangkum dalam dokumen “Bantul dalam Angka”, serta monografi kecamatan dan desa lokasi kajian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial. (Irawan, 1995). Berdasarkan hal ini, data yang dikumpulkan dalam rangka pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi melihat (bersumber) profil, catatan-catatan dan grafik dari atau monografi desa.

Analisa data menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisa data melalui langkah-lang-

kah pengumpulan data, reduksi data, mengklasifikasikan, dan menarik kesimpulan (Moleong, 2007). Analisis data dilakukan terhadap pekerjaan dan kegiatan dalam berorganisasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga PRSE.

C. Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah perempuan dewasa berusia 18 - 59 tahun, belum menikah, perempuan yang sudah menikah dan atau janda tidak memiliki penghasilan keluarga, atau memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari; bertempat tinggal di lokasi pemberdayaan; bersedia mengikuti program pemberdayaan melalui kelompok usaha ekonomi produktif, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa/kelurahan setempat. Pengertian PRSE awalnya dikenal dengan istilah Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah wanita berusia 18 – 59 tahun yang tinggal dalam rumah tangga miskin, sehingga termasuk dalam kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Kondisi dikatakan rawan sosial ekonomi karena tinggal dalam rumah tangga miskin dan sangat rawan terhadap masalah sosial dan ekonomi. Istilah WRSE mengalami perkembangan definisi sesuai kondisi perubahan jaman. WRSE sebelumnya didefinisikan sebagai seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/1996).

Konsep pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan), ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 2005). Selanjutnya, pemberdayaan menurut (Suhendra, 2006) adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis

secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Pemberdayaan menurut Jim Ife (dari buku Suhendra, 2006) adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*). Lebih lanjut menurut (Moh. Ali Aziz dkk, 2005) pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi merupakan pemberian kemampuan kepada PRSE agar dapat lebih berdaya melalui keterlibatan potensi yang ada diluar dirinya, dengan peningkatan pemahaman dan implementasi bimbingan inovasi.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2006 : 4). Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (BKKBN, 1994:5).

1. Kondisi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Pemberdayaan PRSE dilakukan di Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dimaksudkan a) Memberi kemampuan sasaran pemberdayaan dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan setiap bentuk peluang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. b) Meningkatkan kemampuan, fungsi, dan peran sosial perempuan rawan sosial ekonomi dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan

kesejahteraan sosial melalui peningkatan pengetahuan. c) Menumbuhkan kemandirian dalam mendayagunakan potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi secara optimal. Tujuan pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi adalah: Meningkatkan peran dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, terutama kemampuan dalam mengatasi permasalahan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, baik fisik, psikis maupun sosial; Meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peran sebagai isteri atau sebagai kepala keluarga dan atau sebagai anggota masyarakat, sehingga fungsi sosialnya berjalan secara maksimal; Meningkatkan ketahanan sosial ekonomi dalam menangkal dampak negatif arus informasi dan mencegah serta menanggulangi terjadinya masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi secara mandiri, sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan fungsi pencegahan, timbulnya kemiskinan.

Menurut Kelompok Usia. Hasil wawancara terhadap informan berdasarkan kelompok usia yang berjumlah 10 orang dapat dikategorikan sebagai berikut. Informan penelitian ini dalam kategori usia 29 tahun sampai dengan 59 tahun. Usia informan yang menjadi sasaran penelitian sudah menunjukkan sebagai kriteria peserta sebagai mana tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi menurut usia di Desa Triwidadi sudah memenuhi syarat yaitu pada usia 18 sampai 59 tahun. Pemberdayaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta. Umur peserta yang masih dalam kategori usia produktif diharapkan cepat mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Informan yang masuk dalam usia lanjut diharapkan dapat mandiri dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kondisi umur yang masih produktif memungkinkan peran mereka dalam mewujudkan keluarga sejahtera dapat tercapai. Hal ini sesuai yang dikatakan informan Y “saya masih dalam usia produktif akan lebih mudah dalam merubah keluarga untuk menjadi lebih sejahtera dengan ikut dalam pemberdayaan ini”.

Menurut Tingkat Pendidikan. Informan menurut pendidikan di Desa Triwidadi memiliki tingkat pendidikan yang beragam yakni SD ada lima orang, dua orang tidak tamat SD, tiga orang tamat SMP. Informan memiliki pendidikan yang tidak tinggi membuat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki perlu untuk dikembangkan dan dimaksimalkan. Pendidikan yang rendah ini membuat mereka belum mampu meningkatkan penghasilan keluarga dengan baik dan maju. Mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan satu pekerjaan yang dimiliki dan sudah terima apa yang didapatkannya. Setelah mendapatkan pemberdayaan informan sudah banyak berubah tentang pola pikir dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ikut berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

Menurut Penghasilan Pokok. Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa penghasilan pokok peserta pemberdayaan PRSE Desa Triwidadi jumlahnya masih minim kurang dari Rp. 500.000,- yaitu ada delapan orang dan yang memiliki penghasilan di atas limaratus ribu sampai satu juta ada dua orang. Penghasilan yang minim berakibat penghidupan keluarga menjadi *pas-pasan*. Penghasilan yang didapat hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Namun begitu mereka sudah merasa beruntung karena sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga, karena hanya mereka sendiri yang menjadi tulang punggung keluarga.

Menurut Penghasilan Sambilan. Hasil wawancara dengan informan (peserta) bahwa penghasilan mereka dalam batas yang minim. Delapan orang informan mempunyai penghasilan sambilan Rp. 50.000,- sampai Rp. 150.000,- per bulan, satu orang memiliki penghasilan tambahan Rp. 151.000,- hingga Rp. 250.000 dan satu orang informan memiliki penghasilan tambahan Rp. 251.000 hingga Rp. 350.000,-. Kondisi ini mengakibatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga masih kurang. Hasil dari pekerjaan sambilan yang diperoleh tidak menentu setiap hari. Kalau dirata-rata penghasilan sambilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan makan.

Menurut Pengeluaran, hasil wawancara dengan informan, bahwa mereka memiliki pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan. Penerimaan yang diperoleh bahkan kurang sebanding dengan pengeluaran yang mereka miliki yaitu antara Rp. 500.000,- sampai Rp.1.000.000,- dari ke sepuluh informan.

Jumlah Tanggungan Keluarga. Jumlah tanggungan keluarga peserta pemberdayaan berbeda-beda. Informan yang memiliki tanggungan satu ada dua orang. Informan yang memiliki tanggungan dua sampai tiga ada empat hingga enam orang dan tanggungan enam ada dua orang.

2. Hasil Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Pemberdayaan yang diberikan kepada PRSE melalui kegiatan kelompok. Adanya kelompok akan membuat mereka dapat lebih bersosialisasi dan bekerjasama antar anggota. Kelompok melakukan kegiatan dalam bentuk peningkatan ekonomi. Informan dalam melakukan kegiatan terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok Lestari: (1) sudah membuat rencana kerja untuk melaksanakan praktek bimbingan keterampilan membuat onde-onde, stik dan peyek; (2) Hasil usaha dinikmati sendiri dan keluarga; (3) Pendapatan kelompok sebesar Rp. 250.000,-; (4) Buku administrasi kelompok seperti buku keuangan dan buku catatan kegiatan sudah ada; (5) Pertemuan kelompok diadakan secara insidental dan anggota belum kompak melakukan usaha, mereka cenderung bekerja/usaha secara pribadi. Kelompok Sumber Mulyo: (1) belum membuat rencana kerja; (2) sementara baru memenuhi pesanan 80 kue kukus dan brownis ungu tiap Selasa Kliwon; (3) produk keterampilan kelompok yang sudah laku dijual adalah kue kukus dengan harga Rp. 18.000,-; (4) buku administrasi kelompok belum dibuat; (5) pertemuan kelompok dilakukan satu kali dalam sebulan yaitu tiap hari Kamis Kliwon, tetapi anggota belum kompak; (6) sebagian anggota kelompok

melaksanakan usaha ekonomi produktif secara pribadi. Kelompok Barokah: (1) Kelompok belum ada rencana kerja, kegiatan masih dilaksanakan secara pribadi yaitu membuat onde-onde dan keripik talas; (2) Keterampilan telah dipelajari; (3) Buku administrasi kelompok sudah dibuat; (4) Pertemuan kelompok dilaksanakan setiap hari Jum'at Wage.

Sebelum pemberdayaan, sebagian besar peserta pemberdayaan (60%) tidak paham tentang inovasi. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (76,7%) paham tentang inovasi. Artinya ada peningkatan pemahaman sehingga dimungkinkan melakukan usaha. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (53,3%) peserta tidak paham tentang pentingnya potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai pendukung usaha ekonomi produktif. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (83,3%) paham pentingnya inovasi. Artinya ada peningkatan pemahaman. Kesimpulannya bahwa bimbingan inovasi sangat bermanfaat bagi perempuan rawan sosial ekonomi dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (46,7%) peserta tidak paham tentang pengenalan kondisi kehidupan masyarakat. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (70%) paham. Artinya ada peningkatan pemahaman tentang pengenalan kondisi kehidupan masyarakat.

Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (50%) peserta tidak paham tentang penciptaan usaha ekonomi produktif sebagai sumber inovasi kegiatan. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (80%) paham tentang penciptaan usaha ekonomi produktif. Kesimpulan bahwa bimbingan inovasi dapat menumbuhkan penciptaan usaha sosial ekonomi produktif. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (56,7%) peserta tidak paham tentang sarana dan prasarana sebagai sumber inovasi. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (66,7%) paham. Artinya ada peningkatan pemahaman tentang sarana dan prasarana sebagai sumber inovasi. Kesimpulan bahwa bimbingan inovasi dapat meningkatkan pemahaman kepada perempuan rawan sosial ekonomi

agar memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan inovasi. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (56,7%) tidak paham tentang kepuasan berinovasi. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (66,7%) peserta paham tentang kepuasan berinovasi. Artinya ada peningkatan pemahaman bimbingan inovasi menumbuhkan kepuasan perempuan rawan sosial ekonomi melakukan usaha ekonomi produktif. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (63,3%) peserta tidak paham tentang sumber usaha kegiatan. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (90%) paham tentang sarana dan prasarana sehingga dapat mendorong peningkatan usaha ekonomi produktif. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (50%) peserta tidak paham tentang inovasi kepuasan sebagai pendorong sikap untuk mengembangkan usaha sosial ekonomi produktif. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (70%) paham bahwa inovasi kepuasan bisa mendorong sikap untuk mengembangkan usaha, sehingga ada peningkatan inovasi dan lebih berharga. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (53,5%) peserta tidak paham tentang penyelenggaraan pemberdayaan. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (70%) paham. Artinya ada peningkatan pemahaman tentang penyelenggaraan pemberdayaan. Sebelum pemberdayaan, sebagian besar (63,3%) peserta tidak paham tentang pentingnya hasil pemberdayaan. Setelah pemberdayaan, sebagian besar (73,3%) paham hasil kegiatan. Artinya ada peningkatan pemahaman. Menurut (Widjaja, 2003) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Menurut Abu Huraerah (2008) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.

Hasil pemberdayaan yang dilakukan terhadap PRSE di Desa Triwidadi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Alia Fajarwati, Eva Latifah Puspita Sari dan Nirania Galuh Putri Soewarno (2017) yang melakukan survei di Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, bahwa faktor yang menyebabkan wanita menjadi WRSE di desa ini adalah perceraian atau kematian suami, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah. Upaya-upaya yang telah dilakukan dinas sosial untuk mengatasi WRSE dengan memberikan bantuan ternak, pelatihan pembuatan kue dan pelatihan sulam pita. Faktor penghambat dalam upaya pengentasan WRSE adalah minimnya waktu senggang, rendahnya tingkat pendidikan, usia WRSE, jumlah tanggungan, dan terbatasnya akses finansial. Strategi yang dapat direkomendasikan untuk mengentaskan WRSE dari kemiskinan adalah akses pada pendidikan formal, pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas, bantuan dana untuk penghidupan WRSE dan anak-anak WRSE, membuka akses pada keuangan mikro, pendampingan spiritual dan psikologis, memperkuat jaringan pendukung WRSE, serta pelibatan WRSE dalam merumuskan strategi mengentaskan mereka dari kemiskinan.

D. Penutup

Kesimpulan. Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan sosial. Kondisi perempuan rawan ekonomi mengalami ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi dalam bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan keluarga dan bermasyarakat, maka perlu ada pemberdayaan bagi mereka. Pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial telah dilakukan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) pada tahun 2015 di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan: (1)

Membentuk kelompok sosial usaha ekonomi produktif sebagai wahana atau ruang jejaring/kerjasama yang dapat diakses untuk pengembangan prakarsa/inovasi. (2) Memberi bimbingan motivasi, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan termasuk didalamnya bimbingan kewirausahaan dan inovasi.

Hasil pemberdayaan di Desa Triwidadi menunjukkan, perempuan rawan sosial ekonomi berstatus janda, berjumlah 10 orang berumur sekitar 50 tahun. Pada umumnya mereka tidak tamat SD. Penghasilan kurang dari Rp. 500.000,- dan sebagian besar pengeluaran sebanding dengan pemasukan, sebagai dari mereka adalah kepala keluarga dengan tanggungan rata-rata tiga hingga lima orang sehingga kondisi keluarga sasaran tergolong rawan sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan sudah ada peningkatan kesejahteraan keluarga bagi perempuan rawan sosial ekonomi. Ditandai dengan adanya peningkatan pemahaman tentang bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta pemberdayaan. Perempuan rawan sosial ekonomi di Desa Triwidadi setelah mendapatkan bimbingan motivasi, sosial, keterampilan kewirausahaan dan inovasi menunjukkan ada perubahan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan efektif dilakukan di desa yang masih kental dengan kehidupan tradisional. Program/kegiatan kelompok sosial usaha ekonomi produktif yang dilakukan bersinggungan dengan program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kemiskinan (rawan sosial ekonomi).

Rekomendasi. Berdasarkan observasi pada refleksi tengah hingga akhir telah terlihat kemajuan kelompok usaha ekonomi produktif walaupun pertemuan berjalan rutin, namun ada kecenderungan usaha ekonomi dilakukan secara individu. Rekomendasi kepada pemerintah daerah, agar memberikan pendampingan yang lebih intensif, sehingga perempuan rawan sosial ekonomi akan lebih berdaya dalam mengembangkan ekonomi dan mampu bersosialisasi dengan lingkungan. Peningkatan

ekonomi produktif dengan melibatkan *stake holder* lain dalam mengembangkan ekonomi keluarga bagi perempuan rawan sosial ekonomi. Model bimbingan motivasi, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan memasak seperti membuat ceriping dan kue lebih efektif dilakukan di daerah yang masih tertinggal dan memiliki hubungan interaksi antara warga yang masih “kental” dengan nilai kesetiakawanan sosial (gotong royong masih kuat). Kegiatan pemberdayaan dengan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif lebih baik diberikan secara perorangan dan kelompok sebagai wahana kegiatan sosial dan pemecahan masalah. Bantuan/kegiatan kelompok usaha bersama dapat dilakukan efektif apabila tiap anggota atau antar kelompok terjalin hubungan *simbiose mutualistis* (saling membutuhkan dan ada kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak dalam pengembangan usaha). Jenis usaha tidak sama dan jumlah anggota tidak terlalu banyak yakni efektif antara tiga orang atau tiga kelompok.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada sumber data penelitian, redaksi, dan mitra bestari atas terselesainya dan diterbitkannya artikel ini.

Pustaka Acuan

- Alia Fajarwati, Eva Latifah Puspita Sari dan Nirania Galuh Putrie Soewarno. (2017). *Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)* Majalah Geografi Indonesia Vol. 31, No.1, Maret 2017 (22- 30) © 2017 Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geografi Indonesia (IGI)
- Arikunto S. (2000). *Manajemen Penelitian*, Edisi Baru, Jakarta : Rieneka, Jakarta
- Abu Huraerah, (2008). *dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.
- Alsa, Asmadi. (2007). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basuki, A dan Prasetyo, Y. E. (2007). *Memusiumkan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO Surakarta.

- Chambers, R. 1995. Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, pp. 173-204
- Daud Bahransyaf, (2012). *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, Yogyakarta, B2P3KS Press
- Endro Winarno, dkk, (2011). *Partisipasi Pemberdayaan Karang Taruna*, Yogyakarta, B2P3KS Press
- _____ (2012). *Efektivitas Model Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi*, Laboratorium Sosial Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu, Yogyakarta, B2P3KS Press
- Gunawan Sumodiningrat, (2011). *Responsi Pemerintah Terhadap Kewenangan Ekonomi*, Jakarta, Per Pod
- Ginanjart Kartasasmita, (1998). *Manfaat dan Kualitas Manusia dalam Persaingan Global*, Makalah Kongres HIPSI, Yogyakarta
- Haditono, (1983). *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Andi Offset
- Harry Hikmat, (2008). *Pedoman Analisis Kebijakan Sosial*, Jakarta, Universitas Indonesia dan Kementerian Sosial RI
- Irawan Sumantoro, (1995). *Metode Penelitian Sosial Bidang kesejahteraan Sosial dan Ilmu Penelitian Lainnya*, Bandung, Remaja
- Kementerian Sosial, (2010). *Profil Wanita Rawan sosial Ekonomi (WRSE) Indonesia Berdasar Data Susnas*, Jakarta, Kemensos dan BPS
- _____, (2011). *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*, Jakarta, Pusdatin
- Kwik Kian Gie. (2001). *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang Berwawasan Gender*, Makalah pada Rakernas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: BAPENAS
- Sri Marwanti dan Dwi Asturti, (2012). *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kapuapaten Karang Anyar*, SEPA, Vol 9 No 1, September 134-144
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Moh. Ali Aziz dkk. (2005). *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Nasution dkk, (2007). *Sosial Budaya Masyarakat Nelayan, Konsep dan Indikator Pemberdayaan*, Jakarta, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- Patta Rapanna, dkk (2017). *Ekonomi Pembangunan : Makassar* : CV SAH MEDIA
- Prananka, A.M.W dan Agus O.S, (1996). *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS
- Sispa Rini, Lidia and Suparman, Suparman and Desy, Afrita (2010) *Peranan Yayasan 'Aisyiah Dalam Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Studi Kasus Majelis Kesejahteraan Sosial Yayasan 'Aisyiyah Bengkulu)*. Undergraduated thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIB.
- Loekman Soetrisno, (1995), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta,
- Sulistiaty (tanpa tahun) *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Sosial: Dimuat Dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial*, Seri IT: 01, Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial – Departemen Sosial RI.
- Suhendra, K, (2006), *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi,. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- BKKBN, *Pendataan Keluarga Tahun 2000* (http://www.bkkbn.go.id/prvince/yogya/MENU_04.htm).
- Keputusan Menteri Sosial Nomor. 24/HUK/1996, *tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional*

Hubungan Perawatan Diri dengan Sikap Sosial Remaja di Sekolah Menengah Pertama

Correlation Between Self Care and the Social Attitude of Adolescent in Junior High School

Stefany Puspitasari¹ dan Emi Budiastuti²

Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, (0274) 586168
stefany.jogja@gmail.com, HP 085643345233.

diterima 15 Oktober 2018, diperbaiki 30 Oktober 2018, disetujui 21 Desember 2018

Abstract

This study aimed to reveal: (1) self-care of adolescent; (2) the relationship between self-care and social attitude of adolescent. The research used a quantitative approach. The samples for being respondents were chosen by using probability random sampling technique. There were 95 students of SMP N 5 Depok chosen to become respondents. The variable data of self-care was gained by distributing questionnaires and that of study achievement was gained by observing study result report. The data was then analyzed by using descriptive statistics and correlation method. The results showed that: (1) student's self-care was in a low category (53%); (2) there was a positive correlation between self-care and student social attitude with the correlation coefficient value of 0,536. It was recommended that school authority should pay more attention to students' social life and not only to their academic results.

Keywords: *social; attitude; self-care; adolescent*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perawatan diri remaja di SMP; (2) hubungan antara perawatan diri dengan sikap sosial remaja di SMP. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari keseluruhan siswa SMP N 5 Depok, diambil 95 siswa sebagai sampel secara random. Data variabel perawatan diri diperoleh menggunakan kuesioner, sedangkan variabel prestasi belajar diperoleh dari raport. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perawatan diri pada remaja di SMP berada pada kategori rendah yaitu sebesar 53%; (2) ada hubungan positif antara perawatan diri dan sikap sosial siswa, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,536. Direkomendasikan agar pihak sekolah lebih memperhatikan kehidupan sosial siswa disamping nilai akademik.

Kata Kunci: *sikap; sosial; self care (perawatan diri); remaja*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis serta menciptakan suasana sejahtera. Menurut definisinya, kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Suparlan dalam Suud (2006:5), menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang

meliputi keadaan jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Edi Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Self care (perawatan diri) merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Self care* (perawatan diri) adalah salah satu kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya

guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dan kondisi kesehatannya (Depkes, 2000).

Self care merupakan perawatan kesehatan yang mendasar pada masyarakat yang harus dilihat sebagai sumber utama dari kesehatan masyarakat. *Self care* seringkali tidak dikenali dan kurang mendapat penghargaan, sehingga memunculkan istilah *self care iceberg*. Seperti halnya gunung es pada umumnya bahwa yang terlihat hanya pada bagian atas permukaan, seringkali bagian bawah permukaan kurang terlihat. Padahal umumnya bagian bawah permukaan merupakan bagian yang paling besar atau utama, namun jarang ada orang yang menyadari maupun memperhatikannya. Perumpamaan ini seperti kita kurang memperhatikan *self care*, bahkan terkadang kita tidak melihatnya atau tidak tahu tentang *self care*.

World Health Organization dalam Godfrey (2011: 16) memberikan definisi tentang *self care* pada tahun 1983 bahwa *self care* lebih cenderung pada aktivitas individu, keluarga dan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan memulihkan kesehatan. Department of Health Steering Group, (2003) menyatakan bahwa *self care* adalah kebiasaan yang terus ada di sepanjang kehidupan atau kebudayaan, terutama muncul dari individu dan keluarganya untuk tetap dalam kondisi sehat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan juga kolaborasi dengan profesional seperti dokter jika dibutuhkan. UK Department of Health. *Self-Care – A Real Choice*. (2005: 1) menjelaskan bahwa *self care* adalah bagian dari keseharian (*daily living*), yang dilakukan oleh individu untuk menjaga kesehatannya termasuk terhadap keluarga, teman, tetangga dan komunitas.

International self care foundation (ISF) merupakan sebuah organisasi internasional yang secara khusus menangani tentang *self care*, mulai dari definisi hingga isu kesehatan terkini yang terkait dengan *self care*. ISF dengan persetujuan presidennya yang bernama

David E. Webber, telah mengembangkan sebuah kerangka baru untuk *self care*, yakni *The Seven Pillars of Self-Care*. *The Seven Pillars of Self-Care* atau tujuh pilar *self care* ini diantaranya adalah pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, kesehatan mental, aktivitas fisik, asupan makanan yang baik, menghindari resiko (seperti rokok dan minuman keras), kebersihan yang baik, tanggung jawab dan rasional dalam menggunakan produk dan jasa.

David E. Webber menjelaskan bahwa yang terpenting dalam *self care* adalah bukan definisinya karena begitu banyak definisi yang ada mengenai *self care* tersebut. Bahkan dalam sebuah jurnal (Godfrey, 2011: 11) menemukan 139 definisi tentang *self care*. Kemudian David E. Webber menjelaskan bahwa kerangka 7 pilar *self care* ini dikemukakan berdasarkan deskripsi yang memiliki persamaan dari seluruh elemen *self care* yang ada. Tetapi pengguna atau pelaku dapat menambahkan elemen *self care* lain. Peneliti kemudian mendefinisikan *self care* menjadi empat elemen yaitu aktivitas fisik, perilaku makan, personal hygiene dan penggunaan produk, yaitu sebagai berikut:

1. Aktifitas fisik didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dilakukan dengan otot skeletal yang membutuhkan energi. Aktifitas fisik sangat bermanfaat untuk kesehatan dan mengurangi resiko penyakit. Aktifitas fisik dalam kategori sedang yang dapat dilakukan sehari-hari seperti berjalan, bersepeda, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya. Aktifitas fisik yang dilakukan dengan rutin akan mampu mengontrol berat badan serta menghindari penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh atau penyakit seperti diabetes, kardiovaskular, kanker, dll.
2. Pada jurnalnya Lomanjaya (2015: 1) menjelaskan bahwa pola makan terdiri dari jenis makanan, porsi makanan dan frekuensi makanan. Sedangkan Rahman (2016: 1) menjelaskan bahwa perilaku makan adalah suatu keadaan yang menggambarkan peri-

laku seseorang terhadap tata krama makan, frekuensi makan, pola makan, kesukaan makan, dan pemilihan makanan. Perilaku makan sehat merupakan perilaku mengonsumsi beberapa variasi kelompok makanan yang direkomendasikan yaitu karbohidrat, buah dan sayur, protein, dan lemak, berlaku secara universal.

3. *Personal hygiene* atau kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis (Tarwoto & Wartonah, 2010: 40). Kebersihan ini merupakan tanggungjawab perseorangan untuk menjaga kebersihan pada dirinya sendiri seperti kebersihan kulit, kuku, mulut dan rambut pada kehidupan sehari-hari.
4. Penggunaan produk untuk kesehatannya, seperti penggunaan obat dan kosmetika yang tepat. Sebaiknya disetiap rumah terdapat alat untuk memantau kesehatan seperti timbangan berat badan dan tensimeter (untuk mengukur tekanan darah), sehingga secara personal anda dapat selalu memantau kondisi kesehatan. Jika menggunakan obat yang memerlukan resep dokter sebaiknya berkonsultasi dahulu ke dokter, jangan langsung membeli ke apotek. Gunakan produk-produk untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit seperti penggunaan jaring nyamuk dan menggunakan benang alat perawatan gigi seperti *mouthwash* dan benang flash.

Selain itu terdapat juga produk kosmetik yang digunakan untuk memelihara, merawat, dan mempertahankan kondisi kulit seperti pembersih, pelembab, tabir surya, deodorant, dan antiprespiran.

Merujuk kepada Undang-Undang No. 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sikap atau *attitude* merupakan sesuatu hal yang bisa

di nilai dari seseorang. Berdasarkan sikapnya, seseorang dapat dinilai baik atau buruk, dewasa atau kekanak-kanakan, maka sikap menjadi salah satu alasan seseorang mau bersosialisasi dengan yang lain. Sikap seseorang akan dapat disenangi dan dibenci oleh orang lain. Sikap adalah suatu keadaan dalam diri manusia yang menggerakkannya untuk berbuat dalam aktivitas sosialnya dengan perasaan tertentu juga dalam hal menanggapi suatu obyek tertentu yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Eagly dan Chaicken (Ratna Djuwita dkk, 2009: 121) mengemukakan bahwa “sikap dapat merefleksikan sebuah fondasi yang terpenting dan awal dari pemikiran sosial”. Sedangkan Krech dan Crutchfield (Michael Ardyanto, 2009: 137) mendefinisikan bahwa “sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasi, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai beberapa aspek dunia individu”. Atkinson dkk (Nurdjannah Taufiq, 2008: 371) mengemukakan “sikap meliputi rasa suka dan tidak suka; mendekati atau menghindari situasi, benda, orang, kelompok; dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan abstrak, dan kebijakan sosial”. Kemudian Davidoff (Mari Juniati, 1991: 333) yang mendefinisikan “attitude atau sikap sebagai konsep evaluatif yang telah dipelajari dan dikaitkan dengan pola pikiran, perasaan, dan perilaku”.

Thomas (Abu Ahmadi, 2009: 149) mencoba memberi batasan “Sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Chaplin (Kartini Kartono, 2006: 469) mendefinisikan *social attitudes* (sikap sosial) sebagai kecenderungan untuk bertindak laku dengan cara tertentu terhadap orang lain. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Sudarsono (1997: 216) yang mendefinisikan *social attitudes* (sikap sosial) yaitu sebagai perbuatan-perbuatan atau sikap yang tegas dari seseorang atau kelompok di dalam keluarga atau masyarakat. Lebih lanjut lagi Abu Ahmadi (2009: 152) mengutara-

kan pendapat yang sejalan bahwa “sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap sosial adalah perilaku seseorang yang berhubungan dengan lingkungan sekitar atau orang lain. Dalam hal ini sikap sosial siswa yaitu menunjukkan sikap yang baik dalam proses belajar mengajar seperti tidak menyontek, tidak mencuri, tidak telambat, menaati tata tertib sekolah, disiplin mengumpulkan tugas sebagai kesadaran individu melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Seberapa besar siswa melakukan *self care* pada kehidupan sehari-hari?; (2) bagaimana hubungan *self care* dengan sikap sosial siswa?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari sejumlah sampel yaitu sebagian siswa SMPN 5 Depok yang dilakukan dengan *purposive sampling*. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep diri, *self care* dan prestasi belajar siswa SMP N 5 Depok. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Depok Yogyakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 hingga Juni 2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi.

Peserta didik yang dijadikan sampel penelitian menggunakan taraf kesalahan 5%. Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan, maka pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin (Amirin, 2011: 93). Perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{N.(d^2) + 1}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = populasi

d = taraf nyata atau batas kesalahan

Berdasarkan rumus di atas, maka hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{125}{125 \times 0,05^2 + 1} = \frac{125}{1,31} = 95,41$$

Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 95 siswa.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam membentuk keterangan dan kenyataan dari obyek yang ditentukan sehingga dapat diperoleh hasil yang bersifat obyektif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket/kuisisioner dan dokumentasi.

1. Angket

Menurut Arikunto (2010: 193) angket merupakan sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal yang diketahuinya. Lembar angket ini digunakan untuk mengetahui konsep diri dan *self care* (perawatan diri) dari siswa SMP N 5 Depok Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang disertai pilihan jawaban untuk setiap pernyataan tersebut. Skala pengukuran instrument menggunakan model skala likert dengan empat alternatif jawaban, sebagai berikut.

Tabel 1. Skala Pengukuran Instrumen

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat sesuai	4
Sesuai	3
Kurang sesuai	2
Tidak sesuai	1

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. (Arikunto 2010: 201). Teknik ini berguna untuk memperoleh dokumen raport siswa yang kemudian akan digunakan sebagai data variabel sikap sosial siswa.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian. Dalam menganalisis data hasil penelitian ini digunakan metode analisis data kuantitatif, kemudian data berupa angka-angka tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik.

Analisis kuantitatif deskriptif merupakan pengujian untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kategorisasi berdasarkan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik untuk mendeskripsikan data hasil penelitian.

Kategorisasi berdasarkan mean hipotetik dan standar deviasi hipotetik digunakan untuk mengelompokkan subjek berdasarkan jumlah skor dari skala kepuasan perkawinan dan skala pengungkapan diri. Pengelompokan subjek merujuk kepada norma kategorisasi menurut Azwar (2015) yang dibagi menjadi empat kategorisasi yaitu sangat rendah atau sangat buruk, rendah atau buruk, tinggi atau baik dan sangat tinggi atau sangat baik dengan pedoman norma kategorisasi yaitu:

Tabel 7. Acuan Klasifikasi Skor Siswa

No	Skor siswa	Kategori
1	$(\bar{X} + 1,5 SB) < X$	Sangat tinggi
2	$\bar{X} < X \leq (\bar{X} + 1,5 SB)$	Tinggi
3	$(\bar{X} - 1,5 SB) > X \geq \bar{X}$	Rendah
4	$X < (\bar{X} - 1,5 SB)$	Sangat rendah

Sumber : Azwar, Saifuddin (2015: 146)

Keterangan:

$\bar{X}$: rerata skor ideal

SB : simpangan baku ideal

X : skor yang dicapai siswa

Khusus variabel sikap sosial siswa menggunakan pengkategorian nilai berdasarkan konversi nilai ke huruf seperti pada raport siswa SMP Negeri 5 Depok.

Tabel 8. Acuan Klasifikasi Data Sikap Siswa

No	Skor siswa	Kategori
1	86 - 100	Sangat baik (A)
2	71 - 85	Baik (B)
3	56 - 70	Cukup (C)
4	< 55	Kurang (D)

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*. Kemudian dilihat pada nilai signifikansi (p value), jika nilai signifikansi (p) lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi (p) lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal.

Mendeteksi variabel X dan Y yang kemudian dilakukan analisis korelasi menggunakan bantuan software SPSS dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil analisis dapat dilihat pada nilai p yang diperoleh. Apabila nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima, dan jika nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Analisis korelasi merupakan uji yang mengkorelasikan antara variabel independen

(X) dengan variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi $> 0,005$ maka H_0 diterima, dan jika signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Adapun interpretasi koefisien korelasinya adalah sebagai berikut:

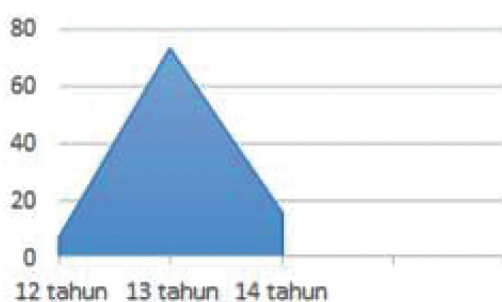
Tabel 9. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2011: 192)

C. Hasil dan Pembahasan

Responden pada penelitian ini sejumlah 48 orang (50,5%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan sejumlah 47 orang (49,5%). Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah siswa SMP Negeri 5 Depok yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki angka yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Artinya tidak ada dominasi jenis kelamin tertentu pada pengambilan data ini di SMP Negeri 5 Depok.



Gambar 1. Persebaran responden berdasarkan usia
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan gambar 1 bahwa sebaran usia responden terdiri dari 3 jenis usia yakni usia 12 tahun, 13 tahun dan 14 tahun. Responden yang berusia 12 tahun ada sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 7,4%, responden yang ber-

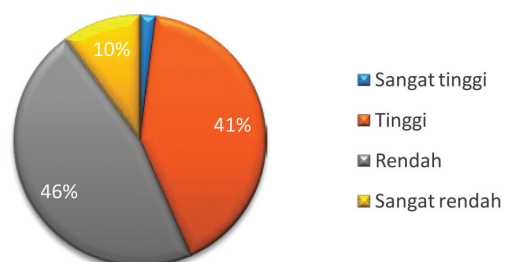
sia 13 tahun ada sebanyak 73 orang atau dengan persentase sebesar 76,8%, dan responden yang berusia 14 tahun ada sebanyak 15 orang dengan persentase sebesar 15,8%. Mayoritas responden ini berada pada usia 13 tahun. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas siswa kelas VII SMP Negeri 5 Depok berada pada usia normal seperti pada umumnya. Artinya tidak ada siswa yang berusia terlalu muda maupun terlalu tua. Hasil ini sesuai dengan peraturan pemerintah tentang usia siswa pada jenjang sekolah menengah pertama.

Self Care (Perawatan Diri)

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilihat bahwa mayoritas konsep diri pada siswa-siswa SMP Negeri 5 Depok berada pada kategori rendah dengan skor diantara 77-110 sejumlah 50 siswa (53%). Sedangkan sisanya terdapat 44 siswa (46%) pada kategori tinggi, dan 1 siswa (1%) berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih belum atau kurang menganggap *self care* sebagai hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat responden yang melakukan *self care* (perawatan diri) dalam kesehariannya yang berada pada kategori tinggi bahkan sangat tinggi, dan jumlah responden tidak terlalu berbeda jauh dan hampir seimbang diantara kategori rendah dan kategori tinggi. Berikut ini merupakan sajian data tentang aspek-aspek yang ada pada variabel *self care* (perawatan diri):

a. Aktivitas fisik

Klasifikasi Aktivitas Fisik

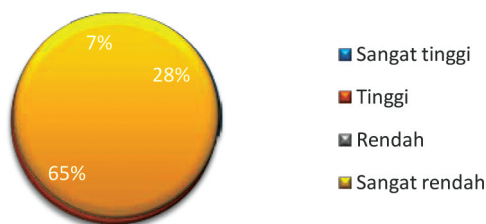


Gambar 2: Klasifikasi Aspek Aktivitas Fisik
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan diagram di atas memperlihatkan bahwa aspek aktivitas fisik pada variabel *self care* (perawatan diri) memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori rendah yakni mencapai 46%. Sedangkan sisanya adalah 41% pada kategori tinggi, 3% pada kategori sangat tinggi dan 10% pada kategori sangat rendah. Hal ini berarti bahwa mayoritas responden kurang memiliki kebiasaan yang baik dalam merawat kesehatan khususnya dengan aktivitas fisik. Contohnya adalah remaja yang bersekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) lebih suka bersantai main *gadget* atau *smartphone* dan *handphone* daripada melakukan aktivitas fisik.

b. Perilaku Makan

klasifikasi perilaku makan

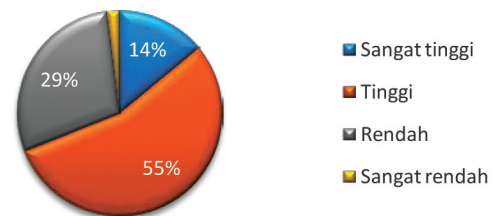


Gambar 3: Klasifikasi Aspek Perilaku Makan
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan diagram di atas memperlihatkan bahwa aspek perilaku makan pada variabel *self care* (perawatan diri) memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori tinggi yakni mencapai 65%. Sedangkan sisanya adalah 28% pada kategori sangat tinggi dan 7% pada kategori sangat rendah. Hal ini berarti bahwa responden telah memiliki kebiasaan yang baik dalam merawat kesehatan khususnya dalam hal perilaku makan. Perilaku makan ini mencakup hal-hal seperti (1) jenis makanan yang dimakan, (2) frekuensi atau berapa kali makan dalam sehari, dan (3) kebiasaan-kebiasaan makan yang sering dilakukan.

c. Personal Hygiene

Klasifikasi Personal Hygiene

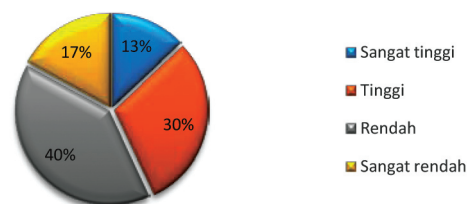


Gambar 4: Klasifikasi Aspek Personal Hygiene
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan diagram di atas memperlihatkan bahwa aspek kebersihan kulit dan rambut pada variabel *self care* (perawatan diri) memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori tinggi yakni mencapai 55%. Sedangkan sisanya adalah 14% pada kategori sangat tinggi, 29% pada kategori rendah dan 2% pada kategori sangat rendah. Hal ini berarti bahwa responden telah memiliki kebiasaan yang baik dalam merawat kesehatan khususnya dalam hal kebersihan kulit dan rambut seperti mandi, keramas, dan menyisir rambut.

d. Penggunaan Produk

klasifikasi penggunaan produk

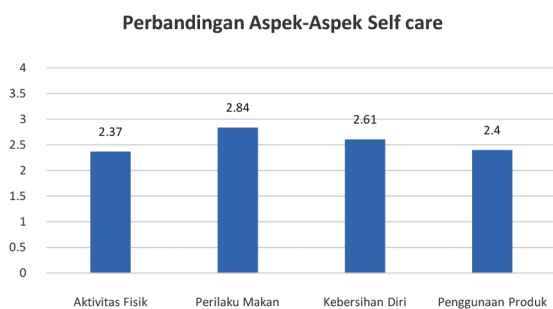


Gambar 5: Klasifikasi Aspek Penggunaan Produk
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan diagram di atas memperlihatkan bahwa aspek penggunaan produk pada variabel *self care* (perawatan diri) memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori rendah yakni mencapai 40%. Sedangkan sisanya adalah 30% pada kategori tinggi, 13% pada kategori sangat tinggi dan 17% pada kategori sangat rendah.

kategori sangat rendah. Hal ini berarti bahwa responden kurang terbiasa dalam penggunaan produk seperti sabun cuci tangan, *deodorant*, pelembab, obat luka, dan sebagainya. Pada kehidupan sehari-hari tentunya akan berpengaruh pada perilaku kesehatan mereka karena kurang memiliki pengetahuan penggunaan produk-produk tersebut untuk memelihara kesehatan maupun mengobati.

Skor total setiap aspek *self care* dapat dibandingkan untuk mengetahui aspek konsep diri yang memiliki skor tertinggi dan terendah. Skor yang dibandingkan ini diperoleh dari skor total dibagi butir soal pada setiap aspek *self care*.



Gambar 5: Diagram perbandingan aspek-aspek *self care*
Sumber: (Hasil Analisis, 2018)

Berdasarkan gambar 5 di atas dapat diketahui bahwa aspek *self care* tertinggi adalah aspek perilaku makan berada pada kategori yang tinggi yakni 2,84. Hal ini sesuai dengan penelitian Torres (2007: 2) menemukan bahwa sarapan sangatlah penting, karena dapat meningkatkan performa akademik bahkan BMI pada anak juga. Hal ini berarti siswa SMP Negeri 5 Depok memiliki frekuensi makan yang teratur karena terdapat jam istirahat yang telah diatur oleh sekolah. Selain itu sejalan pula dengan penelitian sebelumnya bahwa siswa SMP memiliki perilaku konsumsi sayur buah dalam kategori yang baik (Rachman, Mustika dan Kusumawati, 2017:1).

Hasil skor pada aspek *personal hygiene* yang termasuk pada kategori tinggi dapat disebabkan karena adanya dukungan dari lingkung-

an sekitar (Ristiana, 2019: 1). Dukungan ini dapat berasal dari orangtua yang memberikan nasehat dan aturan tentang *personal hygiene* sejak dini, selain itu juga dukungan dari pihak sekolah terutama guru yang memberi nasehat dan aturan kebersihan di sekolah.

Responden yang merupakan siswa SMP Negeri 5 Depok dalam penggunaan produk kosmetik perawatan dan kesehatan masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan pengetahuan dan penggunaan produk kosmetik dan kesehatan yang kurang diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Sesuai dengan penelitian sebelumnya (Putri, 2012:1) yang menemukan bahwa pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku siswa. Artinya bahwa penggunaan produk kosmetik perawatan dan kesehatan yang rendah dikarenakan pengetahuan yang kurang, terutama remaja di SMP Negeri 5 Depok yang berjenis kelamin laki-laki.

Sedangkan aspek *self care* terendah adalah aspek aktivitas fisik yang berada pada angka 2,37. Hal ini dapat disebabkan karena gaya hidup generasi ini terpengaruh dengan pesatnya kemajuan teknologi yang mempermudah berbagai aktivitas seperti adanya aplikasi gojek, serta teknologi yang membuat kecanduan seperti adanya *gadget smartphone* dan *game online/playstation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yang paling rendah adalah aspek aktivitas fisik.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Anthonia dan Akhire (2014: 1) yang kemudian memberikan rekomendasi bahwa guru seharusnya mengajarkan dan mempraktekkan ketrampilan *personal health* sebagai *long-life skills*, dan menyadarkan peran serta tanggungjawab orangtua. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Huriyati, Hadi, Julia (2004: 60) yang menunjukkan bahwa siswa SMP di Yogyakarta masih kurang melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang biasa dilakukan siswa SMP ini hanya sebatas aktivitas ringan seperti duduk, naik motor, antar jemput, menonton tv, aktivitas main *play station* atau *gadget*

lain, belajar di rumah maupun les. Sehingga guru seharusnya memberikan dorongan pada remaja untuk melakukan aktivitas fisik dengan sungguh sungguh pada PJOK maupun ekstrakurikuler. Selain itu orangtua perlu menggiatkan aktivitas fisik seperti lari pagi, melakukan olahraga pada akhir pekan secara bergantian seperti badminton, futsal, bersepeda, dan olahraga lainnya. Jika orangtua kurang memiliki waktu luang untuk mengajak olahraga bersama, orangtua bisa mengikutsertakan anaknya yang seorang remaja pada klub-klub olahraga.

Hubungan *Self Care* (Perawatan Diri) dengan Sikap Sosial Siswa

Self care (perawatan diri) dapat berdampak pada kenyamanan dan kepercayaan diri siswa dalam berinteraksi, baik dengan teman sebaya maupun dengan gurunya. Seperti penggunaan *deodorant* yang dapat meningkatkan kepercayaan diri karena mengurangi bau badan. Kebiasaan memiliki penampilan diri yang bersih dan rapi dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi. Seperti penelitian Robin (2016:1) bahwa ada hubungan positif dan kuat (0,638) antara kepercayaan diri dan interaksi sosial. Kepercayaan diri merupakan salah satu faktor untuk melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Pada penelitian ini *self care* memiliki hubungan yang kuat dengan sikap sosial siswa yaitu sebesar 0,536. Hal ini berarti bahwa *self care* (perawatan diri) yang terdiri dari aktivitas fisik, kebersihan diri, perilaku makan dan penggunaan produk memiliki hubungan dengan sikap sosial siswa. Jika *self care* (perawatan diri) lebih diperhatikan dan ditingkatkan maka dapat meningkatkan sikap sosial siswa di sekolah. penelitian yang sebelumnya dilaksanakan oleh Anthonia dan Akhire (2014: 1) yang memberi rekomendasi bahwa guru seharusnya mengajarkan dan mempraktikkan ketrampilan personal *health* sebagai *long-life skills*, dan menyadari peran serta tanggungjawab orangtua.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lokakuu (2012: 5) mengemukakan bahwa siswa yang melakukan aktivitas fisik pada klub-klub olahraga memiliki performa yang baik di sekolah. Aktivitas fisik yang rutin dapat mengurangi resiko kardiovaskular, selain itu terdapat penelitian yang membuktikan bahwa aktivitas fisik dapat memperbaiki emosi siswa. Selain itu Hillman CH, Erickson KI, & Kramer AF (2008:58-65) menyebutkan bahwa aktivitas fisik yang rutin dapat meningkatkan fungsi otak dan kognitif. Hal ini terjadi karena aktivitas fisik dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak (Jorgensen, Nowak, Ide, dan Secher, 2000:113-236).

Trudeau dan Shephard (2008: 10) menjelaskan temuannya bahwa aktivitas fisik dapat mempengaruhi kehidupan di sekolah termasuk prestasi siswa. Aktivitas fisik memiliki pengaruh yang positif terhadap konsentrasi, ingatan dan juga kebiasaan di kelas. Taras (2005: 214) menjelaskan bahwa pengaruh aktivitas fisik untuk siswa dikategorikan menjadi jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek adalah meningkatnya konsentrasi siswa, sedangkan jangka panjang akan meningkatkan prestasi siswa.

D. Penutup

Kesimpulan: *Self care* (perawatan diri) memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan sikap sosial siswa. Hal ini dikarenakan *self care* (perawatan diri) yang baik dapat menghasilkan kesehatan yang baik, kenyamanan dan juga kepercayaan diri. Jika siswa memiliki *self care* yang baik maka sikap sosial siswa disekolah menjadi semakin baik. Jika menjadi kebiasaan maka siswa tersebut dapat memiliki sikap sosial yang baik dalam bermasyarakat.

Rekomendasi: Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui hal yang dapat mempengaruhi sikap sosial siswa. Sebaiknya pihak sekolah tidak hanya memperhatikan akademik saja namun juga sikap sosial siswa perlu diperhatikan supaya generasi muda tidak memiliki sikap individualis dan egois. Sebaiknya ada program

husus ke sekolah sehingga dapat mengajarkan siswa untuk memiliki sikap sosial yang baik, sehingga remaja siap untuk ikut bermasyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Depok, guru-guru dan karyawan SMP Negeri 5 Depok di Yogyakarta yang menjadi lokasi penelitian serta siswa-siswa kelas VIIA hingga VIID yang bersedia menjadi responden dan telah memberikan data dan informasi sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Pustaka Acuan

- Ardyanto, Michael. (2009). *Pembelajaran Studi Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Abu, Ahmadi. (2009). *Psikologi Umum*. Jakarta: Rieka Cipta.
- Anthonia, U.E., & Ibhafidon, A. (2014). *Students' Perception of Acquisition of Personal Health Skills among Adolescent in Imo State through the School Health Programme*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies 3(7). Doi:10.5901/ajis.2014.v3n7p153
- Chaplin. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Kesehatan. (2000). *Standar Pedoman Perawatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Djuwita, Ratna dkk. (2009). *Psikologi Sosial*. Terjemah. Jakarta: Erlangga
- Godfrey, SM., Harrison, MB., Lysaght, R., et.al. (2011). *Care of self-care by other-care of other: the meaning of self-care from research, practice, policy and industry perspective*. International Journal of Evidence-Based Healthcare, (9:3-24). DOI: 10.1111/j.1744-1609.2010.00196.x
- Hillman CH, Erickson KI, & Kramer AF. (2008). *Be smart, exercise your heart: exercise effects on brain and cognition*. Hillman CH, Erickson KI, & Kramer AF. 2008 Jan;9(1):58-65. DOI:10.1038/nrn2298
- Huriyati E, Hadi H, Julia M. (2004). *Aktivitas fisik pada remaja SLTP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul serta hubungannya dengan kejadian obesitas*. Jurnal Gizi Klinik Indonesia, Vol.1(2), pp.54-60. DOI: 10.22146/ijcn.17395
- Jorgensen, L. G., Nowak, M., Ide, K., & Secher, N. H. (2000). *Cerebral blood flow and metabolism*. In B. Saltin, R. Boushel, N. Secher, & J. Mitchell (Eds.), and Circulation in Health and Disease (pp. 113-236). Champaign, IL: Human Kinetics Publisher.
- Lokakuu, T. (2012). *Physical Activity and Learning*. Finland: Finnish-language publication of the Finnish National Board of Education
- Mari Juniati. (1991). *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Rachman B.N, Mustika I.G, Kusumawati I.G.A.W. (2017). *Faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi buah dan sayur siswa SMP di Denpasar*. In Vol 6, No 1 (2017). <https://doi.org/10.14710/jgi.6.1.9-16>
- Taras, H and Potts, W. (2005). *Sleep and Student Performance at School*. Journal of School Health, Volume 75, Issue 7. DOI:10.1111/j.1746-1561.2005.00033.x
- Taufiq, Nurdjannah. (2008). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga \
- Torres MD. (2007). *Breakfast, Plasma Glucose and Beta-hydroxybutyrate, Body mass Index (BMI) and Academic Performance in Children from Extremadura, Spain*. Nutricion Hospitalaria, 22(4): 487-490.
- Trudeau F & Shephard RJ. *Physical education, school physical activity, school sports and academic performance*. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2008;10. DOI: 10.1186/1479-5868-5-10
- Suharto, Edi. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama.

Praktik Pengasuhan Orang Tua dalam Pengembangan Aspek Kognitif Anak Usia Prasekolah

Parenting Practice in Developing Cognitive Aspect for Preschool Children

Budi Muhammad Taftazani, Nurliana Cipta Apsari, dan Ishartono

Departemen Kesejahteraan Sosial Fisip Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor Sumedang, Tlp (022) 7798418

Email : taftazani@unpad.ac.id HP: 089656536013, nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id HP: 081320713795, Ishartono_kesos@yahoo.com HP: 081322365602

diterima 15 Agustus 2018, diperbaiki 07 Desember 2018, disetujui 20 Desember 2018

Abstract

The practice of social work aside from directed to overcome social problems, also works on issues of prevention and development. One of the issues related to the development and prevention orientation is parenting quality. This research can be used as a practical study for developing social work intervention with parenting quality improvement goals. This study specifically describes parenting practices related to the development of cognitive aspects of preschoolers. The article was written based on descriptive research conducted through a survey on a family population with preschool-aged children living in transit apartments in Rancaekek sub-district, Bandung regency. The practice of parent's upbringing shows that the majority of parents support children by providing activities that challenge children. Parents provide opportunities for children to engage in activities on their own initiative. When the child achieve success not all parents give appreciation to the child. Only some parents know the limits of thinking ability of the child that is useful as a learning benchmark. Some parents once call their child as lazy or incapable, as opposed to effective parenting that should give more support and motivation. The majority of parents practice parenting in accordance with the preparation of entering into the next development stage such as learning to develop perceptions by teaching the child how to understand the others and postpone pleasure. Parent-child interaction and activity allow for dialogue as a medium to improve the child's abilities. To improve the quality of parenting and prevent inappropriate nurture, social workers who work in the child and family welfare arena need to develop educational programs related to appropriate care practices in accordance with the level of child development.

Keywords: *parenting; cognitive aspects; preschool children*

Abstrak

Praktik pekerjaan sosial selain diarahkan kepada tindakan mengatasi masalah sosial, juga bergerak pada isu yang berorientasi pencegahan dan pengembangan. Salah satu isu yang terkait dengan orientasi pengembangan dan pencegahan masalah adalah kualitas pengasuhan anak oleh orang tua. Riset ini secara praktis dapat dijadikan bahan kajian untuk mengembangkan intervensi pekerjaan sosial dalam meningkatkan kualitas pengasuhan anak oleh orang tua. Penelitian secara khusus menggambarkan tentang praktik pengasuhan orang tua terkait pengembangan aspek kognitif anak usia prasekolah. Artikel ditulis berdasarkan riset deskriptif yang dilakukan melalui survey pada populasi keluarga yang memiliki anak usia prasekolah yang tinggal di apartemen transit Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Praktik pengasuhan yang dilakukan orang tua menunjukkan mayoritas orang tua memberi dukungan kepada anak melalui pemberian aktivitas yang menantang anak. Orang tua memberikan kesempatan kepada anak melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri. Hanya sebagian orang tua mengetahui batas kemampuan berfikir anak yang berguna sebagai patokan pembelajaran. Sebagian orang tua pernah menyebut anak mereka malas atau tidak mampu, sebagai hal yang berlawanan dengan pengasuhan efektif yang seharusnya lebih banyak memberi dukungan dan motivasi. Mayoritas orang tua mempraktikkan pengasuhan sejalan dengan persiapan memasuki tahap perkembangan berikutnya diantaranya belajar mengembangkan persepsi dengan mengajarkan anak memahami keadaan orang lain dan menunda kesenangan. Interaksi dan aktivitas bersama antara orang tua dan anak memungkinkan terjadinya dialog sebagai media untuk meningkatkan kemampuan anak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dan mencegah terjadinya perlakuan kurang

tepat, pekerja sosial yang bekerja di arena kesejahteraan anak dan keluarga perlu mengembangkan program edukasi terkait praktik pengasuhan yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Kata Kunci : pengasuhan; aspek kognitif; anak prasekolah

A. Pendahuluan

Kualitas pengasuhan orang tua ikut menentukan kualitas kehidupan anak sebagai penerus generasi di masa depan, oleh karena itu diperlukan lingkungan yang mendukung untuk terjadinya pengasuhan yang baik. Lingkungan ini mencakup lingkungan keluarga, masyarakat atau komunitas dan lingkungan fisik. Pemenuhan kebutuhan dari aspek kehidupan anak mutlak diperlukan. Kebutuhan fisik, kognitif, sosial dan emosional harus terpenuhi dalam upaya pengasuhan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pengasuhan yaitu kesadaran, pengetahuan dan keterampilan orang tua terkait pengasuhan, keadaan lingkungan, sarana dan prasarana yang mendukung. Manfaat dari pengasuhan orang tua yang baik adalah anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki ketahanan menghadapi situasi sulit serta jika mereka berada dalam posisi beresiko (*at risk*), mereka akan terhindar dari masalah yang lebih buruk.

Anak usia prasekolah yaitu kisaran antara tiga sampai enam tahun membutuhkan pengasuhan dengan dukungan, rasa aman, serta penyediaan kesempatan untuk belajar berperilaku dan persiapan menuju masa sekolah. Salah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam pengasuhan adalah aspek kognitif. Perkembangan kognitif anak usia pra sekolah menurut Piaget (dalam Fong & Resnick, 1986), berkisar pada tahap pra operasional. Pada tahap ini perilaku yang paling terlihat dari anak usia prasekolah adalah banyak bertanya (Piaget, 1928). Perilaku ini merupakan gambaran dari perkembangan mental mereka yang mencerminkan rasa ingin tahu secara intelektual. Perilaku bertanya sekaligus menunjukkan tanda munculnya minat anak akan penalaran.

Sementara itu, Vygotsky (dalam Santrock, 2007) percaya bahwa anak aktif menyusun pengetahuan mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan diri. Diperlukan orang-orang dan lingkungan sekitar yang dapat memberi kesempatan kepada anak untuk aktif dan berinisiatif sendiri. Selain itu menurut Vygotsky, pengetahuan didistribusikan diantara orang dan lingkungan sehingga anak dapat memperoleh pengertian jika mereka berinteraksi dengan orang lain.

Pekerja sosial yang terlibat dalam arena pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan anak akan pengasuhan yang baik. Pekerja sosial terlibat dalam meningkatkan kualitas pengasuhan dengan mengajarkan keterampilan pengasuhan kepada para orang tua (Butler & Roberts, 2004; Berlin, 2002). Petr (2003) menjelaskan bahwa pengasuhan dalam pekerjaan sosial merupakan bagian dari praktik pekerjaan sosial berbasis keluarga. Bagi para pekerja sosial, bekerja bersama anak dan keluarga membutuhkan akumulasi pengetahuan mengenai pengasuhan, perkembangan anak, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan keluarga. (Iwaniec, in O'Hagan, 2007).

Terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan dalam praktik pengasuhan yaitu pengaturan diri, aspek prososial dan moral, dan pengembangan aspek kognitif. Studi ini menggambarkan secara khusus bagaimana orang tua dalam pengasuhan mereka mengembangkan aspek kognitif pada anak usia prasekolah. Responden terdiri dari orang tua yang tinggal di apartemen transit Rancaekek Kabupaten Bandung yang memiliki anak usia prasekolah tiga sampai enam tahun.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan tujuan deskriptif. Jumlah populasi 22 keluarga, sedangkan yang bersedia diwawancara sebanyak 20 keluarga. Responden terdiri dari para ibu yang bersedia diwawancara dan bisa menggambarkan bagaimana praktik pengasuhan yang dilakukan bersama suami mereka (kedua orang tua) kepada anak mereka yang berusia prasekolah (3-6 tahun). Kuesioner digunakan untuk penggalian data. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi.

C. Dukungan Lingkungan

Seorang anak tidak akan berkembang jika mereka tidak memiliki kesempatan belajar yang diperoleh dari lingkungannya. Tentunya lingkungan pertama dan primer pendidikan anak adalah keluarga. Pada pengembangan aspek kognitif yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas berdasarkan pada kemampuan anak. Orang tua sebaiknya mengetahui atau memiliki perkiraan mana yang bisa dilakukan anak dan mana yang tidak bisa atau belum bisa dilakukan anak. Orang tua sebaiknya memberi tantangan secara seimbang antara aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak dan memberi tantangan aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh anak sesuai dengan penilaian orang tua. Berdasarkan jawaban responden, 10 persen orang tua tidak pernah memberikan tantangan pada anak meskipun tantangan tersebut dapat dilakukan anak dan 90 persen memberi tantangan. Memberi tantangan pada anak sesungguhnya dapat mengasah kemampuan anak menyelesaikan masalah. Keaktifan dan keterlibatan orang tua menjadi penting untuk memberikan stimulasi berupa pemberian aktivitas yang menantang anak.

Selanjutnya memberi anak tantangan yang tidak bisa dilakukan berdasarkan penilaian orang tua merupakan upaya untuk melatih anak mengeksplorasi kemampuan baru yang belum

teridentifikasi sesuai dengan batas yang dia mampu (Williams & Sternberg dalam Bornstein, 2002). Lima puluh persen orang tua memberi tantangan aktivitas yang dianggap diluar kemampuan anak, sisanya tidak memberi tantangan.

Memberi tantangan kepada anak yang dianggap diluar kemampuan anak untuk menyelesaikannya merupakan strategi pembelajaran yang berdasarkan pada anggapan Vygotsky mengenai *zone of proximal development* (ZPD), yaitu menunjuk jarak antara perkembangan aktual dan tingkat atau potensi perkembangan yang dapat dicapai jika anak memperoleh dukungan dan bimbingan dari orang lain yang lebih mampu atau orang dewasa. Pendekatan ini menekankan pada memberi kesempatan anak melewati tingkat kemampuan saat ini.

Memberi tantangan pada anak untuk melakukan hal diluar kemampuan dan dilakukan secara seimbang. Orang tua memberi tantangan pada anak dan mengetahui batas kemampuan anak. Orang tua tidak memberikan tugas yang sulit yang tidak dipahami anak yang membuat anak frustrasi. Sebaliknya pada saat yang sama orang tua tidak melindungi anak dari semua frustrasi dengan terus menerus memberi tugas yang sederhana dan mudah diselesaikan atau dicapai. Para orang tua yang efektif memahami bahwa anak membutuhkan banyak tantangan sekaligus dukungan dan bimbingan dari orang tua untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.

Orang tua memberikan bimbingan dan dukungan pada anak untuk mengembangkan kemampuan baru mereka melewati kemampuan saat ini. Saat anak melakukan pekerjaan diluar kemampuannya jika dilakukan sendiri, misalnya memasang kancing baju, mengikat tali sepatu, 63 persen responden menjawab mereka membantu dan melakukan aktivitas yang sulit dilakukan bersama anak. Alasan orang tua memberikan tantangan yang tidak bisa anak lakukan yaitu agar anak belajar mandiri, agar anak termotivasi dan dapat berkembang, muncul inisiatif,

agar anak mencoba dan belajar, supaya anak mampu dan sekaligus mengajarkan tanggung jawab, dan agar anak bisa belajar. Responden juga memberikan contoh tantangan yang tidak bisa dilakukan anak diantaranya melipat baju sendiri, lomba mewarnai, makan sendiri, dan belajar berhitung atau matematika.

Praktik orang tua memberikan tantangan seperti ini dapat meningkatkan kemampuan anak melewati kemampuan yang ada. Bantuan dan dukungan orang dewasa atau orang yang lebih kompeten pada aktivitas atau pekerjaan anak yang tidak bisa mereka selesaikan jika dilakukan sendiri merupakan upaya yang disebut Vygotsky sebagai *scaffolding*, yaitu teknik mengubah tingkat dukungan. Pada saat kemampuan anak meningkat, maka semakin sedikit bantuan yang diberikan.

Sisa jawaban responden mereka mengambil alih pekerjaan itu. Jika orang tua sering mengambil alih pekerjaan anak tanpa memberi dukungan dan kesempatan kepada mereka berbagai kemungkinan pemecahan masalah, maka anak tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan baru.

Dalam rangka mengembangkan otonomi berfikir anak, para orang tua sebaiknya memberikan kesempatan pada anak untuk berinisiatif melakukan aktivitas sesuai keinginan dan mereka pilih sendiri. Sebanyak 85 persen responden memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri. Beberapa alasan para orang tua melakukan hal tersebut yaitu agar anak dapat mandiri, anak tidak akan tinggal terus dengan orang tua, dan anak tidak merasa terkekang. Orang tua sudah memiliki kesadaran akan pentingnya kemandirian. Namun ada pula orang tua yang menjawab jika anak dilarang melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri anak akan menangis.

Jawaban orang tua agar anak tidak menangis dan terkekang adalah gambaran dari pengertian orang tua terkait kebutuhan anak akan otonomi dan penghargaan atas inisiatif mereka. Lima

belas persen responden menjawab tidak memberikan anak kesempatan melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri. Anak seharusnya diberi ruang untuk berperan sebagai subjek pembelajar yang aktif dan menyusun pengetahuan sendiri. Jika anak diberi keleluasaan untuk mengembangkan otonomi mereka seperti melakukan aktivitas berdasarkan pilihan dan inisiatif mereka, anak akan belajar bagaimana menguasai keadaan sosial, fisik dan mereka mengembangkan *self efficacy* (Daniel & Wassell, 2002).

Anak perlu diberi apresiasi atas keberhasilan yang mereka capai. Dua puluh lima persen responden menjawab tidak pernah memberi penghargaan atas keberhasilan anak. Memberi penghargaan atas keberhasilan anak sangatlah penting karena anak dapat belajar tujuan yang seharusnya dikejar dan dicapai. Hal ini akan mendorong anak untuk berprestasi. Selain itu kebutuhan anak akan penghargaan juga dapat terpenuhi. Erikson (1987), menandai perkembangan anak usia prasekolah sebagai tahap *initiative vs guilt*. Jika inisiatif dan keberhasilan anak tidak diperhatikan, tidak dihargai dan dibangkitkan, apalagi diabaikan atau tidak diakui, maka anak rentan memunculkan perasaan bersalah dan pencapaian yang disebut Erikson sebagai *direction and purpose* akan terhambat.

Sementara itu Wiliam Glasser (1979, dalam Zastrow), menggambarkan bahwa jika anak dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dan berhasil, mereka akan mengembangkan perasaan diri yang berharga (*self worth*). Jika lingkungan sekitar terutama orang tua tidak memberikan apresiasi apapun pada anak, maka anak tidak memiliki dukungan lingkungan yang mereka perlukan, sehingga keberhasilan dan prestasi yang dicapai dianggap tidak bermakna. Hal ini akan beresiko anak kehilangan rasa diri yang berharga.

Pendekatan perilaku menjelaskan bahwa pemberian 'hadiah' setelah keberhasilan sebuah perilaku dapat meningkatkan perilaku tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 40 persen

responden selalu memberikan apresiasi atas keberhasilan anak dan 35 persen responden menjawab kadang-kadang.

Batas Berfikir Anak dan Mengembangkan Potensi Berfikir Anak

Orang tua sebaiknya mengetahui batas kemampuan berfikir anak. Hal ini agar dalam pengasuhan orang tua tidak memberi beban yang berlebihan diluar kemampuan anak. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu anak perlu diberi tantangan yang seimbang antara aktivitas yang mereka bisa lakukan dan yang tidak bisa mereka lakukan. Aktivitas tersebut termasuk aktivitas berfikir.

Sebanyak 40 persen orang tua tidak mengetahui batas berfikir anak, dan 60 persen mengetahui batas berfikir anak. Untuk dapat memberi tantangan yang seimbang, para orang tua harus mengetahui sampai batas mana anak dapat memikirkan suatu hal. Mengetahui batas berfikir anak juga dapat menghindari pemberian tugas atau pemaparan isu yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran anak secara terus menerus sehingga anak mengalami titik frustrasi.

Dalam teori kognitif, tindakan dan keadaan perasaan seseorang dipengaruhi oleh cara pandang terhadap apa yang dialami (Ellis, 2000). Untuk mencapai tingkat kemampuan tertentu seseorang mengawalinya dari bagaimana ia mempersepsikan atau memandang diri mereka sendiri terkait kemampuan yang dimiliki. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kekuatan fikiran dapat menentukan keberhasilan.

Anak sebaiknya belajar bahwa kemampuan mereka tergantung fikiran mereka sendiri. Tujuh puluh persen responden mengajarkan hal tersebut pada anaknya, sedangkan sisanya tidak mengajarkan. Jika anak diajarkan pengertian mengenai adanya hubungan antara fikiran dengan tindakan atau kemampuan, mereka dapat belajar bahwa faktor internal lebih menentukan dibanding faktor eksternal. Hal ini merupakan upaya mengembangkan otonomi atau juga dikenal dengan sebutan *internal locus of control*

pada anak. Selain itu hampir semua responden (90%) menjawab bahwa mereka memberikan motivasi agar anak mampu mengatasi kesulitan-kesulitannya sendiri, sedangkan 10 persen tidak. Memberikan motivasi merupakan bentuk dukungan yang dapat mendorong anak menyelesaikan masalah mereka secara mandiri.

Potensi berfikir anak dapat terhambat bila lingkungan memberikan label negatif terhadap perilaku anak. Tiga puluh lima persen responden pernah menyebut anak mereka malas atau tidak mampu, sedangkan 65 persen tidak pernah menyebut label tersebut. Orang tua yang efektif harus lebih banyak memotivasi, mendukung, dan memberi arahan. Anak dapat mengembangkan gambaran diri (*self concept*) sesuai dengan yang dilabelkan orang tua. Dengan demikian menyebut anak pemalas dan tidak mampu membuat mereka menampilkan sikap dan perilaku seperti yang disebutkan. *Self concept* yang dikembangkan anak dan menetap akan mempengaruhi anak sampai mereka memasuki tahap perkembangan berikutnya bahkan bisa menetap hingga usia dewasa.

Anak prasekolah mulai mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Salah satu ciri dari proses tersebut adalah mereka banyak bertanya tentang apapun yang mereka tidak mengetahui dan belum mengerti. Para orang tua sebaiknya tidak selalu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anak, namun sesekali perlu memberi kesempatan kepada mereka agar mencari jawaban sendiri. Cara ini dapat memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi sendiri berbagai kemungkinan jawaban.

Jawaban responden saat anak mempertanyakan sesuatu adalah 84 persen selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan anak secara langsung, sedangkan 16 persen orang tua memotivasi dan membantu anak agar mereka mencari jawabannya sendiri. Saat orang tua memberi kesempatan kepada anak untuk menemukan jawabannya sendiri, orang tua memang harus memiliki kesabaran dan penilaian sampai titik mana anak dapat bertoleransi dengan kelelahan dalam upa-

ya mencari jawabannya sendiri. Secara kognitif cara ini dapat memberikan kesempatan kepada mereka melakukan *trial and error*; mengeksplorasi berbagai kemungkinan, penguasaan kemampuan, dan keterampilan memecahkan masalah.

Untuk mengembangkan potensi berfikir anak, orang tua sebaiknya memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka meski itu tidak disukai orang tua. Lima puluh lima persen responden dapat melihat ada hal yang mengasyikan atau yang menyenangkan yang dilakukan anak tetapi tidak disukai orang tua. Sedangkan, 45 persen menjawab tidak ada yang artinya apa yang dilakukan anak selalu disukai orang tua.

Menurut responden aktivitas yang menyenangkan bagi anak tetapi tidak disukai orang tua adalah bermain pasir di halaman rumah, bermain kotor-kotoran atau lumpur sehingga pakaian jadi kotor, berkeliling dusun, bermain *handphone* melebihi waktu yang ditetapkan, bermain terlalu jauh dari lokasi rumah yang membuat orang tua khawatir, mainan yang tidak dibereskan, dan bermain sampai sore karena anak tidak mau pulang. Dari contoh aktivitas anak tersebut ada yang searah dengan kegiatan yang mengembangkan aspek kognitif dan aspek tumbuh kembang lain, ada pula aktivitas yang kontra produktif dalam pengasuhan bahkan sampai menimbulkan resiko keselamatan bagi anak.

Dalam menyikapi pilihan aktivitas anak, para orang tua harus memilah jenis dan tujuan serta manfaat dari aktivitas tersebut. Paling tidak ada empat variasi aktivitas yang terkait kepentingan anak dan preferensi orang tua yaitu: 1) Aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan anak namun tidak disukai orang tua; 2) Aktivitas yang tidak bermanfaat bagi kepentingan anak tapi disukai orang tua; 3) Aktivitas yang tidak bermanfaat bagi kepentingan anak dan tidak disukai orang tua; dan 4) Aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan anak dan disukai orang tua.

Keempat aktivitas tersebut adalah aktivitas yang berpusat pada kepentingan anak. Orang tua sebaiknya memberi dorongan dan dukungan atas aktivitas yang bermanfaat bagi anak meski itu tidak disukai orang tua. Kadangkala orang tua harus menyediakan tambahan waktu dan energi untuk aktivitas anak yang mereka sukai, misalnya melatih anak untuk membereskan sendiri mainan mereka, atau mencuci baju anak yang kotor kena tanah. Semua usaha orang tua tersebut adalah dalam rangka memberi manfaat bagi anak-anak.

Hasil penelitian menunjukkan hanya 35 persen orang tua yang mendukung anak melakukan aktivitas yang dianggap tidak disukai orang tua. Beberapa alasan yang dikemukakan orang tua mengapa mereka mendukung aktivitas tersebut adalah agar anak tetap memiliki semangat dan ada yang menjawab ingin melihat keberanian anak. Jawaban tersebut menunjukkan ada orang tua yang lebih memprioritaskan kepentingan terbaik anak.

Dalam upaya memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi hal yang baru, anak sebaiknya diberi kesempatan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Upaya ini butuh dukungan orang tua baik saat anak berhasil melakukan aktivitas baru tersebut ataupun saat anak tidak berhasil melakukannya. Saat anak melakukan kesalahan pada aktivitas yang sedang mereka lakukan, 56 persen orang tua membantu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan anak dan 31 persen mengambil alih aktivitas tersebut. Sisa jawaban responden adalah menghentikan aktivitas dan membiarkan.

Saat anak dibantu karena mereka belum bisa menguasai suatu kemampuan tertentu, maka itu merupakan dukungan positif dari orang tua. Alasan dari orang tua membantu anak menyelesaikan aktivitas yang baru mereka lakukan adalah agar anak menjadi mampu, bermain sambil membantu agar percobaan tersebut jadi, sekalian mengajari agar mampu, karena yang dicoba itu baik, tidak ingin menekan anak namun memberi kebebasan dan tetap mengarahkan,

serta agar anak dapat mengoreksi kesalahannya.

Dalam hal belajar mengambil tanggung jawab atas apa yang telah anak lakukan, semua responden menjawab pernah memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengambil tanggung jawab. Sementara bagaimana orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk belajar bertanggung jawab atas “kesalahan” yang mereka lakukan, 58 persen orang tua menjawab mendorong pengakuan anak dengan sukarela. Sebanyak 17 persen dilakukan dengan cara memaksa anak untuk mengakui kesalahannya. 95 persen responden juga menjawab mereka tidak pernah menyalahkan kesalahan pada orang lain, dan hanya 1 persen responden yang mengakui bahwa mereka pernah menyalahkan kesalahan kepada orang lain atas kesalahan yang dibuat anak dengan alasan agar anak berhenti menangis.

Ada pula respon marah dari orang tua jika anak berbuat kesalahan. Sebanyak 25 persen responden memarahi anaknya saat mereka berbuat kesalahan, sedangkan 70 persen tidak. Alasan orang tua memarahi anak karena orang tua spontan memarahi dulu dan dijelaskan kemudian, hal tersebut agar anak jera, dan mau belajar dengan baik. Alasan orang tua tidak memarahi anak agar anak menurut bukan membantah, kemudian dapat membuat anak menangis, rekaman marah akan selalu diingat atau direkam anak, jika dimarahi anak akan berdiam di kamar, anaknya masih kecil untuk dimarahi, orang tua marah-marah dianggap tidak baik, cukup dinasihati, lebih baik diberi tahu dan dibenarkan.

Perilaku anak untuk mengoreksi perilaku anak yang salah, adalah orang tua perlu lebih banyak memberi tahu apa yang seharusnya dilakukan anak. Marah pada anak adalah perilaku yang tidak bisa dihindari. Kemarahan orang tua seringkali lebih disebabkan oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi di satu sisi, namun di sisi lain perilaku marah orang tua dapat dianggap sebagai tautan bagi anak agar tidak

melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Terkait dengan pertanyaan apakah orang tua memberi tahu apa yang seharusnya dilakukan anak ketika mereka membuat kesalahan, semua responden menjawab mereka memberikan penjelasan terkait kesalahan anak.

Anak belajar mengambil tanggung jawab merupakan upaya untuk membantu agar anak mengembangkan dorongan internal mereka (*internal locus of control*). Orang tua tidak perlu menekan atau mendesak anak atau mengambil alih tanggung jawab atas apa yang anak lakukan, namun buatlah mereka agar bisa melakukannya untuk diri mereka sendiri. Jika orang tua merespon anak dengan marah, maka anak tidak terlatih mengambil tanggung jawab untuk diri mereka sendiri karena anak melakukan sesuatu hanya didorong oleh dorongan eksternal yaitu menghindari kemarahan. Jawaban responden juga menggambarkan jika anak tidak mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri seperti mandi, cebok, menyikat gigi, dan sebagainya, 10 persen orang tua memarahi anaknya. Alasan semua responden yang memarahi adalah karena anak dianggap sudah besar sehingga menurut orang tua mereka seharusnya sudah bisa melakukannya sendiri. Sementara yang menjawab tidak memarahi (90%) memberi alasan takut jika anak mengalami rendah diri, dengan marah tidak dapat membuat anak jadi mengerti, karena anak memang belum bisa, karena anak masih kecil, tidak efektif jika marah, lebih banyak diberi nasehat daripada dimarahi, sebaiknya diberi arahan karena masih belajar, dan lebih baik diajari daripada dimarahi.

Belajar Menunda Kesenangan

Upaya anak memaksimalkan aspek kognitif untuk belajar menunda kesenangan. Orang yang kreatif harus belajar bagaimana menunda kepuasan atau kesenangan, karena bisa jadi pekerjaan besar mereka diabaikan untuk sementara waktu sampai pada akhirnya pekerjaan mereka dikenali dan dihargai. Jika anak punya tendensi berhenti ditengah jalan karena terburu-

buru ingin memperoleh hasil, maka anak akan berhenti berusaha dan tidak akan mencoba banyak hal karena takut mengalami kegagalan. Menunda kesenangan dapat memunculkan ketekunan dan keuletan.

Hampir semua responden (90%) menjawab bahwa mereka melatih anak untuk mampu menunda memperoleh apa yang mereka senangi. Orang tua tidak langsung memenuhi keinginan anak saat itu juga meskipun sebetulnya bisa dipenuhi. Sementara 10 persen tidak melatih hal tersebut yaitu langsung memenuhi keinginan anak. Saat anak menunda kesenangan, secara kognitif mereka belajar bagaimana merubah cara pandang sehingga bisa mengendalikan keinginan berdasarkan pengertian yang mereka terima. Cara orang tua agar anak dapat atau bersedia menunda keinginannya, 84 persen responden memberi alasan yang sebenarnya mengapa keinginan anak ditunda untuk dipenuhi, 11 persen memberikan alasan yang tidak sebenarnya, dan 16 persen menjanjikan hal lain yang menyenangkan.

Memberikan kepada anak alasan yang sebenarnya merupakan cara yang lebih baik agar anak dapat menunda keinginannya. Hanya saja untuk usia anak prasekolah yang masih pada tahap praoperasional, alasan yang terlalu abstrak belum bisa mereka pahami. Anak usia prasekolah mengalami kesulitan memahami peristiwa yang ia tahu akan terjadi tetapi tidak dapat mereka lihat. Mereka belum dapat menjawab pertanyaan: "Bagaimana jika?". Sementara menjanjikan hal lain yang menyenangkan dapat dianggap sebagai strategi pengalihan perhatian anak. Meski demikian anak bisa tau dan bisa diberi tahu, hanya belum bisa membayangkan secara kongkrit atau masih samar-samar dengan alasan yang tidak bisa mereka lihat langsung. Paling tidak alasan yang diberikan orang tua adalah upaya meletakkan pondasi untuk mengembangkan aspek kognitif ke tahap operasional kongkrit

Belajar Mengembangkan Perspektif

Dalam pengasuhan, anak perlu diajarkan untuk bisa memahami keadaan orang lain yang berbeda dengan keadaan diri mereka. Hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan persepektif sekaligus menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama. Anak usia prasekolah sedang mengembangkan apa yang Piaget sebut sebagai "fungsi simbolis", yaitu kemampuan untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada. Dengan belajar memahami bagaimana keadaan orang lain yang berbeda dengan dirinya, anak dapat mengembangkan secara cepat dunia mental mereka.

Pada aspek ini, 70 persen orang tua menjawab mereka mengajarkan anak agar bisa memahami keadaan orang lain yang berbeda, dan 30 persen menjawab tidak mengajarkan. Alasan para orang tua mengajarkan hal tersebut diantaranya yaitu supaya anak dapat bersyukur atas apa yang dimiliki, supaya muncul kepedulian kepada lingkungannya, agar menyadari bahwa tidak semua jalan kehidupan itu berjalan mulus, supaya bisa berbagi, bersyukur dan berempati. Alasan orang tua yang belum mengajarkan anak bagaimana memahami keadaan orang lain karena anak dianggap belum mengerti. Orang belum mengajarkan secara langsung informasi dari televisi.

Anak perlu melihat secara kongkrit keadaan orang di sekitar mereka. Setelah ingatan anak akan gambaran objek yang kongkret tersebut dapat dimunculkan di lain waktu. Karena perkembangan kognitif usia anak prasekolah masih berada dalam tahap praoperasional, maka pengambilan perspektif orang lain belum bisa dilakukan sehingga pembelajaran perspektif buat mereka baru sebatas melihat keadaan secara fisik orang di sekeliling mereka.

Interaksi dan Aktivitas Bersama

Vygotsky menyebutkan bahwa pengetahuan didistribusikan diantara orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Faktor interaksi menjadi sangat penting karena dengan aktivitas yang

bersifat kolaboratif proses pertukaran gagasan diantara orang-orang yang terlibat dapat terjadi. Anak dapat menjadi pembelajar yang aktif sebagaimana orang dewasa dalam interaksi tersebut. Dukungan pembelajaran yang kuat selama masa prasekolah masih bersumber dari keluarga atau orang tua. Dengan demikian, interaksi anak dan orang tua menjadi penting sehingga dukungan yang diperlukan anak terpenuhi. Interaksi anak dan orang tua bisa terjadi jika ada kesempatan untuk bertemu.

Hasil penelitian terkait waktu berkumpul antara anak dan orang tua menunjukkan bahwa semua responden menjawab mereka menyediakan waktu untuk berkumpul dengan anak-anak mereka. Aktivitas yang dilakukan saat berkumpul dengan anak yaitu 41 persen menjawab bermain bersama anak, 31 persen melakukan aktivitas jalan-jalan, dan 24 persen mengobrol. Apapun bentuk aktivitas yang dilakukan bersama anak, yang terpenting adalah adanya kualitas interaksi yang disertai aktivitas bersama. Kualitas interaksi anak dan orang tua bermanfaat juga untuk menciptakan basis rasa aman (*secure base*) dan memelihara kelekatan.

Aktivitas bersama antara anak dengan orang tua seperti bermain, ngobrol, atau jalan-jalan dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk belajar tentang banyak hal. Anak dapat menemukan hal-hal baru dan kesempatan untuk bertanya kepada orang tua tentang apa yang mereka ingin tahu dapat terfasilitasi. Begitu pula orang tua memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui perkembangan dari pengertian-pengertian anak dan melatih keterampilan dan pengetahuan baru kepada mereka.

Adapun durasi dalam melakukan aktivitas orang tua bersama anak ketika berkumpul sebanyak 80 persen responden menjawab lebih dari 60 menit, 15 persen menjawab antara 30 sampai 60 menit, dan kurang dari 10 menit sebanyak 5 persen. Dalam seminggu intensitas orang tua melakukan aktivitas bersama saat berkumpul dengan anak yaitu 70 persen orang tua melakukan aktivitas bersama anak setiap hari.

25 persen melakukannya satu sampai dengan dua kali dalam seminggu dan (5%) tiga sampai empat kali dalam seminggu.

Interaksi anak usia prasekolah dengan orang tua dalam konteks pengasuhan berarti orang tua melakukan pembimbingan melalui berbagai aktivitas bersama seperti bermain, ngobrol, atau jalan-jalan. Jika orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk membiarkan melakukan aktivitas atas inisiatif mereka sendiri, memberikan berbagai tantangan aktivitas baik yang bisa anak lakukan sendiri maupun yang tidak, bertanya dan berpendapat maka akan terjadi dialog antara orang tua dan anak. Dialog merupakan alat utama dari *scaffolding* dalam *zone of proximal development* (Tappan, 1998, dalam Santrock).

Anak membutuhkan bantuan, jawaban, dan dukungan maka orang tua akan berperan sebagai orang yang kompeten yang memberikan instruksi langsung bagaimana cara memecahkan sebuah masalah atau menjawab sebuah pertanyaan. Vygotsky menganggap bahwa anak sesungguhnya sudah memiliki konsep yang kaya hanya saja konsep-konsep dalam pikiran mereka masih belum sistematis, kacau dan bersifat spontan. Saat orang tua melakukan dialog dengan anak, maka konsep dan pengetahuan anak akan lebih sistematis, logis, dan rasional.

Implikasi Bagi Praktik Pekerjaan Sosial

Merujuk pada Piaget (dalam Apsari, 2015), tingkat perkembangan kognitif anak usia prasekolah masuk dalam fase praoperasional. Piaget percaya bahwa anak berusaha untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui tindakan-tindakan tertentu. Anak usia dua hingga enam tahun, mulai menggunakan logika-logika dasar meski mereka belum memahami mengapa orang lain melihat masalah dengan cara yang berbeda dengan dirinya (Crawford & Walker, 2007). Crawford dan Walker (2007) menjelaskan mengenai karakteristik anak usia dua hingga enam tahun yang berada pada masa preoperasional yaitu

mereka masih memiliki kesulitan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain sehingga masa ini disebut pula sebagai masa *egocentric*. Kemudian mereka juga mengalami tahap *centration*, yaitu anak hanya bisa fokus pada satu dimensi saja dari situasi tertentu. Anak juga masih mengalami ketidakmampuan untuk berfikir terbalik (*reversibility*), yaitu pemikiran yang belum bisa melihat bahwa jika sebuah ide atau sesuatu bekerja secara berputar atau terbalik maka akan kembali ke bentuk semula atau belum bisa melihat bahwa melakukan eksperimen kedua akan bisa menghasilkan akibat yang berbeda dari eksperimen pertama.

Kemampuan berfikir anak yang masih seperti orang tua sebaiknya membantu memahami apa yang terjadi di sekeliling mereka dengan contoh yang kongkrit, atau dengan cerita deskriptif yang sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka termasuk mengurangi pilihan kata yang abstrak.

Karakteristik lain yang dialami anak pra-sekolah adalah keingintahuan dan ingin mencoba (Apsari, 2015). Keluarga menjadi sumber utama dari informasi dan contoh bagi anak karena pada masa ini anak belum memasuki masa sekolah formal. Apsari (2015) menjelaskan: "Nutrisi paling penting yang dibutuhkan anak pada usia ini adalah bagaimana orang tua menjawab pertanyaan anak, mendorong anak memecahkan masalah, mengajak anak untuk dihadapkan pada tantangan sehingga dapat memancing mereka berfikir dan mengekspresikan pendapat. Bagaimana orang tua menjelaskan keputusan mereka akan membantu mengembangkan kognisi anak dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Bagi anak di bawah usia lima tahun yang tidak memiliki kesempatan mengikuti kelas *play group*, orang tua dapat memberi stimulus untuk mengembangkan aspek kognitif mereka misalnya dengan membacakan buku cerita, menemani anak bermain, dan memastikan anak memperoleh jawaban dari setiap pertanyaan yang mereka ajukan dengan jawaban yang dapat ditangkap oleh tingkat perkembangan kognitif mereka."

Implikasi bagi praktik pekerjaan sosial adalah pekerja sosial harus memahami tingkat perkembangan kognitif anak usia dua hingga enam tahun, dengan pembawaan egosentrik seringkali memicu kesalahpahaman baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Pekerja sosial harus memahami situasi tersebut terjadi bukan karena anak dengan sengaja menentang atau melawan yang lain, namun karena secara kognitif mereka masih belum matang dan masih dalam proses perkembangan.

Pekerja sosial memastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik membutuhkan orang tua dan lingkungan yang memahami dan dapat membimbing sesuai tahap perkembangan dan kebutuhan anak, alih-laih mendorong anak memenuhi apa yang orang tua atau orang dewasa inginkan.

Pekerja sosial dapat mengembangkan intervensi peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua terkait aspek kognitif dengan berdasarkan pada kerangka kerja asesmen kebutuhan anak dan keluarga yang dikutip Butler & Roberts (2004). Dalam kerangka kerja tersebut dijelaskan bahwa salah satu dimensi dari kapasitas pengasuhan adalah pemberian stimulasi, yaitu anak harus diberi kesempatan belajar dan mengembangkan kapasitas intelektual mereka melalui rangsangan kognitif, mendorong kesempatan untuk terlibat secara sosial, memfasilitasi potensi kognitif anak melalui interaksi, komunikasi, bercerita, merespon bahasa dan pertanyaan anak, mendorong dan melibatkan diri ke dalam permainan anak, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Anak juga diberi kesempatan untuk mengalami kesuksesan dan menemukan berbagai tantangan.

Pekerja sosial memberikan pelayanan kesejahteraan pada anak dengan memastikan pemenuhan hak anak untuk dilindungi dari perlakuan salah dan menerima pengasuhan yang baik dari orang tua maupun dari pengasuh lainnya.

Praktik pekerjaan sosial yang dapat memenuhi hak anak akan pengasuh yang memadai yaitu dengan memperkaya keterampilan mengasuh para orang tua. Praktik yang dilakukan dapat bersifat preventif maupun rehabilitatif.

Praktik yang bersifat preventif dapat dilakukan melalui pengayaan pengetahuan orang tua mengenai perkembangan anak, pengayaan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak, serta dapat dilakukan kerja sama dengan sejumlah lembaga yang terkait dengan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga seperti kader posyandu, BKKBN, dan sebagainya.

Praktik yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan praktik pengasuhan yang tidak efektif akibat dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua atau orang dewasa lainnya mengenai perkembangan anak serta pengasuhan anak.

Pada praktik yang bersifat rehabilitatif, pekerja sosial bekerja untuk menyembuhkan anak yang mendapatkan perlakuan salah atau kekerasan dari orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Praktik yang dapat dilakukannya diantaranya adalah konseling bagi korban dan atau konseling bagi pelaku kekerasan atau perlakuan salah.

D. Penutup

Kesimpulan. Berdasarkan uraian bagaimana orang tua melakukan praktik pengasuhan yang terkait dengan pengembangan aspek kognitif, dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua sudah menyediakan dukungan bagi perkembangan kognitif anak meskipun pada beberapa dukungan seperti memberi anak tantangan yang belum bisa dilakukan sebagai upaya memberi kesempatan anak melewati tingkat kemampuan yang ada, sebagian orang tua tidak melakukannya.

Orang tua belum bisa mengidentifikasi batas berfikir anak mereka. Batas berfikir merupakan zona atas dalam konsep *Zone of Proximal Deve-*

lopment (ZPD) sebagai patokan untuk pembelajaran. Meskipun sebagian orang tua tidak mengajarkan bahwa kemampuan tergantung juga pada pikiran, orang tua yang menjawab mengajarkan hal tersebut lebih banyak. Pada praktik belajar mengembangkan perspektif, mayoritas orang tua mengajarkan bagaimana memahami keadaan orang lain, dan sebagian menjawab tidak mengajarkan. Belajar bagaimana memahami perbedaan keadaan diantara orang-orang dapat membantu mengembangkan fungsi simbolis pada usia prasekolah. Mayoritas orang tua memiliki waktu bersama untuk berinteraksi dengan anak dengan durasi yang dan intensitas yang berbeda-beda. Aktivitas saat berkumpul memberi peluang bagi anak untuk belajar hal-hal baru dan bagi orang tua sekaligus dapat secara aktif memperhatikan perkembangan anak.

Implikasi bagi praktik pekerjaan sosial berdasarkan pada riset ini adalah pekerja sosial dapat meningkatkan kesejahteraan anak melalui peningkatan keterampilan pengasuhan orang tua atau pengasuh. Pengembangan aspek kognitif melalui pemberian stimulasi yang memadai merupakan bagian dari pelayanan tumbuh kembang anak dalam spektrum pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga.

Rekomendasi. Upaya memaksimalkan kemampuan kognitif anak, orang tua perlu memahami strategi pembelajaran kolaboratif dengan *scaffolding*. Konsep *zone of proximal development* perlu diperkenalkan sehingga para orang tua dapat secara efektif memberi kesempatan kepada anak untuk memaksimalkan potensi kognitif mereka melampaui kemampuan saat ini.

Pekerja sosial yang bekerja di arena kesejahteraan anak dan keluarga dapat meningkatkan kualitas pengasuhan orang tua dan mencegah terjadinya perlakuan kurang tepat, melalui pengembangan program edukasi bagi orang tua khususnya bagi mereka yang mempraktikkan pengasuhan yang tidak efektif. Program edukasi tersebut terkait dengan bagaimana praktik yang tepat dalam pengasuhan yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Diperlukan aksi yang terprogram oleh lembaga yang terkait dengan upaya perlindungan anak dan kesejahteraan anak dan keluarga sehingga pelayanan peningkatan kemampuan pengasuhan orang tua dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada Direktur Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi, Universitas Padjadjaran, pengelola dan para orang tua di Apartemen Transit Rancaekek Kabupaten Bandung yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Apsari, N.C. (2015). *Hak Anak: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press.
- Berlin, B.Sharon, (2002). *Clinical Social Work Practice*. New York : Oxford University Press, Inc.
- Butler, Ian & Gwenda Roberts, (2004). *Social Work With Children and Family*. New York : Jessica Kingsley Publihers, Ltd.
- Coates, D., Anand, P., & Norris, M. (2013). *Housing, Happiness And Capabilities: A Summary Of The International Evidence And Models*. *International Journal of Energy, Environment and Economics*, Vol. 21, No. 3.
- Crawford, K. & Walker, J. (2007). *Social Work And Human Development* 2nd Edition. Exeter Uk, Learning Matters Ltd.
- Daniel, B. & Wassell, S. (2002). *The Early Years. Assessing and Promoting Resilience in Vulnerable Children*. Jessica London : Kingsley Publishers.
- Erikson, H. Erik (1987) *Childhood and Society*. London : Paladin Grafton Books.
- Fong, Bernadine Chuck & Resnick, Miriam Roher (1986). *The Child : Development Through Adolescence*. California :Mayfield Publishing Company.
- Hurlock. Elizabeth B. (1980). *Developmental Psychology. A life-Span Approach*, Fith Edition. McGraw-Hill, Inc.
- Iwaniec, Dorota. (2007)*Competence in Working With Families*, in O'Hagan Kieran, *Competence in Social Work Practice: a Practical Guide for Students dan Professionals*. London : Jessica Kingsley Publishers.
- Petr G. Christopher (2003)*Social Work With Children and Their Families : Pragmatic Foundations*, 2nd Editon. New York : Oxford University Press, Inc.
- Piaget, (1928). *Judgement and Reasoning in The Child*. Taylor & Francis e-Library, 2002.
- Santrock, W John. (2007). *Life Span Development*. New York: McGraw-Hill.
- Williams & Sternberg. (2002). *How Parents Can Maximize Childrens Cognitive Abilities* in Marc H. Bornsetin.*Handbook of Parenting: Practical Issues in Parenting*. Lawrence, New Jersey :Erlbaum Associates, Inc.
- Zastrow, Charles H. (2003). *The Practice of Social Work: Applications of Generalist and Advanced Content*. Brooks/Cole Thomson Learning, Inc.

Pentingnya Peran Kelekatan Teman Sebaya dalam Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Remaja di Panti Asuhan di Kota Banda Aceh

The Important Role of Peer Attachment on Self Concept and Emotional Intelligence of Orphanage Teenagers in Banda Aceh

Putri Diah Qashdina¹ dan Alfiasari²

Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Dramaga Bogor 16680, email: putridiahq@gmail.com¹ & alfiasari@apps.ipb.ac.id, HP: 082367766173¹ & 08128514193².

diterima 11 November 2018, diperbaiki 17 Desember 2018, disetujui 26 Desember 2018

Abstract

The existence of abandoned children including those living in orphanages is caused by various social problems that occur in people's lives such as poverty, loss of parents due to death, and lack of parental presence caused by conflict and natural disasters. A new life with a different social environment will be experienced by teenagers who live in orphanages. Therefore, this study was conducted to find the influence of adolescent characteristics, family characteristics, characteristics of peer groups, and peer attachment to self-concept and emotional intelligence of adolescents in orphanages. The study was conducted at two orphanages in Banda Aceh with purposive sampling, namely teenagers in selected orphanages aged 12-18 years. Data acquisition was done by interview method using structured questionnaires to 63 teenagers. In accordance with the research hypothesis, the results showed that peer attachment had a significant positive relationship with self-concept and emotional intelligence while self-concept was positively correlated very significantly with the emotional intelligence of adolescents in orphanages. Regression analysis results indicate that there is a very significant positive effect on peer attachment to self-concept and emotional intelligence. The results showed that self concept and emotional intelligence of the orphanage adolescents were quite good but there were no more significant effects on this two variables.

Keywords: *emotional intelligence; orphanage; peer attachment; self concept; teenager*

Abstrak

Keberadaan anak-anak terlantar termasuk yang tinggal di panti asuhan banyak disebabkan oleh berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, kehilangan orang tua akibat kematian, dan ketiadaan keberadaan orang tua yang disebabkan konflik serta bencana alam. Kehidupan yang baru dengan lingkungan sosial yang berbeda akan dialami oleh remaja yang tinggal di panti asuhan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Penelitian dilakukan di dua panti asuhan di Kota Banda Aceh dengan penarikan contoh secara purposif, yaitu remaja di panti asuhan terpilih dengan usia 12-18 tahun. Perolehan data dilakukan dengan metode wawancara menggunakan kuesioner terstruktur kepada 63 remaja. Sesuai dengan hipotesa penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelekatan teman sebaya memiliki hubungan positif signifikan dengan konsep diri dan kecerdasan emosi sedangkan konsep diri berhubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif sangat signifikan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri maupun terhadap kecerdasan emosi. Hasil penelitian menunjukkan konsep diri dan kecerdasan emosi remaja panti asuhan cukup baik namun tidak terdapat pengaruh yang lebih nyata pada kedua variabel tersebut.

Kata Kunci: *kecerdasan emosi; kelekatan teman sebaya; konsep diri; panti asuhan; remaja*

A. Pendahuluan

Bencana tsunami pada tahun 2004 mengakibatkan terjadinya peningkatan penghuni panti

asuhan di kota Banda Aceh terutama pada tahun 2005. Keberadaan panti asuhan pasca tsunami sangat besar manfaatnya untuk menyelamatkan

generasi penerus yang tersisa terutama yang kehilangan keluarga dan orang tua. Bencana tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa sehingga mengakibatkan permasalahan sosial yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tidak sedikit dari anggota keluarga korban yang kemudian menjadi penyandang masalah sosial seperti yatim, piatu, dan yatim piatu (BRR 2008). Akibat bencana tersebut, pertumbuhan panti asuhan pasca tsunami meningkat yang didukung dengan ketersediaan donasi dari organisasi internasional yang peduli terhadap anak (Dinas Sosial Kota Banda Aceh 2017). Keberadaan panti asuhan memegang peranan penting dalam fungsi pengasuhan pengganti yang biasa dilakukan oleh keluarga.

Faktor ekonomi ataupun ketidakutuhan orang tua karena meninggal dan bencana alam akan menyebabkan berbagai macam permasalahan keluarga. Permasalahan tersebut akan menyebabkan adanya fenomena anak-anak atau remaja terlantar hingga tinggal di panti asuhan. Konvensi Hak-hak Anak pasal 20 menyatakan bahwa seorang anak yang untuk sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga, atau demi kepentingannya sendiri tidak dapat dibiarkan tetap berada dalam lingkungan itu, akan berhak mendapatkan perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara (Persekutuan Bangsa-bangsa, 1989). Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak terlantar melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Kehidupan remaja yang tinggal di panti asuhan akan dipengaruhi oleh pengasuh pengganti dan teman-teman sebayanya sehingga mereka akan memiliki lingkungan sosial yang baru.

Panti asuhan anak merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan pe-

nyandang masalah kesejahteraan sosial kearah kehidupan normatif secara fisik, mental, dan sosial (BRR Aceh dan Nias, 2008). Saat ini, panti asuhan dipandang sebagai solusi pendidikan dan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan terlan-tar. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa kriteria rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlan-tar, dan lanjut usia terlantar pada panti social adalah tidak ada lagi yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan masih memiliki keluarga namun berpotensi mengalami tindak kekerasan.

Fluktuasi emosi dan pencarian jati diri akan timbul pada masa remaja dan dialami oleh remaja termasuk remaja di panti asuhan. Kondisi panti asuhan menyebabkan interaksi yang sering dialami anak berasal dari lingkungan teman sebayanya karena jumlah pengasuh yang tidak sebanding dengan jumlah anak. Teman sebaya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan remaja (Hurlock, 2007). Kelekatan teman sebaya menurut Armsden and Greenberg (1987) diukur dengan menilai kepercayaan, komunikasi, dan pengasingan remaja dengan teman sebayanya.

Remaja akan mencapai beberapa aspek dalam perkembangannya, salah satunya adalah pemahaman tentang konsep diri positif. Pemahaman tentang konsep diri positif yang akan menjadi kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Agustiani, 2006). Konsep diri adalah pandangan dan keyakinan remaja terhadap dirinya sendiri meliputi aspek fisik, moral, personal, keluarga, dan sosial yang berasal dari pengalaman dan interaksinya dengan orang lain (Hurlock, 2007). Berdasarkan hasil modifikasi Naibaho (2013) dari Fitts (1971), konsep diri diukur melalui tiga dimensi yaitu identitas diri, tingkah laku dan kepuasan diri.

Perubahan hidup yang semakin cepat dan kompleks akan terjadi pada usia remaja yang menyebabkan remaja menjadi mudah stres,

depresi, kecemasan, dan emosi negatif yang tidak bisa dihindari oleh remaja tersebut (Santrock, 2007). Masalah kecerdasan emosi pada remaja panti asuhan adalah adanya rasa takut, cemas, khawatir, minder, putus asa, frustrasi, dan dapat menimbulkan sikap kegelisahan dalam hidupnya (Rochmat, 2010). Kecerdasan emosi terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Salah satu faktor yang dapat mengembangkan kecerdasan emosi remaja adalah teman sebaya (Nuryanti, 2008).

Oleh sebab itu berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, dirasa penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana hubungan dan pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman sebaya dalam perkembangan konsep diri dan kecerdasan emosi remaja yang tinggal di panti asuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai capaian konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pengasuh dan pengurus panti asuhan dalam hal fungsinya untuk membentuk kepribadian anak atau remaja yang tinggal di panti asuhan.

Penelitian mengenai pengaruh kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri dan kecerdasan emosi pada remaja di panti asuhan di Kota Banda Aceh diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang baru bagi ilmu pengetahuan dalam bidang keluarga khususnya pada kajian perkembangan anak. Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengasah kemampuan berfikir logis dan sistematis untuk mengembangkan wawasan yang dimiliki dalam mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak pengasuh/pengelola panti asuhan dalam hal capaian konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan sebagai upaya untuk mengatasi dan memberikan tindakan positif dalam membantu remaja menjadi pribadi yang positif.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh. Kota tersebut dipilih karena merupakan kota yang terus memulihkan diri pasca bencana tsunami pada tahun 2004 yang menyebabkan banyaknya anak dan remaja kehilangan keluarga dan tempat tinggal akibat bencana alam yang terjadi hingga anak dan remaja tersebut tinggal dalam lembaga sosial yaitu panti asuhan.

Pemilihan lokasi panti asuhan dilakukan secara *purposive*, yaitu dua panti asuhan di Kota Banda Aceh yang direkomendasikan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kedua panti asuhan tersebut dipilih karena memiliki populasi remaja asuh terbanyak dan bersedia untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja berusia 12-18 tahun di kedua panti asuhan terpilih yang menjadi lokasi penelitian. Contoh dalam penelitian ini merupakan remaja yang tinggal di panti asuhan sesuai kriteria contoh. Total contoh dari kedua panti asuhan tersebut berjumlah 63 remaja. Teknik penarikan contoh yang dipilih secara *purposive*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh terkait data mengenai jumlah panti asuhan, data mengenai jumlah remaja serta data mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Data primer meliputi karakteristik remaja (usia, jenis kelamin, dan lama tinggal di panti asuhan), karakteristik keluarga (status orang tua, usia ayah dan ibu, pekerjaan ayah dan ibu, tingkat pendidikan terakhir ayah dan ibu, pendapatan keluarga per bulan, dan besar keluarga), karakteristik kelompok teman sebaya (jumlah teman dekat, lama pertemanan, frekuensi pertemuan, dan lama berkumpul), kelekatan teman sebaya, konsep diri, dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pada remaja panti asuhan dengan alat bantu kuesioner untuk mengukur variable-variabel penelitian. Variabel kelekatan

an teman sebaya diukur dengan menggunakan alat ukur kuesioner dari Armsden dan Greenberg (1987) berjudul "*Inventory of Parent and Peer Attachment*" (IPPA) yang berjumlah 25 pernyataan dan terdiri dari tiga dimensi yaitu kepercayaan, komunikasi, dan pengasingan dengan nilai *Cronbach's alpha* 0.823.

Sementara itu, variable konsep diri diukur dengan menggunakan kuesioner berbentuk skala likert yang mengacu pada instrumen konsep diri *Tennessee Self-Concept Scale* (TSCS) yang dimodifikasi oleh Naibaho (2013) dari Fitts (1971) berjumlah 50 pernyataan. Kemudian, peneliti melakukan modifikasi dibagian pernyataan kuesioner dengan menambahkan kata "panti asuhan". Instrumen yang digunakan memiliki nilai *Cronbach's alpha* 0.783.

Selanjutnya, variabel kecerdasan emosi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Rachmawati dan Alfiasari (2017) yang merujuk pada teori kecerdasan emosi Goleman (2017) yang terbagi pada lima dimensi yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial dengan total 30 pernyataan. Instrumen tersebut memiliki nilai *Cronbach's alpha* 0.660. Peneliti kemudian melakukan modifikasi dibagian pernyataan kuesioner dengan menambahkan kata "panti asuhan".

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba terhadap instrumen yang akan digunakan. Kemudian data yang didapatkan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu proses *editing*, *coding*, *scoring*, *entering*, *cleaning*, dan *analyzing* data. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara statistik dengan menggunakan program SPSS dan *Microsoft Excel*.

indeks dikategorikan dengan *cut-off point* rendah (0-<60); sedang (60-<80); dan tinggi (e">80-100). Hasil pengolahan dianalisis secara statistik deskriptif dan statistik inferensia. Analisis deskriptif yang dilakukan adalah nilai minimal, nilai maksimal, rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi. Analisis inferensia meliputi uji korelasi antarvariabel penelitian sesuai dengan

tujuan penelitian yang diteliti menggunakan uji korelasi Pearson menggunakan SPSS. Adapun untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan uji regresi linier berganda.

Pada penelitian ini, sebelum dilakukan uji regresi dengan model seperti di atas, dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan tujuan ingin melihat sifat sebaran data yang telah dikumpulkan. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan seperti uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

C. Pengaruh Kelekatan Teman Sebaya terhadap Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi Remaja di Panti Asuhan

Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh (2017), terdapat 11 panti asuhan di wilayah Kota Banda Aceh dengan jumlah penghuni sebanyak 501 orang.

Fasilitas yang dimiliki kedua panti asuhan tersebut pada umumnya adalah kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, ruang berkumpul, musholla, dapur, dan taman. Setiap kamar tidur pada umumnya ditempati oleh sekitar delapan remaja. Remaja memiliki tugas piket setiap harinya untuk melakukan kegiatan rumah tangga di panti asuhan. kegiatan wajib pada panti asuhan adalah mengaji, sholat berjamaah, dan sekolah. Panti asuhan Media Kasih memberikan fasilitas berupa uang saku, biaya sekolah, uang transportasi, dan biaya kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, panti asuhan Muhammadiyah memberikan fasilitas biaya sekolah, kursus sore hari, dan biaya kebutuhan sehari-hari.

Karakteristik remaja yang tinggal di panti asuhan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lama tinggal di panti asuhan. Usia remaja dikelompokkan menjadi tiga kategori usia berdasarkan Hurlock (2007) yaitu remaja awal (12-14 tahun), remaja tengah

(15-17 tahun) dan remaja akhir (18-21 tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghuni panti asuhan Muhammadiyah dan Media Kasih di Kota Banda Aceh didominasi oleh kelompok usia remaja awal dan tengah dengan persentase mencapai 90.4 persen. Remaja pada kedua panti asuhan tersebut terdiri dari 30 remaja laki-laki dan 33 remaja perempuan. Sebanyak 46.7 persen dari total remaja laki-laki berada dalam rentang usia 12-14 tahun atau kategori usia remaja awal sedangkan 51.5 persen dari total remaja perempuan berada pada kategori usia remaja tengah (15-17 tahun). Selain itu, sebanyak 68.3 persen remaja telah tinggal di panti dalam kurun waktu 1-5 tahun terakhir. Sebagian besar remaja di panti asuhan berasal dari Aceh Besar.

Sebaran karakteristik keluarga terbagi menjadi beberapa kategori yaitu status orang tua, usia orang tua, pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan terakhir orang tua, pendapatan keluarga per bulan, dan besar keluarga. Sebagian besar remaja panti asuhan Muhammadiyah dan Media Kasih memiliki orang tua yang lengkap dan hanya sebagian kecil dalam kondisi yatim, piatu, maupun yatim piatu. Hasil penelitian menunjukkan 60.3 persen remaja masih memiliki orang tua yang lengkap, dan sisanya berstatus tidak mempunyai orang tua lengkap, baik anak yatim, piatu, maupun yatim piatu. Hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan remaja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar tujuh dari sepuluh remaja perempuan yang tinggal di panti asuhan masih mempunyai orang tua lengkap sedangkan empat dari sepuluh remaja laki-laki merupakan anak yatim.

Usia orang tua dikategorikan menjadi tiga yaitu dewasa awal (21-40 tahun), dewasa menengah (41-60 tahun), dan dewasa akhir (> 60 tahun) (Papalia *et al.*, 2008). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa usia orang tua dari remaja yang masih memiliki orang tua yang lengkap (n= 38 remaja), baik usia ayah maupun usia ibu sebagian besar berada pada kelompok usia dewasa menengah (41-60 tahun).

Besar keluarga dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2001) yaitu kategori keluarga kecil berjumlah 1-4 orang, kategori keluarga sedang berjumlah 5-7 orang, dan kategori keluarga besar adalah keluarga dengan jumlah anggota lebih dari atau sama dengan 8 orang. Hasil menunjukkan sebanyak 32 dari 63 keluarga berada pada kategori keluarga sedang dan paling sedikit berada pada kategori keluarga besar.

Karakteristik Kelompok Teman Sebaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di panti asuhan memiliki jumlah teman dekat berkisar antara 1-3 orang dengan persentase sebesar 65.1 persen. Teman dekat yang diartikan remaja adalah teman yang dirasa dekat atau sering melakukan interaksi dan menghabiskan waktu bersama di panti asuhan.

Lama pertemanan remaja di panti asuhan sebagian besar berada diatas 12 bulan dengan persentase 57.1 persen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lebih dari separuh remaja di panti asuhan memiliki frekuensi pertemuan per minggu dengan teman dekatnya adalah diatas atau sama dengan 13 kali dengan persentase 55.6 persen dan paling sedikit rata-rata bertemu per minggu 1-3 kali sebesar 7.9 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar remaja panti asuhan sering bertemu dengan teman dekatnya. Mayoritas remaja menghabiskan waktu bersama teman-temannya di panti asuhan adalah 1-2 jam dengan persentase 55.6 persen.

Kelekatan Teman Sebaya

Kelekatan teman sebaya diukur dalam tiga dimensi yaitu kepercayaan, komunikasi dan pengasingan (Armsden and Greenberg, 1987). Secara keseluruhan rata-rata capaian variabel kelekatan teman sebaya pada remaja dalam penelitian ini adalah 63.6. Data rata-rata tersebut menunjukkan kelekatan teman sebaya remaja

bisa dikatakan cukup baik meskipun belum sangat baik.

Pengelompokkan berdasarkan *cut off* menunjukkan bahwa capaian variabel kelekatan teman sebaya berada pada kategori sedang dengan nilai capaian 57.1 persen. Dimensi kepercayaan memiliki capaian dalam kategori sedang dengan nilai 54.0 persen. Remaja penghuni panti asuhan memiliki capaian dimensi pengasingan dalam kategori rendah dengan nilai 61.9 persen. Remaja di panti asuhan beranggapan bahwa mereka memiliki teman yang baik dan mudah mengetahui ketika remaja sedang marah. Sementara itu, dimensi komunikasi memiliki capaian dalam kategori rendah sebesar 46.0 persen. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa remaja panti asuhan masih memiliki kekurangan dalam hal berkomunikasi dengan kelompok teman sebayanya seperti sikap ke-lompok teman sebaya yang jarang dapat memberikan nasehat apabila remaja sedang marah dan tidak langsung mengetahui masalah yang dihadapi oleh remaja panti asuhan.

Konsep Diri

Konsep diri dalam penelitian ini diukur dari dimensi identitas diri, tingkah laku dan kepuasan diri (Fitts, 1971). Capaian rata-rata variabel konsep diri pada remaja panti asuhan adalah 64.9. Data rata-rata tersebut menunjukkan konsep diri remaja bisa dikatakan cukup baik meskipun belum sangat baik.

Capaian konsep diri dikategorikan menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Capaian variabel konsep diri berada pada kategori sedang dengan nilai 76.2 persen. Jika dilihat capaian per dimensi, semua dimensi pada variabel konsep diri baik dimensi identitas diri, tingkah laku, dan kepuasan diri berada pada kategori sedang dengan nilai capaian sebesar 77.8 persen; 68.3 persen; dan 69.8 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa remaja panti asuhan mampu bertenggang rasa, berusaha untuk menyenangkan orang lain, dan merasa senang berada di panti asuhan. Hal ini dapat dilihat bahwa rem-

aja panti asuhan tersebut memiliki penilaian fisik, moral, personal, keluarga dan sosial yang sedang.

Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosi dalam penelitian ini diukur dari dimensi kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial (Goleman, 2017). Capaian rata-rata variabel kecerdasan emosi pada remaja di kedua panti asuhan tersebut adalah 69.1. Data rata-rata tersebut menunjukkan kecerdasan emosi remaja bisa dikatakan cukup baik meskipun belum sangat baik.

Secara keseluruhan pengelompokkan berdasarkan *cut off* menunjukkan bahwa capaian indeks kecerdasan emosi remaja panti asuhan berada pada kategori sedang dengan nilai 74.6 persen. Dimensi kesadaran diri, pengaturan diri, dan keterampilan sosial memiliki capaian dalam kategori sedang dengan nilai 50.8 persen; 50.8 persen; dan 55.6 persen.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa remaja panti asuhan mengetahui apabila dirinya sedih dan tidak berlarut dalam kesedihan serta dapat membantu sesama teman di panti asuhan. Sementara itu, dimensi motivasi memiliki capaian pada kategori tinggi dengan nilai 71.4 persen. Sikap yang ditunjukkan oleh remaja dari hasil tersebut adalah remaja tidak mudah terhasut untuk melakukan kegiatan negatif apabila diajak oleh teman sebayanya. Sedangkan pada dimensi empati memiliki capaian pada kategori rendah dengan nilai 44.4 persen, ditandai dengan remaja jarang merasa sedih terhadap teman sebaya.

Hubungan Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, dan Karakteristik Kelompok Teman Sebaya dengan Kelekatan Teman Sebaya, Konsep Diri, dan Kecerdasan Emosi

Uji hubungan yang dilakukan antara karakteristik remaja, karakteristik keluarga, dan karakteristik kelompok teman sebaya dengan

kelekatan teman sebaya, konsep diri, dan kecerdasan emosi ditampilkan pada Tabel 1. Hasil uji menunjukkan bahwa jenis kelamin remaja dan lama berkumpul dengan kelompok teman sebaya berhubungan positif sangat signifikan dengan kelekatan teman sebaya, sedangkan frekuensi pertemuan berhubungan positif signifikan dengan kelekatan teman sebaya yang berarti semakin sering bertemu dengan teman dekat maka akan meningkatkan kelekatan pertemanan.

Selain itu, lama tinggal di panti asuhan berhubungan positif signifikan dengan konsep diri ($r = 0.321$; $\alpha < 0.05$) yang berarti bahwa remaja yang semakin lama tinggal di panti asuhan maka berhubungan dengan semakin baik konsep diri remaja. Sementara itu, status orang tua berhubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan ($r = 0.276$; $\alpha < 0.01$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sekalipun pada remaja yang tinggal di panti asuhan, remaja yang masih mempunyai orang tua lengkap cenderung memiliki kecerdasan emosi yang baik (Tabel 1).

Tabel 1 Koefisien korelasi antara karakteristik remaja, karakteristik keluarga, dan karakteristik kelompok teman sebaya dengan kelekatan teman sebaya, konsep diri, dan kecerdasan emosi (lanjutan)

Variabel	Kelekatan Teman Sebaya	Konsep Diri	Kecerdasan Emosi
Usia (tahun)	0.171	0.059	0.194
Jenis kelamin (0 = laki-laki; 1 = perempuan)	0.284**	-0.001	-0.047
Lama tinggal di panti asuhan (tahun)	-0.014	0.321*	0.243
Pendapatan keluarga (rupiah/bulan; 0 = $\leq$ Rp. 1.000.000; 1 = $>$ Rp. 1.000.000)	0.115	0.205	0.015
Status orang tua (0 = tidak lengkap; 1 = lengkap)	-0.088	0.179	0.276**
Besar keluarga (orang)	-0.078	0.043	-0.084
Jumlah teman dekat (0 = < 4 orang; 1 = ≥ 41 orang)	-0.017	0.197	-0.038
Lama pertemanan (0 = ≤ 12 bulan; 1 = > 12 bulan)	0.096	0.147	0.137
Frekuensi pertemuan (kali per minggu; 0 = < 13 kali; 1 = ≥ 13 kali)	0.212*	0.111	0.106
Lama berkumpul (jam per 1 kali pertemuan; 0 = < 3 jam; 1 = ≥ 3 jam)	0.340**	0.184	-0.054

Hubungan Kelekatan Teman Sebaya dengan Konsep Diri

Hasil uji korelasi antara kelekatan teman sebaya dengan konsep diri ditampilkan pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa variabel kelekatan teman sebaya memiliki hubungan positif sangat signifikan dengan identitas diri pada variabel konsep diri ($r = 0.383$; $\alpha < 0.01$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin lekat remaja dengan teman sebayanya maka semakin baik gambaran remaja terhadap identitas dirinya. Sementara itu, dimensi kepercayaan ($r = 0.320$; $\alpha < 0.05$), komunikasi ($r = 0.297$; $\alpha < 0.05$), dan pengasingan ($r = 0.310$; $\alpha < 0.05$) memiliki hubungan yang positif signifikan dengan dimensi identitas diri pada variabel konsep diri. Hal ini menun-

jukkan bahwa semakin meningkat rasa percaya dan komunikasi remaja dengan teman sebaya maka akan berhubungan dengan semakin baik remaja dalam mengenal identitas dirinya namun berbanding terbalik dimensi pengasingan dengan identitas diri. Remaja yang semakin sering merasa terasingi diantara kelompok teman sebayanya maka berhubungan dengan semakin berdampak tidak baik pandangan remaja dalam mengenal identitas dirinya.

Hasil lain menunjukkan variabel kelekatan teman sebaya ($r = 0.336$; $\alpha < 0.01$), dan dimensi kepercayaan ($r = 0.333$; $\alpha < 0.01$), juga memiliki hubungan positif sangat signifikan dengan dimensi kepuasan diri pada variabel konsep diri. Secara keseluruhan, variabel kelekatan te

man sebaya ($r = 0.321$; $\alpha < 0.05$), dimensi kepercayaan ($r = 0.304$; $\alpha < 0.05$), dan pengasingan ($r = 0.253$; $\alpha < 0.05$) memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan variabel konsep diri kecuali pada dimensi pengasingan yang berbanding terbalik dengan konsep diri. Hal ini berarti semakin tinggi kelekatan dan kepercayaan

remaja dengan teman sebayanya maka semakin tinggi konsep diri yang dimiliki remaja sedangkan dimensi pengasingan yang berarti apabila remaja merasa semakin terasingkan maka konsep diri yang dimiliki oleh remaja tersebut semakin rendah (Tabel 2).

Tabel 2. Koefisien korelasi antara kelekatan teman sebaya dengan konsep diri

Variabel dan Dimensi	Konsep Diri			
	Identitas Diri	Tingkah Laku	Kepuasan Diri	Total
Total kelekatan teman sebaya	0.383**	0.046	0.336**	0.321*
Kepercayaan	0.320*	0.078	0.333**	0.304*
Komunikasi	0.297*	-0.032	0.247	0.218
Pengasingan	0.310*	0.090	0.212	0.253*

Keterangan:

*=signifikan pada $p < 0.05$, **=signifikan pada $p < 0.01$

Hubungan Kelekatan Teman Sebaya dan Konsep Diri dengan Kecerdasan Emosi

Uji korelasi juga dilakukan terhadap variabel kelekatan teman sebaya dan konsep diri dengan kecerdasan emosi. Hasil uji menunjukkan pengasingan berhubungan positif sangat signifikan dengan empati pada variabel kecerdasan emosi. Hasil tersebut memiliki makna semakin sering remaja merasa terasingkan dengan kelompok teman sebayanya maka berhubungan dengan semakin menurunnya perasaan empati remaja. Jika dilihat secara keseluruhan hasil uji menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel kelekatan teman sebaya dengan kecerdasan emosi ($r = 0.272$; $\alpha < 0.05$).

Hal ini berarti semakin tinggi kelekatan dengan teman sebaya maka berhubungan dengan semakin baik kecerdasan emosi remaja. Berdasarkan hasil penelitian terlihat juga dimensi kepercayaan memiliki hubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi ($r = 0.330$; $\alpha < 0.01$). Hal ini dapat dimaknai semakin tinggi kepercayaan remaja dengan temannya maka berhubungan nyata dengan semakin tinggi kecerdasan emosi remaja. Sementara itu, variabel konsep diri ($r = 0.393$; $\alpha < 0.01$), dimensi identitas diri ($r = 0.367$; $\alpha < 0.01$), dan dimensi kepuasan diri ($r = 0.418$; α

< 0.01) berhubungan positif sangat signifikan dengan variabel kecerdasan emosi. Hasil tersebut dapat dimaknai semakin baik konsep diri, pandangan remaja terhadap identitas dirinya, dan kepuasan diri yang dirasakan remaja maka akan berhubungan dengan semakin tinggi kecerdasan emosi remaja sekalipun remaja yang tinggal di panti asuhan.

Hal ini didukung oleh Prihatina (2011) bahwa kecerdasan emosi seseorang akan dipengaruhi oleh konsep diri yang ia miliki. Cara seseorang mengelola perasaannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana mengenal konsep dirinya sendiri. Konsep diri itu pun akan terbentuk melalui perkembangan kecerdasan emosi dan pengaruh dari lingkungan di sekitarnya termasuk teman sebaya.

Pengaruh Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, Karakteristik Kelompok Teman Sebaya, dan Kelekatan Teman Sebaya terhadap Konsep Diri

Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan dua model. Model pertama adalah menguji pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri.

Model yang tersaji pada Tabel 3 telah sangat signifikan secara keseluruhan. Model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Nilai *Adjusted R Square* dari model regresi yaitu 22.9 persen yang mengandung arti, sebesar 22.9 persen konsep diri dipengaruhi oleh variabel-variabel di dalam penelitian sedangkan 77.1 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain di

luar penelitian. Selanjutnya, hasil regresi Tabel 3 menunjukkan kelekatan teman sebaya ($B = 0.207$) berpengaruh positif sangat signifikan terhadap konsep diri. Hal ini bermakna tingkat signifikansi < 0.01 setiap 1 satuan peningkatan skor indeks kelekatan teman sebaya maka akan turut meningkatkan nilai konsep diri sebesar 0.207 poin (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil analisis regresi linier berganda pada karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri (lanjutan)

Variabel	Koefisien			
	Koefisien Tidak Terstandarisasi (B)	Std. Error	Koefisien Terstandarisasi Beta (β)	Sig.
Konstanta	44.894	5.380		0.000
Jenis kelamin (0= laki-laki; 1= perempuan)	-1.687	1.613	-0.131	0.300
Lama tinggal di panti asuhan (tahun)	0.531	0.366	0.191	0.153
Pendapatan orang tua (rupiah/bulan; 0= $\leq$ Rp. 1.000.000; 1= $>$ Rp. 1.000.000)	3.163	1.679	0.222	0.065
Status orang tua (0= tidak lengkap; 1= lengkap)	2.913	1.859	0.221	0.123
Besar keluarga (orang)	0.677	0.491	0.178	0.174
Jumlah teman dekat (0= $<$ 4 orang; 1= $\geq$ 4 orang)	1.405	1.618	0.104	0.389
Kelekatan teman sebaya (skor indeks)	0.207	0.068	0.366	0.004**
F		3.626		
Sig.		0.003**		
R ²		0.316		
Adjusted R Square		0.229		

Keterangan:

*=signifikan pada $p < 0.05$

**=signifikan pada $p < 0.01$

Pengaruh Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, Karakteristik Kelompok Teman Sebaya, Kelekatan Teman Sebaya, dan Konsep Diri terhadap Kecerdasan Emosi

Model kedua pada uji regresi linier berganda pada penelitian ini adalah menguji pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, kelekatan teman sebaya, dan konsep diri terhadap kecerdasan emosi. Model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun maka penelitian ini menduga bahwa kelekatan teman sebaya memengaruhi kecerdasan emosi secara langsung maupun secara tidak langsung melalui konsep diri.

Model yang tersaji pada Tabel 4 telah sangat signifikan secara keseluruhan. Nilai *Adjusted R Square* dari model regresi kedua yaitu 27.2 persen yang mengandung arti, sebesar 27.2 persen kecerdasan emosi dipengaruhi oleh variabel-variabel di dalam penelitian sedangkan 72.8 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian yang tidak diteliti.

Selanjutnya, hasil uji regresi linier berganda pada model ini menemukan bahwa status orang tua ($B = 3.971$) berpengaruh positif signifikan terhadap kecerdasan emosi dan lama berkumpul ($B = -5.066$) dengan teman sebaya berpengaruh negatif signifikan terhadap kecerdasan emosi remaja. Hal ini bermakna tingkat signifikansi $<$

0.05 setiap 1 satuan peningkatan status orang tua maka akan turut meningkatkan nilai kecerdasan emosi sebesar 3.971 poin. Hal ini diduga karena berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh, salah satu agenda yang diadakan dari pihak panti asuhan adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali remaja sehingga remaja yang tinggal di panti asuhan tetap mendapatkan kontrol dari pihak keluarga dan mengikuti perkembangan remaja.

Kemudian, makna lainnya adalah tingkat signifikansi < 0.05 setiap peningkatan 1 satu-

an lama berkumpul dengan teman sebaya akan menurunkan kecerdasan emosi sebesar 5.066 poin. Sementara itu, kelekatan teman sebaya ($B = 0.245$) berpengaruh positif sangat signifikan terhadap kecerdasan emosi. Hal ini berarti tingkat signifikansi < 0.01 setiap 1 satuan peningkatan skor indeks kelekatan teman sebaya maka akan turut meningkatkan nilai kecerdasan emosi sebesar 0.245 poin. Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 4 tanpa konsep diri, kelekatan teman sebaya juga tetap memberikan pengaruh yang nyata terhadap kecerdasan emosi.

Tabel 4 Hasil analisis regresi linier berganda pada karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, kelekatan teman sebaya, dan konsep diri terhadap kecerdasan emosi

Variabel	Koefisien			
	Koefisien Tidak Terstandarisasi (B)	Std. Error	Koefisien Terstandarisasi Beta (β)	Sig.
Konstanta	32.176	9.521		0.001
Lama tinggal di panti asuhan (tahun)	0.667	0.448	0.191	0.142
Status orang tua (0= tidak lengkap; 1= lengkap)	3.971	1.942	0.240	0.046*
Lama berkumpul (jam per 1 kali pertemuan; 0= < 3 jam; 1= ≥ 3 jam)	-5.066	2.073	-0.311	0.018*
Kelekatan teman sebaya (skor indeks)	0.245	0.090	0.345	0.009**
Konsep diri (Skor indeks)	0.303	0.155	0.241	0.055
F		5.634		
Sig.		0.000**		
R ²		0.331		
Adjusted R Square		0.272		

Keterangan:

*=signifikan pada $p < 0.05$,

**=signifikan pada $p < 0.01$

Pembahasan

Hasil uji hubungan karakteristik antara jenis kelamin remaja berhubungan positif signifikan dengan kelekatan teman sebaya serta frekuensi pertemuan dan lama berkumpul berhubungan positif signifikan dengan kelekatan teman sebaya. Menurut Mota dan Matos (2013), pertemanan yang dilakukan sejak lama akan menunjukkan kepercayaan remaja dengan temannya satu sama lain. Kepercayaan ini menjadi salah satu dimensi penting dari kualitas pertemanan. Kualitas pertemanan dapat dilihat dari frekuensi pertemuan dan lama berkumpul yang berkontri-

busi dalam perkembangan perasaan aman pada remaja terutama bagi remaja tanpa dukungan keluarga.

Selanjutnya, pengujian hubungan karakteristik menunjukkan lama tinggal di panti asuhan memiliki hubungan positif signifikan dengan konsep diri. Hal ini berarti semakin lama remaja tinggal di panti asuhan maka akan semakin baik konsep diri remaja. Menurut Hidayah (2009), konsep diri berkembang secara dinamis seiring dengan adanya interaksi dengan individu lain khususnya lingkungan sosial. Oleh karenanya, semakin lama remaja tinggal di panti asuhan

maka akan semakin banyak interaksi sosial yang dilakukan dengan lingkungan panti asuhan.

Konsep diri berkembang dari pengalaman yang terus menerus dan terdiferensiasi (Rahmawati, 2015). Selain itu, hasil penelitian diperoleh adanya hubungan positif sangat signifikan antara status orang tua dengan kecerdasan emosi yang menunjukkan bahwa semakin lengkap orang tua maka akan semakin baik kecerdasan emosi yang dimiliki oleh remaja panti asuhan. Keberadaan orang tua memiliki hubungan dengan kecerdasan emosi remaja panti asuhan. Remaja yang kurang mendapatkan dukungan keluarga akan berpengaruh pada ketidakstabilan emosi remaja (Yusuf, 2005). Berdasarkan Salam, Suharsono, dan Amogo (2011), remaja yang memperoleh dukungan keluarga akan memiliki kematangan emosi yang ditandai dengan konsep diri remaja yang baik.

Hasil uji hubungan lainnya menemukan bahwa kelekatan teman sebaya memiliki hubungan positif signifikan dengan konsep diri. Hal ini didukung oleh dimensi kelekatan teman sebaya seperti kepercayaan berhubungan positif signifikan dengan konsep diri dan berbanding terbalik dengan pengasingan. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin baik kelekatan teman sebaya maka akan semakin baik konsep diri remaja panti asuhan sedangkan dimensi pengasingan yang berarti apabila remaja merasa semakin terangsang maka konsep diri yang dimiliki oleh remaja tersebut semakin rendah. Menurut Saraswatia *et al.*, (2015) menyatakan bahwa apabila pengasingan remaja tinggi yang berakibat pada rendahnya kelekatan teman sebayanya, maka akan diikuti dengan penurunan konsep diri remaja tersebut. Menurut Rola (2006), penilaian remaja panti asuhan terhadap dirinya sendiri akan lebih banyak dipengaruhi oleh pergaulan teman seasramanya karena sedikitnya perhatian yang diberikan oleh pengasuh.

Sementara itu, hasil uji hubungan menunjukkan bahwa kelekatan teman sebaya juga ber-

hubungan positif signifikan dengan kecerdasan emosi. Hasil tersebut menegaskan bahwa semakin lekat remaja dengan teman sebaya maka akan semakin baik kecerdasan emosi remaja. Menurut Nuryanti (2008) salah satu faktor yang dapat mengembangkan kecerdasan emosi remaja adalah teman sebaya. Dimensi kepercayaan pada kelekatan teman sebaya memiliki hubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi. Apabila remaja memiliki kepercayaan dengan teman maka akan membentuk kecerdasan emosi yang baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahmawati (2015) bahwa remaja akan memiliki emosi yang baik apabila dapat mengenali perasaan dan membangun hubungan dengan orang lain.

Konsep diri remaja panti asuhan berhubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi. Hasil yang sama juga dapat dilihat pada dimensi identitas diri dan kepuasan diri yang memiliki hubungan positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi. Menurut Salam, Suharsono, dan Amogo (2011), konsep diri yang baik akan menjadikan remaja sehat secara emosi dan hal ini akan berdampak baik bagi kematangan emosi sehingga remaja akan memperoleh kecerdasan emosi yang tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliati *et al.*, (2012) adalah terdapat hubungan yang berarti antara kecerdasan emosi dengan tingkat konsep diri pada remaja. Hal ini berarti remaja yang matang emosinya adalah remaja yang konsep dirinya berkembang baik. Sebaliknya, remaja yang konsep dirinya berkembang dengan baik berarti remaja tersebut telah matang secara emosi. Disisi lain, pengasingan berhubungan positif signifikan dengan empati yang berarti semakin sering remaja merasa terasingkan dengan kelompok teman sebayanya maka berhubungan dengan semakin menurunnya perasaan empati remaja.

Hasil uji regresi linear berganda model pertama ini dilakukan dengan menguji karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, dan kelekatan teman

sebayanya terhadap konsep diri. Pada model pertama menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah sangat signifikan. Selain itu, terdapat pengaruh positif sangat signifikan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri.

Kelekatan teman sebaya merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi pembentukan konsep diri remaja (Agustiani, 2009). Hal ini berarti semakin lekat hubungan remaja dengan teman sebaya akan memengaruhi pembentukan konsep diri remaja. Menurut Shiddiq (2013), remaja di panti asuhan merasa lebih nyaman dengan teman sebaya karena mampu memberikan bantuan yang mereka butuhkan secara langsung seperti memberikan saran, dukungan emosional yang berupa pemberian perhatian, saling berempati satu sama lain, serta pemberian bantuan dorongan positif agar mampu merasa percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya.

Uji regresi model dua yaitu menguji pengaruh karakteristik remaja, karakteristik keluarga, karakteristik kelompok teman sebaya, kelekatan teman sebaya, dan konsep diri terhadap kecerdasan emosi ini. Hasil yang diperoleh adalah terdapat pengaruh positif signifikan karakteristik status orang tua dengan terhadap kecerdasan emosi dan berpengaruh negatif signifikan lama berkumpul dengan teman sebaya terhadap kecerdasan emosi. Selain itu, kelekatan teman sebaya berpengaruh positif sangat signifikan dengan kecerdasan emosi.

Hal tersebut menjelaskan bahwa kecerdasan emosional remaja dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor dominan yang dapat memengaruhi kecerdasan emosional adalah faktor lingkungan seperti teman sebaya (Goleman, 2002). Hal ini berarti semakin lekat pertemanan remaja dengan teman sebayanya maka akan berpengaruh pada kemampuan remaja dalam mengelola dan mengenal emosinya. Dampak dari perkembangan kecerdasan emosi yang negatif pada remaja menurut Goleman (2002) seperti ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, mengelola emosi, motivasi

belajar yang rendah dan kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain.

Hasil penelitian ini tidak mengelompokkan kelekatan remaja dengan teman sebayanya dalam kategori *insecure* atau *secure* tetapi hanya melihat rendah atau tinggi tingkatan kelekatan teman sebaya yang dimiliki oleh remaja panti asuhan. Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak menganalisis lebih lanjut mengenai konsep diri dan kecerdasan emosi remaja laki-laki dan perempuan pada panti asuhan sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menguji hal tersebut.

D. Penutup

Kesimpulan: Hasil uji hubungan menunjukkan bahwa semakin sering bertemu dengan teman dekat maka akan meningkatkan kelekatan pertemanan. Sementara itu, remaja yang semakin lama tinggal di panti asuhan maka akan semakin baik konsep dirinya dan semakin lengkap keberadaan orang tua remaja maka kecerdasan emosi yang diperoleh akan semakin baik. Selanjutnya, semakin tinggi kelekatan dan kepercayaan remaja dengan teman sebayanya maka semakin tinggi konsep diri yang dimiliki remaja sedangkan semakin terasingkan maka konsep diri yang dimiliki oleh remaja semakin rendah. Selain itu, semakin tinggi kelekatan dengan teman sebaya maka berhubungan dengan semakin baik kecerdasan emosi dan konsep diri remaja di panti asuhan. Semakin baik konsep diri maka berhubungan dengan semakin baik kecerdasan emosi remaja. Pada model pertama dan model kedua variabel bebas yang paling berpengaruh sangat signifikan adalah kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri dan kecerdasan emosi. Kondisi panti asuhan juga mendukung tercapainya konsep diri dan kecerdasan emosi remaja melalui kelekatan dengan teman sebaya. Pengaruh kelekatan tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari remaja di panti asuhan yang lebih sering berhubungan dengan pengasuh dan teman sebayanya dibandingkan orang tua remaja.

Rekomendasi: Pada model kedua uji regresi diperoleh pengaruh yang sangat signifikan kelekatan teman sebaya terhadap konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan. Berdasarkan hasil tersebut, maka disarankan kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk membuat sebuah program pembinaan kepada remaja panti asuhan yang menekankan pada keakraban dengan sesama penghuni panti asuhan, menciptakan suasana hangat, peduli, kompak, dan saling memberi dukungan antara sesama teman di panti asuhan. Program yang dimaksud dapat berupa *gathering* yang disertai dengan kegiatan *outbond* dan olahraga. Selain itu, pemberian *training* seperti *leadership skill* juga diperlukan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja di panti asuhan. Dinas Sosial disarankan agar memberikan dukungan sosial bagi keluarga remaja panti asuhan karena sebagian besar remaja tersebut masih memiliki keluarga yang lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar fungsi keluarga remaja dapat kembali berjalan optimal.

Selanjutnya, para pengasuh diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dan memberikan dukungan serta motivasi kepada anak asuh di panti asuhan. Pengasuh diharapkan lebih memperhatikan interaksi antar penghuni panti dalam setiap program yang diberikan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti remaja di panti asuhan dalam kaitannya dengan variabel keluarga seperti pengasuhan, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut mengingat sebagian besar remaja yang tinggal di panti asuhan masih memiliki keluarga yang lengkap. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis perbedaan jenis kelamin terhadap pembentukan konsep diri dan kecerdasan emosi remaja di panti asuhan

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin dan informasi panti asuhan dan permasalahannya di Kota Banda Aceh.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Panti Asuhan Media Kasih dan Muhammadiyah Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin dan dukungan pada penelitian ini.

Pustaka Acuan:

- Agustiani, H. (2006). *Psikologi Perkembangan Pendekatan Eko-logi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. Jakarta: Refika Aditama.
- _____. (2009). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Armsden, G.C., dan Greenberg, M.T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Relationships to Well-being in Adolescence, *Journal of Youth and Adolescence* Vol. 5, Oktober 1987. Seattle: University of Washington. doi: 10.1007/s10964-017-0727-z.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2001). *Analisa Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2001*, Bogor: BKKBN
- Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Aceh dan Nias. (2008). *Standarisasi Penanganan Pelayanan Sosial Anak di Panti*, Banda Aceh: BRR Aceh & Nias
- Dinas Sosial. (2017). *Data LKSA/ Panti Sosial Tahun 2017*, Dinsos Banda Aceh
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak*. PBB
- Fitts, W.H. (1971). *The Self Concept and Self-Actualization*. California: Western Psychological Service.
- Goleman, D. (2002). *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2017). *Kecerdasan Emosional*. T Herma-ya, Penerjemah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayah, R. (2009). *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hurlock, E.B. (2007). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. edisi ke-5. Jakarta: Erlangga.
- Mota, C.P., dan Matos, P.M. (2013). Peer Attachment, Coping, and Self Esteem in Institutionalized Adolescents: The Mediathing Role of Social Skills, *Eur Psychol Educ*, Vol. 28, Maret 2013. Lisboa: Instituto Superior de Psicologia Aplicada. doi: 10.1007/s10212-012-0103-z.
- Muliani, R., Huda, I., dan Jundiah, S. (2012). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dengan Konsep Diri Pada Remaja Akhir (18-21 tahun) Mahasiswa Ilmu Keperawatan di STIKES Bhakti Kencana Bandung, *Bhakti Kencana Medika* Vol.2 No. 4, September 2012. Bandung: Stikes Bhakti Kencana.
- Naibaho, D.F. (2013). *Gaya pengasuhan ibu, kelekatan dengan teman sebaya, dan konsep diri remaja pada keluarga ibu bekerja dan tidak bekerja*. [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Nuryanti, L. (2008). *Psikologi Anak*. Jakarta: PT Indeks.
- Papalia, D.E., Olds, S.W., & Feldman, R.D. (2008). *Human Development 11th Edition*. Diterjemahkan oleh A.K. Anwar. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prihatina, R.D. (2011). *Konsep diri, kecerdasan emosional, tingkat stress, dan strategi coping remaja pada berbagai model pembelajaran di SMA* [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rachmawati, M., & Alfiasari. (2017). Emotional Socialization and Emotional Intelligence Prevent Aggressive Behavior Among School-Age Children in The Rural Family, *Journal of Child Development Studies* Vol. 2 No. 1, Desember 2017. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati, E.D. (2015). *Pengaruh pergaulan teman sebaya dan konsep diri terhadap kecerdasan emosional siswa kelas V SD Negeri Se-Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015* [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rochmat, R. (2010). *Peningkatan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan agama di panti asuhan darul hadlonah semarang* [skripsi]. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Rola, F. (2006). *Konsep diri remaja panti asuhan*. [skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Salam, M.N., Suharsono., dan Amogo, T.A. (2011). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Konsep Diri Remaja Kelas VIII SMPN 13 Depok, Sleman Yogyakarta. Vol. 1 No. 1.
- Santrock, J.W. (2003). *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Saraswati, G.K., Zulpahiyana., dan Arifah, S. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri Remaja di SMPN 13 Yogyakarta, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* Vol. 3 No. 1, Februari 2015. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma ata.
- Shiddiq, A.S. (2013). *Hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan identitas diri remaja di Panti Asuhan Sinar Melati Yogyakarta*. [skripsi]. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yusuf, S. (2005). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pengaruh Status Perkawinan dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017

The Effect of Marital Status and Economic Condition on Children Poverty in Banten Province in 2017

Euis Naya Sari

Pusdiklat BPS, Jln. Raya Jagakarsa No. 70 Lenteng Agung Jakarta Selatan

HP. 081383958830, email: enayasari@gmail.com

diterima 26 November 2018, diperbaiki 26 Desember 2018, disetujui 28 Desember 2018

Abstract

The development of a child is influenced by many factors including the marital status of the head of the household and the economic condition of the household. The information about child poverty is very important to be known by local government so that local government can implement policies to overcome the problem. In this regard, this study was conducted, which aimed to find out the relationship of those factors in Banten Province. This study was carried out by using literature review supported by quantitative descriptive analysis and logistic regression on secondary data. In the analysis, the predictor variables used were the marital status of the head of the household (KRT), the working status of the household head, and the number of children in the household. The results show that the accuracy of the model is 94.30 percent. All predictor variables have a significant effect on child poverty. The odds ratio of the KRT marital status is 1.068. The odds ratio of working status of household head is 0.891. Finally, the odds ratio of the number of children in the household is 1.939. This shows that the KRT's marital status, the work status of the household head, and the number of children in the household significantly influence the poverty level of the children in the family. If the household head is divorced, then a child in the family is more likely to be classified as poor compared to that if married. Then, the status of unemployed household head is able to increase the incarceration of child households to be classified as poor. Finally, the more the number of children in the household, the higher the tendency of children to be classified as poor is. This is due to many family members, households that cannot be used to maintain balance, income, and savings per individual. If they fall into poverty. Poverty for children cannot be used for education. Differences occur in a circle of poverty that recurs between generations. The tendency to be very important because it can cause long-term damage. Those who need education and a decent life and happy childhood become lost because of your limitations to love parents, economic conditions, and they look for schools to work or various other reasons. The facts are very worrying, considering they are the successor of this nation later. Therefore, some values are given in advance: First, a program to provide family planning program services and campaign for happy small families. Thus, the family can balance income, expenditure and savings for the future. Second, giving to many people. This is done to encourage people from poverty and prevent it.

Keywords: *Head of Household; Logistic Regression; Odds Ratio*

Abstrak

Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah status perkawinan kepala rumah tangga dan kondisi ekonomi rumah tangga. Informasi tersebut sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka penelitian ini dilakukan, yang bertujuan mengetahui hubungan tersebut di Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan telaah pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi logistik terhadap data-data sekunder. Dalam analisis regresi logistik yang digunakan, Variabel prediktor yang diteliti adalah status perkawinan Kepala Rumah Tangga (KRT), status bekerja KRT, dan jumlah anak dalam rumah tangga. Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh ketepatan model sebesar 94,30 persen. Seluruh variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan anak. Odds ratio dari status perkawinan KRT adalah sebesar 1,068. Odds ratio status bekerja KRT adalah sebesar 0,891. Terakhir, odds ratio dari jumlah anak dalam rumah tangga adalah sebesar 1.939. Hal ini menunjukkan bahwa status perkawinan KRT, status bekerja KRT, dan jumlah anak dalam rumah tangga signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga anak. Apabila KRT berstatus cerai, maka rumah tangga anak lebih cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan

apabila KRT berstatus kawin. Kemudian, KRT berstatus tidak bekerja akan meningkatkan kecenderungan rumah tangga anak untuk tergolong miskin. Terakhir, semakin banyak jumlah anak dalam rumah tangga maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk tergolong miskin. Hal ini disebabkan karena semakin banyak anggota keluarga, rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan per individu. Sehingga mereka jatuh ke dalam kemiskinan. Kemiskinan tersebut mengakibatkan anak tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang layak untuk mendukung masa depannya. Akibatnya, terjadi lingkaran kemiskinan yang terulang kembali antar generasi. Kecenderungan untuk menjadi miskin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta masa kecil yang bahagia menjadi hilang karena keterbatasan kasih sayang orang tua, kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja atau berbagai alasan lainnya. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat merekalah adalah penerus bangsa ini nantinya. Oleh karena itu, beberapa masukan yang diberikan di antaranya: Pertama, kebijakan untuk memberikan layanan program keluarga berencana dan mengkampanyekan keluarga kecil bahagia. Dengan begitu, keluarga dapat menyeimbangkan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan untuk masa depan. Kedua, pemberian jaminan sosial untuk keluarga dengan banyak anak. Hal ini dilakukan untuk mengangkat keluarga tersebut dari kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan apabila terjadi krisis ekonomi.

Kata Kunci: Kepala Rumah Tangga; Regresi Logistik; Odds Ratio

A. Pendahuluan

Kemiskinan yang dialami pada masa kanak-kanak memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak tersebut. Akibat dari kemiskinan, anak-anak memiliki pilihan yang terbatas untuk mengembangkan potensi optimalnya. Kemiskinan menghambat anak dalam nilai akademik, jenjang pendidikan yang dicapai (Moore, 2009), dan kesejahteraan hidupnya di masa yang akan datang (Grantham-McGregor et al. 2007). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangannya dan kapabilitasnya kelak sebagai manusia dewasa yang seharusnya dapat berkontribusi terhadap masyarakat.

Selain itu, kemiskinan anak berbeda dengan kemiskinan orang dewasa. Anak-anak lebih rentan untuk terjerumus dalam kemiskinan dikarenakan anak-anak masih bergantung terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Byegon, 2014). Anak bukan merupakan agen ekonomi yang memiliki penghasilan sendiri dan melangsungkan kehidupan dari penghasilan tersebut. Kemiskinan anak juga berbeda dibandingkan kemiskinan orang dewasa karena kemiskinan pada masa dewasa dapat berlangsung sementara. Sementara itu, apabila seorang anak miskin, maka besar kemungkinan anak tersebut untuk miskin ketika dewasa dan kemiskinan tersebut akan diterus-

kan kepada generasi setelahnya (Casimiro et al., 2013).

Anak-anak merupakan aset fundamental dan masa depan dari suatu negara, seperti yang tertera dalam pasal 2 UU no 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu Hak anak untuk memperoleh kesejahteraan. Serta UU no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak wajib mendapatkan jaminan dan perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kualitas penduduk dewasa di masa depan ditentukan oleh kesejahteraan anak-anak di masa kini. Terlebih lagi, pada negara berkembang seperti Indonesia, struktur demografi penduduk adalah usia muda. Sehingga, apabila tingkat kemiskinan anak tinggi, akan memengaruhi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Melihat urgensi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Faktor Demografi terhadap Kemiskinan Anak di Provinsi Banten Tahun 2017”. Dengan analisis ini, diharapkan pemerintah dapat mencanangkan program dan mengalokasikan dana pemerintah dengan efektif dan efisien untuk mengentaskan kemiskinan pada anak.

Menurut Konsep Kemiskinan BPS, Pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan

pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar terbagi menjadi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kebutuhan dasar makanan terdiri dari 52 komoditi makanan pokok terpilih untuk memenuhi kebutuhan harian 2100 kalori per kapita. Sedangkan, kebutuhan dasar non makanan terdiri dari perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, ditentukan suatu nilai Garis Kemiskinan yang merupakan batas pengeluaran per kapita per bulan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin atau tidak. Sehingga, seseorang tergolong miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan” (BPS, 2017).

Dari berbagai sumber yang dirangkum kemiskinan diduga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor penting yang memengaruhi kemiskinan adalah faktor demografi. Faktor demografi dapat dimaknai sebagai faktor yang berkaitan dengan karakteristik rumah tangga, seperti struktur keluarga, status perkawinan kepala rumah tangga, jumlah anak di dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan masalah penelitian di atas, penulis tertarik untuk meneliti karakteristik anak miskin di Provinsi Banten dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Anak yang tercakup dalam penelitian adalah penduduk berusia di bawah 18 tahun. Anak tergolong miskin ketika anak tinggal dalam rumah tangga dengan pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Variabel yang diuji sebagai determinan adalah faktor demografi, yaitu status perkawinan kepala rumah tangga, jumlah anak di dalam rumah tangga, dan status bekerja kepala rumah tangga.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder individu di Provinsi Banten pada tahun 2017. Variabel status perkawinan kepala rumah tangga, jumlah anak di dalam rumah tangga, dan status bekerja kepala rumah tangga diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Tahun 2017.

Kemiskinan anak telah menjadi salah satu topik yang sering diulas dari kemiskinan. Penelitian Brady (2004) melihat konvergensi antara kemiskinan pada penduduk lansia, anak-anak, dan kemiskinan secara keseluruhan dengan menggunakan data dari 18 negara dari tahun 1970 hingga 2000. Brady menemukan bahwa lansia dan anak-anak sangat mungkin untuk tergolong miskin dibandingkan kelompok usia lainnya. Selain itu, kemiskinan anak dan kemiskinan secara keseluruhan memiliki hubungan searah yang kuat. Untuk melihat pengaruh dari struktur keluarga, jumlah anak dalam rumah tangga, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, ketenagakerjaan industri, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan PDB per kapita terhadap kemiskinan anak digunakan random effects model. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dapat menurunkan kemiskinan pada ketiga kelompok tersebut. Sementara, struktur keluarga memengaruhi tingkat kemiskinan anak.

Chen dan Corak (2008) mengulas kemiskinan anak di berbagai negara, dinamika kemiskinan, dan faktor-faktor yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan anak. Penelitian ini mencakup 12 negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sepanjang dekade 1990-an. Dengan menggunakan data Luxembourg Income Study (LIS), diteliti pengaruh dari faktor demografi, pasar tenaga kerja, dan bantuan langsung tunai terhadap tingkat kemiskinan anak. Dari penelitian tersebut, diperoleh bahwa tingkat kemiskinan anak turun drastis di tiga negara. Kemudian, pada 11 dari 12 negara, karakteristik orang tua memengaruhi tingkat kemiskinan anak. Begitupula, perubahan pada pasar tenaga kerja dan bantuan langsung tunai yang menyebabkan perubahan pada tingkat kemiskinan anak.

Selanjutnya, Whiteford dan Adema (2007) melihat tren tingkat kemiskinan anak dan hubungan antara status bekerja orang tua, jum-

lah orang tua yang bekerja, dan status perkawinan orang tua terhadap kemiskinan anak di negara-negara anggota OECD dengan menggunakan data OECD Income Distribution Study. Dalam penelitian ini, rumah tangga diklasifikasikan menurut jumlah orang dewasa dalam rumah tangga, status bekerja orang dewasa tersebut, dan jumlah anak dalam rumah tangga. Hasilnya, pada hampir seluruh negara OECD, kemiskinan anak lebih tinggi pada rumah tangga dimana tidak satupun anggotanya bekerja dan pada rumah tangga dengan orang tua tunggal. Peningkatan kerentanan kemiskinan memiliki hubungan dengan peningkatan rumah tangga dengan orang tua tunggal dan tingginya tingkat pengangguran.

Sementara itu, Bradshaw (2002) meneliti karakteristik anak miskin di Inggris pada pertengahan tahun 1990-an. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa sebesar 61 persen anak miskin tinggal di rumah tangga dimana tak seorangpun bekerja. Kemudian, sebesar 78 persen anak yang tinggal di rumah tangga dengan karakteristik tersebut tergolong sebagai miskin. Dilihat dari status perkawinan kepala rumah tangga, sebagian dari anak miskin tinggal di rumah tangga dengan orang tua tunggal. Hasil lain menunjukkan bahwa kecenderungan seorang anak untuk tergolong miskin meningkat apabila terdapat tiga atau lebih anak dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian, Fertig dan Tamm (2009) menganalisis durasi kemiskinan anak di Jerman beserta dinamika kemiskinan anak. Penelitian menggunakan data German Socio-Economic Panel (GSOEP) dari tahun 1984 hingga 2004. Seluruh anak menjadi unit analisis, baik pada masa tersebut mereka pernah atau tidak pernah mengalami kemiskinan. Dari model durasi yang diterapkan, ditemukan bahwa tinggal dengan orang tua tunggal mengurangi kemungkinan anak tersebut untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kemungkinan untuk terjerumus kembali dalam kemiskinan. Selain itu, orang tua berpendidikan tinggi dan bekerja mening-

katkan durasi anak tersebut tidak tergolong miskin dan memperpendek jangka waktu anak tersebut tergolong miskin.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah telah pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan regresi logistik terhadap data-data sekunder. Data unit analisis adalah rumah tangga dengan anak berusia di bawah 18 tahun yang diklasifikasikan menjadi miskin dan tidak miskin. Seorang anak tergolong miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2017. Variabel respon dari penelitian adalah status kemiskinan. Sementara itu, variabel predikto yang digunakan adalah faktor demografi, seperti status perkawinan Kepala Rumah Tangga, jumlah anak di dalam rumah tangga, dan status bekerja Kepala Rumah Tangga. Untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik anak miskin di Provinsi Banten, digunakan analisis deskriptif.

Kemudian, untuk menguji arah, besaran, dan signifikansi pengaruh variabel prediktor terhadap kejadian kemiskinan anak dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik merupakan suatu jenis analisis dimana variabel responnya bersifat dikotomi atau memiliki 2 nilai. Pada kasus ini, variabel respon dapat bernilai miskin atau tidak miskin. Persamaan umum regresi logistik adalah sebagai berikut

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon_i$$

Dalam penelitian ini, model yang diajukan adalah

$$\ln\left(\frac{\hat{p}}{1-\hat{p}}\right) = \bar{\beta}_0 + \bar{\beta}_1 X_1 + \bar{\beta}_2 X_2 + \bar{\beta}_3 X_3$$

dimana

X1 : Status perkawinan Kepala Rumah Tangga

X2 : Jumlah anak dalam rumah tangga

X3 : Status bekerja Kepala Rumah Tangga

Dari hasil analisis regresi logistik akan diperoleh suatu nilai Odds Ratio yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan seorang anak termasuk dalam kategori miskin apabila terdapat peningkatan nilai suatu variabel. Odds ratio dihitung dengan menggunakan rumus :

$$OR = e^{\hat{\beta}_k}$$

Semakin tinggi nilai odds ratio, maka semakin besar kecenderungan seorang anak un-

tuk tergolong miskin dimana nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai odds ratio kurang dari 1 maka terdapat hubungan negatif antara variabel prediktor dan variabel respon. Sebaliknya, apabila nilai odds ratio lebih dari 1 maka terdapat hubungan positif antara variabel prediktor dan variabel respon. Variabel respon dan variabel prediktor yang digunakan dalam analisis ini tertera pada Tabel 1.

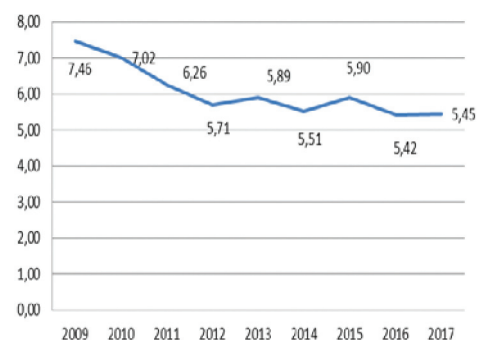
Tabel 1. Variabel Respon dan Variabel Prediktor dalam Analisis

Variabel	Definisi	Kategori	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
Y	Status kemiskinan rumah tangga anak	1. Miskin 2. Tidak miskin	Nominal
X ₁	Status Perkawinan	1. Kawin 2. Cerai Hidup 3. Cerai mati	Nominal
X ₂	Status Bekerja	1. Bekerja 2. Tidak bekerja	Nominal
X ₃	Jumlah anak	-	Rasio

C. Pembahasan

Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten pada periode 2009-2017 terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 angka kemiskinan Provinsi Banten 7,46 dan pada tahun 2017 sebesar 5,45. Namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 5,90. Hal ini mengindikasikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkecil jumlah penduduk miskin serta kebijakan mengurangi tingkat kedalaman keparahan kemiskinan sudah cukup berhasil. Walaupun belum merata di setiap kabupatennya. Hal ini sejalan yang disampaikan dalam Berita Resmi Statistik Provinsi Banten bahwa “Penurunan Kedalaman kemiskinan turun dari 0,859 pada Maret 2017 menjadi 0,778 pada September 2017. Demikian indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,19 menjadi 0,162 pada periode yang sama. Penurunan kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk

miskin juga semakin menyempit” (BPS, Berita Resmi Statistik, 2017). Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dapat dilihat pada Grafik berikut ini :



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten, 2009-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Pada anak, dilihat tingkat kemiskinan anak di Provinsi Banten. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga dengan anak tergolong miskin adalah sebesar 5,63 persen. Persentase ini tidak berbeda jauh dengan tingkat kemiskinan secara

keseluruhan. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, persentase rumah tangga dengan anak miskin tertinggi berada di Kabupaten Lebak sebesar 16,00 persen. Sedangkan, persentase terendah berada di Kota Tangerang Selatan dengan persentase sebesar 0,40 persen. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa disparitas tingkat kemiskinan anak antar kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup tinggi dengan selisih sebesar 15,60 persen. Tingginya angka kemiskinan anak di kabupaten di lebak sejalan dengan angka kemiskinan secara keseluruhan. Menurut data BPS tahun 2015, Kabupaten Lebak adalah kabupaten nomor dua tertinggi angka kemiskinannya setelah kabupaten pandeglang (9,97 %). Kabupaten Lebak diduga yang memiliki desa miskin yang terbanyak di Propinsi Banten, dimana sebagian besar desa di Kabupaten Lebak termasuk dalam kategori desa miskin. Kondisi ini berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat yang secara tidak langsung menyebabkan kebanyakan keluarga miskin di Kabupaten Lebak tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar terutama kebutuhan anak-anak. Sebaran tingkat kemiskinan anak di setiap kabupatennya seperti terlihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Persentase Rumah Tangga dengan Anak Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2017

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan Anak
(1)	(2)
Kabupaten Pandeglang	11,73
Kabupaten Lebak	16,00
Kabupaten Tangerang	4,45
Kabupaten Serang	5,95
Kota Tangerang	1,56
Kota Cilegon	2,81
Kota Serang	3,86
Kota Tangerang Selatan	0,40
Provinsi Banten	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan anak merupakan masalah multidimensional. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi miskin. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi rumah tangga di mana anak tersebut tinggal. Karakteristiknya dapat dilihat dari jumlah anggota rumah tangga atau jumlah anak yang dimiliki, status perkawinan kepala rumah tangga serta status pekerjaan kepala rumah tangga. Tabel 3 di bawah ini menampilkan informasi tentang Persentase Rumah Tangga dengan Anak Menurut Kabupaten/Kota dan Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Banten pada tahun 2017. Dari data tersebut berdasarkan status perkawinan, sebesar 89,04 persen kepala rumah tangga dengan anak berusia di bawah 18 tahun berstatus kawin. Sebesar 2,68 persen berstatus cerai hidup dan 8,07 persen berstatus cerai mati. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak di Provinsi Banten tinggal di rumah tangga dengan orang tua lengkap.

Berdasarkan status pekerjaan kepala rumah tangga, sebesar 90,32 persen kepala rumah tangga dengan anak memiliki pekerjaan. Sisanya sebesar 9,68 persen berstatus tidak bekerja. Kemudian, dilihat dari jumlah anak dalam rumah tangga, sebesar 43,04 persen rumah tangga di Banten memiliki 1 anak berusia di bawah 18 tahun. Kemudian, sebesar 39,15 persen rumah tangga memiliki anak lebih dari 2. Terdapat 12,61 persen rumah tangga yang memiliki 3 anak dan sisanya sebesar 5,20 persen memiliki anak lebih dari 3.

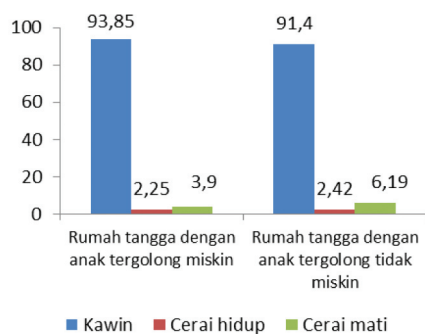
Secara rata-rata, jumlah anak dalam rumah tangga di Provinsi Banten adalah 1,75. Gambaran umum karakteristik rumah tangga berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.

Apabila dibedakan berdasarkan rumah tangga miskin dan tidak miskin, terdapat perbedaan pada beberapa karakteristik. Pada rumah tangga dengan anak yang tergolong miskin, sebesar 91,40 persen kepala rumah tangga berstatus kawin.

Tabel 3. Persentase Rumah Tangga dengan Anak Menurut Kabupaten/Kota dan Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Banten, 2017

Kab/Kota	Status Perkawinan		Status Bekerja		Jumlah Anak			
	Kawin	Cerai	Bekerja	Tidak bekerja	1	2	3	> 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	87,99	12,02	91,54	8,46	40,24	37,39	16,52	5,84
Lebak	93,34	6,54	94,40	5,60	45,82	38,01	10,19	5,98
Tangerang	86,69	13,31	90,04	9,96	42,65	39,57	11,39	6,39
Serang	87,09	11,82	86,46	13,54	37,60	38,12	17,73	6,55
Kota Tangerang	91,25	8,58	89,77	10,23	46,98	41,51	10,46	1,04
Kota Cilegon	93,22	6,78	90,35	9,65	45,52	39,04	11,67	3,76
Kota Serang	88,38	11,62	91,13	8,87	38,75	36,82	13,27	11,16
Kota Tangsel	89,38	10,26	90,32	9,68	44,81	39,53	12,40	3,26
Prov. Banten	89,04	10,75	90,32	9,68	43,04	39,15	12,61	5,20

Sumber: Susenas, 2017 (diolah)



Gambar 2. Persentase rumah tangga berdasarkan status kawin di Provinsi Banten, 2017
Sumber: Susenas, 2017 (diolah)

Sementara itu, pada rumah tangga dengan anak yang tidak tergolong miskin, persentase kepala rumah tangga berstatus kawin sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 93,85 persen. Sebesar 6,19 persen kepala rumah tangga dengan anak tergolong miskin berstatus cerai mati. Persentase tersebut lebih rendah pada rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin, yaitu hanya sebesar 3,90 persen (Gambar 2)

Dilihat dari status bekerja, tidak terdapat perbedaan antara rumah tangga dengan anak

tergolong miskin dan rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin. Pada rumah tangga tergolong miskin, persentase kepala rumah tangga bekerja adalah sebesar 95,21 persen. Sedangkan, pada rumah tangga yang tidak tergolong miskin, persentase kepala rumah tangga bekerja adalah sebesar 94,98 persen. Kemudian, dilihat dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, terdapat perbedaan antara rumah tangga dengan anak tergolong miskin dan rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin. Pada rumah tangga dengan anak tergolong miskin, rata-rata jumlah anak berusia kurang dari 18 tahun dalam rumah tangga adalah sebesar 2,43 dengan distribusi jumlah anak tersebar antara 1 hingga 4 anak. Sedangkan pada rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin, rata-rata jumlah anak hanya sebesar 1,71 dengan distribusi terpusat pada 1 hingga 2 anak. Perbedaan karakteristik antara rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin dan rumah tangga dengan anak tergolong miskin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Karakteristik Rumah Tangga dengan Anak tergolong Miskin dan Rumah Tangga dengan Anak Tergolong Tidak Miskin di Provinsi Banten, 2017

Kategori RT	Status Perkawinan		Status Bekerja		Jumlah Anak			
	Kawin	Cerai	Bekerja	Tidak Bekerja	1	2	3	> 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tidak Miskin	93,85	6,15	94,98	5,02	46,73	39,14	11,11	3,02
Miskin	91,40	8,60	95,21	4,79	25,80	36,12	15,84	22,04

Sumber: (Hasil Analisis, 2017)

Berdasarkan analisis deskriptif tersebut, terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara rumah tangga dengan anak tergolong tidak miskin dan rumah tangga dengan anak tergolong miskin. Perbedaan karakteristik ini dapat menjadi penyebab suatu rumah tangga anak tergolong miskin. Untuk menguji pengaruh antara karakteristik tersebut dengan kemiskinan rumah tangga anak, dilakukan analisis regresi logistik.

Analisis regresi logistik dilakukan dengan membagi rumah tangga anak di Provinsi Banten menjadi 2 kategori yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Model yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan adalah:

$$\ln P/(1-P) = -4,252 + 0,662X_1 + 0,066KX_2 - 0,116X_3$$

Dari model tersebut, diperoleh suatu tabel klasifikasi yang melihat ketepatan model dalam memprediksi variabel respon. Tabel klasifikasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Tabel Klasifikasi Model

Pengamatan	Prediksi		Persentase Ketepatan
	Miskin	Tidak miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)
Miskin	2173764	2263	99,90
Tidak miskin	128513	1410	1,10
Persentase keseluruhan			94,30

Sumber: (Hasil Analisis, 2017)

Dari tabel klasifikasi, diperoleh bahwa persentase ketepatan adalah 94,30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat memprediksi nilai variabel respon dengan sangat baik.

Persamaan regresi menghasilkan odds ratio sebagai berikut

Tabel 6. Nilai *odds ratio* variabel prediktor

Variabel	<i>Odds ratio</i>
(1)	(2)
Status perkawinan KRT*	1,068
Status bekerja KRT*	0,891
Jumlah anak dalam rumah tangga*	1,939

Catatan*: Variabel signifikan memengaruhi kemiskinan rumah tangga anak

Odds ratio dari status perkawinan KRT adalah sebesar 1,068. Hal ini berarti apabila KRT berstatus cerai (dibandingkan kawin), maka akan meningkatkan kecenderungan suatu rumah tangga untuk menjadi miskin sebesar 1,068 kali. Hasil ini sesuai dengan penelitian Bradshaw, et al. (2006) yang menemukan bahwa status perkawinan KRT signifikan memengaruhi status kemiskinan anak. Hal ini dikarenakan dengan orang tua yang lengkap, kemungkinan anak untuk tinggal dalam rumah tangga di mana setidaknya satu orang tua bekerja semakin tinggi jika dibandingkan dengan orang tua tunggal (Chen dan Corak, 2008).

Kemudian, status bekerja KRT memberikan nilai odds ratio sebesar 0,891. Artinya, apabila KRT tidak bekerja, maka akan meningkatkan kecenderungan suatu rumah tangga untuk menjadi miskin sebesar 1,122 kali. Kecenderungan

ini sesuai dengan penelitian Nolan dan Farrell (1990) yang menemukan bahwa status bekerja KRT signifikan memengaruhi status kemiskinan anak. Dengan adanya KRT yang bekerja, maka akan meningkatkan biaya hidup anak dalam rumah tangga dibandingkan ketika KRT berstatus tidak bekerja.

Selanjutnya, odds ratio dari jumlah anak dalam rumah tangga adalah sebesar 1,939. Nilai ini dapat diartikan apabila jumlah anak bertambah 1, maka akan meningkatkan kecenderungan suatu rumah tangga anak untuk menjadi miskin sebesar 1,939 kali. Penemuan ini sesuai dengan penelitian Brady (2004) yang menemukan bahwa jumlah anak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan anak. Anak yang tinggal dalam rumah tangga dengan jumlah saudara lebih sedikit lebih mungkin untuk hidup dengan standar hidup yang tinggi. Dengan sedikitnya jumlah anak, tiap anak memperoleh biaya hidup yang lebih besar dibandingkan ketika memiliki banyak anak (Chen dan Corak, 2008).

D. Penutup

Kesimpulan: Penelitian ini bertujuan untuk untuk meneliti karakteristik anak miskin di Provinsi Banten dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga anak di Provinsi Banten adalah sebesar 5,63 persen. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, persentase rumah tangga anak miskin tertinggi adalah Kabupaten Lebak sebesar 16,00 persen. Persentase rumah tangga anak miskin terendah adalah Kota Tangerang Selatan, yaitu sebesar 0,40 persen.

Dari analisis regresi logistik, diperoleh bahwa status perkawinan KRT, status bekerja KRT, dan jumlah anak dalam rumah tangga signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga anak. Apabila KRT berstatus cerai, maka rumah tangga anak lebih cenderung untuk tergolong miskin dibandingkan apabila KRT berstatus kawin. Kemudian, KRT berstatus tidak bekerja akan meningkatkan kecenderungan

rumah tangga anak untuk tergolong miskin. Terakhir, angka odds ratio sebesar 1,939 ini dapat diartikan apabila jumlah anak bertambah 1, maka akan meningkatkan kecenderungan suatu rumah tangga anak untuk menjadi miskin sebesar 1,939 kali sehingga semakin banyak jumlah anak dalam rumah tangga maka akan meningkatkan kecenderungan anak untuk tergolong miskin. Kemiskinan tersebut mengakibatkan anak tidak dapat menempuh jenjang pendidikan yang layak untuk mendukung masa depannya. Akibatnya, terjadi lingkaran kemiskinan yang terulang kembali antar generasi. Kecenderungan untuk menjadi miskin sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang. Mereka yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak serta masa kecil yang bahagia menjadi hilang karena keterbatasan kasih sayang orang tua, kondisi ekonomi keluarga, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja atau berbagai alasan lainnya. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat merekalah adalah penerus bangsa ini nantinya.

Rekomendasi: Berdasarkan penelitian ini ditemukan berbagai permasalahan yang tentunya perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mengatasi kemiskinan anak antara lain :

1. Upaya yang lebih konkrit lagi dari Pemerintah khususnya Pemda Prov Banten dan stakeholder terkait yaitu Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial dalam pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga miskin misalnya pembimbingan keterampilan usaha serta wadah pemasarannya, Program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan fasilitasi kesehatan murah dan mudah, pendidikan formal dan informal serta bantuan dana untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. Adanya kebijakan untuk memberikan layanan program keluarga berencana dan mengkampanyekan keluarga kecil bahagia. Dengan begitu, keluarga dapat menyeimbangkan antara pendapatan, pengeluaran, dan tabungan untuk masa de-

pan. Selanjutnya pemberian jaminan sosial untuk keluarga dengan banyak anak. Hal ini dilakukan untuk mengangkat keluarga tersebut dari kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan apabila terjadi krisis ekonomi.

2. Adanya pengawasan dan pendampingan pada program penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga jenjang Perguruan tinggi agar tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang tidak sekolah.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas ijinnyalah penulis dapat menyelesaikan Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Endan Suwandana, ST, M.Sc., Ph.D. dan Euis Mulyaningsih, ST, MT yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat widyaiswara BPS yang telah memberikan dukungan dan masukkannya pada penulisan penelitian ini.

Pustaka Acuan:

- Badan Pusat Statistik. (2017). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2017. Jakarta
- BPS Prov. Banten. (2017). *Berita Resmi Statistik*, Serang: BPS Prov. Banten
- Bradshaw, J. et al. (2006). *Child Poverty in Large Families*. Bristol: The Policy Press.
- Bradshaw, J. (2002). *Child Poverty and Child Outcomes*. Children & Society, Vol. 16.
- Brady, D. (2004). *Reconsidering the Divergence Between Elderly, Child, and Overall Poverty*. Research on Aging, Vol. 26 (5).
- Byegon, I.K. (2014). *An Analysis of Child Deprivations and Inequalities in Kenya* [Disertasi]. Kenya: University of Nairobi.
- Casimiro, et al. (2013). *A Multidimensional Approach to Child Poverty in The Philippines*. 12th National Convention on Statistics.
- Chen, W. dan Corak, M. (2008). *Child Poverty and Changes in Child Poverty*. Demography, Vol. 45 (4).
- Fertig, M. dan Tamm, M. (2009). *Always Poor or Never Poor and Nothing in Between? Duration of Child Poverty in Germany*. German Economic Review, Vol. 11 (2).
- Graham-McGregor (2007). *Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries*. Lancet, Vol. 369 (9555).
- Moore, K.A. (2009). *Children in Poverty: Trends, Consequences, and Policy Options*. Child Trends Research Brief.
- Nolan, B. dan Farrell, B. (1990). *Child Poverty in Ireland*. Dublin: Combat Poverty Agency.
- Whiteford, P. dan Adema, W. (2007). *What Works Best in Reducing Child Poverty: A Benefit or Work Strategy?*. OECD Social, Employment, and Migration Working Papers No. 51. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Orbeta Jr, A.C. (2006). *The More The Poorer: Why Large Family Size Causes Poverty*. Philippine Institute for Development Studies.

Hubungan antara Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral, Interaksi Ibu-Anak, dan Karakter Tekun Anak Usia Sekolah pada Keluarga di Slum Area

The Relationship between Mother's Spiritual Intelligence, Moral Socialization, Mother-Child Interaction, and Persistence Character of School Age Children in Slum Area Families

Rizki Rulita Putri¹, Dinda Ayu Az'zahrah², dan Alfiasari³

Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University

Email: ²dindayuazz@gmail.com ¹kikitalitaa@gmail.com ³alfiasari@apps.ipb.ac.id

diterima 27 Desember 2018, diperbaiki 29 Desember 2018, disetujui 30 Desember 2018

Abstract

Parental factors such as mother's spiritual intelligence, mother's moral socialization, and mother-child interaction can affect the child's persistence character. The objectives of this research were to: identify and analyze the relationship between family and child characteristics, mother's spiritual intelligence, moral socialization, and mother-child interaction with the persistence character of children in urban slums. This study used a cross-sectional study design and purposive selection of location. Respondents of this study included 44 mothers and 44 children aged 6-12 years in formal school, and lived in slum areas, in one of the North Jakarta areas. The results showed that the average achievement of mother's spiritual intelligence, mother's moral socialization, mother-child interaction, and persistence character of children were in a fairly good category. Correlation test results showed that the size of the family, mother's spiritual intelligence, moral socialization, and mother-child interaction were significantly related to the persistence character of school-age children. It is recommended that the involvement of the government and the community of family observers is needed through counseling on the importance of mother's spiritual and moral intelligence, as well as mother and child interactions.

Keywords: *moral socialization; mother's spiritual intelligence; mother-child interaction; persistence character; slum area*

Abstrak

Faktor orang tua seperti kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, serta interaksi ibu-anak dapat memengaruhi karakter tekun anak. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis hubungan karakteristik keluarga dan anak, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, serta interaksi ibu-anak dengan karakter tekun anak di wilayah kumuh perkotaan. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional study* dan pemilihan lokasi secara *purposive*. Responden penelitian ini meliputi 44 ibu dan 44 anak berusia 6-12 tahun bersekolah formal, serta tinggal di pemukiman kumuh (*slum area*), di salah satu kawasan Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, interaksi ibu-anak, dan karakter tekun anak berada pada kategori cukup baik. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa besar keluarga, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, dan interaksi ibu-anak berhubungan positif nyata dengan karakter tekun anak usia sekolah. Hubungan yang positif signifikan juga terjadi antara kecerdasan spiritual ibu dengan sosialisasi moral. Interaksi ibu-anak dengan sosialisasi moral dan kecerdasan spiritual ibu juga menunjukkan hubungan yang sangat signifikan.

Kata Kunci: *interaksi ibu-anak; karakter tekun; kecerdasan spiritual ibu; sosialisasi moral ibu; pemukiman kumuh.*

A. Pendahuluan

Salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah me-

ningkatkan kualitas kehidupan pada beberapa kelompok marginal, seperti kelompok keluarga miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statis-

tika (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 10,64 persen. Jumlah tersebut meliputi wilayah perdesaan dan perkotaan di Indonesia, termasuk wilayah ibu kota yaitu DKI Jakarta. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebesar 389.690 ribu orang dan mengalami peningkatan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya (BPS 2017). Kemiskinan di perkotaan memiliki karakter berbeda dengan kemiskinan di perdesaan. Kemiskinan di perdesaan cenderung disebabkan oleh rendahnya fasilitas penunjang, salah satunya fasilitas pendidikan yaitu bangunan sekolah. Selain itu, masyarakat miskin perdesaan biasanya juga kurang berpendidikan jika dibandingkan dengan masyarakat miskin perkotaan (World Bank, 2013). Kemiskinan perkotaan meliputi beberapa dimensi, yaitu rendahnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan, kerawanan tempat tinggal, dan ketidakberdayaan. Apabila dilihat dari tempat tinggal, mayoritas penduduk miskin perkotaan tinggal di beberapa jenis area/daerah yaitu daerah kumuh (*slum area*), daerah bantaran kali (*riverside area*), dan daerah pesisir (*seaside area*) (Heriawan, 2007).

Hadirnya kawasan kumuh perkotaan sering kali dianggap sebagai sebuah masalah karena biasanya kawasan kumuh tersebut menjadi pusat kriminalitas, kenakalan remaja, dan juga perilaku menyimpang (Basir 2012). Menurut Chomariah (2015), *slum area* sering kali dicirikan dengan tingginya perilaku menyimpang dan kriminalitas, yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh remaja dan anak-anak. Hal ini mengindikasikan resiko yang tinggi akan rendahnya karakter remaja dan anak-anak di pemukiman tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya yang dapat mengubah kehidupan anak di wilayah miskin perkotaan ke arah yang lebih baik. Menurut Dalimunthe (2017), pemerintah memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat miskin perkotaan, khususnya pada sektor sosial, ekonomi dan pendidikan.

Penelitian Prasetyo *et al.* (2017) membuktikan bahwa jumlah perilaku pelanggaran pada siswa cenderung menurun dan mengarah pada perilaku setelah adanya program *social behavior* oleh pemerintah yang dilakukan di sekolah. Hal tersebut membuktikan bahwa program pemerintah khususnya dalam sektor pendidikan menjadi salah satu upaya yang baik dalam meningkatkan karakter anak khususnya di pemukiman kumuh (*slum area*). Tidak hanya peran pemerintah, peran nonpemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat juga dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di *slum area*. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih banyak kajian empiris tentang masyarakat di *slum area* sehingga pengembangan program kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut dapat lebih efektif. Apabila dilihat dari karakteristik lingkungan, anak yang bertempat tinggal di *slum area* cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi akan rendahnya karakter. Hal ini dikarenakan keluarga di *slum area* memiliki kondisi lingkungan yang banyak memiliki keterbatasan seperti langka akan akses air bersih, sistem sanitasi, dokumen resmi, serta kondisi rumah yang tidak layak huni (UNICEF 2012).

Lickona (2012) menjelaskan bahwa karakter merupakan perilaku, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, dicirikan oleh individu yang mengetahui tentang kebaikan, menginginkan dan mencintai kebaikan, serta melakukan kebaikan. Anak yang berkarakter juga ditandai dengan kematangan emosi dan spiritual (Megawangi, 2009). Karakter yang dimiliki seorang anak mempunyai kekuatan karakter yang bermacam-macam, salah satunya adalah karakter tekun. Menurut Briggs & Ololube (2015) ketekunan merupakan kualitas karakter anak yang akan memberikan manfaat hingga pada masa dewasanya, yang terlihat dari proses anak mempelajari sesuatu. Ketekunan anak juga dicirikan dengan kegigihan dalam mengerjakan tugas secara baik, selalu merasa senang dalam melakukan sesuatu, dan berusaha

ha memecahkan masalah dengan cepat (Jozsa *etal.*, 2014). Hal tersebut merupakan sebuah proses dan dapat dipelajari oleh anak sejak usia prasekolah, dari orang tua, kemudian akan berkembang seiring bertambahnya usia anak.

Hubungan antara orang tua dan anak juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter tekun. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Sari (2016) mengenai ketekunan anak dalam belajar yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perhatian orang tua terhadap ketekunan belajar anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin baik perhatian orang tua maka ketekunan belajar anak juga akan semakin baik. Yunus (2017) dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa karakter tekun anak berhubungan dengan pengasuhan orang tua, khususnya pengasuhan ayah.

Keluarga menjadi salah satu faktor yang berperan penting serta memiliki kontribusi yang besar terhadap proses perkembangan anak. Berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner yang dijelaskan melalui pendekatan ekosistem dalam menganalisis lingkungan keluarga, terdapat beberapa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan yang terdekat adalah lingkungan mikrosistem, selanjutnya lingkungan mesosistem, kemudian lingkungan eksosistem, dan terakhir lingkungan yang paling luas yaitu lingkungan makrosistem (Puspitasari, 2013). Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal keluarga termasuk ke dalam lingkungan mikrosistem dan menjadi lingkungan yang paling dekat dan memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Dalam lingkungan mikrosistem ini juga terjadi proses sosialisasi anak melalui interaksi yang terjadi di dalam keluarga. Salah satu proses sosialisasi tersebut dapat berupa sosialisasi mengenai nilai-nilai moral dan karakter.

Sosialisasi adalah proses interaksi sosial manusia sejak lahir dalam memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, perilaku, dan berbagai keterampilan (Berns 2012). Sosialisasi nilai

karakter oleh orang tua terhadap anak dilakukan melalui berbagai metode sosialisasi seperti teladan, penjelasan, penetapan standar, penguatan positif, dan hukuman (Pasaribu *et al.*, 2013). Hal serupa juga dijelaskan oleh Hoffman (2000) yang mengatakan bahwa proses sosialisasi dalam keluarga, terutama strategi disiplin orang tua secara signifikan berhubungan dengan pengembangan nurani anak pada masa-masa awal. Dalam hal tersebut, orang tua menggunakan penjelasan dan penalaran kepada anak untuk menyampaikan standar perilaku, meminta agar anak berperilaku sesuai dengan standar tersebut, menekankan konsekuensi perilaku buruk anak. Hal ini dapat dilakukan orang tua dalam interaksinya bersama anak melalui proses pengasuhan. Hasil penelitian Pasaribu *et al.* (2013) membuktikan bahwa semakin beragam metode sosialisasi karakter yang diberikan orang tua maka semakin baik karakter remaja. Umasyah & Alfiasari (2016) juga menemukan hubungan yang signifikan dari semakin beragamnya metode sosialisasi karakter ibu dengan semakin baiknya karakter anak usia sekolah di perdesaan.

Selain sosialisasi moral yang tepat, dalam mengembangkan karakter anak juga diperlukan kecerdasan spiritual orang tua yang memadai. Dalam penelitiannya, Puspitasari *et al.* (2016) membuktikan bahwa kecerdasan spiritual orang tua, terutama ibu berhubungan dengan karakter anak. Selain peran penting kecerdasan spiritual ibu terhadap karakter anak, Puspitasari *et al.* (2016) juga menemukan bahwa ibu dengan anak laki-laki memiliki adaptasi kecerdasan spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu anak perempuan. Dengan memiliki kecerdasan spiritual, orang tua memiliki kecerdasan yang dapat mendukungnya dalam memfungsikan, mengadaptasi, dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan (Hosseini *et al.*, 2010). Kecerdasan spiritual juga akan memberikan kemampuan dalam membedakan mana perilaku yang baik dan buruk, menjadikan manusia lebih kreatif

dalam memecahkan masalah, dan bahkan menjadi fungsi dasar yang diperlukan dalam kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ) (Zohar & Marshall, 2000). Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik cenderung mampu bersikap bijaksana, kreatif dalam membangun komunikasi dengan anak, serta mampu menyampaikan nilai-nilai moral dengan baik dalam interaksinya bersama anak.

Interaksi orang tua dengan anak dapat dilihat dari kualitas kebersamaan yang terjalin di antara keduanya (Ingranurindani, 2010). Interaksi antara orang tua dan anak diwujudkan dalam komunikasi, kegiatan yang dilakukan bersama, perbuatan saling tolong-menolong, cinta kasih, serta di saat mengatasi konflik (Dixson *et al.*, 2014). Hal yang sama diungkapkan oleh Asih (2012) yang menyatakan bahwa interaksi dalam keluarga dapat berupa komunikasi, kualitas hubungan, *bonding*, dan pengasuhan. Dalam pengasuhan, proses interaksi, peran orang tua khususnya ibu dalam membangun kelekatan atau perasaan aman menjadi hal yang penting bagi perkembangan dan pembentukan karakter anak (Dewanggi *et al.*, 2014).

Nilai-nilai karakter yang tertanam pada diri anak tidak terbentuk begitu saja, melainkan terdapat peran orang tua, khususnya ibu. Menurut Puspitasari *et al.* (2016) peran ibu dapat terlihat melalui kualitas interaksinya bersama anak. Kualitas tersebut dicirikan dengan kondisi ibu yang stabil dapat menangani dan memperbaiki perilaku anak, terutama perilaku yang melanggar aturan moral. Kondisi tersebut sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi periode anak usia sekolah dasar. Papalia *et al.* (2008) mengatakan bahwa anak usia sekolah dasar menyukai seseorang yang baik kepadanya dan akan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Oleh karenanya, penting bagi orang tua terutama ibu yang memiliki anak usia sekolah untuk memiliki kemampuan yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan karakter

anak dengan memiliki kecerdasan spiritual yang baik, serta sosialisasi moral yang tepat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sosialisasi moral, kecerdasan spiritual, dan karakter anak, maka menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, dan interaksi ibu-anak dengan karakter anak usia sekolah, terutama karakter tekun khususnya pada anak-anak di wilayah kumuh (*slum area*). Hal ini menjadi penting dikarenakan ketika orang tua tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik, maka akan menjadi sulit untuk berpikir fleksibel, cenderung memiliki kesadaran rendah, tidak bijaksana, sulit beradaptasi, serta tidak mampu berpikir holistik (Zohar dan Marshall 2000). Hal tersebut tentu dapat berdampak buruk pada karakter anak, karena karakter anak juga dapat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual ibu yang rendah (Puspitasari *et al.* 2016).

Tujuan dari penelitian terkait kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, interaksi ibu-anak dan karakter tekun anak usia sekolah pada keluarga di *slum area* ini adalah: 1) Mengidentifikasi karakteristik keluarga dan anak, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, interaksi ibu-anak, serta karakter tekun anak usia sekolah pada keluarga di *slum area*; 2) Menganalisis hubungan karakteristik keluarga dan anak, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, dan interaksi ibu-anak dengan karakter tekun anak usia sekolah pada keluarga di *slum area*.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah *cross sectional study*. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive* yakni salah satu pemukiman kumuh (*slum area*) di wilayah Jakarta Utara. Pemilihan lokasi penelitian memenuhi syarat pemukiman dengan karakteristik miskin perkotaan menurut BPS (Heriawan, 2007) seperti rendahnya tingkat pendapatan, ketidakberdayaan, dan tinggal di daerah *slum area*. Anak yang bertempat ting-

gal di lokasi penelitian ini berasal dari keluarga yang terkategori miskin dengan karakteristik tempat tinggal kumuh, berada di sekitar rel kereta, dan minim fasilitas. Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Maret 2018. Populasi penelitian ini adalah anak dengan ibu yang bertempat tinggal di salah satu pemukiman kumuh (*slum area*) di Jakarta Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 44 ibu dan 44 anak berusia 8-12 tahun yang bersekolah formal, serta tinggal di pemukiman kumuh (*slum area*), di salah satu kawasan Jakarta Utara, serta bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Sampel dipilih secara *convenience* sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut di antaranya anak berusia 8-12 tahun yang memiliki ibu, bersekolah formal, dan tinggal di lokasi penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah anak dan ibu sesuai dengan kriteria dan bersedia diwawancara.

Jumlah responden diperoleh melalui proses seleksi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sekitar tiga ratus keluarga di lokasi penelitian. Dalam proses menentukan responden, peneliti dibantu oleh seorang informan yang berasal dan mengenal lokasi penelitian dengan baik. Peneliti dibantu seorang informan mendatangi rumah-rumah keluarga yang sesuai dengan kriteria untuk ditanya mengenai kesediannya menjadi responden. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi anak usia sekolah dengan rentang usia 8-12 tahun di lokasi penelitian. Anak usia sekolah terpilih adalah yang masih memiliki dan tinggal bersama ibunya, serta bersekolah formal. Usia 8-12 tahun dipilih sebagai kriteria dikarenakan pada usia tersebut, kemampuan anak sudah cukup berkembang. Anak sudah dapat bertanggung jawab atas tugas yang diterima, mampu mematuhi peraturan, dan sudah dapat mengendalikan emosinya (Gunarsa, 2008).

Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan pada anak dan orang tua khususnya ibu, dengan alat bantu kuesioner. Data yang dikumpulkan adalah data primer.

Data primer meliputi karakteristik keluarga, karakteristik anak, kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, dan karakter tekun anak.

Instrumen kecerdasan spiritual ibu dalam penelitian ini merupakan alat ukur kecerdasan spiritual ibu yang dikembangkan oleh Puspitasari *et al.* (2016) yang mengembangkan konsep *Measure of Religiosity/Spirituality* (Idler, 1999) dan sembilan aspek kecerdasan spiritual dari Zohar & Marshall (2000). Sembilan aspek kecerdasan spiritual tersebut adalah fleksibel, evaluatif, bijaksana, adaptif, kepemilikan visi dan nilai, bermanfaat, holistik, kepemilikan rasa ingin tahu, dan teguh pendirian. Skala jawaban yang digunakan adalah skala Likert dimulai dari 1= tidak pernah, 2= jarang, 3= sering, dan 4= selalu. Variabel interaksi orang tua-anak diukur dengan menggunakan instrumen *Parent Child Schema Scale* (PCRSS) yang dikembangkan oleh Dixson *et al.* (2014). Kuesioner ini terdiri dari lima aspek (*do together, communication, helping, love/respect, conflict*). Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert 1=tidak pernah, 2=kadang-kadang, 3=sering, 4=selalu. Sementara itu, instrumen sosialisasi moral dan karakter tekun anak diukur menggunakan kuesioner dari tim Hibah Penelitian Berbasis Kompetensi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Hastuti & Alfiasari 2017). Skala jawaban yang digunakan adalah skala Likert dimulai dari 1= tidak pernah, 2= jarang, 3= sering, dan 4= selalu. Setiap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diuji reliabilitas untuk menguji konsistensi instrumen dan uji validitas untuk menguji keabsahan penelitian. Nilai reliabilitas instrumen kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, dan karakter tekun pada penelitian ini secara berturut-turut adalah 0.931, 0.913, 0.831 dan 0.721.

Pengolahan data dilakukan mulai dari tahap *editing, coding, scoring, entering, cleaning, analyze*, dan interpretasi data. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan inferensia dengan menggunakan *Microsoft Excel dan SPSS for*

Windows. Analisis deskriptif mencakup nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum pada data kuantitatif. Analisis inferensia yang digunakan yaitu uji korelasi. Data karakteristik anak meliputi usia, jenis kelamin, dan jumlah saudara. Data jenis kelamin dan urutan kelahiran anak dikodekan secara *dummy*, untuk laki-laki dikodekan menjadi angka 0, sedangkan perempuan dikodekan menjadi angka 1. Sementara itu, untuk anak dengan urutan kelahiran bukan anak pertama dikodekan menjadi 0, sedangkan anak pertama dikodekan menjadi 1. Data karakteristik keluarga meliputi usia orang tua (ayah dan ibu), lama pendidikan orang tua (ayah dan ibu), pekerjaan orang tua (ayah dan ibu), pendapatan keluarga, dan besar keluarga. Data usia orang tua diukur berdasarkan tahun, lalu dikelompokkan berdasarkan kategori dewasa awal (20-40 tahun), dewasa menengah (41-60 tahun), dewasa akhir (>60 tahun) (Santrock 2012). Pekerjaan orang tua dibedakan secara *dummy* menjadi tidak bekerja (kode 0) dan bekerja (kode 1).

Pemberian skor pada variabel penelitian dibuat secara konsisten, kemudian dibuat dalam bentuk indeks, yaitu mentransformasikan nilai skor variabel ke dalam interval 0-100, dengan kategori: (1) kurang baik: 0-60, (2) cukup baik: >60-80, dan (3) baik: >80-100.

C. Hubungan antara Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral, Interaksi Ibu-Anak, dan Karakter Tekun

Gambaran Umum Lokasi

Lokasi penelitian ini terkategori sebagai wilayah miskin perkotaan, terletak di pemukiman padat penduduk bernama Kampung Dao. Kampung Dao berlokasi di sepanjang perlintasan kereta api Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pemukiman ini pada dasarnya merupakan bangunan yang ilegal atau tidak memiliki izin administratif untuk membangun hunian. Mayoritas bangunan rumah di pemukiman ini hanya memiliki luas

sekitar 25m², merupakan rumah darurat /semi permanen, serta berlokasi di sekitaran tempat pembuangan akhir. Tidak hanya itu, pemukiman ini cenderung langka akan air bersih, fasilitas MCK, serta fasilitas penunjang lain. Kondisi di pemukiman ini tentu tidak layak huni, serta berpotensi memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak.

Karakteristik Anak dan Keluarga

Responden anak usia sekolah dalam penelitian ini terdiri dari 13 anak laki-laki berusia rata-rata 10,26 tahun dan 31 anak perempuan berusia rata-rata 10,34 tahun. Dari 44 anak, sebesar 34,1 persennya merupakan anak pertama. Secara keseluruhan, anak memiliki ayah dengan rata-rata usiayang berada pada kategori dewasa menengah (42,32 tahun) dan ibu berusia dewasa awal (38,93 tahun) (Santrock 2012). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 29,5 persen ibu yang bekerja, sedangkan pada ayah persentasenya jauh lebih besar yaitu sebesar 90,9 persen ayah berstatus bekerja. Jenis pekerjaan yang paling banyak dimiliki oleh ayah dan ibu adalah buruh dan pedagang. Rata-rata jumlah anggota keluarga (5 orang) termasuk dalam kategori keluarga sedang (BKKBN 2005), dengan rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp 1.628.571,43 per bulan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasar analisis, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan ayah yaitu selama 7,98 tahun dan ibu 6,23 tahun (Tabel 1). Hal tersebut menunjukkan dalam hal lama pendidikan, ayah lebih baik jika dibandingkan dengan ibu. Rata-rata lama pendidikan ayah dalam penelitian ini sejalan dengan data BPS (2017) yang menyebutkan bahwa rata-rata lama pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia adalah 7,95 tahun. Apabila dilihat dari persentase terbesar, sebanyak 34,1 persen ayah memiliki lama pendidikan sembilan tahun atau setara tamat SMP, sedangkan 31,8 persen ibu memiliki lama pendidikan enam tahun atau setara tamat SD. Oleh karena itu, berdasarkan

Tabel 1 Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Karakteristik Anak dan Keluarga

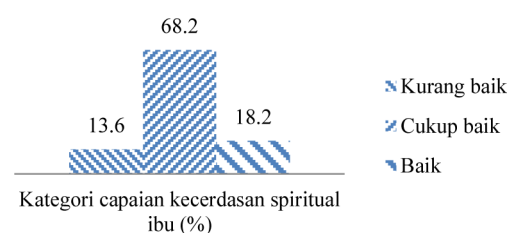
Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata±Standar Deviasi
Usia anak (tahun)	8,00	12,00	10,34±1,24
Urutan kelahiran (urutan)	1,00	9,00	2,52±1,92
Jumlah saudara kandung (orang)	0,00	10,00	2,66±1,98
Usia ayah (tahun)	23,00	60,00	42,32±8,56
Usia ibu (tahun)	24,00	60,00	38,93±8,96
Lama pendidikan ayah (tahun)	0,00	16,00	7,98±3,16
Lama pendidikan ibu (tahun)	0,00	12,00	6,23±3,50
Besar keluarga (orang)	3,00	13,00	5,55±1,81
Pendapatan keluarga (Rp/bulan)	5000.000,00	3.500.000,00	1628571,43±866131,44

rata-rata keseluruhan dan persentase terbesar, dapat disimpulkan pendidikan ayah lebih baik dibandingkan ibu.

Kecerdasan Spiritual Ibu

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang berada pada bagian dalam diri dan melekat sebagai sebuah karakteristik seseorang (Mossa & Ali, 2011). Penelitian ini melihat kecerdasan spiritual sebagai karakteristik ibu yang tercermin dari beberapa kemampuan ibu seperti mampu bersikap fleksibel, evaluatif, bijaksana dan teguh pendirian. Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan capaian kecerdasan spiritual ibu cukup baik dengan rata-rata indeks sebesar $71,88 \pm 10,11$. Hal ini berarti, ibu sering kali merasakan kehadiran Tuhan, tersentuh dengan ciptaan-Nya, serta sering kali bersedia menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Puspitasari *et al.* (2016) yang membuktikan bahwa ibu di wilayah perdesaan memiliki rata-rata kecerdasan spiritual yang tergolong cukup baik. Ibu dengan kecerdasan spiritual cukup baik dalam penelitian ini terlihat dari kesadaran ibu akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar, serta kesadaran diri untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Seseorang dengan kecerdasan spiritual yang baik akan memiliki peningkatan kualitas hidup, kompatibilitas dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan sehari-hari (Mossa & Ali, 2011).

Berdasarkan hasil pengkategorian, dua dari 11 responden ibu (18,2%) memiliki kecerdasan spiritual yang tergolong baik (Gambar 1). Kecerdasan spiritual ibu yang baik dibuktikan dengan keyakinan ibu bahwa dirinya mampu menghadapi kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Sementara itu, ibu dengan kategori kecerdasan spiritual rendah (13,6%) terlihat dari pernyataan sebagian ibu yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah atau jarang berolahraga, tidak begitu senang berinteraksi dengan tetangga, serta sering tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Ibu dengan rata-rata capaian kecerdasan spiritual terendah (Tabel 3) merupakan ibu rumah tangga, berusia dewasa awal dengan anak perempuan, serta memiliki besar keluarga lebih dari lima orang.



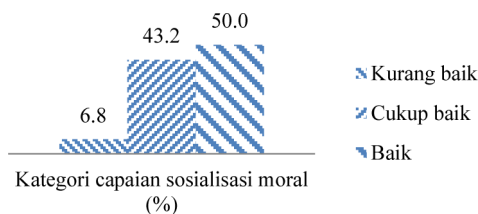
Gambar 1. Sebaran ibu berdasarkan kategori capaian kecerdasan spiritual ibu

Sosialisasi Moral Ibu

Sosialisasi moral merupakan proses bertahap yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam mengubah sebuah pemahaman menjadi nilai yang nantinya akan digunakan anak dalam menjalani kehidupannya (Rozin, 1999). Penelitian ini melihat sosialisasi moral ibu dalam mengajarkan nilai ketekunan yang didasarkan pada

rasa tanggung jawab anak terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Gambar 2, didapatkan hasil bahwa terdapat 6,8 persen ibu yang terkategori memiliki sosialisasi moral yang kurang baik. Ibu dengan sosialisasi moral yang kurang baik dicirikan dengan perilaku ibu yang tidak pernah menemani anak belajar di rumah, serta tidak pernah membantu anak mengerjakan tugas sekolah (PR). Tidak hanya memiliki sosialisasi moral yang terkategori kurang baik, seluruh ibu dalam kategori ini juga terbukti memiliki kecerdasan spritual yang terkategori kurang baik.

Hasil yang disajikan pada Gambar 2 menunjukkan setengah (50%) dari responden ibu berada pada kategori sosialisasi moral yang baik. Ibu dengan sosialisasi moral yang baik ditandai dengan perilaku ibu yang selalu meminta anak untuk meletakkan perlengkapan sekolah pada tempatnya, berangkat sekolah tepat waktu, dan menghabiskan setiap makanan yang diambil.



Gambar 2. Sebaran ibu berdasarkan kategori capaian sosialisasi moral ibu

Secara keseluruhan, indeks rata-rata sosialisasi moral ibu dalam penelitian ini adalah sebesar $75,76 \pm 14,63$ (Tabel 3). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ibu sudah melakukan sosialisasi moral dengan cukup baik. Sosialisasi moral yang baik terhadap anak

terlihat dari konsistensi ibu dalam menerapkan aturan, memberikan penjelasan akan peraturan tersebut, serta memberi contoh terhadap anak untuk selalu disiplin. Pasaribu *et al.* (2013) menjelaskan terdapat berbagai macam metode sosialisasi yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak di antaranya adalah dalam bentuk teladan, penjelasan, penetapan standar, penguatan positif, dan hukuman.

Interaksi Ibu-Anak

Interaksi ibu-anak dalam penelitian ini diukur berdasarkan beberapa dimensi yaitu hal yang dilakukan bersama, komunikasi, tolong menolong, cinta kasih, dan konflik. Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa capaian tertinggi berdasarkan dimensi interaksi ibu-anak adalah dimensi cinta kasih dengan rata-rata sebesar $85,76 \pm 13,53$. Hal ini terlihat dari pernyataan ibu yang menyatakan bahwa anak dan ibu saling menyayangi dan merasa bahagia satu sama lain. Sementara itu, capaian terendah terdapat pada dimensi hal yang dilakukan bersama sebesar $65,37 \pm 15,83$. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu dan anak jarang melakukan kegiatan bersama, misalnya jalan-jalan atau tamasya di waktu libur.

Pada dimensi konflik nilai rata-ratanya adalah sebesar $70,83 \pm 11,01$ (Tabel 2). Pertanyaan pada dimensi konflik merupakan pertanyaan yang bersifat positif, sehingga nilai rata-rata dimensi ini menunjukkan makna bahwa jarang terjadi konflik di antara ibu dan anak. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan ibu yang menyatakan bahwa ibu dan anak saling berbuat baik satu sama lain, serta berjanji untuk tidak melakukan hal yang tidak disukai.

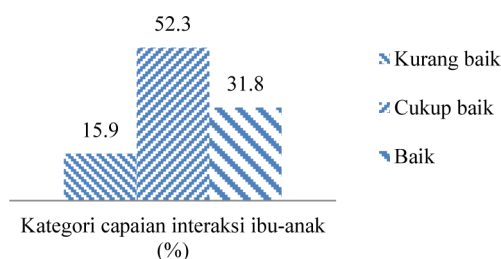
Tabel 2 Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Dimensi Interaksi Ibu-Anak

Dimensi Interaksi Ibu-Anak	Min-Max	Rata-rata $\pm$ Standar deviasi
Hal yang dilakukan bersama	26,66-100,00	65,37 $\pm$ 15,83
Komunikasi	40,47-92,85	74,45 $\pm$ 12,42
Tolong menolong	33,33-88,89	69,02 $\pm$ 12,83
Cinta kasih	40,00-100,00	85,76 $\pm$ 13,53
Konflik	50,00-100,00	70,83 $\pm$ 11,01

Berdasarkan kategori capaian interaksi ibu-anak, persentase terbesar (52,4%) berada pada kategori cukup baik, dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil ini sejalan dengan total rata-rata capaian interaksi ibu yang menunjukkan nilai sebesar $72,02 \pm 11,28$ (Tabel 3).

Secara keseluruhan interaksi ibu-anak sudah terjalin cukup baik. Hal ini terlihat dari sudah baiknya ibu dalam menjalin komunikasi, membangun aktifitas bersama, menyalurkan rasa cinta kasih, berusaha untuk saling tolong menolong, serta terbilang hampir tidak pernah atau jarang terlibat konflik. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Dixon *et al.* (2014) yang mengatakan bahwa cinta kasih, berkomunikasi, melakukan kegiatan bersama, tolong-menolong, serta mengatasi konflik adalah wujud interaksi antara orang tua dan anak yang dapat menciptakan keharmonisan.

Berdasarkan hasil penelitian, anak dan ibu juga sudah cukup baik dalam berkomunikasi seperti selalu rutin berbicara bersama dan memahami satu sama lain.

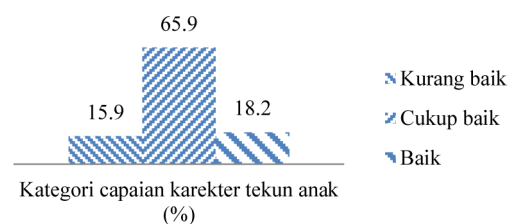


Gambar 3. Sebaran ibu berdasarkan kategori capaian interaksi ibu-anak

Karakter Tekun Anak Usia Sekolah

Ketekunan merupakan kualitas karakter anak yang dapat dilihat dari proses anak mempelajari sesuatu (Briggs dan Ololube 2015). Menurut Peterson dan Seligman (2004) ketekunan dicirikan dengan menyelesaikan apa yang dimulai, bertahan dalam suatu kegiatan meskipun ada hambatan, serta menikmati proses dalam menyelesaikan suatu tugas. Penelitian ini melihat karakter tekun sebagai nilai kebaikan yang dimiliki oleh anak, dan didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap diri

sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hasil penelitian (Gambar 4) menunjukkan bahwa lebih dari setengah (65,9%) anak memiliki karakter tekun yang cukup baik. Anak dengan karakter tekun kurang baik dengan yang tergolong baik menunjukkan hasil tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing sebesar 15,9 persen dan 18,2 persen. Dari keseluruhan anak dengan kategori capaian karakter tekun yang kurang baik, tiga anak diantaranya memiliki ibu dengan capaian kecerdasan spiritual dan sosialisasi moral yang juga tergolong kurang baik.



Gambar 4 Sebaran anak berdasarkan kategori capaian karakter tekun anak usia sekolah

Karakter tekun anak yang masih tergolong rendah atau kurang baik terlihat dari masih kurangnya perhatian anak terhadap kelestarian lingkungan. Anak hampir tidak pernah atau jarang merawat tanaman dan hewan dikarenakan kondisi tempat tinggal yang tidak memungkinkan. Anak dengan karakter baik ditandai dengan perilaku anak yang selalu mengikuti piket sekolah dan kerja bakti, serta selalu mengerjakan PR sendiri tanpa menyontek. Secara keseluruhan, karakter tekun anak sudah cukup baik dengan rata-rata indeks sebesar $68,99 \pm 9,10,5$ (Tabel 3). Hal ini berarti, secara keseluruhan anak sudah cukup baik dalam menerapkan rutinitas belajar, selalu meletakkan barang yang digunakan ke tempat semula, serta datang ke sekolah tepat waktu. Anak sudah mampu mengerjakan tugas sekolah secara mandiri tanpa melihat pekerjaan teman, serta mampu secara rutin melakukan tugas piket dan kerja bakti di lingkungan sekolah. Akan tetapi sebagian besar anak mengaku tidak pernah ikut kegiatan belajar bersama teman sekolah dikarenakan lokasi rumah yang sulit diakses dan jauh dari lokasi rumah teman-

Tabel 3. Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-Rata, dan Standar Deviasi Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral Ibu, Interaksi Ibu-Anak, dan Karakter Tekun Anak Usia Sekolah

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata±Standar Deviasi
Kecerdasan Spiritual Ibu	45,83	88,09	71,88±10,11
Sosialisasi Moral Ibu	47,62	95,24	75,76±14,63
Total interaksi ibu-anak	44,44	88,09	72,02 ±11,28
Karakter Tekun Anak Usia Sekolah	41,02	87,18	68,99±10,52

temannya. Pada dasarnya ketekunan seorang anak dapat dilihat dari cara anak menyelesaikan apa yang dimulai, bertahan meskipun ada hambatan, serta menikmati proses di dalamnya (Peterson & Seligman, 2004).

Hubungan Karakteristik Anak dengan Keluarga, Kecerdasan Spiritual dan Sosialisasi Moral Ibu dengan Karakter Tekun

Hasil uji hubungan yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara usia ibu dengan sosialisasi moral ibu ($r=-0,356$; $p<0,05$). Semakin tinggi usia ibu, maka sosialisasi moral ibu akan semakin rendah. Sosialisasi moral juga berhubungan dengan lama pendidikan ayah ($r= 0,414$; $p<0,01$) dan lama pendidikan ibu ($r= 0,395$; $p<0,01$). Selain berhubungan positif dengan sosialisasi moral, lama pendidikan ayah ($r= 0,407$; $p<0,01$) dan lama pendidikan ibu ($r= 0,316$; $p<0,05$) juga berhubungan positif dengan interaksi ibu-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan ayah dan ibu, maka sosialisasi moral ibu dan interaksi ibu-anak juga akan semakin baik. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Umasyah dan Alfiasari (2016) yang menyatakan ada hubungan negatif tidak signifikan antara usia ibu dengan metode sosialisasi. Latar belakang orang tua juga akan berhubungan dengan pilihan orang tua terhadap cara mereka menyosialisasikan suatu nilai kepada anak (Serpell *et al.*, 1997).

Menurut Mossa & Ali (2011), kecerdasan spiritual merupakan bagian dari karakteristik yang melekat pada diri seseorang. Uji hubungan juga membuktikan bahwa terdapat hubung-

an yang negatif antara besar keluarga dengan kecerdasan spiritual ibu ($r= -0,399$; $p<0,01$) dan karakter anak ($r= -0,341$; $p<0,05$). Jumlah anggota keluarga yang semakin besar berbanding terbalik dengan kecerdasan spiritual ibu dan karakter anak yang justru semakin rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal ini dikarenakan semakin besar jumlah anggota keluarga, perhatian ibu akan semakin terfokus hanya kepada anak dan keluarganya. Ibu menjadi lebih sering menghabiskan waktunya di rumah dan cenderung jarang memperhatikan lingkungan sekitar dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual ibu berhubungan dengan sosialisasi moral ibu ($r= 0,549$; $p<0,01$) dan interaksi ibu-anak ($r= 0,579$; $p<0,01$). Semakin tinggi kecerdasan spiritual ibu, maka sosialisasi moral ibu dan interaksi ibu-anak juga akan semakin baik. Hubungan yang positif signifikan juga terjadi antara interaksi ibu-anak dengan sosialisasi moral ibu ($r= 0,698$; $p<0,01$). Artinya semakin baik interaksi ibu-anak, maka sosialisasi moral juga akan semakin baik. Menurut Vig & Jaswal (2014), seorang ibu yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik akan melakukan sosialisasi moral yang baik pula. Ibu berperan dalam penanaman nilai moral terhadap anak, sehingga kecerdasan spiritual dapat dijadikan landasan orang tua dalam mengasuh moral anak. Proses penanaman nilai anak terjadi di dalam pengasuhan, khususnya dalam proses orang tua dan anak berinteraksi. Melalui proses interaksi bersama orang tua, anak memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, perilaku, dan berbagai keterampilan (Berns, 2012).

Tabel 4. Koefisien Korelasi Antara Karakteristik Anak dan Keluarga Dengan Kecerdasan Spiritual Ibu, Sosialisasi Moral Ibu, dan Karakter Tekun

Variabel	Kecerdasan Spiritual Ibu	Sosialisasi Moral Ibu	Interaksi Ibu-Anak	Karakter Tekun
Usia anak (tahun)	-	-0,081	-0,200	0,093
Jenis kelamin anak (0= laki-laki; 1= perempuan)	-	0,037	0,000	0,120
Urutan kelahiran (0=bukan anak pertama; 1=anak pertama)	-	0,191	0,026	0,074
Jumlah saudara kandung (orang)	-	-0,201	-0,125	-0,268
Usia ayah (tahun)	-	-0,225	-0,109	-0,247
Usia ibu (tahun)	-0,149	-0,356*	-0,180	-0,232
Lama pendidikan ayah (tahun)	-	0,414**	0,407**	0,287
Lama pendidikan ibu (tahun)	0,272	0,395**	0,316*	0,258
Pekerjaan ayah (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	-	0,284	0,181	0,047
Pekerjaan ibu (0= tidak bekerja; 1= bekerja)	0,016	0,035	-0,008	-0,187
Pendapatan keluarga (Rp /bulan)	0,050	0,269	-0,010	0,193
Besar keluarga (orang)	-0,399**	-0,230	-0,184	-0,341*
Kecerdasan spiritual ibu	1	0,549**	0,579**	0,398**
Sosialisasi moral ibu	-	1	0,698**	0,511**
Interaksi Ibu-Anak	-	-	1	0,462**

Keterangan: * Signifikan pada $p<0.05$; ** Signifikan pada $p<0.01$

Pada variabel terikat yaitu karakter tekun, menunjukkan adanya hubungan dengan kecerdasan spiritual ($r= 0,398$; $p<0,01$), sosialisasi moral ($r= 0,511$; $p<0,01$), dan interaksi ibu-anak ($r= 0,462$; $p<0,01$). Hal ini berarti bahwa semakin baik kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral, dan interaksi ibu-anak, maka karakter tekun anak juga akan semakin baik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Puspitasari *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual ibu berhubungan nyata dengan karakter anak, namun lebih terlihat pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Kualitas karakter anak juga berkaitan dengan sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan orang tua (Hastuti & Alfiasari, 2015). Ibda (2011) menjelaskan bahwa sosialisasi nilai dan norma yang dilakukan terus-menerus akan meningkatkan kualitas karakter anak. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menemukan hubungan positif signifikan antara sosialisasi moral ibu dengan karakter tekun anak. Landry *et al.* (2001) juga mengatakan bahwa orang tua mempunyai peran penting dalam perkembangan anak yang diwujudkan dalam interaksi di dalam pengasuhan.

D. Penutup

Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan rata-rata usia anak secara keseluruhan adalah 10,34 tahun, dengan proporsi jumlah anak perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Apabila dilihat dari segi pendidikan, lama pendidikan ayah lebih lama dibandingkan dengan ibu. Hampir seluruh ayah berstatus bekerja, sedangkan lebih dari setengah ibu berstatus ibu rumah tangga. Rata-rata capaian kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral tekun, interaksi ibu-anak dan karakter tekun anak berdasarkan indeks, ketiganya berada pada kategori cukup baik. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga justru menyebabkan semakin rendahnya karakter tekun anak usia sekolah. Di sisi lain semakin baik kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, dan interaksi ibu-anak maka akan semakin baik juga karakter tekun anak usia sekolah. Antara kecerdasan spiritual dan sosialisasi moral ibu juga menunjukkan keterkaitan yang bersifat positif. Artinya semakin baik kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu juga akan semakin baik. Di sisi lain, penelitian juga

menunjukkan bahwa interaksi ibu-anak secara nyata berkaitan dengan kecerdasan spiritual dan sosialisasi moral ibu. Ketiga variabel bebas ini (kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, dan interaksi ibu-anak) berhubungan signifikan dengan karakter tekun. Oleh karena itu, untuk menghasilkan karakter tekun yang baik pada anak usia sekolah di *slum area* dibutuhkan kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, dan interaksi ibu-anak yang baik juga.

Rekomendasi: Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, masih perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan kecerdasan spiritual ibu, sosialisasi moral ibu, interaksi ibu-anak, dan karakter tekun. Kepada pemerintah atau komunitas pemerhati keluarga di *slum area*, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual ibu dapat dilakukan kegiatan berupa penyampaian motivasi nilai-nilai spiritualitas oleh tokoh yang dianggap memiliki spiritualitas yang baik di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, orang tua masih kurang baik dalam melakukan sosialisasi nilai kebersihan, serta cenderung masih jarang melakukan pendampingan terhadap anak. Kemudian untuk meningkatkan sosialisasi moral tersebut, sebaiknya pihak pemerintah dapat memberikan penyuluhan terhadap orang tua tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan memberikan cara menyosialisasikan nilai tersebut kepada anak. Sementara itu, komunitas pemerhati keluarga di *slum area* dapat mengadakan aktivitas yang melibatkan orang tua dalam proses belajar anak. Hal ini akan melatih terbangunnya interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Penyampaian akan pentingnya konsistensi dalam sosialisasi nilai-nilai moral juga akan sangat membantu dalam pembentukan karakter anak khususnya karakter tekun. Selain faktor orang tua, pihak sekolah atau komunitas pemerhati anak di *slum area* perlu mengadakan kegiatan belajar bersama khususnya pada saat menjelang ujian sekolah untuk meningkatkan ketekunan anak. Hal ini bertujuan agar anak memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi ujian.

Ucapan Terima Kasih:

1. Komunitas Umbrella Wisdom yang telah bersedia memberikan kemudahan akses dalam proses pengambilan data di lokasi penelitian.
2. Ibu dan anak responden yang telah berkenan terlibat dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan

- [BPS] Badan Pusat Statistika [ID] 2017. Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 mencapai 3,78 persen. [Internet]. [diunduh 2018 Januari 22]. Tersedia pada <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/255/persentase-penduduk-miskin-di-dki-jakarta-pada-bulan-september-2017-mencapai-3-78-persen.html>.
- Asih, R. R. D. S. I. (2012). *Pengaruh interaksi orang tua dan anak terhadap kesejahteraan anak pada keluarga nelayan*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Baker, J. L. (2013). *Indonesia: kemiskinan perkotaan dan ulasan program*. Washington D.C: World Bank.
- Berns, R. M. (2012). *Child, Family, School, Community: Socialization and Support*. Cengage Learning. California (USA): Wadsworth.
- Briggs, T., & Ololube, N. P. (2015). Children's reading and writing success: the role of diligence and intelligence. *International Journal of Knowledge and Learning*, 10(1), 78-93. doi: 10.1504/IJKL.2015.071055.
- Chomariah, S. (2015). Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-11.
- Dalimunthe, H. H. B. (2017). Government Role of Urban Poor Community Empowerment Program in DKI Jakarta. *Journal of Nonformal Education*, 3(2), 97-109. Doi: org/10.24914/jne.v3i2.10944.
- Dewanggi, M. (2014). *Pengaruh kelekatan, gaya pengasuhan, dan kualitas lingkungan pengasuhan terhadap karakter anak perdesaan dan perkotaan*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Dixon, M., Bermes, Fair, S. (2014). An Instrument to Investigate Expectations about and Experiences of the Parent-Child Relationship: The Parent-Child Relationship Schema Scale. *Journal social science*. (3), 84-114.
- Gunarsa, S. D. (2008). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. BPK Gunung Mulia.
- Hastuti, D., & Alfiasari, A. (2008). Stimulasi psikososial dan pengaruhnya pada karakter anak yang bersekolah dan tidak bersekolah di taman bermain semai benih bangsa, kabupaten aceh utara, provinsi nad. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 1(2), 141-152.

- Heriawan, R. (2007). *Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan Tahun 2007*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistika.
- Hoffman, M. L. (2001). *Empathy and moral development: Implications for caring and justice*. Cambridge University Press.
- Hosseini, M., Krauss, S. E., Aishah, S. (2010). A review study on spiritual intelligence, adolescence and spiritual intelligence, factors that may contribute to individual differences in spiritual intelligence, and the related theories. *International Journal of Psychological Studies*. 2(2), 179. doi: 10.3844/jssp.2010.429.438.
- Ibda, F. (2011). Perkembangan moral pada anak dan relevansinya dengan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Didaktika*. 11(2), 380-391.
- Ingranurindani, B. (2010). *Hubungan Antara Hardiness dengan Strategi Regulasi Emosi Secara Kognitif pada Ibu Bekerja*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Jalota, S. (2016). *The Effect of Slum Redevelopment on Child Health Outcomes: Evidence from Mumbai*. Durham (USA): Duke University.
- Jozsa, K., Wang, J., Barrett, K. C., Morgan, G. A. (2014). Age and cultural differences in self-perceptions of mastery motivation and competence in American, Chinese, and Hungarian school age children. *Child Development Research*. doi: 10.1155/2014/803061.
- Kejerfors, J. (2007). *Parenting in urban slum areas: Families with children in a shantytown of Rio de Janeiro*. Sweden (SE): Stockholm University.
- Latifah, M., Hernawati, N. (2009). Dampak pendidikan holistik pada pembentukan karakter dan kecerdasan majemuk anak usia prasekolah. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Kosumen*. 2(1), 32-40.
- Lickona, T. (2012). *Raising good children: From birth through the teenage years*. Bantam.
- Megawangi, R. (2009). *Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pengalaman Sekolah Karakter*. Depok (ID): Indonesia Heritage Foundation.
- Mossa, J., Ali, N. (2011). The study relationship between parenting style and spiritual intelligence. *Journal of life Science and Biomedicine*. 1(1), 24-27.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D. (2008). *Human development (psikologi perkembangan) edisi kesembilan*. Jakarta (ID): Kencana.
- Park, H. (2014). *Socialization of morality as a cultural value in young children: Perspectives of first generation Korean American mothers* [disertasi]. Washington (US): University of Washington.
- Pasaribu, R. M., Hastut, D., Alfiasari. (2013). Pengaruh gaya pengasuhan dan metode sosialisasi orang tua terhadap karakter jujur dan tanggung jawab siswa SMA di Kota Bogor. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 6(3), 163-171.
- Peterson, C., Seligman, M. E. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification (Vol. 1)*. England (UK): Oxford University Press.
- Prasetyo, A. F., Suyahmo, S., Handoyo, E. (2017). Student's Establishment of Character and Social Behavior Through Langit Biru Program at SMP Negeri 3 Tuban. *Journal of Educational Social Studies*, 6(2), 125-134.
- Puspitasari, R., Hastuti, D., Herawati, T. (2016). Pengaruh kecerdasan spiritual ibu terhadap karakter anak usia sekolah dasar di perdesaan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 9(2), 101-112. doi: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2016.9.2.101>.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep dan teori keluarga*. Retrieved May, 20, 2014.
- Puspitawati, H. (2013). *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor (ID): Intitut Pertanian Bogor.
- Rozin, P. (1999). The process of moralization. *Psychological Science*. 10(3), 218-221. doi: 10.1111/1467-9280.00139
- Sari, W. M. (2016). *Pengaruh perhatian orang tua, pergaulan siswa, dan bimbingan belajar siswa di sekolah terhadap ketekunan belajar siswa kelas Xi Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 1 Seyegan Yogyakarta*. Yogyakarta (ID): Universitas Negeri Yogyakarta.
- Serpell, R. (1997). Parental Ideas about Development and Socialization of Children on the Threshold of Schooling. *Reading Research Report*. 78.
- Umasyah, R., Alfiasari. (2016). Effect socialization methods and peer attachment on character strength of school-aged children. *Journal of Child Development Sciences*. 1(2), 1-11.
- UNICEF Bangladesh. (2012). *Children from Urban Slums Tooled for Work*.
- Vig, D., Jaswal, I. J. S. (2014). Assessment of parent-child relationship across various levels of social maturity of parents. *Indian Journal of Health and Wellbeing*. 5(4), 465. doi:10.11114/jets.v3i5.929
- Yunus, H. H. (2017). *Pengaruh pengasuhan ayah dan hubungan guru-siswa terhadap karakter tekun remaja perdesaan*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Zohar, D., Marshall, I. (2000). *Spiritual Intelligence The Ultimate. Intelligence*. Bloomsbury Publishing Plc.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Keserasian Sosial

The Role of Civil Society Organization on Developing Social Harmony

Ratih Probosiwi

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Jalan Kesejahteraan Sosial No 1 Sonosewu Kasihan Bantul, 0274-377265 - 373530,
email: ratihprobo@yahoo.com, 081804870872

diterima 27 Desember 2018, diperbaiki 29 Desember 2018, disetujui 30 Desember 2018

Abstract

In every government program implementation, it needs support from three pillars of good governance namely the government itself, the private sector and civil society. Civil society organizations or better known as CSOs have a role in the history of Indonesian government. The implementation of the social harmony program as one of the government programs to prevent and create harmony and harmonization of the community also needs support of CSO. This study aims to examine the role of CSOs in creating social harmony through the social harmony program launched by the Ministry of Social Affairs. Data is obtained through literature review, in-depth interviews, as well as field study and observations. The results of the study show that CSOs still have very little role in Program Keserasian Sosial, especially on non-physic programs. The social harmony forum as the main implementer of the program lacked a portion of involvement in civil society and its organizations to participate in the implementation of the program. An understanding must be given to program implementers to involve CSOs in building harmony and harmony between communities.

Keywords: *Civil Society Organization; Involvement; Impementation; and Social Harmony*

Abstrak

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, perlu dukungan dari tiga pilar pemerintahan yang baik yaitu pemerintah itu sendiri, pihak swasta dan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil atau lebih dikenal dengan CSO mempunyai peran dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan program keserasian sosial sebagai salah satu program untuk mencegah konflik dan menciptakan kerukunan serta harmonisasi berbasis masyarakat perlu didukung oleh CSO. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan CSO dalam penciptaan keserasian sosial melalui program keserasian sosial yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan uji lapangan atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSO masih kurang berperan dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial terutama dalam kegiatan non fisik. Forum keserasian sosial sebagai pelaksana utama program kurang memberikan porsi keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil lain untuk turut dalam pelaksanaan program. Perlu diberikan pemahaman bagi pelaksana program untuk melibatkan CSO lain dalam membangun keserasian dan kerukunan antarmasyarakat.

Kata Kunci: *Civil Society Organization; Pelibatan; Pelaksanaan; dan Keserasian Sosial*

A. Pendahuluan

Indonesia terdiri lebih dari 1.340 suku bangsa dengan berbagai adat istiadat dan norma hidup serta bahasa yang berbeda (Akhsan & Hendry, 2011). Kekayaan budaya Indonesia mempunyai dua sisi mata uang, di satu sisi memperkuat dan mempersatukan bangsa, di sisi lain mampu meningkatkan konflik masyarakat. Dalam periode antara 1997-2004, terjadi 3.600

kali konflik dengan jumlah korban sedikitnya 10.700 orang belum termasuk konflik Aceh, Maluku dan Papua (Firdaus, 2017).

Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang rawan konflik berdasarkan indeks kerentanan Negara (Kompas, 2018). Pada tahun politik, kerentanan Indonesia akan konflik sosial meningkat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan lima wilayah padat

penduduk di Indonesia masuk dalam kategori rawan konflik selama ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Lima daerah itu adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Agama menjadi faktor dominan yang dapat menimbulkan konflik dibandingkan kesukuan atau faktor lain. Selain itu, perpindahan partai politik para calon atau pasangan calon juga diperkirakan akan menimbulkan gesekan di masyarakat (CNN Indonesia, 2017). Selain konflik politik, konflik Indonesia juga kini didominasi konflik SARA, yaitu suku, agama, ras dan antargolongan. Kompas menyebutkan sepanjang 2015 sampai 2016, paling tidak telah terjadi 1.568 konflik Sara (Sumber: Kompas, 16 Maret 2017).

Kementerian Sosial meluncurkan Program Keresasian Sosial dengan membentuk forum keserasian sosial di tingkat desa/kelurahan di hampir seluruh provinsi di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat. Program Keresasian Sosial memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat melalui Forum Keresasian Sosial yang dibentuk sebesar 109 juta rupiah diperuntukkan untuk kegiatan utama dalam upaya pemecahan masalah atau pencegahan konflik sosial, sesuai akar masalah terjadinya kerawanan dan kerentanan konflik sosial di masyarakat (kegiatan fisik) sebesar 97 juta rupiah; penyediaan tugu keserasian sosial sebagai perwujudan ikrar bersama masyarakat berketahanan sosial sebesar lima juta rupiah; operasional forum keserasian sosial sebagai stimulan dalam rangka membangkitkan semangat dan mobilisasi forum sebesar lima juta rupiah; dan seremonia sebagai media publikasi dan mendapat dukungan pemerintah setempat serta pengakhiran kegiatan keserasian sosial sebesar dua juta rupiah (Dit. PSKBS-Kemensos, 2016).

Keresasian Sosial merupakan program perlindungan sosial korban bencana sosial yang terus dilaksanakan setiap tahun dalam upaya pencegahan konflik sosial dan membangun perdamaian di daerah rawan konflik sosial. Hingga

tahun 2017, Program Keresasian Sosial telah dilaksanakan di lebih dari 2.000 desa/kelurahan rawan konflik di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka mengevaluasi program. Sumarno dan Roebiyantho pada tahun 2013 menyebutkan bahwa program keserasian sosial yang mengutamakan kegiatan fisik sebagai langkah penanganan konflik sosial dinilai kurang mampu mengurangi potensi konflik sosial di daerah. Perlu diketahui bahwa Program Keresasian Sosial mengalokasikan 90% bantuan stimulannya untuk digunakan dalam pembangunan fisik yang sekiranya mampu mencegah konflik atau membangun keeratan antarwarga.

Hal ini agak timpang dengan hakikat utama program untuk membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi domisili dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, senasib sepenanggungan, saling setia satu dengan lainnya serta solidaritas sesama warga masyarakat, dengan acuan sebagaimana dalam Pedoman Keresasian Sosial. Strategi dasar kegiatan keserasian sosial adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keserasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (melalui Forum Keresasian Sosial yang dibentuk) dan pemberdayaan pilar-pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai Pendamping Keresasian Sosial (TKSK, PSM, Tagana). Forum Keresasian Sosial yang dibentuk Kementerian Sosial untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat dari masyarakat disepakati bersama oleh masyarakat, secara bersama, dan dimanfaatkan masyarakat untuk bersama. Kenyataan, program keserasian sosial tidak memberikan porsi yang cukup untuk kegiatan non-fisik pembangunan keserasian sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pemerintah, perlu didukung seluruh elemen pemerintahan terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Dalam perkembangannya, *civil society organization* (CSO) muncul sebagai wa-

dah organisasi masyarakat sipil selain *non-government organization* (NGO). Peran masyarakat sipil meluas di banyak negara sejak pertengahan abad 20, termasuk Indonesia. Banyak negara industri yang mengontrak CSO sebagai penyedia layanan publik. Di negara berkembang, banyak lembaga bantuan lebih memilih CSO karena kekecewaan terhadap negara yang dianggap gagal mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan. Di Indonesia, CSO yang paling besar adalah Yayasan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Istilah *civil society*, yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat sipil atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. *Civil society*, sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya, tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensi (Muhammad, 1996).

Civil Society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi, biasanya bercirikan sukarela, swasembada, swadaya, mandiri, dan terikat terhadap norma dan nilai yang dijunjung masyarakat (Rozi, 2013). *Civil society* seringkali dikaitkan sebagai syarat utama adanya pembangunan demokrasi. *Civil society* sebagai wadah atau ruang publik yang bebas untuk bertransaksi komunikasi warga negara. Gerakan masyarakat sipil terlihat dengan banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif yang memiliki peranan advokasi, penelitian, dan pengabdian terhadap kegiatan dan kasus di masyarakat.

CSO adalah organisasi yang dibentuk masyarakat di luar pemerintah dan *market* bisnis

(untuk mencari keuntungan) untuk mendukung aspek kehidupan sosial yang menjadi kepentingan bersama (Arsenio, TT). Bagi para aktivis CSO yang menggerakkan perubahan kebijakan tertentu dan penguatan *grass root*, strategi yang mantap dibutuhkan dalam rangka memaksimalkan dampak perubahan dan perbaikan bagi masyarakat. Diakui dan disayangkan bahwa aliansi strategis CSO untuk isue kebersamaan dan kearifan lokal masih sangat lemah (Aryos, 2013). CSO lebih banyak bergerak di ruang politik sebagai wujud dari ruh demokrasi yang dianutnya.

Dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial, diharapkan CSO atau masyarakat sipil ikut andil dan hadir secara bersama dengan Forum Keserasian Sosial di masing-masing daerah untuk menciptakan kerukunan dan keserasian antarmasyarakat. Forum Keserasian Sosial diberikan kebebasan untuk bekerjasama dengan pihak manapun sepanjang sejalan dengan tujuan dari program. Masyarakat sipil diharapkan berperan dalam pengembangan kegiatan dan penanaman nilai kebersamaan dan kerukunan.

Perlu diketahui seberapa besar CSO dalam pelaksanaan Program Keserasian Sosial. Hal ini mendasari dilaksanakannya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan keterlibatan CSO dalam menciptakan keserasian sosial antarmasyarakat melalui Program Keserasian Sosial.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil fokus pada beberapa Forum Keserasian Sosial di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013). Metode ini memberikan informasi aktual yang secara rinci digali dalam rangka mengungkapkan peran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam menciptakan keserasian

sosial antarmasyarakat melalui Program Keresasian Sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pelaksana program meliputi pengurus forum keserasian sosial, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Informasi diperkuat melalui uji lapangan atau observasi dan juga studi literatur. Studi literatur yang digunakan lebih banyak pada laporan hasil penelitian dan kajian terkait keberadaan CSO. Data, kemudian, dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif atau dengan menganalisis temuan lapangan dengan kajian teoritik yang digunakan.

C. Konsep dan Sejarah Peran *Civil Society Organization* dalam Pembangunan Indonesia

Civil Society saat ini dipandang sebagai posisi alternatif bagi negara dan pasar. Di banyak negara berkembang, CSO memainkan fungsi penting dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, menciptakan kondisi pemberdayaan masyarakat, dan memperkuat proses demokrasi. CSO mewakili kapasitas masyarakat untuk mengartikulasi rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Menurut UNDP, CSO merujuk pada segala organisasi non-market dan non-pemerintah selain keluarga dimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka sendiri untuk mencapai kepentingan bersama di domain publik (Tomlinson, 2013). CSO memiliki peran vital dalam membantu masyarakat menuntut hak mereka, membentuk kebijakan pemerintah dan kemitraan, serta untuk melihat pelaksanaan program tersebut. CSO menurut Salamon, memiliki kriteria privat yang artinya bahwa CSO lepas dari sistem pemerintahan negara; non-profit artinya bahwa CSO tidak bertujuan mencari keuntungan untuk orang atau kelompok tertentu; pemerintahan sendiri artinya bahwa CSO mandiri dari perusahaan dan pemerintah, mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri; kesukarelaan artinya bahwa tidak ada pemaksaan untuk menjadi anggota CSO (AUGUR, 2012).

CSO dalam implementasinya seringkali menggunakan istilah lain seperti *civic institutions*, *social movement*, *non-profit organizations*, *non-governmental organizations*, *third party sector*; dan *voluntary organizations various advocacy/interest groups* (Tomi, 2014). Secara umum, tujuan CSO adalah mengidentifikasi masalah utama di masyarakat, mengartikulasi isu, memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, melayani sebagai suatu independen dalam perdebatan strategis (dalam formulasi kebijakan), dan menyediakan forum konstruktif untuk bertukar ide dan informasi tentang isu tertentu.

CSO terbagi dalam beberapa jenis. Paling tidak ada lima tipe utama CSO berdasarkan tujuan. Tipe pertama adalah keagamaan, walaupun disebut sebagai CSO keagamaan, mereka tidak mempromosikan agama dalam perencanaan program. Kegiatan primer yang dilakukan berkisar antara kesehatan, pendidikan, pendampingan kebutuhan dasar, dan kegiatan kedaruratan. Tipe kedua adalah CSO berbasis masyarakat. Mereka berlandaskan solidaritas, pemanfaatan suberdaya, dan pembangunan komunitas. Tipe ketiga adalah CSO filantropi. Organisasi tipe ini memberikan layanan berbasis kemanusiaan tanpa memandang agama. Tipe keempat adalah CSO ahli. CSO ini bergerak di bidang baru yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya lingkungan dan keuangan. Mereka memiliki unit keahlian dan mempublikasikan beberapa laporan teknis. Tipe kelima, yaitu Serikat Pekerja berdasarkan kepentingan mereka (AUGUR, 2012).

Hubungan antara CSO dan negara memiliki kekhasan tersendiri. Satu sisi, CSO membutuhkan negara sebagai pijakan utama dalam hal pendirian sebagai lembaga. Sisi lain, negara membutuhkan CSO dalam taraf peningkatan respons aktif masyarakat terhadap kegiatan politik. Mereka saling membutuhkan, meskipun ada kecenderungan perbedaan karakter hubungan, tergantung dari kesepakatan dan tujuan dari tiap CSO (Qureta, 2016).

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, para aktor CSO mempunyai peran masing-masing dalam membangun masyarakat. Iding Rosyidin membagi empat peran aktor CSO. Peran pertama adalah penghubung, yaitu menghubungkan keinginan masyarakat kepada pemerintah dan sebaliknya. Kedua adalah advokasi yaitu membela masyarakat yang haknya tidak terpenuhi. Ketiga yaitu katalisator yang artinya bahwa ada perubahan atau menggerakkan masyarakat dalam memenuhi satu tujuan tertentu. Keempat yaitu sebagai mobilisator yang artinya mereka menggerakkan masyarakat dalam skala yang lebih besar (Qureta, 2016).

Di Indonesia, konsep CSO sudah muncul sejak masa Orde Lama hingga kini. Pada masa Orde Lama CSO bahkan memiliki basis militer misalnya DI/TII dan RMS, kemudian pada masa Orde Baru, konsep *civil society* lebih condong pada badan mahasiswa atau tokoh seperti Kwik Kian Gie. Pada masa Habibie, muncul CSO yang menginginkan kemerdekaan Timor Leste yaitu Fretilin. Pada masa Gusdur hingga SBY *civil society* lebih bervariasi misalnya partai politik, GAM, ICW, Rumah Zakat, dan Rumah Pengaduan Publik. Pascareformasi, penguatan *civil society* digunakan sebagai kontrol publik.

Pemerintahan Gusdur menjadi tonggak awal restorasi bentuk CSO sesungguhnya di Indonesia (Juni, 2001). CSO dan NGO di Indonesia mempunyai ruang gerak yang lebih luas untuk berekspresi secara optimal. Ketidakstabilan ekonomi pada masa itu juga mengakibatkan CSO terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah mereka yang lebih berorientasi mengembangkan elemen *civility*, yaitu mengembangkan prinsip universalisme, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Kelompok kedua lebih mendukung *primordiality*, kesamaan agama, etnis, dan kedaerahan.

Pilar yang berkontribusi dalam penegakan *civil society* di Indonesia antara lain adalah LSM sebagai wadah perkumpulan kegiatan mandiri dan komunikatif terhadap kasus di masyarakat. Selain itu terdapat pula pers dan organisasi ma-

hasiswa sebagai bagian dari gerakan *civil society*. Pers memungkinkan untuk mengkritisi dan menjadi bagian *social control* karena fungsi publikasinya. Organisasi mahasiswa cenderung lebih independen dan masih mempertahankan idealismenya (Rozi, 2013). Hingga kini CSO telah banyak membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahkan telah banyak menentukan arah kebijakan pemerintah untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Sebut saja *Indonesia Corruption Watch* (ICW) berhasil menjatuhkan salah satu Jaksa Agung yang terlibat kasus korupsi sebagai tersangka atau NU dan Muhammadiyah yang tidak ragu untuk mengkritik pemerintahan.

Dari berbagai penjelasan tersebut, CSO adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil secara mandiri dan lepas dari Negara. Mereka mempunyai peranan untuk meneruskan aspirasi dan, mewadahi kegiatan kebersamaan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. CSO dalam konteks penelitian ini adalah segala wadah atau kelompok sosial mandiri non pemerintah yang mempunyai kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan program pemerintah terutama Program Kesperasian Sosial yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan kohesivitas antarwarga.

Peran *Civil Society Organization* dalam Program Kesperasian Sosial

Di beberapa negara, CSO memainkan peran penting dalam berbagai kebijakan dan kegiatan penanganan terorisme, seperti kampanye anti terorisme dan penguatan ketahanan masyarakat sipil yang bekerjasama dengan pemangku kebijakan terkait. Program penciptaan kerukunan dan pencegahan konflik antarwarga. Misalnya, pada tahun 2015, NU menggelar dialog kerukunan antarumat beragama bersama dengan LSM Kompak dan Yayasan Dian Pertiwi. Contoh lain yaitu komunitas Gusdurian. Gusdurian adalah sebutan untuk para murid, pengagum, dan penerus pemikiran dan perjuangan almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur). Kelompok

atau komunitas Gusdurian berfokus untuk menyuarakan toleransi dan kerukunan beragama sesuai dengan ajaran Gus Dur semasa hidupnya.

Program Keserasian Sosial berfungsi untuk membaurkan kembali antarmasyarakat yang rentan atau rawan konflik sosial untuk beradaptasi secara cepat, meningkatnya kohesivitas masyarakat serta terpeliharanya sistem kerukunan berkehidupan berdampingan yang dilandasi semangat non diskriminasi, kesamaan hak dan kewajiban, kesepakatan bersama, non prasangka, dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan dalam upaya berketahanan sosial. Program ini menggunakan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat pelaksana keserasian sosial; pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui forum keserasian sosial; pemberdayaan pilar kesejahteraan sosial masyarakat sebagai pendamping program; serta fasilitasi kegiatan masyarakat (Dit. PSKBS-Kemensos, 2014).

Pelaksanaan Program Keserasian Sosial di Kota Ambon, didominasi oleh pelaksana forum. Konflik sosial di Kota Ambon masih saja terjadi walaupun dikatakan dalam tataran relatif kecil. Sebut saja bentrok antarpemuda di Kecamatan Nusaniwe bulan Februari 2018, bentrok antarkampung di Kecamatan Teluk Ambon bulan Juni 2018, dan bentrok antarwarga di kawasan Kudamati bulan Juli 2018. Pemicunya sederhana seperti perkelahian atau minuman keras namun menimbulkan korban baik jiwa dan harta benda. Program keserasian sosial berjalan selama pembangunan fisik berjalan. Setelah pembangunan fisik selesai, program keserasian sosial juga berhenti. Fungsi forum keserasian sosial sebagai wadah pertemuan warga terhenti setelah pembangunan selesai dan seremoni dilaksanakan. Tidak lagi ada pertemuan yang menjembatani antarwarga. Minimnya pertemuan antarwarga dikhawatirkan meningkatkan konflik sosial. Keefektifan bangunan fisik diperlukan untuk menciptakan

keserasian sosial. Hasil penelitian menunjukkan dampak positif bahwa dengan adanya bangunan fisik tersebut, konflik dapat teredam karena kebutuhan masyarakat penyebab konflik terpenuhi.

Peranan gereja sebagai bagian dari *civil society* juga menjadi perhatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja mampu menggerakkan jemaahnya untuk menguatkan ketahanan, kerukunan, dan toleransi antarmasyarakat. Gereja baik secara struktural organisatoris maupun sebagai pribadi, merupakan bagian penting dari *civil society*. Artinya secara kelembagaan gereja berada bersama-sama dengan berbagai organisasi lainnya, dalam masyarakat dengan tugas utama adalah membina umat atau jemaahnya untuk selalu berjalan sesuai perintah Tuhan. Gereja menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran terkait masalah kerukunan dan hidup bermasyarakat. Gereja mengajarkan cinta kasih dan perdamaian terkait dengan keserasian sosial. Sebuah niatan positif dari forum untuk menggandeng dan melibatkan tokoh gereja dalam kepengurusan forum keserasian sosial, walaupun tidak diikuti dengan kegiatan penguatan kemasyarakatan melalui gereja. Gereja dan forum keserasian sosial berdiri dan berjalan sendiri.

Di Kota Ambon, *local leadership* masih sangatlah kental. Hasil pengamatan yang diperkuat dengan penjelasan Raja atau Kepala Desa Hunuth, Kota Ambon) menunjukkan kepatuhan masyarakat atas ucapan atau instruksi dari tokoh atau tetua di wilayahnya. Kepatuhan ini membuka celah bagi pemerintah (melalui programnya) untuk masuk ke dalam masyarakat dan membangun keharmonisan masyarakat. Kota Ambon memiliki jumlah penduduk Islam yang cukup banyak. Menurut BPS tahun 2018, Islam adalah agama mayoritas sebanyak 195.717 orang, (49,99 persen dari keseluruhan penduduk Kota Ambon), diikuti oleh agama Kristen sebanyak 173.075 orang. Data ini menunjukkan bahwa peranan dari tokoh masjid, NU, dan juga Muhammadiyah cenderung lebih kuat

dalam menjaga kerukunan dan menggerakkan umatnya.

Program Keresasian Sosial lebih banyak dijalankan internal pengurus forum itu sendiri. Hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa seringkali pelaksanaan program tidak melibatkan CSO lain. Ketua, sekretaris dan bendahara forum keresasian sosial cenderung menguasai program disamping pendamping program (disebut dengan pelopor perdamaian). Mereka berkoordinasi dengan aparat pemerintah desa setempat untuk merencanakan kegiatan program. Kepala desa memfasilitasi kegiatan forum keresasian sosial dalam bentuk pertemuan warga untuk pelaksanaan program. Kerjasama yang dilakukan pengurus forum lebih banyak pada internal pemerintah desa karena memang cakupan wilayah Program Keresasian Sosial hanya satu desa. CSO seolah terlupakan dan tidak mendapat peran. Kegiatan non fisik tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program penguatan keresasian antarmasyarakat hanya menjadi program sampingan dan mendapat porsi sedikit di tiap pertemuan warga. Pembangunan fisik yang sebenarnya ditujukan sebagai wadah bertemu dan bekerjasama antarwarga yang berkonflik ternyata juga tidak optimal karena forum keresasian sosial melibatkan pihak ketiga atau tukang untuk menyelesaikan pembangunan.

CSO lain yang ikut berperan dalam pelaksanaan Program Keresasian Sosial adalah karang taruna dan PKK. Karang taruna sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dibentuk atas dasar tanggung jawab dan kepedulian pemuda untuk membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Karang taruna merupakan wadah pembinaan mental pemuda, salah satunya untuk selalu menjaga kerukunan antarmasyarakat. Karang taruna juga berfungsi untuk menampung aspirasi pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menciptakan kerukunan dan keresasian sosial, karang taruna menjadi jembatan sekaligus wadah penanaman nilai kerukunan. Pelaksanaan Program Kesera-

sian Sosial didukung oleh tokoh kepemudaan yaitu tokoh karang taruna. Tokoh karang taruna dimasukkan dalam keanggotaan pengurus forum keresasian sosial dengan maksud, dapat membawa misi forum atau program keresasian sosial dalam kegiatan karang taruna. Begitu juga dengan PKK. PKK adalah organisasi pemberdayaan perempuan yang telah diakui masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, PKK bahkan telah diakui oleh lembaga internasional seperti WHO, Unicef, dan Unesco) karena perannya melalui sepuluh program pokok dengan melibatkan pria dan perempuan bersama-sama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. Pelibatan PKK dalam kepengurusan forum keresasian sosial (misal sebagai bendahara) menunjukkan bahwa forum keresasian sosial memperhatikan besarnya peran perempuan dalam penciptaan harmonisasi di masyarakat.

Di Kabupaten Lumajang, konflik utama yang menimbulkan kasus Salim Kancil disebabkan adanya penambangan pasir ilegal. Selain kasus Salim Kancil di Desa Selok Awar-awar, sejumlah desa melakukan blokade jalan terkait kegiatan penambangan pasir, sebut saja Desa Jugosari, Kalibendo, Sudimoro, Urang-gantung, dan Sumberwuluh. Tercatat dalam bulan November 2018 terjadi empat kali konflik yaitu penutupan jalan desa oleh warga Urang-gantung dan Sudimoro, konflik antar warga yang minta jalan yang ditutup agar dibuka kembali dan terjadi pembalasan dari warga Yugosari dengan melakukan penutupan akses jalan menuju tambang agar warga Sudimoro dan Urang-gantung tidak bisa menikmati hasil tambang di Desa mereka (KBRN Lumajang, 2018). Hal ini kemudian memunculkan banyak CSO yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia, seperti LSM Laskar Hijau, Lembaga Konsorsium Pembaruan Agraria, Komnas HAM, dan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir Lumajang. Program Keresasian Sosial di Kabupaten Lumajang, khususnya di Desa

Selok Awar-awar, dibentuk sebagai respons adanya kasus Salim Kancil. Kasus penambangan pasir ilegal membuat warga bersatu untuk menentang dan mengupayakan penghentian penambangan pasir ilegal. Hal tersebut kemudian menggerakkan sekelompok masyarakat untuk membentuk forum menentang penambangan pasir ilegal. Forum berusaha mengadvokasi keinginan masyarakat ke pemerintah melalui kegiatan diskusi dan pelaporan ke pihak berwajib untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Forum tersebut merupakan suatu gerakan masyarakat menanggapi penyimpangan di wilayahnya.

Forum keserasian sosial dibentuk sebagai pelaksana Program Keserasian Sosial dari Kementerian Sosial setelah kasus Salim Kancil terjadi sebagai upaya pencegahan konflik dan penciptaan situasi yang serasi antarwarga di daerah rawan konflik. Dalam kegiatannya, kedua forum ini ternyata tidaklah saling terhubung. Mereka bekerja sendiri sesuai dengan tujuannya. Forum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada kasus Salim Kancil, sedangkan forum keserasian sosial berfokus pada pembangunan kerukunan antarmasyarakat pascakasus Salim Kancil. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan kerukunan di Selok Awar-awar oleh forum keserasian sosial diwujudkan dalam bentuk pembangunan pembatas jalan dengan lahan pertanian. Hal ini tidak berhubungan dengan kerukunan masyarakat di wilayah tersebut. Pembangunan seolah meredam keinginan Salim Kancil yang lahannya rusak akibat penambangan pasir ilegal.

Pembangunan keserasian antarwarga tidak secara eksplisit dilaksanakan oleh forum keserasian sosial. Tidak ada kegiatan yang secara khusus dilaksanakan untuk menciptakan keserasian antarwarga. Di desa lain, pelaksanaan program keserasian sosial tercatat lebih baik. Konflik akibat keterbatasan air bersih dapat diakomodir oleh Program Keserasian Sosial. Kegiatan penyediaan air bersih oleh forum

keserasian sosial terbukti mampu menciptakan kerukunan dan kebersamaan antarwarga. Warga saling membantu dalam penyediaan air bersih baik itu dalam bentuk tenaga maupun uang. Disayangkan program keserasian sosial terhenti setelah pembangunan penyediaan air bersih tersebut selesai. Penciptaan keserasian sosial dilaksanakan mandiri oleh masyarakat, diluar forum keserasian sosial dan programnya.

Seperti halnya Kota Ambon, pelaksanaan program keserasian sosial di Kabupaten Lumajang melibatkan CSO di level lokal seperti karang taruna dan PKK. Masyarakat secara umum dilibatkan sebatas musyawarah penentuan dan pelaksanaan pembangunan fisik. Dalam menciptakan keserasian, masyarakat berpartisipasi secara penuh baik melalui CSO ataupun organisasi lain yang dikoordinir oleh pemerintah daerah baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Program keserasian sosial dilaksanakan melibatkan beberapa CSO dalam level kecil di daerah, misal gereja, mesjid, karang taruna, dan PKK. Gereja dan mesjid sebagai lembaga keagamaan memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi masyarakat. Kekuatan tokoh agama terbukti masih sangat kuat dan didengar masyarakat. Mereka mempunyai kekuatan untuk menggerakkan jemaat. Karang taruna dan PKK berperan untuk memobilisasi masyarakat di lingkup yang lebih spesifik yaitu pemuda dan perempuan.

Sebagai salah satu CSO terbesar di Indonesia, NU berperan dalam kehidupan masyarakat di Lumajang. Lumajang diketahui sebagai salah satu basis NU di Jawa Timur. Sebagai basis NU, kegiatan dan nilai NU sangat kental baik secara keorganisasian maupun kehidupan sehari-hari. Pada Agustus 2018, warga NU Lumajang menggelar upacara HUT RI di Situng Kandungan Senduro dengan mengangkat tema Kebhinekaan. Wujud kebersamaan masyarakat Lumajang ditandai dengan banyaknya kalangan yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Tidak hanya warga NU, warga Hindu dan umat agama yang lain juga hadir menggunakan pa-

kaian adat. Tema kebhinekaan diangkat dengan harapan menghidupkan kembali nilai kesatuan di tengah konflik politik di Indonesia. Ketua MWC NU Kecamatan Senduro menyatakan harapan perdamaian muncul dari akar rumput dengan menyemai kegiatan toleran dan kebersamaan (NU Lumajang, 2018). Dalam pelaksanaan Program Keresasian Sosial, anggota Muslimat NU (organisasi wanita di Indonesia dan sebagai salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama) diikutkan dalam kepengurusan forum keresasian sosial. Perlu ditegaskan bahwa pelibatan Muslimat NU bukanlah kesengajaan, namun kebetulan bahwa pengurus forum adalah anggota Muslimat NU di Lumajang.

Muhammadiyah juga memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Lumajang yaitu melalui pendidikan dan lembaga yang diciptakannya. Lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai dari level paling rendah yaitu pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (universitas) merupakan jalan untuk memasukkan nilai kerukunan, kebangsaan, toleransi dan solidaritas antarumat. Muhammadiyah yang terdapat di desa bukanlah menambah struktur baru melainkan suatu kesatuan untuk memberikan amalan nyata bagi masyarakat. Muhammadiyah mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kerukunan dan toleransi yang diusung oleh Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muhammadiyah. Melalui pengajian rutin yang dilaksanakan di sekolah, nilai kerukunan dan toleransi ditanamkan di masyarakat, antarumat beragama. Bersama dengan forum keresasian sosial mereka menciptakan kerukunan dan keresasian antar-masyarakat walaupun belum dalam bentuk kerjasama yang terorganisir dengan baik.

Pelaksanaan Program Keresasian Sosial baik di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang telah melibatkan CSO walaupun belum maksimal. Dalam pembangunan fisik, pelibatan CSO terutama saat pelaksanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan, pelibatan CSO cenderung

sekedar formalitas. Karang taruna, perwakilan PKK (tokoh perempuan), tokoh agama (gereja, mesjid, ataupun lembaga lain) dilibatkan dalam proses penentuan pembangunan fisik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat menurut masing-masing CSO. Dari rapat penentuan pembangunan, diteruskan dalam penyusunan rencana aksi kegiatan yang biasanya hanya dibahas oleh pengurus forum dan pemerintah desa. Pada tahap ini keterlibatan CSO tidak terlihat. Pada saat pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat termasuk CSO (karang taruna, PKK, gereja, mesjid, dan lembaga keagamaan lain). Dalam hal ini PKK lebih pada penyediaan konsumsi selama proses pembangunan berjalan dengan swadaya masyarakat.

Kegiatan non fisik, baik di Kota Ambon dan Kabupaten Lumajang, tidak secara optimal dilaksanakan. Tidak ada perencanaan khusus untuk kegiatan non fisik sehingga tidak ada kegiatan peningkatan keresasian dan kerukunan antar-masyarakat yang secara eksplisit diwujudkan dalam perencanaan program. Kegiatan peningkatan keresasian sosial dilaksanakan oleh masyarakat diluar forum keresasian sosial melalui CSO yang ada di masyarakat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, CSO dalam menciptakan kerukunan antarwarga dan keresasian sosial berjalan sendiri sesuai dengan visi dan misi masing-masing CSO. Forum keresasian sosial nyatanya tidak melibatkan CSO dalam kegiatan non fisik karena memang forum tidak memiliki kegiatan tersebut selain seremonial peresmian bangunan fisik.

CSO sebagai perwujudan masyarakat madani ternyata kurang terlibat (baik secara sengaja maupun tidak) secara nyata dalam program keresasian sosial. Pelaksanaan program cenderung dikuasai oleh pengelola program yang secara *ad hoc* dibentuk dan dikukuhkan dalam surat keputusan kepala desa. Pelibatan masyarakat hanya terjadi di proses pembangunan fisik. Dalam penciptaan keresasian sosial di masyarakat rawan konflik sosial, peran dan peli-

batan CSO harus ditingkatkan untuk melengkapi program pemerintah. Masyarakat sipil dapat diberdayakan untuk membantu setiap program pemerintah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan komprehensif.

D. Penutup

Kesimpulan: Program Keserasian Sosial dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman umum pelaksanaan program. Pelaksanaan Program Keserasian Sosial baru sebatas pembangunan fisik dan kurang mampu membawa tujuan utama dari program untuk membaaurkan masyarakat dan meningkatkan keeratan sosial. Program ini lebih banyak dilaksanakan secara mandiri oleh forum keserasian sosial yang dibentuk. Kepengurusan forum keserasian sosial bervariasi di dua lokasi penelitian. Pelibatan unsur tokoh agama (baik itu gereja, mesjid atau bahkan pura di Lumajang), tokoh pemuda (karang taruna) dan tokoh perempuan (PKK) sebagai bagian dari masyarakat sipil atau CSO patut diapresiasi. Disayangkan pelibatan tersebut masih sangatlah terbatas. Secara umum, peranan CSO dalam program keserasian sosial masih jauh dari kata ideal. CSO belum menyatu dalam program pembangunan pemerintah. Keterlibatan masih sebatas formalitas dan belum terorganisir.

Pelibatan CSO pada Program Keserasian Sosial dimulai pada penentuan penggunaan bantuan penguatan keserasian sosial (Rp 109.000.000,-) hingga pelaksanaan pembangunan fisik. Pelibatan ini masihlah terbatas pada keikutsertaan dalam rapat belum secara inklusi dalam perencanaan keuangan dan penentuan rencana program. Dalam pelaksanaan kegiatan fisik, CSO dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat. Kegiatan non fisik tidak dilaksanakan oleh forum keserasian sosial sehingga tidak ada pelibatan dari CSO.

CSO atau masyarakat sipil ikut berperan menciptakan keserasian sosial. Karang taruna dalam penciptaan kerukunan dan harmoni sosial lebih pada penanaman pengertian, memu-

puk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi; serta penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai kearifan lokal. Karang taruna memiliki jadwal rutin untuk melaksanakan pertemuan sebagai wadah meningkatkan keeratan masyarakat. Begitu juga dengan PKK, gereja, ataupun lembaga keagamaan lain. Kegiatan pertemuan dilaksanakan sebagai bagian dari program rutin mereka untuk meningkatkan keeratan dan harmoni masyarakat.

Keikutsertaan CSO dalam Program Keserasian Sosial didukung oleh adanya niatan baik dari pelaksana forum untuk mengikutsertakan berbagai elemen dari masyarakat walaupun tidak optimal di tiap tahapan kegiatan program. Pemerintah desa juga mendukung pelibatan CSO melalui rekomendasi kegiatan program karena pelaksanaan Program Keserasian Sosial diketahui dan dilaporkan kepada pemerintah desa. Kelemahan utama dalam pelibatan CSO adalah belum ada pemahaman yang tepat dari pelaksana forum keserasian sosial mengenai hakikat program bahwa didalamnya diharapkan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam penciptaan kerukunan dan keserasian sosial melalui kegiatan non fisik.

Rekomendasi: Perlu peningkatan kegiatan non fisik penciptaan keserasian sosial. Program Keserasian Sosial perlu memberikan porsi yang lebih besar dalam kegiatan non fisik, misalnya dalam kegiatan pertemuan warga yang tidak hanya berhenti begitu program pembangunan fisik selesai. Pelibatan CSO sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik juga harus ditingkatkan. Perlu ada jaring kemitraan yang jelas antara forum keserasian sosial dengan CSO di daerah, tidak hanya dicantumkan dalam kepengurusan namun ikut dalam kegiatan non fisik. Forum keserasian sosial perlu lebih proaktif ikut dalam kegiatan rutin CSO di daerah dan menyelipkan misi Program Keserasian Sosial sebagai bagian dari edukasi dan sosialisasi serta pelaksanaan peningkatan kohesivitas berbasis kearifan lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terimakasih kepada Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta selaku pemberi dana penelitian ini. Selain itu juga diucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Kabupaten Lumajang atas dampingan, fasilitas dan informasi yang diberikan selama proses pengumpulan data dilaksanakan; pengurus forum keserasian sosial dan masyarakat desa atas penerimaan dan informasi yang diberikan, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pustaka Acuan

- Akhsan, N., & Hendry, S. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Arsenio, B. (TT). *Peranan Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan di Timor Lorosa'e*. Dipetik December 13, 2018, dari Tripod: http://members.tripod.com/sd_east_timor/PROC%20Papers/Institutions/Arsenio%20Bano/Arsenio%20Bano%20PROC%20BHA.htm
- Aryos, N. (2013, December 4). *CSO dan NGO*. Dipetik December 15, 2018, dari NGO Network: <http://jsi.web.id/2013/12/cso-dan-ngo/>
- AUGUR. (2012). *The Role and Structure of Civil Society Organizations in National and Global Governance: Evolution and Outlook between Now and 2030*. AUGUR: Fabrice DESSE.
- CNN Indonesia. (2017, November 27). *Polisi Fokus Amankan Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018*. Dipetik December 13, 2018, dari Berita Peristiwa: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171127180829-20-258436/polisi-fokus-amankan-lima-daerah-rawan-konflik-pilkada-2018>
- Dit. PSKBS-Kemensos. (2014). *Pedoman Keserasian Sosial*. Jakarta: Direktorat PSKBS Kementerian Sosial RI.
- Firdaus, B. (2017, February 13). *Menyimak Konflik Sosial di Indonesia*. Dipetik December 17, 2018, dari Harian Ekonomi : Neraca: <http://www.neraca.co.id/article/81045/menyimak-konflik-sosial-di-indonesia>
- Imam, M. (2003). Peran Penting Civil Society Organizations (CSO) dalam Penanganan Terorisme. *Kertas Kebijakan RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia: C-Save.
- Juni, T. (2001, October 30). *Peta dan Peran Civil Society Organization di Indonesia Paska Pemerintahan Wahid*. Dipetik December 13, 2018, dari Interseksi Website: http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/peta_peran_cso.html
- Kompas. (2018, March 13). *Indonesia Masuk Kategori Negara Rawan Konflik*. Dipetik December 13, 2018, dari Politik & Hukum: <https://kompas.id/baca/utama/2018/03/13/indonesia-masuk-kategori-negara-rawan-konflik/>
- Muhammad, A. H. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta Pusat: LP3ES.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif*. Jakarta: GP Press Group.
- Qureta. (2016, December 2). *Civil Society Organization dalam Literasi Politik*. Dipetik December 13, 2018, dari Qureta Website: <https://www.quireta.com/post/civil-society-organization-dalam-literasi-politik>
- Rozi. (2013, October 14). *Civil Society sebagai Gerakan Sosial di Indonesia, Dalam Tantangan Melawan Arus Globalisasi Pasca Reformasi*. Dipetik December 13, 2018, dari Orijinal Mens Blog: <https://orijinalmens.wordpress.com/2013/10/14/civil-society-sebagai-gerakan-sosial-di-indonesia-dalam-tantangan-melawan-arus-globalisasi-pasca-reformasi-oleh-rozi-h-mahasiswa-ilmu-politik-iisip-jakarta/>
- Tomi, S. (2014). Pengantar Civil Society Organizations. *Materi Kuliah*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Tomlinson, B. (2013). *Working with Civil Society in Foreign Aid: Possibilities for South-South Cooperation? 'Annex 1: NGOs and CSOs : A Note on Terminology*. Dipetik December 13, 2018, dari UNDP Website: www.cn.undp.org/content/.../UNDP-CH03%20Annexes.pdf

Gerak Langkah Program Keluarga Harapan: Kontribusi Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat

The Action Step Of Expected Family Program: The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficiary Family

Sunit Agus Tri Cahyono¹ dan Siti Wahyu Iryani²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta, Telp. (0274) 377265

email: sunit_atc62@yahoo.com, HP. 081215173663

email: iryanisitiwahyu@gmail.com, HP. 085878403038

Diterima 11 Desember 2018, diperbaiki 18 Desember 2018, disetujui 30 Desember 2018

Abstract

This study was aimed to describe the contribution of Expected Family Program (=PKH), supporting factors and its inhibitors to the welfare of Beneficiary Families (KPM) in Candimulyo Sub-District. The research used a descriptive qualitative approach. The data was collected by conducting interviews, observations and document studies techniques. The data was then analyzed by an interactive cycle analysis. The results showed that PKH contributed to the improvement of family welfare, particularly in reducing the lack of food quality and quantity, health and education, so that KPM tended to be more prosperous. Supporting factors were the high motivation and enthusiasm of KPM in fulfilling their commitment in the field of education, health and social welfare. The other things that became inhibiting factors were exclusive errors and inclusive errors in targeting families of KPM. It was recommended that the verification and validation of KPM data should involve all elements of the community tiered from below such as the nearest neighborhood units (=RT, RW, kelurahan / village), sub-districts, districts /cities and that of local community leaders.

Keywords: *action step; program keluarga harapan (PKH); beneficiary family (KPM)*

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang diharapkan mempunyai dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi PKH, faktor pendukung dan penghambatnya terhadap kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Wawancara, observasi, dan telaah dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data menggunakan siklus interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa PKH berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan keluarga, khususnya mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga KPM cenderung lebih sejahtera. Faktor pendukung antara lain KPM memiliki motivasi/antusiasme tinggi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Faktor penghambat antara lain masih ditemukan *exclusive error* dan *inclusive error* dalam penetapan sasaran garap (KPM). Rekomendasi yang diajukan diantaranya dalam verifikasi dan validasi (Verivali) data KPM perlu perluasan pelibatan semua unsur masyarakat mulai dari RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga tokoh masyarakat setempat.

Kata Kunci: gerak langkah; program keluarga harapan (PKH); keluarga penerima manfaat (KPM)

A. Pendahuluan

Kemiskinan sebagai kondisi dimana terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan faktor eksternal berupa kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Dengan demikian kemiskinan hanya sebatas dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan secara layak bagi kemanusiaan, termasuk keterkucilan/keterisolasian sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan periode 2005 hingga 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara berturut-turut adalah: pada tahun 2005 sebesar 35,10 juta jiwa (15,97 persen) dari seluruh penduduk Indonesia, tahun 2006 meningkat menjadi 39,30 juta (17,75 persen), tahun 2007 menjadi 37,17 juta jiwa (16,58 persen), tahun 2008 sebesar 34,96 juta jiwa (15,42 persen), tahun 2009 sebanyak 32,53 juta jiwa (14,15 persen), tahun 2010 sebesar 31,02 juta jiwa (13,33 persen) dan pada tahun 2011 berjumlah 30,02 juta jiwa (12,49). September 2015 sebanyak 28,51 juta jiwa (11,13) dan pada bulan September tahun 2017 penduduk miskin mencapai 26,58 jiwa atau sebesar 10,12 persen atau selama dua tahun berkurang 1.930.000 jiwa (1,02 persen). Dari data tersebut di atas diketahui bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan tetapi pen-

uduk yang berada di bawah garis kemiskinan relatif masih cukup besar.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya rumah tangga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan komitmen atau kewajibannya. Program ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (Fasdik) bagi anak usia sekolah ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (Faskes) bagi anak balita atau bagi ibu hamil). Sejak tahun 2016 terdapat perubahan dari tunai ke non tunai dan penambahan komponen kesejahteraan, yaitu penyanggah disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu diantara program penanggulangan kemiskinan tahun 2007 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang disebut keluarga penerima manfaat (KPM). Persyaratan KPM sebagai peserta PKH minimal memenuhi kriteria komponen kesehatan seperti ibu hamil/nifas, dan anak usia di bawah enam tahun; komponen pendidikan diantaranya memiliki anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA; dan komponen kesejahteraan sosial, yaitu penyanggah disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran KPM. Untuk jangka menengah, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi. Dalam jangka panjang diharapkan PKH akan memutus rantai kemiskinan antar generasi dan meningkatkan

kesejahteraan sosial keluarga melalui perubahan pola pikir, perilaku dan kemandirian pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk mendukung tersebut dilakukan kegiatan pertemuan kelompok KPM disebut Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS) bagi KPM yang dilakukan oleh pendamping PKH minimal satu bulan sekali untuk setiap kelompok. Demikian juga terdapat program komplementer untuk mendukung agar KPM lebih cepat *exit* dari kondisi miskin. Program komplementer untuk pendukung kesiapan *exit* dari KPM-PKH mencakup jaminan kesehatan nasional (JKN), beras sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kelompok Usaha Bersama (Kube), Rumah tinggal layak huni (Rutilahu), Asistensi lanjut usia terlantar (Aslut), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dan bantuan sosial lain yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, atau masyarakat dalam hal material, spiritual dan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Ife (2002) mengemukakan bahwa ciri keberdayaan adalah: (1) Keberdayaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan dalam hidup (*power over personal choices and life chances*) banyak orang yang kurang berdaya untuk menentukan nasib hidupnya, seperti dalam menentukan matapencaharian. Pada kasus kemiskinan, orang memiliki pilihan yang amat sedikit dalam mengambil keputusan mengenai hidup mereka; (2) *Power over the assertion of human rights*, merupakan keberdayaan dalam menuntut penyelenggaraan hak asasi manusia terhadap diri dan lingkungannya. Jika dikaitkan

dengan program PKH itu sendiri, pemenuhan kebutuhan hidup merupakan hak asasi bagi seluruh manusia. Hambatan dalam pemenuhan kebutuhan merupakan tidak terpenuhinya hak asasi itu sendiri; (3) Keberdayaan dalam mendefinisikan kebutuhan (*power over the definition of need*). Seringkali kebutuhan masyarakat miskin tidak ditentukan oleh pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka; (4) Keberdayaan dalam mengemukakan gagasan (*power over ideas*). Dengan kata lain merupakan kapasitas seseorang dalam menyampaikan gagasan di dalam forum publik, kapasitas seseorang untuk terlibat dalam dialog dengan orang lain dan kemampuan orang untuk memiliki gagasan yang dapat berkontribusi dalam perbaikan kehidupan bersama; Pasal 1 ayat 1 disebutkan, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu (5) Keberdayaan terhadap institusi (*power over institutions*). Seringkali ketidakberdayaan masyarakat atau seseorang disebabkan oleh institusi sosial seperti sistem pendidikan, struktur pemerintahan. Keberdayaan ini berarti individu atau komunitas mampu bertindak atas dampak yang diakibatkan oleh institusi tersebut. Nampaknya hal ini yang menjadi fokus dari program PKH; (6) Keberdayaan terhadap sumber kehidupan (*power over resources*). Banyak sekali komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber kehidupan yang ada. Hal ini dapat terjadi baik pada sumber yang bersifat finansial maupun *non monetary resources* seperti pendidikan. Keberdayaan ini dapat dicapai ketika terdapat keadilan dalam distribusi dan penggunaan sumber-sumber; (7) Keberdayaan dalam melakukan aktivitas ekonomi (*power over economic activity*). Merupakan kapasitas masyarakat untuk mengontrol mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran yang terjadi. Hal ini berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan usaha; (8) Keberdayaan atas reproduksi (*power over reproduction*). Meru-

pakan keberdayaan yang tidak hanya berkait dengan kelahiran, namun juga latar belakang seseorang, bagaimana proses sosialisasi dan edukasi dilakukan. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan kepada masyarakat miskin berdasarkan pengalaman negara-negara lain terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis (sangat miskin). Implementasi PKH di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang mulai digulirkan sejak tahun 2012 dengan jumlah KPM 745 KK, hingga tahun 2018 bertambah menjadi 1.823 KK atau dalam perjalanan program PKH selama lima tahun (2012-2017) terdapat penambahan sebanyak 1.078 KK (kenaikan 145 persen) atau rerata setiap tahun terjadi peningkatan jumlah peserta sebanyak 205-206 KK. Keberhasilan kontribusi implementasi PKH di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang tidak sebatas berkontribusi terhadap meningkatnya taraf kesejahteraan pada komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi KPM tetapi juga terjadi perilaku dan kemandirian KPM. Penelitian PKH di tujuh provinsi yang dilakukan oleh Togiaratua Nainggolan, dkk menyebutkan, bahwa secara umum PKH berkontribusi positif bagi KPM. Ada perbedaan signifikan antara kondisi KPM sebelum PKH dan sesudah PKH dalam indikator di komponen kesehatan dan pendidikan. Namun demikian belum berdampak signifikan terhadap status sosial ekonomi KPM.

Hasil penelitian lain menunjukkan, bahwa PKH memberi dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga keluarga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8 persen. Sebaliknya program pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan (termasuk implementasi PKH) akan menjadi kurang efektif apabila program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok sasaran (KPM); Pelayanan yang disampaikan tidak menjangkau sasaran yang diharapkan; dan pelayanan tidak sesuai dengan desain program.

Berdasarkan urgensi pentingnya kontribusi PKH bagi perubahan tingkat kesejahteraan sosial khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup KPM, maka perlu dilakukan kajian tentang Gerak Langkah Program Keluarga Harapan, Kontribusi PKH Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Tujuan kajian ini lebih memfokuskan pada kontribusi implementasi PKH terhadap kesejahteraan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta menemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat implementasi PKH. Melalui kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambil kebijakan khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial RI, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan berbagai pihak pemerhati PKH.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bulan Maret-April 2018. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuannya untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi pada kelompok KPM-PKH di Kecamatan Candimulyo. Metode ini adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Teknik pengumpulan dengan

trianggulasi (wawancara, observasi, dan telaah dokumen). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Informan sebanyak 40 KPM kohort (periode waktu kepesertaan) dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dan memiliki syarat kepesertaan komponen pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data kualitatif, yaitu kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau siklus interaktif (Males and Huberman, 1992).¹²

C. Kontribusi PKH Terhadap Kesejahteraan Sosial KPM

1. Karakteristik KPM-PKH Kecamatan Candimulyo

Pada mulanya PKH adalah program pemberian uang tunai kepada KPM, dahulu bernama RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

PKH di Kecamatan Candimulyo merupakan program dibawah Kementerian Sosial RI berupa bantuan non tunai bersyarat bagi masyarakat kurang sejahtera yang memiliki salah satu komponen PKH.

Bantuan sosial non tunai adalah bantuan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti pangan dari Kementerian Sosial yang diberikan kepada KPM setiap tiga bulan sekali melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan/agen yang bekerjasama dengan Bank BNI. Mekanisme pencairan bantuan non

tunai menggunakan akun elektronik seperti buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera (KKS) sebagai upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.

Pada awalnya PKH di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, memberikan nutrisi (kesehatan) yang lebih seimbang dan pendidikan kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Selanjutnya tahun 2017 di Kecamatan Candimulyo menjadi PKH *New Iniatif* dengan tambahan komponen kesejahteraan sosial (penyandang disabilitas dan lansia) selain komponen mencakup kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, luas wilayah Kecamatan Candimulyo yaitu 46.95 KM² dengan penduduk yaitu 48.386 terdiri dari 24.344 laki-laki dan 24.042 perempuan. Kecamatan Candimulyo mempunyai jumlah rumah tangga 13.846 KK. Dari Jumlah tersebut sebanyak 1.823 KK sudah tercover dalam PKH. Meskipun secara nasional PKH sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007, tetapi di Kecamatan Candimulyo baru dilaksanakan sejak tahun 2012. Perkembangan jumlah peserta KPM- PKH sejak awal program digulirkan pada tahun 2012 hingga saat ini (2018) telah mengalami perkembangan jumlah yang cukup signifikan, sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Perkembangan KPM-PKH di Kecamatan Candimulyo

No	Tahun	Jumlah KPM-PKH
1	2012	745 KK
2	2014	697 KK
3	2015	1.558 KK
4	2016	1.853 KK
5	2017	1.823 KK
6	2018	3.000 KK

Sumber: hasil wawancara dan dokumentasi, 2018

PKH di Kecamatan Candimulyo telah hadir sejak tahun 2012 dan kepesertaannya terus bertambah dari tahun ke tahun atau lima tahun berselang semenjak pertama kali digulirkan oleh Kementerian Sosial RI. Peserta PKM-PKH Kecamatan Candimulyo tahun 2012 berjumlah 745 KK hingga tahun 2017 bertambah menjadi 1.823 KK atau dalam perjalanan program PKH selama lima tahun (2012-2017) terdapat penambahan sebanyak 1.078 KK (kenaikan 145 persen) atau rerata setiap tahun terjadi peningkatan jumlah peserta sebanyak 205-206 KK. Pada tahun 2018 bertambah lagi menjadi 3000-an KPM. Pada tahun 2016 pendamping PKH di Kecamatan Candimulyo berjumlah tujuh orang, sedangkan pada tahun 2018 bertambah menjadi sembilan orang atau naik sebesar 28,57 persen. Dari jumlah pendamping dan jumlah peserta KPM-PKH diketahui bahwa rata-rata setiap pendamping mendampingi sebanyak lebih dari 340-350 KPM. Dilihat dari rentang kendali (*span of control*) antara pendamping PKH dan peserta KPM, maka jumlah pendamping PKH di Kecamatan Candimulyo kurang ideal mengingat idealnya jika dilihat dari rasio seorang pendamping dan KPM adalah 1:250-300. Namun demikian faktor/letak geografis yang berbukit-bukit dan luas wilayah juga dapat menentukan jumlah rasio dampingan dan efektifitas pendampingan terhadap KPM. Terlebih lagi tugas pendamping cukup berat, tidak sekedar melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran KPM pada layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lebih dari itu seorang pendamping melakukan kegiatan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota KPM dan tugas pengembangan/pemberdayaan seperti kegiatan *Family Development Session* (FDS). Kegiatan layanan kesejahteraan sosial diantaranya memotivasi atau mendorong keluarga KPM agar tidak hanya memanfaatkan uang yang diterima untuk mendukung pendidikan dan peningkatan gizi dan nutrisi bagi keluarga, tetapi juga memberdayakan keluarga agar mampu atau mandiri secara ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tugas

pengembangan diantaranya: mengidentifikasi potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di wilayah kerja Kecamatan Candimulyo yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan masalah yang dialami KPM-PKH; Memfasilitasi ketersediaan media konsultasi bagi peserta KPM-PKH yang mengalami disharmonisasi keluarga; dan Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, adat dan tokoh agama dalam rangka memperteguh nilai-nilai spiritual dan moral bagi keluarga peserta KPM- PKH.

Dalam konteks di atas, dalam rangka untuk memenuhi kekurangan pendamping PKH di Kecamatan Candimulyo dibutuhkan rekrutmen pendamping PKH yang berkualifikasi pendidikan terendah sarjana (atau D4) diutamakan di bidang kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial. Rekrutmen ini selain bertujuan untuk menutup kekurangan pendamping PKH juga dapat diarahkan untuk persiapan penambahan calon peserta KPM-PKH tahun berikutnya dengan porsi yang seimbang dan ideal.

Keluarga Penerima manfaat (KPM- PKH) Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sebagai besar berusia produktif dan sebagian lain tidak produktif. KPM PKH usia produktif biasanya tergolong dalam komponen KPM-PKH reguler (kesehatan dan pendidikan), sedang yang kurang/tidak produktif dikategorikan ke dalam komponen kesejahteraan sosial (lanjut usia dan penyandang disabilitas). Dari 40 KPM, 95 persen berusia produktif antara 30 hingga 55 tahun, sisanya 5 persen tergolong usia lanjut, yaitu antara 56 hingga 60 tahun ke atas. Berkait dengan sumber daya manusia (SDM), saat ini dari 40 informan KPM-PKH, sebanyak 34 orang atau 85 persen berpendidikan SD dan SMP, sisanya berpendidikan SMA sebanyak lima orang atau 15 persen. Rendahnya tingkat pendidikan KPM berpengaruh pada jenis pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh menjadi rendah pula, sehingga berpengaruh kurang baik terhadap kemampuan KPM dalam memenuhi ketercukupan kebutuhan kesehatan

dan pendidikan anak balita, anak pra sekolah (Apras) dan usia sekolah. Ditinjau dari status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai, duda-janda, dan hidup bersama), ada tiga jenis status perkawinan dalam penelitian, yaitu kawin (31 orang atau 77,5 persen), cerai mati (7 orang atau 17,5 persen), dan belum kawin/lansia (2 orang atau 5 persen).

Berkait dengan mata pencaharian, sebagian besar informan berprofesi sebagai ibu rumah tangga (22 KPM atau 55 persen), buruh (16 KPM atau 40 persen), dan petani (2 orang atau 5 persen). Dari jenis pekerjaan dimaksud, sebagian besar informan (dan suami) berpendapatan antara Rp. 500.000 hingga Rp. 1.500.000,-/bulan, dengan rincian di bawah hingga Rp. 600.001 ada lima orang atau 12,5 persen. Antara Rp. 600.001,- hingga Rp. 1.000.000 ada 23 orang atau 57,5 persen, dan Rp. 1.000.001 hingga Rp. 1.500.000,- ada delapan orang atau 20 persen. Di atas Rp. 1.500.000,- sebanyak empat orang atau 10 persen. Dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Magelang sebesar Rp. 1.706.747 dipastikan 36 informan (90 persen) berpenghasilan di bawah UMR (di bawah garis kemiskinan), sisanya empat informan (10 persen) di atas UMR. Ada dua hal penting agar KPM meningkat penghasilannya, yaitu memperbaiki kemampuan produktif dan mengubah agar mandiri, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan pemetaan status pendidikan dan pekerjaan KPM dapat disimpulkan, bahwa tingkat pendidikan dan pekerjaan KPM dapat dijadikan indikator penghasilan KPM menjadi relatif rendah. Secara langsung ada-nya PKH berdampak membantu meringankan, membantu mengurangi pengeluaran/konsumsi, dan menambah penghasilan rumah tangga KPM, bahkan dimungkinkan KPM berinvestasi SDM bagi anak melalui pendidikan dan kesehatan dengan memanfaatkan akses kesehatan dan pendidikan yang telah disediakan pemerintah, sehingga dalam jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan.

Di Kecamatan Candimulyo, komponen PKH difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (lanjut usia dan penyandang disabilitas). Tujuan utama komponen kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan KPM khususnya ibu, ibu hamil, nifas, dan anak dibawah lima tahun (balita) melalui pemberian peningkatan gizi dan vitamin, serta melakukan kunjungan yang dianjurkan bersifat preventif (pencegahan daripada pengobatan) ke fasilitas kesehatan (Faskes) yang ditunjuk pemerintah daerah seperti puskesmas, polindes, dan posyandu. Komponen pendidikan diperuntukkan bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah 6 hingga 18 tahun, yaitu dari usia SD, SMP hingga SMA. Atau bagi anak KPM berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun dengan kewajiban hadir di sekolah formal dengan frekuensi sekurang-kurangnya 85 persen. Tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar 12 tahun dan mengurangi angka pekerja anak pada KPM. Komponen kesehatan dan kesehatan merupakan inti peningkatan kualitas hidup KPM, oleh karena itu tidak mengherankan apabila sebagian besar KPM di Kecamatan Candimulyo sebagian besar masuk dalam komponen kesehatan dan pendidikan, yaitu sebesar (95 persen), sisanya komponen kesejahteraan sosial lansia (5 persen). Kebersertaan KPM dalam komponen PKH sebagai berikut.

Tabel 2
Kepesertaan KPM dalam Komponen PKH

No	Komponen PKH	f	%
1	Kesehatan	9	22,5
2	Pendidikan	27	67,5
3	Kesejahteraan Sosial	4	5
Jumlah		40	100,00

Sumber: hasil wawancara, 2018

Seperti diketahui, PKH di Kecamatan Candimulyo dilatarbelakangi masih adanya masalah kemiskinan, khususnya masih banyak ditemukan keluarga miskin yang memiliki balita, anak usia pra sekolah (Apras) yang kurang

mampu memenuhi ketercukupan gizi, dan anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang sangat terbatas dalam mengakses fasilitas pendidikan (Fasdik) dan kesehatan (Faskes). Berkait kondisi tersebut, diketahui bahwa sebagian besar KPM memiliki kepesertaan PKH pada tahun 2014 hingga tahun 2016 meliputi komponen pendidikan (67 persen) dan pendidikan (22 persen). Sisanya KPM yang memiliki anggota keluarga lanjut usia (lansia) sebesar lima persen.

Berkait dengan banyaknya KPM di Kecamatan Candimulyo yang memiliki komponen pendidikan, terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi masalah rendahnya pendidikan dan kesehatan anak pada KPM, yaitu pendidikan dan pekerjaan (kesempatan kerja) orangtua (KPM). Berdasarkan kajian di lokasi penelitian ditemukan, bahwa tingkat pendidikan, kesempatan kerja (jenis pekerjaan), dan penghasilan KPM dapat dijadikan tolok ukur kondisi pendidikan anak dan status gizi anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Semakin lebih baik pekerjaan, maka besar peluang memperoleh penghasilan lebih layak yang lebih menjamin pemenuhan asupan gizi, dan pendidikan anak, demikian pula faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi ketercukupan gizi dan pendidikan anak. Dalam penelitiannya, Supariasa menemukan adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi masalah gizi anak pada masa tumbuh kembang, yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, kesediaan pangan, dan kesempatan kerja (pekerjaan). Kajian Glewwe menemukan terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan ibu dengan gizi anak, pendidikan tinggi maka pekerjaan yang dilakukan akan memperoleh pendapatan yang baik atau sebaliknya (Abuya, dkk, 2012), pendidikan ibu juga sebagai salah satu penentu untuk kesehatan anak. Hal ini sesuai dengan pembagian kerja dalam keluarga yang menempatkan ibu penanggungjawab utama pendidikan anak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi lokasi pe-

nelitian yang menemukan sebagian besar tingkat pendidikan ibu (KPM) rendah, yaitu SD 27 orang (67,5 persen), dan SMP tujuh orang (17,5 persen). Hal ini menggambarkan bahwa fungsi pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga karena orangtua yang berpendidikan tinggi, lebih besar peluangnya terhindar dari kondisi kemiskinan.

2. Kontribusi PKH Terhadap Kesejahteraan Sosial KPM

Terdapat dua indikator untuk mengetahui kontribusi PKH terhadap kesejahteraan sosial KPM. Pertama, kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan. Kedua, kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, dan kebutuhan lain.

Ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh keluarga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan yang diterima keluarga akan digunakan untuk membeli kebutuhan konsumsi/bahan pangan dan keluarga setiap tahun. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran kebutuhan konsumsi untuk pangan dan nonpangan. Konsumsi pangan antara lain beras, jagung, ikan, daging, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan, minyak goreng, daging, dan buah-buahan. Sementara itu, konsumsi nonpangan meliputi biaya untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, jasa angkutan, bahan bakar, penerangan/listrik dan air (mandi, cuci), barang dan jasa, pakaian dan barang-barang tahan lama lain. Tingkat kesejahteraan dapat dikatakan membaik dengan adanya bantuan sosial PKH, maka pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk menambah konsumsi non makanan, begitupun sebaliknya sehingga terjadi peningkatan kualitas nutrisi, gizi, dan kesehatan pada KPM, khususnya anak-anak.

Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa terdapat kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan

KPM dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Dengan adanya bantuan sosial PKH sebesar Rp. 1.890.000/tahun, maka dapat diketahui besaran kontribusi PKH terhadap kesejahteraan KPM. Pada umumnya, semakin kecil pendapatan KPM maka semakin besar kontribusi bansos PKH terhadap pengeluaran keluarga. Berikut ini ditampilkan kontribusi bantuan sosial PKH terhadap pendapatan KPM/tahun. non pangan (Sukirno, 2011). Salah satu indikator kesejahteraan KPM adalah dengan mengukur besarnya pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Tabel 3
Kontribusi PKH terhadap Pendapatan KPM

No	Rerata Pendapatan/ Tahun (dalam Ribuan)	Bansos PKH (dalam Ribuan)	f	%
1	Rp. 4.800-15.600	Rp. 1.890	33	18,53
2	Rp. 15.601-26.400	Rp. 1.890	6	9,00
3	> Rp. 26.400	Rp. 1.890	1	3,08

Sumber: hasil wawancara, 2018

Pendapatan keluarga bervariasi. Variasi tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik KPM seperti pendidikan dan sektor pekerjaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan keluarga KPM yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usaha seperti petani, buruh tani lepas, dan buruh tani. Dari sektor nonpertanian berasal buruh dodol, pelayan toko, pelayan rumah makan, pembantu rumah tangga, buruh harian lepas, serabutan, dan ibu rumahtangga murni.

Seperti diketahui, penghasilan KPM-PKH berkisar antara Rp. 400.000 hingga Rp. 3.000.000. dengan rerata penghasilan setiap tahun adalah Rp. 12.440.000,-/tahun, atau Rp. 1.036.666,-/bulan. Berkait dengan kontribusi PKH terhadap kebutuhan rumah tangga PKH berkisar antara 3,08 persen hingga 18,53 persen setiap tahun, dengan rerata kontribusi pelayanan PKH terhadap kebutuhan rumah tangga sebe-

sar 10,20 persen, atau apabila dihitung dengan agenda pencairan bansos PKH setiap triwulan, maka kontribusi PKH terhadap penghasilan sebesar 2,55 persen.

Ditinjau dari aspek kontribusi PKH terhadap pengeluaran KPM-PKH di Kecamatan Candimulyo masih dimanfaatkan untuk konsumsi makanan rumah tangga, dan non makanan (pendidikan, kesehatan, dan lainnya). Pengeluaran konsumsi (pangan) dan non pangan merupakan salah aktivitas ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dapat dijadikan indikator kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan KPM dikatakan membaik apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan/penghasilan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan.

Diketahui, pengeluaran konsumsi rumah tangga KPM-PKH berkisar antara Rp. 750.000 hingga Rp. 3.350.000 setiap bulan dengan rerata sekitar Rp. 1.287.500,- /bulan. Pengeluaran pendidikan bagi anak-anak KPM sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 350.000,- per bulan atau rerata Rp. 412.500/bulan. Pengeluaran untuk kebutuhan kesehatan, nutrisi dan kebutuhan gizi berkisar antara 100.000 hingga Rp. 350.000,- dengan rerata Rp. 196.250,- /bulan. Dengan demikian bila diakumulasikan antara pengeluaran konsumsi (pangan) dan non pangan KPM sebanyak Rp. 1.287.500,-/bulan ditambah Rp. 412.500/bulan ditambah Rp. 196.250,- /bulan sama dengan Rp. 1.896.250,-/bulan, sedangkan penghasilan informan rerata sebanyak Rp. 1.036.666,-/bulan, sehingga terdapat kekurangan pengeluaran sebanyak Rp. 859,584,- perbulan. Kekurangan tersebut menjadi dilema klasik informan yang tidak kunjung selesai. Biasanya untuk menutup kekurangan kebutuhan tersebut, mengharuskan sebagian informan mencari pinjaman ke saudara, tetangga, atau pihak jasa kredit.

Tingkat pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan KPM dipengaruhi oleh penghasilan, Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan

konsumsi pangan dan non pangan ditentukan pada besar kecilnya penghasilan. Secara umum masalah pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan yang dihadapi KPM-PKH di Kecamatan Candimulyo bersumber dari rendahnya penghasilan KPM yang berada di bawah rata-rata UMK Kabupaten Magelang dibandingkan rata-rata pendapatan KPM-PKH di Kecamatan Candimulyo. Kondisi ini mengakibatkan KPM-PKH mengalami kendala dalam mencapai taraf kebutuhan yang lebih layak. Seperti diketahui, bahwa salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan apabila penghasilan di atas kebutuhan dasar minimum (UMK) dan sebagian pendapatan digunakan untuk pengeluaran pangan dan non pangan. Dalam kerangka itulah PKH di Kecamatan Candimulyo digulirkan dengan maksud meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan dan non pangan) sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan gizi (nutrisi) kepada KPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKH terhadap kebutuhan pangan dan non pangan sangat bervariasi, namun secara umum rerata kontribusi PKH terhadap kebutuhan makanan di kisaran sebesar 10,20 persen/tahun. Artinya adanya peningkatan pendapatan untuk konsumsi dan perbaikan pemenuhan kebutuhan pangan dari berbagai aspek baik jumlah, kualitas gizi dan nutrisi KPM sebesar 10,20 persen dari pendapatan keluarga KPM.

Tabel 4
Kontribusi PKH terhadap Pengeluaran Pemenuhan Kebutuhan Pangan/Tahun

No	Interval Kontribusi)	Pangan	
		f	%
1	1-10 persen	0	0
2	11-20 persen	1	2,50
3	21-40 persen	25	62,50
4	41 persen keatas	14	35,00
Jumlah		54	100,00

Sumber: hasil wawancara, 2018

Ditinjau dari aspek pengeluaran konsumsi (pangan) dan non konsumsi, maka diketahui kontribusi bantuan sosial PKH terhadap pengeluaran konsumsi antara 7,86 persen hingga 39,37 persen per tahun, atau 0,66 persen hingga 3,28 persen dari total pengeluaran konsumsi pangan keluarga KPM. Kontribusi terbesar PKH terhadap pengeluaran kebutuhan pangan informan dikisaran antara 36 persen hingga 45 persen ada satu orang (2,5 persen). Sebaliknya kontribusi terkecil antara satu hingga 15 persen ada 12 orang (30 persen). Sisanya antara 16-25 persen ada 21 orang (52,5 persen), dan antara 26-35 persen ada enam orang (15 persen). Kontribusi PKH terhadap konsumsi KPM menunjukkan nilai positif karena dijumpai adanya penambahan konsumsi rumah tangga KPM baik dari aspek kualitas dan kuantitas makanan. Meski demikian pemanfaatan bantuan masih cenderung pada kuantitas pangan dibandingkan dengan kualitas pangan seperti panganekaragaman jenis gizi, karbohidrat, protein, asupan nutrisi dan kebutuhan non pangan. Kondisi ini dengan asumsi BPS yang menyatakan bahwa pada umumnya rumah tangga miskin lebih banyak terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dibanding kebutuhan non pangan.

Ada peningkatan kesejahteraan KPM, khususnya mampu mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas pangan. Berdasarkan data empirik di atas, bantuan sosial PKH dapat mempengaruhi pola konsumsi KPM ke arah yang lebih baik. Artinya bantuan sosial PKH mampu merespon terhadap kekurangan kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penghasilan, sehingga KPM cenderung lebih sejahtera.

Berkait dengan pendidikan anak, diketahui bahwa semua KPM setelah memenuhi kewajibannya, khususnya menerapkan persyaratan kewajiban jumlah kehadiran yang telah ditetapkan program yaitu komitmen kehadiran 85 persen, KPM-PKH dapat mengikutkan anak ke dalam program PKH pendidikan. Kontribusi bantuan sosial PKH terhadap pendidikan anak tertinggi mencapai lebih dari 45 persen/tahun,

terdapat pada 14 KPM (35 persen) yang memiliki anak berpendidikan SMP, SMA/ sederajat dan memiliki tanggungan anak usia sekolah lebih dari dua anak. Sebaliknya kontribusi terendah kurang dari 30 persen/ tahun ada satu informan/KPM (2,50 persen) yang memiliki dua anak usia sekolah Taman-Kanak-Kanak dan anak SD. Selebihnya 25 KPM (62,50 persen) memanfaatkan 31 hingga 40 persen lebih bantuan sosial PKH untuk membiayai sekolah anak-anak yang berusia TK, SD, dan SMP.

Tampak bahwa pendapatan KPM masih banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan atau pengeluaran konsumsi. Adanya bantuan PKH setidaknya berkait dengan kebutuhan SPP, transport sekolah, peralatan sekolah, seperti alat/buku tulis, tas, sepatu, dan pakaian. Di sisi lain ada kecenderungan sikap dan perilaku orang tua menyikapi pendidikan anaknya. Hal ini tidak terlepas dari adanya intervensi kegiatan *Family Development Session* (FDS) yang dilakukan oleh pendamping dengan cara mengadakan pertemuan satu kali dalam satu bulan. Rata-rata pendamping PKH memiliki 12 hingga 15 kelompok dampingan KPM. Pendamping rata-rata melakukan pertemuan FDS 13 kali dalam satu bulan. Hingga saat penelitian ini dilakukan, materi FDS yang diberikan pendamping PKH masih pada modul 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak dan modul 2 tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha.

Pemanfaatan penghasilan KPM untuk biaya pendidikan anak selama satu tahun antara Rp. 100.000 hingga Rp. 700.000,- dengan rerata Rp. 415.000,- setiap tahun. Rerata kontribusi bantuan sosial PKH sebanyak Rp. 207.000,- atau secara umum rerata kontribusi bantuan sosial PKH terhadap pengeluaran biaya pendidikan KPM adalah 49,81 persen setiap tahun. Kontribusi PKH terhadap pendidikan anak KPM tidak hanya dapat meringankan beban orangtua dalam membiayai pendidikan anak, tetapi juga dapat meningkatkan akses anak KPM bersekolah SD, SMP, dan SMA sehingga mereka mampu

meningkatkan status pendidikan. Apalagi dengan ditunjang program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Kementerian Pendidikan semakin menambah kualitas pendidikan anak KPM. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak anak KPM yang putus sekolah dan atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA. Kondisi ini memungkinkan terjadinya peningkatan angka partisipasi sekolah anak KPM baik dari SD ke SMP maupun dari SMP ke jenjang SMA.

Lebih dari itu, guru di sekolah tidak hanya memperhatikan pendidikan anak KPM dari segi akademik atau prestasi belajar melainkan juga non akademik, tidak sedikit dari guru, bahkan kepala sekolah secara rutin berdiskusi dan berkonsultasi dengan pendamping PKH membahas kebutuhan anak PKH yang memenuhi persyaratan yang berkait dengan kesehatan anggota keluarga yang terdiri dari ibu, anak balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah. Caranya dengan mengakses dan memanfaatkan secara rutin berbagai fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan kartu PKH dan KIS yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan (puskesmas, posyandu, polindes yang berada di Kecamatan Candimulyo). Dengan adanya PKH, cenderung ada peningkatan kapasitas KPM berupa terjadinya perubahan sikap dan perilaku KPM tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi bagi keluarga. Dari kondisi di atas tampak bahwa PKH memberi kontribusi bagi peningkatan konsumsi kualitas dan kuantitas gizi dan nutrisi keluarga serta lebih aktif periksa ke fasilitas kesehatan seperti tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5
Kontribusi PKH terhadap Pendidikan Anak KPM
Setiap Tahun

No	Interval Kontribusi)	Pendidikan	
		f	%
1	1-15 persen	12	30,00
2	16-25 persen	21	52,50
3	26-35 persen	6	15,00
4	36-45 persen	1	2,50
Jumlah		54	100,00

Sumber: hasil wawancara, 2018

Di bidang kesehatan, KPM-PKH Kecamatan Candimulyo diwajibkan kontribusi bantuan sosial PKH terhadap kesehatan dan perbaikan gizi bagi KPM-PKH bervariasi. Dengan adanya FDS, KPM yang semula enggan, tidak semangat atau “*aras-arasen*” berobat ke Puskesmas/polindes setelah ada PKH, KPM semakin aktif berobat ke faskes kesehatan karena tidak dikenakan biaya. Selain itu, mereka makin menyadari akan pentingnya perbaikan gizi bagi anak. Hal tersebut menunjukkan, bahwa kontribusi PKH di bidang kesehatan sudah terlaksana. Kontribusi terbesar antara 11 persen hingga 40 persen digunakan tujuh informan atau 75 persen. Hal ini bermakna, bahwa seluruh pengeluaran perbaikan gizi dan kesehatan 11 hingga 40 persen diantaranya berasal dari bantuan sosial PKH. Peringkat berikutnya berkisar antara satu hingga 10 persen digunakan oleh enam informan (15 persen), dan terakhir pada kisaran 41 persen digunakan pada empat informan (10 persen). Keseluruhan rata-rata penggunaan dana bantuan sosial PKH di Kecamatan Candimulyo untuk kebutuhan perbaikan gizi dan kesehatan sebesar sebesar 37,50 persen.

Tampak bahwa PKH telah cukup mampu memperbaiki perilaku KPM dalam meningkatkan kesehatan keluarga dan mengakses layanan kesehatan. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari peran FDS yang dilakukan oleh pendamping PKH yang cukup mampu mengubah perilaku kurang mendukung ke arah perbaikan peningkatan kesejahteraan sosial KPM, baik aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan melalui pertemuan rutin setiap bulan. Pertemuan kelompok bulanan dengan KPM PKH dan pendampingannya dalam format pertemuan rutin bulanan yang disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), melakukan fungsi penanganan pengaduan, dan melakukan edukasi pada KPM tentang kebijakan baru PKH. P2K2 antara lain Modul Peningkatan Kemampuan Keluarga tentang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak

dan kesejahteraan sosial, jika dilakukan secara rutin dan dilaksanakan secara baik dipastikan terjadi perubahan perilaku dan kondisi KPM yang lebih sejahtera.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung dalam jangka tertentu, tidak tertutup kemungkinan memberikan efek atau dampak bagi kesejahteraan KPM dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2012), bahwa manfaat PKH dalam jangka pendek memberikan *income effect* berupa pengurangan beban KPM melalui pengeluaran biaya KPM yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anak. Dalam jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan KPM melalui peningkatan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*), serta memberikan kepastian akan masa depannya (*insurance effect*). Mengubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak, manfaat, keuntungan, dan kesempatan, serta tingginya biaya tidak langsung (transport, seragam) dan *opportunity cost* (anak bekerja lebih “menguntungkan” dari pada sekolah). Mengurangi pekerja anak, yaitu mencegah turunnya anak-anak bekerja di jalanan, mencegah KPM menjadi tuna sosial dan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui *complementary* perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan (*supply side*), pengembangan sistem perlindungan sosial masyarakat miskin (*demand side*).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Sebagai model perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (lansia dan penyandang disabilitas), PKH di Kecamatan Candimulyo tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tujuan yang hendak dicapai. Sejumlah faktor pendukung dan penghambat tersebut antara lain.

Faktor pendukung antara lain: 1) Agenda pencarian bantuan sosial yang terjadwal dan KPM-PKH mengetahui agenda pengambilan bantuan sosial setiap tahap, yaitu antara minggu ke tiga atau keempat; 2) Peran aktif Dinas Sosial Kabupaten Magelang dalam melakukan koordinasi secara rutin setiap bulan dengan para pendamping PKH, koordinator dan operator PKH sehingga kegiatan KPM PKH relatif berlangsung lancar, baik yang berkaitan dengan kegiatan FDS maupun pencairan bantuan sosial; 3) KPM PKH memiliki motivasi tinggi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pendamping PKH memfasilitasi kegiatan KPM-PKH dampingannya, sehingga memudahkan KPM memenuhi kewajibannya; 4) Petugas faskes pendidikan dan faskes kesehatan ramah dan mengetahui peserta PKH sehingga memudahkan, sehingga memudahkan KPM-PKH mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi dimaksud didukung oleh adanya sarana-prasarana faskes dan fasdik yang memadai; 5) KPM-PKH selalu menginformasikan setiap ada perubahan yang ada pada keluarga kepada pendamping, sehingga memudahkan operator PKH melakukan pemutakhiran data.

Faktor penghambat: 1) Secara umum pelaksanaan PKH di Kecamatan Candimulyo relatif berjalan sesuai tujuan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan tepatan sasaran dalam kepesertaan dan penyaluran karena penentuan sasaran masih menggunakan BDT 2015. Bantuan sosial yang dibagikan kepada keluarga kurang mampu sesuai kriteria, tetapi masih ada keluarga yang tidak memenuhi kriteria (mampu) masih menerima bantuan sosial. Sebaliknya ada keluarga yang tidak dan kurang mampu belum mendapatkan bantuan (*eklusif eror dan inklusif eror*); 2) Masih ditemukan keluarga yang seharusnya graduasi (KPM yang keluar dari kepesertaan PKH baik mandiri maupun alami karena dianggap sudah mampu secara ekonomi) belum ber-

sedia mengundurkan diri; 3) Kondisi geografis Kecamatan Candimulyo yang berbukit-bukit menyebabkan sebagian KPM-PKH mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan; 4) Ada sebagian KPM-PKH yang membawa anak dalam kegiatan FDS sehingga terpecah perhatiannya. Kondisi ini membuat tidak semua materi FDS yang diajarkan oleh pendamping dapat diserap secara maksimal. Dibutuhkan perhatian dan teknik khusus bagi KPM lansia yang mengikuti FDS mengingat faktor usia dan fisik menjadi salah satu kendala dalam memahami materi FDS; 5) Sebagian besar KPM-PKH berpenghasilan rendah sehingga masih ditemukan pemanfaatan dana bantuan sosial kurang sesuai dengan tujuan, seperti masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari.

D. Penutup

Kesimpulan. Implementasi PKH di Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang mulai digulirkan sejak tahun 2012 dengan sasaran KPM 745 KK. Dalam perkembangannya, tahun 2018 bertambah menjadi 1.823 KK atau dalam kurun waktu enam tahun program PKH terdapat kenaikan sebesar 145 persen atau penambahan sebanyak 1.078 KK. Dengan kata lain, rerata setiap tahun terjadi peningkatan jumlah peserta KPM sebanyak 205-206 KK. Keberhasilan kontribusi implementasi PKH di Kecamatan Candimulyo tidak sebatas ditandai dengan meningkatnya taraf kesejahteraan pada komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi KPM tetapi juga terjadi perilaku dan kemandirian KPM. KPM-PKH Kecamatan Candimulyo sebagian besar berusia produktif dan sebagian lain tidak produktif. Dari 40 KPM, 95 persen berusia produktif antara 30 hingga 55 tahun, sisanya lima persen tergolong usia lanjut, yaitu antara 56 hingga 60 tahun ke atas.

Berkait dengan SDM, sebanyak 34 orang atau 85 persen berpendidikan SD dan SMP, sisanya berpendidikan SMA sebanyak lima orang atau 15 persen. Rendahnya tingkat pendidikan

KPM berpengaruh pada jenis pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh juga menjadi rendah, sehingga berpengaruh kurang baik terhadap kemampuan KPM dalam memenuhi ketercukupan kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak balita, anak pra sekolah (Apras) dan usia sekolah. Bantuan PKH berkontribusi terhadap kesejahteraan KPM, khususnya mampu mereduksi kekurangan kualitas dan kuantitas (kesehatan). Berdasarkan data empirik di atas, bantuan sosial PKH dapat mempengaruhi pola konsumsi KPM ke arah yang lebih baik. Artinya bantuan sosial PKH mampu merespon terhadap kekurangan kebutuhan konsumsi, kesehatan, dan pendidikan, sehingga KPM cenderung lebih sejahtera, meskipun terdapat variasi dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

Sejumlah faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Candimulyo antara lain KPM-PKH memiliki motivasi tinggi dalam memenuhi komitmen di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif pendamping PKH memfasilitasi kegiatan KPM-PKH dampingannya, sehingga memudahkan KPM memenuhi kewajibannya. Sejumlah faktor kendala antara lain sebagian besar KPM-PKH berpenghasilan rendah sehingga masih ditemukan pemanfaatan dana bantuan sosial kurang sesuai dengan tujuan, seperti masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari. Kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit menyebabkan sebagian KPM-PKH mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Rekomendasi: memperhatikan, bahwa KPM merupakan keluarga miskin, maka dalam rangka meningkatkan keberdayaan ekonomi KPM, seyogyanya juga lebih memperhatikan pola perubahan perilaku ekonomi keluarga melalui FDS selain kepada meningkatkan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Memperhatikan masih adanya *inclusive error* dan *exclusive error*, maka ke depannya dalam melakukan pendataan ulang diperlukan verifikasi dan validasi (vefivali) data KPM yang melibatkan se-

mua unsur masyarakat mulai dari RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga tokoh masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Keluarga Penerima Manfaat, pendamping PKH, dan aparat Kecamatan Candimulyo kami sampaikan terima kasih atas bantuannya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan secara baik.

Pustaka Acuan

- Abuya, Ciera dan Murage. (2012). *“Effect Of Mother’s Education On Child’s Nutritional Status In The Slums Of Nairobi”*
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota Tahun 2015*. Jakarta: BPS Biro Pusat Statistik (2018). Jakarta
- Evi Rahmawati dan Bagus Kisworo (2017). *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Volume 1 (2): 161-169, Desember 2017
- Ivanovich Agusta. (2013). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Bogor: Litbang Pertanian
- Jim Ife. (2002). *Community Development and Edition*. Sydney: Pearson Education Australia Pty Ltd
- Miftachul Huda, (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Program Keluarga Harapan* Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Kementerian Sosial
- Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty. *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty. *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*: Afabeta
- Supriasa, (2013). *Pendidikan & Konsultasi Gizi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Sukirno, (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Togiaratua Nainggolan, dkk. (2012). *Program Keluarga Harapan: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS.

Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah

Improving Human Resources Competencies Of Social Welfare Area Organizers

Eny Hikmawati¹ dan Chatarina Rusmiyati²

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial 1 Sonosewu Yogyakarta

¹ E-mail: enyhikmawati59@gmail.com, HP. 081227930092;

² E-mail: chatarinarus65@gmail.com, HP. 08562870070;

diterima 14 Desember 2018, diperbaiki 23 Desember 2018, disetujui 30 Desember 2018

Abstract

The Human Resources of Social Welfare Organizer act as executing performers, drivers or companions of social activity programs. This study was aimed to know the Human Resources Competencies of Social Welfare Area Organizers and the effort to improve the competencies concerned. It was a qualitative descriptive research to describe the current competencies of social welfare area organizers and the effort to improve those competencies. The location of the research was determined purposively and it was in Banjarmasin City. This city was chosen because there was a social home managed by the local government namely LKS PSBW Melati and that of LKSA Hikmah Zam Zam managed by a private party. The data was collected and analyzed descriptively to explain the Human Resources Competencies in organizing social welfare for local area. The result of the research showed that from the view point of education aspect, the majority of the human resources concerned graduated from universities but they had not had any educational background of being social workers. The ratio of the amount of the human resources and the clients served had not been in accordance with the LKS organization guidances yet. The quality of the service was influenced by the human resources concerned length of work, the longer the length of work was, the more experiences related to the duties and responsibilities they would have accordingly. The social service process in LKS had met the standard procedures appropriately covering the service stage to termination. The human resources competency and capacity of social welfare organizers need to be developed by attending social work training and practicing so that they are able to carry out social service on the base of social works.

Key Words: *competency; human resources; social welfare organizer*

Abstrak

Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial berperan sebagai pelaku, penggerak ataupun pendamping program kegiatan sosial. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah dan upaya pengembangannya. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah, dan upaya pengembangannya. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yakni Kota Banjarmasin karena terdapat panti yang dikelola pemerintah yaitu LKS PSBW Melati dan dikelola swasta yaitu LKSA Hikmah Zam Zam. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pendidikan mayoritas SDM berpendidikan sarjana namun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Namun demikian mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya, serta mempunyai sikap yang baik dalam pelayanan. Rasio jumlah SDM dan jumlah klien yang dilayani belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan LKS. Kualitas layanan dipengaruhi lama bekerja, makin lama bekerja semakin banyak pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban. Proses pelayanan sosial di LKS sudah sesuai prosedur meliputi tahapan pelayanan hingga terminasi. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial untuk meningkatkan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan karier agar dapat melakukan pelayanan sosial secara efektif.

Kata Kunci: *kompetensi; sumber daya manusia; penyelenggara kesejahteraan sosial*

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan Pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat secara tegas mengamanatkan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial agar rakyat sejahtera.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh rakyat warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik jasmani, rohani dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Pada kenyataannya permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasar karena kondisinya mengalami hambatan fungsi sosial sehingga kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial, akibatnya mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat belum optimalnya dukungan sumber daya manusia (SDM), dan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, selain dukungan pemerintah baik yang berupa regulasi maupun pendanaan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial ataupun penanganan fakir miskin belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sehingga hasilnya belum signifikan dalam konteks

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat diprioritaskan bagi mereka yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan secara perseorangan maupun melalui kelembagaan ataupun kelompok organisasi sosial, membutuhkan SDM yang kompeten sehingga program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan sosial (Permensos RI, Nomor 16 Tahun 2017).

Pengembangan SDM menjadi hal penting, SDM yang berkualitas dan kompeten menjadi landasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang kompeten dalam jumlah dan sebaran yang luas menjadi modal utama terselenggaranya program kesejahteraan sosial yang efektif dalam arti tepat sasaran, teknik dan metode, administrasi serta bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok sasaran. SDM yang kompeten diharapkan dapat menangani PMKS dan mengembangkan potensinya sehingga terentaskan dari permasalahan dan mampu melaksanakan fungsi sosial secara layak. SDM yang kompeten juga dapat mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di daerah guna peningkatan kesejahteraan ataupun penanganan PMKS secara mandiri. Namun demikian, SDM penye-

lenggara kesejahteraan sosial di daerah sebagai modal sosial dapat didayagunakan untuk membangun belum diikuti dukungan yang memadai sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian Warto, dkk. tahun 2012 menyatakan bahwa sebagian besar organisasi sosial di daerah belum memiliki SDM dengan latar pendidikan pekerjaan sosial dan belum memperoleh diklat ataupun bimtek pekerjaan sosial. Penelitian terkait yaitu kompetensi pendamping sosial di lima lokasi menunjukkan bahwa kinerja pendamping Kube Fakir Miskin belum optimal 66, 67 persen sekedar memberi penyuluhan tentang pendayagunaan bantuan atau sumber kesejahteraan sosial; 20,83 persen hanya menyampaikan bantuan sosial kepada penerima manfaat dan hanya 12,50 persen terlibat langsung pada aktivitas pendampingan dalam memanfaatkan bantuan. (Tateki Yoga Tursilarini, dkk. 2016). Kondisi ini berpengaruh pada peran dan kinerja SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah belum optimal. Kinerja SDM penyelenggara kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh kompetensi sehingga mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran dan kinerjanya secara profesional.

Kementerian Sosial sebagai unsur pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan SDM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air sebagai gugus tugas sosial di daerah. Satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) yaitu pekerja sosial profesional berbasis pekerjaan sosial sebagai pendamping penyelenggaraan kesejahteraan sosial di LKS. Jumlah Sakti Peksos saat ini ada 750 orang bekerja di berbagai panti baik milik pemerintah maupun swasta, pusat pelayanan sosial dan orsos. LKS adalah lembaga pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan sosial bagi warga masyarakat kurang beruntung. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa Kementerian Sosial memiliki modal sosial cukup besar da-

lam upaya mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera dalam arti dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan bermartabat serta dapat melakukan fungsi sosial secara wajar.

SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang berperan sebagai pelaku, penggerak ataupun pendamping program kegiatan sosial yang diluncurkan Kementerian Sosial perlu dikembangkan sehingga menjadi suatu "*social task force*" dalam penanganan PMKS dan pengembangan PSKS. Pada hakekatnya pelaksanaan program yang efektif perlu ditunjang oleh SDM yang kompeten. Hasil penelitian Tateki Yoga Tursilarini, dkk tahun 2016 menunjukkan bahwa sistem rekrutmen, seleksi dan pelatihan berpengaruh terhadap kompetensi pendamping sosial (SDM). Pertanyaannya adalah apakah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah memiliki kompetensi? Bagaimana mengembangkan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang kompeten ? Berdasar pertanyaan dimaksud kajian ini dilakukan.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang ada di daerah, dan upaya pengembangannya. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu daerah yang memiliki panti yang dikelola pemerintah dan swasta. Berkaitan dengan hal itu kemudian dipilih Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, yakni Panti Sosial Bina Wanita yang merepresentasikan LKS pemerintah dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Hikmah Zam Zam sebagai LKS swasta.

Sumber data penelitian ini adalah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah, terdiri atas kepala bidang/seksi terkait di dinas sosial, pengurus atau pengelola LKS/Orsos dan klien atau penerima manfaat. Pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara untuk mengungkap SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang kompeten di daerah serta upaya pengembangannya. Data

yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan memaknai hasil wawancara dan observasi, memverifikasi dan menyimpulkan, sehingga menggambarkan objek penelitian yakni menggambarkan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

C. Gambaran Panti Sosial/LKS Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Dinas sosial sebagai representasi pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai tugas membantu urusan pemerintah di bidang sosial, pada hakekatnya merupakan amanat konstitusi UUD Tahun 1945 pasal 34 ayat (2) dan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2009 serta PP Nomor 39 Tahun 2012. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai visi “PMKS lebih sejahtera, PSKS lebih berdaya”. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka misi yang dicanangkan adalah pertama melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS berbasis praktik pekerjaan sosial, meliputi: pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Kedua, mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Profil Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2018).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memiliki lima panti sosial tipe A yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan menjadi kewenangan dinas sosial provinsi. UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan meliputi: 1) Panti Sosial Bina Wanita “Melati” dengan sasaran pelayanan wanita rawan sosial ekonomi; 2) Panti Tresna Werda “Budi Sejahtera” dengan sasaran pelayanan lanjut usia terlantar; 3) Panti Bina Remaja “Budi Satria” dengan sasaran pelayanan remaja

putus sekolah dan ABH; 4) Panti Asuhan Anak “Budi Mulia” dengan sasaran pelayanan anak balita dan anak terlantar; dan 5) Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” dengan sasaran pelayanan penyandang disabilitas netra.

Di lingkungan Dinas Sosial Kota Banjarmasin terdapat 50 panti sosial/LKS yang dimiliki oleh pihak swasta dengan dominasi di bawah naungan Organisasi Muhammadiyah. Dari kelima puluh LKS dimaksud dapat dikelompokkan sebagai berikut. LKS Anak (LKSA) ada 27 dengan sasaran pelayanan anak; LKS dengan sasaran penyandang disabilitas sebanyak lima buah; Taman Anak Sejahtera dengan sasaran anak balita keluarga tidak mampu ada satu; LKS dengan sasaran anak korban Napza ada dua; LKS Lanjut Usia Terlantar ada enam; LKS Pendampingan/Konseling terhadap Perempuan, Anak dan Keluarga Korban Tindak Kekerasan ada satu; LKS yang bergerak di bidang pendidikan gratis ada satu; LKS dengan sasaran gepeng, anak jalanan, eks napi dan ABH ada satu; LKS dengan sasaran ODHA ada satu; LKS yang bergerak dalam perlindungan anak sebanyak tiga; IPWL dengan sasaran korban napza satu; dan LKS yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak tiga.

Dari banyak LKS dengan program layanan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua jenis PMKS sebenarnya tersedia lembaga yang menangani. Permasalahannya adalah penanganan yang dilakukan lembaga dimaksud belum optimal disebabkan SDM belum didayagunakan secara optimal. Di samping itu juga banyaknya PMKS tidak sebanding dengan jumlah lembaga yang menangani sehingga belum efektif.

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin

Pengembangan SDM merupakan salah satu kunci sukses dan terpenting bagi pencapaian tujuan organisasi ataupun tujuan sebuah program. Pengembangan SDM akan membentuk manusia yang berkualitas dalam arti mempunyai penge-

tahuan, keterampilan dan kemampuan kerja dan loyalitas kepada perusahaan ataupun organisasi tempat bekerja. Program pengembangan SDM yang berhasil akan meningkatkan kemampuan tenaga yang lebih produktif sehingga program dapat terlaksana secara efektif.

Pedoman manajemen organisasi sosial mendiskripsikan SDM pengurus merupakan organ pokok organisasi sosial yang melaksanakan kegiatan operasional, minimal terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Susunan organ kepengurusan untuk LKS berbadan hukum terdiri atas pembina, pengawas dan pengurus minimal ada ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus bertanggungjawab secara penuh atas kepengurusan organisasi sosial, menyusun program kerja dan menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan di lembaga yang diurus. Pengelola adalah komponen unsur pelaksana pelayanan sosial yakni sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan sosial yang dilakukan oleh unit pelaksana ataupun bidang kegiatan yang ada pada masing-masing organisasi sosial. Dalam konteks pemerintah pengurus adalah SDM yang menduduki jabatan struktural sedangkan pengelola adalah SDM pelaksana yang terlibat langsung dalam kegiatan layanan sesuai dengan jenis program dan kebutuhan pelayanan lembaga. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam konteks penelitian ini adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial dan Relawan Sosial yang bekerja di LKSA Hikmah Zam Zam dan PSBW Melati.

Tabel 1. berikut mendeskripsikan usia pengurus dan pengelola di dua lembaga yang menjadi lokasi penelitian ini.

Tabel 1. Usia Pengurus dan Pengelola Lembaga

No	Kelompok Umur	LKSA Hikmah		PSBW Melati	
		F	%	F	%
1	20 – 29	2	13,33	4	26,67
2	30 – 39	4	26,67	2	13,33
3	40 – 49	3	20	6	40
4	50 – 59	5	33,33	3	20
5	>60	1	6,67	-	-
Jumlah		15	100	15	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Data pada Tabel 1 menunjukkan usia responden pengurus dan pengelola lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah berkisar antara 20 sampai 60 tahun. Dari aspek umur, penyelenggara kesejahteraan sosial berusia dewasa dan masuk kategori usia potensial dan produktif dalam melaksanakan berbagai tugas kehidupan termasuk tugas pelayanan sosial. Pada usia dimaksud mereka pada umumnya dapat berfikir dan bertindak secara rasional dan arif bijaksana dalam memberikan pelayanan, membimbing dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Program kegiatan layanan dan rehabilitasi di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dimaksud dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, kondisi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah

No	Tingkat Pendidikan	LKSA Hikmah		PSBW Melati	
		f	%	F	%
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	2	13,33
3	SLTA	4	26,67	3	20
4	Sarjana	10	66,67	7	46,67
5	Magister	1	6,66	3	20
Jumlah		15	100	15	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tingkat pendidikan seseorang dapat mencerminkan pengetahuan atau wawasan di bidang tertentu. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan maka individu tersebut akan semakin tahu dan memahami suatu masalah terutama yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tabel 2 menunjukkan bahwa SDM penyelenggara kesos di daerah baik di LKSA maupun PSBW mempunyai tingkat pendidikan sarjana (80%) dan magister (20%). Namun demikian mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial sehingga perlu peningkatan kapasitas misalnya melalui diklat pekerjaan sosial agar mereka dapat melakukan pelayanan sosial atas dasar basis pekerjaan sosial. Dari aspek pendidikan maka LKS di daerah mempunyai SDM yang potensial dan diharapkan dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Peran LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah mencegah terjadinya masalah sosial; memberikan pelayanan kepada PMKS; memperkuat dan mengembangkan kemampuan serta peningkatan peran potensi sumber kesejahteraan sosial; mengembangkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan; dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan sosial keluarga dan/pelayanan konseling lainnya. LKS berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah selayaknya dikembangkan agar dapat menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat; memberdayakan masyarakat dan pelayanan sosial bagi PMKS. Berkait dengan hal itu maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai tuntutan kebutuhan dan perkembangan masalah sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan SDM yang kompeten agar program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengembangan SDM menjadi hal penting, SDM yang berkualitas dan kompeten menjadi landasan sangat penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

daerah. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang kompeten dalam jumlah dan sebaran yang luas menjadi modal utama terselenggaranya program kesejahteraan sosial yang efektif dalam arti tepat sasaran, teknik dan metode, administrasi serta bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok sasaran. Hanya dengan SDM yang kompeten diharapkan dapat menangani PMKS dan mengembangkan potensinya sehingga terentaskan dari permasalahan dan mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang memiliki kapabilitas yakni menguasai prosedur dan masalah yang ditangani serta memiliki kompetensi, mempunyai keahlian, strategi kerja dan terampil menyelesaikan masalah akan berpengaruh pada penanganan masalah kesejahteraan sosial yang cenderung berkembang secara pesat dengan karakteristik beragam (Benny Setia Nugraha, 2018). SDM yang kompeten juga dapat mengembangkan potensi PMKS dan PSKS yang ada di daerah guna peningkatan kesejahteraan ataupun penanganan PMKS secara mandiri dan dapat menjadi agen perubahan menuju kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial selain dipengaruhi oleh kompetensi SDM penyelenggara dapat juga dipengaruhi oleh lama masa bekerja atau pengabdian. Secara rasional semakin lama bekerja maka akan semakin memperoleh pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Dari hasil wawancara diperoleh informasi terkait lama bekerja sebagai berikut.

Tabel 3. Lama Bekerja Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah

No	Lama Bekerja (th)	LKSA Hikmah		PSBW Melati	
		f	%	F	%
1	< 1	4	26,67	2	13,33
2	1 – 3	6	40	4	26,67
3	4 – 6	3	20	6	40
4	>7	2	13,33	3	20
Jumlah		15	100	15	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Di LKSA Hikmah Zam Zam terdapat empat orang yang bekerja kurang dari satu tahun mereka adalah relawan dan pekerja sosial. Mereka ini termasuk SDM tenaga profesi. Ada yang bekerja lebih dari tujuh tahun yakni tenaga pelaksana pelayanan (pengasuh) dan SDM yang masuk komponen kepengurusan (ketua yayasan). Mereka pernah mengikuti bimbingan teknis manajemen LKSA dan bimbingan teknis pengasuhan anak sehingga mereka setidaknya memiliki pengetahuan bagaimana mengelola sebuah LKSA dan pengasuhan anak dari perspektif sistem pekerjaan sosial secara praktis. Di PSBW Melati ada pegawai yang sudah mengabdikan selama 24 tahun dan sekarang menjabat sebagai kepala seksi pelayanan, kemudian satu orang mengabdikan selama enam tahun menjabat sebagai kepala seksi bimbingan dan konseling. Dua orang bekerja kurang dari dua tahun adalah staf pembinaan dan sosialisasi. Mereka ini pegawai baru dengan latar pendidikan psikologi sehingga dapat membantu direhabilitasi sosial.

Kompetensi merupakan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kompetensi dimaksud meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dari hasil penelitian menunjukkan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki pengetahuan sebesar 80 persen mengenai undang-undang, peraturan, pedoman umum dan juklak juknis terkait pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi tugas dan fungsinya, serta pengetahuan tentang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Sebesar 81 persen memiliki keterampilan dalam proses pelayanan dan rehabilitasi sosial dari identifikasi masalah sampai terminasi sesuai tahapan pelayanan sosial. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di kedua lembaga tersebut memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab sebesar 85 persen, yakni selalu hadir ketika dibutuhkan sehingga klien merasa aman.

Sistem manajemen organisasi mestinya dikuasai oleh SDM yang handal artinya mere-

ka harus mampu menyusun rencana, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi dari perencanaan hingga capaian. Dalam praktik pekerjaan sosial terdapat tahapan pertolongan, intervensi bagi seorang klien meliputi: 1) *Engagement Intake Contract* (EIC) adalah tahap awal dalam praktik pertolongan yaitu kontrak awal antara pekerja sosial dengan klien yang berakhir dengan kesepakatan untuk terlibat dalam keseluruhan proses; 2) *Assesment* adalah tahap pengungkapan dan pemahaman masalah untuk mempelajari masalah yang dihadapi klien; 3) *Planning* adalah perencanaan, pemilihan, strategi teknik dan metode berdasarkan hasil asesmen masalah; 4) Intervensi adalah bentuk kegiatan penanganan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri klien; 5) Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap klien untuk mengetahui perubahan, perkembangan yang terjadi pada klien dan kendala yang dihadapi untuk mencari solusi; 6) Terminasi merupakan tahapan akhir dengan tujuan pemutusan kontrak yang telah disepakati (Tateki, dkk., 2016).

Dikaji dari aspek rasio SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dibanding jumlah klien di kedua lembaga baik LKSA maupun PSBW belum sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan/standardisasi LKS. Dalam panduan ditetapkan rasio SDM pekerja sosial adalah satu dibanding lima, pendidik satu dibanding lima dan dokter satu dibanding lima. Temuan penelitian menunjukkan di LKSA terdapat 1 : 33 sedangkan di PSBW 2 : 85. Artinya keberadaan pekerja sosial di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial masih jauh dari harapan sehingga perlu ditambah agar dapat memberikan pendampingan secara optimal menuju kemandirian sasaran pelayanan/ penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini SDM penyelenggara kesejahteraan sosial memberikan pelayanan atau intervensi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung kepada PMKS.

Hasil Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Panti

Kondisi pelayanan dan rehabilitasi sosial di LKSA Hikmah Zam Zam dan PSBW Melati yang menjadi lokasi penelitian ini, disajikan data terkait karakteristik responden klien penerima manfaat meliputi umur, pendidikan, alasan masuk panti, dan persyaratan masuk panti.

Deskripsi kondisi umur responden klien di LKSA Hikmah Zam Zam dan PSBW Melati dalam tabel berikut.

Tabel 4. Kelompok Umur Responden Klien

No	Kelompok Umur	LKSA Hikmah		PSBW Melati	
		F	%	f	%
1	1 – 5	-	-	-	-
2	6- 10	2	20	-	-
3	11- 15	3	30	-	-
4	16 – 20	5	50	3	30
5	21 – 25	-	-	4	40
6	26 – 30	-	-	-	-
7	>30	-	-	3	30
Jumlah		10	100	10	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Jika dikaji dari aspek umur kedua lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial di Banjarmasin dapat dikatakan tepat sasaran sebagaimana tersaji pada Tabel 4. LKSA Hikmah Zam Zam menyelenggarakan pelayanan sosial berbasis panti terhadap anak yatim, yatim piatu dan duafa berusia sekolah mulai Sekolah Dasar sampai tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Data pada Tabel 1 juga menunjukkan klien LKSA Hikmah Zam Zam berusia antara 6 hingga 10 tahun artinya mereka berpendidikan setingkat SD, berusia 16 hingga 20 tahun berpendidikan setingkat SLTP dan yang berusia 16 hingga 20 tahun berpendidikan setingkat SLTA. Menurut Undang Undang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sasaran rehabilitasi sosial di PSBW Melati adalah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang berusia 20 sampai dengan 50 tahun. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil dan bersedia tinggal di asrama selama 6 (enam) bulan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial. Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa setempat dan rekomendasi dari Dinsos Kabupaten/Kota setempat. Dari Tabel 1 diketahui klien PSBW Melati tepat sasaran yaitu WRSE dengan rentang usia 16 tahun sampai 30 tahun. Dilihat dari aspek gender klien baik LKSA Hikmah Zam Zam maupun PSBW Melati semua perempuan. Hal ini sesuai kriteria sasaran program yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dimaksud bahwa kelompok sasaran adalah perempuan.

Ditinjau dari tingkat pendidikan responden klien baik di LKSA Hikmah Zam Zam maupun PSBW Melati dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden Klien

No	Tingkat Pendidikan	LKSA Hikmah		PSBW Melati	
		f	%	F	%
1	Tidak Tamat SD	-	-	-	-
2	SD	2	20	1	10
3	SLTP	1	10	-	-
4	SLTA	7	70	9	90
5	Sarjana	-	-	-	-
Jumlah		15	100	15	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Data pada Tabel 5 menunjukkan klien LKSA Hikmah Zam Zam sebagian besar (70%) sedang dalam proses belajar di Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau tingkat SLTA, 20% Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan 10% sekolah di Madrasah Sanawiyah setingkat SLTP. Dari aspek pendidikan, LKSA memberikan pelayanan pendidikan baik formal maupun informal melalui pelatihan keterampilan sebagai bekal kemandirian anak, pembinaan mental, spiritual dan pembinaan

ahlak. Pendidikan formal untuk anak usia setingkat SD dan SLTP diarahkan di sekolah yang berbasis agama sedangkan pendidikan setingkat SLTA diarahkan ke sekolah kejuruan dengan harapan apabila tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi mereka sudah mempunyai “kemampuan” tertentu meskipun masih terbatas, sebagai bekal keterampilan hidup. Pelayanan pendidikan di LKSA Hikmah Zam Zam bertujuan membentuk anak asuh yang berakhlakul karimah, beriman, bertaqwa, terampil dan cerdas, mandiri dan berguna bagi bangsa, negara serta agama. Pelayanan sosial di LKSA Hikmah Zam Zam menunjukkan adanya peningkatan partisipasi anak usia sekolah, karena dari anak terlantar yang semula tidak dapat sekolah setelah mendapatkan pelayanan di LKSA mereka dapat sekolah atau kembali aktif ke sekolah.

Klien PSBW Melati sebagian besar 90% mempunyai latar pendidikan setingkat SLTA yakni 5 (lima) orang lulus MAN, 2 (dua) orang SMKK, 1 (satu) orang lulus SMA dan 1 (satu) orang lulus kejar paket C dan hanya 1 (satu) orang yang lulus SD. Kondisi ini sebagai akibat dari kondisi ekonomi orang tua miskin sehingga mereka tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dari perspektif kesejahteraan sosial wanita dengan karakteristik pendidikan rendah dan dari keluarga miskin dapat dikategorikan sebagai wanita rawan sosial ekonomi. Mereka perlu diintervensi melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjerumus ke hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan memicu terjadinya permasalahan sosial lain.

Klien LKSA masuk ke panti dengan alasan karena kondisi ekonomi tidak mampu disebabkan salah satu orang tua pencari nafkah keluarga meninggal, dzuafa atau miskin sehingga keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk pendidikan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi semua klien (100%) masuk LKS karena alasan ekonomi yakni keluarga miskin baik yang masih mempunyai orang tua (60%) maupun yang yatim dan yatim piatu

sebanyak 40 persen. Mereka ingin menuntut ilmu atau melanjutkan pendidikan dan LKS menjadi solusinya. Klien LKSA diberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidup terutama makan, tempat tinggal dan kesempatan sekolah sampai lulus SLTA. Mereka dibimbing melalui pendidikan formal, informal dan keterampilan hidup agar menjadi manusia yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia serta mandiri.

Diungkap oleh salah satu klien berinisial NF gadis kecil berusia 11 tahun asal Banjar yang sudah empat tahun tinggal di panti. Ketika ditanya apakah senang tinggal di panti, NF mengaku senang karena banyak teman dan ramai, kalau di rumah sepi dan setelah di sini bisa sekolah. Sebelum tinggal di panti, NF tinggal bersama ibu dengan kondisi terlantar, tidak sekolah bahkan kurang terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hal itu dibenarkan oleh pengasuh, yang menyatakan bahwa rata-rata anak-anak yang tinggal di panti merasa senang dan betah.

Di PSBW Melati klien diberi program pembinaan jasmani, rohani dan keterampilan selama enam bulan. Keterampilan yang diberikan terbagi dalam tiga kelompok yaitu tata busana dan menjahit, tata boga dan tata rias. Mereka dibimbing dan diberikan motivasi untuk membangkitkan semangat hidup dan diberikan bekal keterampilan ke arah kemandirian. Alasan masuk program pelatihan adalah karena ingin memperoleh keterampilan yang diinginkan (50%), ingin belajar dan berharap dapat mandiri di kemudian hari (35%), serta dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik ada 15 persen.

Hasil wawancara terungkap bahwa mereka masuk panti karena ingin memperoleh keterampilan agar dapat mandiri dikemudian hari. Sebagaimana diungkap MR salah satu klien di PSBW Melati yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mengikuti pelatihan selama lima bulan. Dia merasa senang bisa mengikuti rehabilitasi sosial di panti karena banyak teman, bisa berbagi cerita dan sa-

ling mengenal teman dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Program pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti menuntut persyaratan tertentu sehingga calon klien apabila lolos seleksi dapat diterima sebagai klien panti. Hasil penelitian menunjukkan calon kelayan yang lengkap administrasi sebanyak 11 orang atau 44 persen yang berarti efektif, sedang yang administrasi kurang ada 9 orang atau 27 persen cukup efektif. Persyaratan administrasi yang kurang lengkap adalah menyangkut umur calon klien PSBW. Salah satu syarat masuk rehabilitasi sosial PSBW Melati adalah WRSE berusia 20-50 tahun. Informasi yang diperoleh dari pengelola PSBW dalam rekrutmen calon klien sering mengalami kendala terkait batas umur 20 tahun, apabila batas umur diberlakukan secara tegas maka dapat mengganggu pencapaian target sasaran. Oleh karena itu panti mempunyai solusi sepanjang di akhir masa pembinaan klien terpenuhi usia 20 dapat diterima. Dilihat dari persyaratan administrasi dalam penerimaan calon klien di LKSA maupun PSBW sudah sesuai.

Proses pelayanan sosial di panti meliputi tahapan pelayanan hingga terminasi. Pada tahap penerimaan klien di panti dilakukan kegiatan asesmen yakni pengungkapan dan penelaahan masalah untuk mengetahui kondisi klien baik menyangkut potensi, masalah, kondisi latar keluarga dan solusi penanganannya. Setelah diketahui potensi, masalah dan rencana solusi penanganan kemudian klien ditempatkan dalam program pelayanan maupun rehabilitasi sosial yang sesuai dengan hasil assesment. Asesmen menjadi hal penting dalam proses penerimaan klien, hal ini diperkuat pernyataan pengelola di kedua panti bahwa dalam proses penerimaan klien harus dilakukan asesmen melalui teknik wawancara untuk mengetahui latar belakang klien dan keluarganya. Hasil asesmen dicatat dan dibuat laporan sebagai bahan untuk pembahasan kasus. Sebanyak 19 responden atau 76 persen menyatakan asesmen harus dilakukan,

satu responden atau 14 persen menyatakan asesmen dilakukan apabila diperlukan saja.

Setelah dilakukan asesmen dan pembahasan kasus dengan melibatkan berbagai pihak terkait, kemudian dilakukan diagnosis untuk menetapkan rencana tindak atau solusinya. selanjutnya calon klien ditetapkan dalam program pelayanan (penempatan sebagai klien) dan dicatat dalam buku register. Klien berhak mengakses layanan sesuai program dan mengikuti kegiatan yang sudah ditetapkan. Penetapan program dan langkah kegiatan di panti selama ini tidak melibatkan klien tetapi sudah ditetapkan oleh lembaga. Namun demikian apabila dirasa perlu pihak klien dan/keluarga dapat diminta dukungannya untuk menyelesaikan masalah.

Kondisi psikologis klien di panti menurut informasi dari pengelola selalu dipantau perkembangannya, apabila klien kelihatan sedang mengalami masalah akan didekati dan dibantu. Pengelola maupun pengasuh dan instruktur di PSBW akan selalu memperhatikan klien binaannya agar merasa “nyaman” berada di panti. Sementara di LKSA perkembangan fisik maupun psikis selalu dipantau dan dicatat menggunakan formulir pemantauan.

Sistem pelayanan yang digunakan di panti terutama di LKSA adalah pelayanan terbuka yakni panti berpartisipasi secara timbal balik dengan masyarakat dalam mengembangkan jalur hubungan kerja baik secara individu maupun kelembagaan untuk membantu pelayanan di panti. Hubungan kerja dibangun baik selama proses pengasuhan, pembinaan maupun dalam tahap pasca asuhan. Dalam sistem ini anak asuh bersosialisasi dan berpartisipasi langsung dengan anak di luar panti dan masyarakat sekitar. Di PSBW interaksi anak di luar panti cenderung pada masa magang kerja di mitra kerja panti seperti pengusaha garment, salon kecantikan dan pengusaha kue maupun catering. Sebanyak sembilan responden mampu berinteraksi di luar panti, tujuh responden mampu berinteraksi secara terbatas, dan satu responden mengaku tidak mampu berinteraksi. Dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar klien cenderung mampu berinteraksi dengan masyarakat di luar panti terutama yang terkait dengan program pelayanan.

Pada tahap pelaksanaan pelayanan klien memperoleh bimbingan fisik dan pelayanan kesehatan. Bimbingan fisik dapat berupa pembinaan jasmani seperti olah raga seminggu sekali sedangkan pelayanan kesehatan satu bulan tiga kali secara rutin kecuali ada yang sakit langsung mendapat pengobatan. Di LKSA pelayanan kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan puskesmas yang berkunjung ke panti sedangkan di PSBW ada petugas medik yang berjaga setiap hari.

Semua klien di panti diberi layanan pendidikan baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal berupa pendidikan keagamaan, keterampilan, kesenian dan jasmani. Informasi dari pengelola panti menegaskan bahwa semua anak asuh di LKSA harus memiliki ijazah formal pasca pelayanan panti. Di LKSA semua anak asuh diberi layanan pendidikan sesuai tingkatan masing masing dari tingkat SD, SLTP dan SLTA dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh panti. Pendidikan anak usia SD–SLTP cenderung diarahkan di pendidikan berbasis agama sedang setingkat SLTA diarahkan di sekolah kejuruan dengan maksud apabila dikemudian hari tidak dapat meneruskan ke perguruan tinggi setidaknya telah memiliki bekal keterampilan sebagai modal hidup. Pendidikan di PSBW sifatnya non formal berupa pembinaan keterampilan seperti menjahit atau tata busana, tata rias dan tata boga. Klien dikelompokkan menjadi tiga jurusan dan mengikuti pembinaan selama enam bulan dengan alokasi waktu lima bulan pendidikan di panti satu bulan magang.

Selain pendidikan formal anak asuh di panti juga diajarkan pendidikan non formal antara lain Pendidikan agama, keterampilan menjahit, tata boga, berkebun dan kesenian. Bimbingan keterampilan di LKSA diarahkan di bidang usaha dan teknologi tepat guna dilakukan de-

ngan bekerja sama fihak terkait seperti Dinsos, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi dan Rumah Kreatif. Di PSBW bimbingan keterampilan diarahkan dalam bidang usaha tata busana, tata boga dan tata rias. Hasil bimbingan keterampilan di panti diharapkan dapat memberi manfaat terutama kepada klien. Sebanyak 10 responden menyatakan bimbingan keterampilan sangat bermanfaat bagi dirinya, sembilan informan menyatakan bimbingan dapat dimanfaatkan dengan baik, dan satu informan menyatakan cukup bermanfaat. Bimbingan keterampilan di kedua panti baik LKSA maupun PSBW adalah dapat dimanfaatkan klien sebagai bekal atau modal hidup di kemudian hari. Hasil bimbingan keterampilan menurut pengelola LKSA, anak dapat berkebun secara hidroponik, lainnya dapat menjahit dan mengolah kain perca menjadi produk seni yang bernilai ekonomis dan hasilnya dipasarkan oleh Rumah Kreatif.

Pasca pelayanan dan rehabilitasi di panti diharapkan klien dapat berubah baik sikap, status dan hasil. Pasca pelayanan eks klien terjadi perubahan sikap menjadi semangat, mempunyai harga diri dan optimistik. Terjadi perubahan status dari terlantar menjadi tidak terlantar, dari rawan sosial ekonomi menjadi berdaya, dari ketergantungan menuju ke arah kemandirian. Informasi yang diperoleh dari pengelola panti menyatakan bahwa sebagian besar klien panti meningkat harga diri dan rasa percaya diri, serta termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Kondisi psikologis eks klien dapat dikatakan sehat sesuai yang diharapkan. Sebanyak 11 informan dapat mandiri secara ekonomi, sebagian besar informan merupakan eks klien PSBW yang telah membuka usaha di bidang ekonomi seperti penjahit, salon kecantikan ataupun warung kue. Sebanyak sembilan informan menyatakan dapat mandiri dalam aktivitas keseharian dalam hal ini adalah klien LKSA yang memperoleh manfaat terpenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan. Hasil layanan di LKSA adalah terjadi perubahan status dari terlantar menjadi tidak

terlantar, terjadi perubahan sikap dari pesimis menjadi optimis dan dari tidak semangat menjadi bersemangat.

Pelayanan kepada klien apabila telah habis waktu kemudian dilakukan terminasi yaitu pemutusan hubungan pelayanan, secara resmi klien diserahkan kembali kepada keluarga dan untuk klien PSBW diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota asal klien. Pada tahap ini fihak panti masih melakukan monitoring untuk mengetahui keberadaan eks klien pasca pelayanan dan kendala yang dihadapi. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan PSBW terhadap eks klien tahun 2017 menunjukkan keberhasilan sebesar 77 persen. Sebanyak 25 orang membuka usaha penjahitan, enam orang usaha salon dan enam orang usaha jualan kue. Sebagian orang bekerja pada orang lain tetapi ada sembilan orang yang tidak melakukan usaha ekonomi. Hasil evaluasi diketahui mereka yang tidak bekerja ternyata merasa kurang percaya diri dan modal. Bagi yang telah membuka usaha diketahui masih mengalami kendala seperti kurang pengetahuan model dan pola, mesin obras, alat kancing tumbuk, lemari etalase, dan manekin. Bagi yang membuka usaha salon kendala yang dihadapi adalah alat potong rambut elektronik (*cleeper*), tempat, bahan dan peralatan rias sedang bagi usaha kue terkendala oleh lingkungan yang kurang mendukung. Berdasar hasil monitoring evaluasi dimaksud kemudian mulai tahun 2017 diadakan bimbingan lanjut sebagai solusi untuk menghilangkan kendala yang dihadapi eks klien PSBW agar mereka benar benar bisa mandiri. Di LKSA tidak secara rutin melakukan monitoring, baru dilakukan apabila dianggap perlu.

Dari hasil pelayanan tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di kedua lembaga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, serta memiliki sikap yang sesuai dengan norma pekerjaan sosial. Mereka dapat melakukan pendampingan pada klien dan sebagai agen perubahan agar

klien menjadi lebih baik, dalam arti sikap, kondisi menuju ke arah kemandirian.

Dari hasil penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang sudah diuraikan artinya SDM penyelenggara kesejahteraan sosial telah melakukan peran sesuai fungsi layanan sosial. Dalam hal ini memberikan pelayanan dan pendampingan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup melalui perlindungan sosial yang diselenggarakan di LKSA dan rehabilitasi sosial di PSBW. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial telah hadir sebagai agen perubahan terlibat membantu mengatasi permasalahan klien dan membangkitkan semangat agar tidak mudah putus asa, optimis, dan semangat menyongsong masa depan yang lebih baik.

D. Penutup

Kesimpulan. Pengembangan SDM merupakan salah satu kunci sukses dan penting bagi pencapaian tujuan sebuah program. Pengembangan SDM akan membentuk manusia yang berkualitas dalam arti mempunyai pengetahuan, keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas dalam bekerja. Penyelenggaraan program pelayanan kesejahteraan perlu didukung SDM yang kompeten. Pendidikan dan pelatihan merupakan wahana strategis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga SDM penyelenggara kesejahteraan sosial memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik, mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi tanggung jawabnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di PSBW Melati dan LKSA Hikmah Zam Zam dari aspek pendidikan mayoritas berpendidikan sarjana namun mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. dari aspek kompetensi mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan yang baik. Demikian pula dalam pendampingan klien selalu dilakukan dengan sikap yang baik, bertanggung jawab

dan dapat menjadi agen perubahan, motivator, mediator, advokator dan fasilitator menuju arah kemandirian klien.

Rasio jumlah SDM dan jumlah klien yang dilayani belum sesuai dengan pedoman penyelenggaraan LKS. Kualitas layanan dipengaruhi lama bekerja, makin lama bekerja makin banyak pengalaman terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban. Proses pelayanan sosial di LKS sudah sesuai prosedur meliputi tahapan pelayanan hingga terminasi. SDM yang kompeten akan mau dan mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara profesional dan menjamin keberhasilan suatu program kegiatan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawabnya.

Rekomendasi. SDM penyelenggara kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan kompetensi dan kapasitas melalui diklat pekerjaan sosial agar mereka dapat melakukan pelayanan sosial atas dasar basis pekerjaan sosial. Bagi SDM ASN pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan formal melalui diklat dan pembinaan karier. Menempatkan SDM secara proporsional. Jumlah SDM penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah perlu disesuaikan agar dapat menangani permasalahan sosial yang cenderung berkembang pesat dengan karakteristik semakin beragam.

Ucapan Terima Kasih

Kepada B2P3KS yang telah memberikan fasilitas untuk penelitian ini diucapkan terima kasih. Kepada LKSA Hikmah Zam Zam, PSBW Melati dan seluruh informan penelitian ini, serta berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini juga diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Benny Setia Nugraha. 2018. *Membangun SDM Kementerian Sosial yang Kompeten*. Makalah tidak diterbitkan.
- . 2018. *Reformasi Birokrasi di Kemensos: Pengembangan Mutu SDM dan Keberhasilan Program*. Makalah tidak diterbitkan.
- Departemen Sosial RI. 2014. *Standardisasi Panti Sosial*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
- Kementerian Sosial RI. 2016. *Pedoman Standardisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
- . 2017. *Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial*
- Lexy Moleong. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- LKSA Aisyiyah Hikmah Zam Zam. 2018. *Profil LKSA Aisyiyah Hikmah Zam Zam Cabang Banjarmasin*
- Panti Sosial Bina Wanita Melati. 2017. *Profil Panti Sosial Bina Wanita Melati Provinsi Kalimantan Selatan*
- Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*
- Sri Prastyowati, dkk. 2018. *Rumah Harapan: Efektivitas Peran Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah*. Draf Laporan Penelitian B2P3KS Yogyakarta
- Sumar Sulistyono dkk, 2011. *Pengkajian Peran Organisasi Sosial dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Tertinggal*, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Tateki Yoga Tursilarini, dkk., 2016, *Kinerja Pendamping Ujicoba Standardisasi Kompetensi Pendamping Kube FM*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: B2P3KS Press
- Warto, dkk., 2012, *Tatakelola Orsos Menuju Indonesia Sejahtera, Ujicoba Model Pemberdayaan Organisasi Sosial di Daerah Tertinggal*, Yogyakarta: B2P3KS Press

Index Penulis

A

Akhmad Purnama 319
Alfiasari 375
Ana Uluwiyah 309
A. Nururrochman Hidayatulloh dan Pranowo 195

B

Budi Muhammad Taftazani, Nurliana Cipta Apsari dan Ishartono 339

C

Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati 165
Chatarina Rusmiyati dan Eny Hikmawati 415
Christiana mayang Anggraeni dan Kokom Komariah 257

E

Elly Kuntjorowati 89
Elly Kuntjorowati 365

H

Hempri Suyatna, Awan Santosa, Ing Swartanti Nayono, Istianto Ari Wibowo 21

I

Ikawati 179
Istiana Hermawati dan Akhmad Sofian 1

K

Kissumi Diyanayati, Suryani dan A. Nururrochman Hidayatulloh 147

M

Marietta Marlina Telaumbanua dan Mutiara Nugraheni 217
Memi Almizi dan Istiana Hermawati 239

N

Nuril Endi Rahman 207

P

Putri Diah Qashdina dan Alfiasari 351

R

Rahmat Syah dan Istiana Hermawati 131
Ratih Probosiwi 389
Ruaida Murni 115

S

Siti Hidayatul Jumaah 267

Soetji Andari 287

Sri Yuni Murti Widayati 47

Stefany Puspitasari 329

Sunit Agus Tri Cahyono 401

T

Trilaksmi Udiati dan Ani Mardiyati 101

Triyanti Anugrahini 37

Tyas Eko Raharjo 227

Tyas Eko Raharjo 297

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 17 Nomor 4 Desember 2018, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Prof. Dr. M. Mas'ud Said, MM (Manajemen Pemerintahan dan Reformasi Administrasi Publik, UMM)
3. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS